



Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

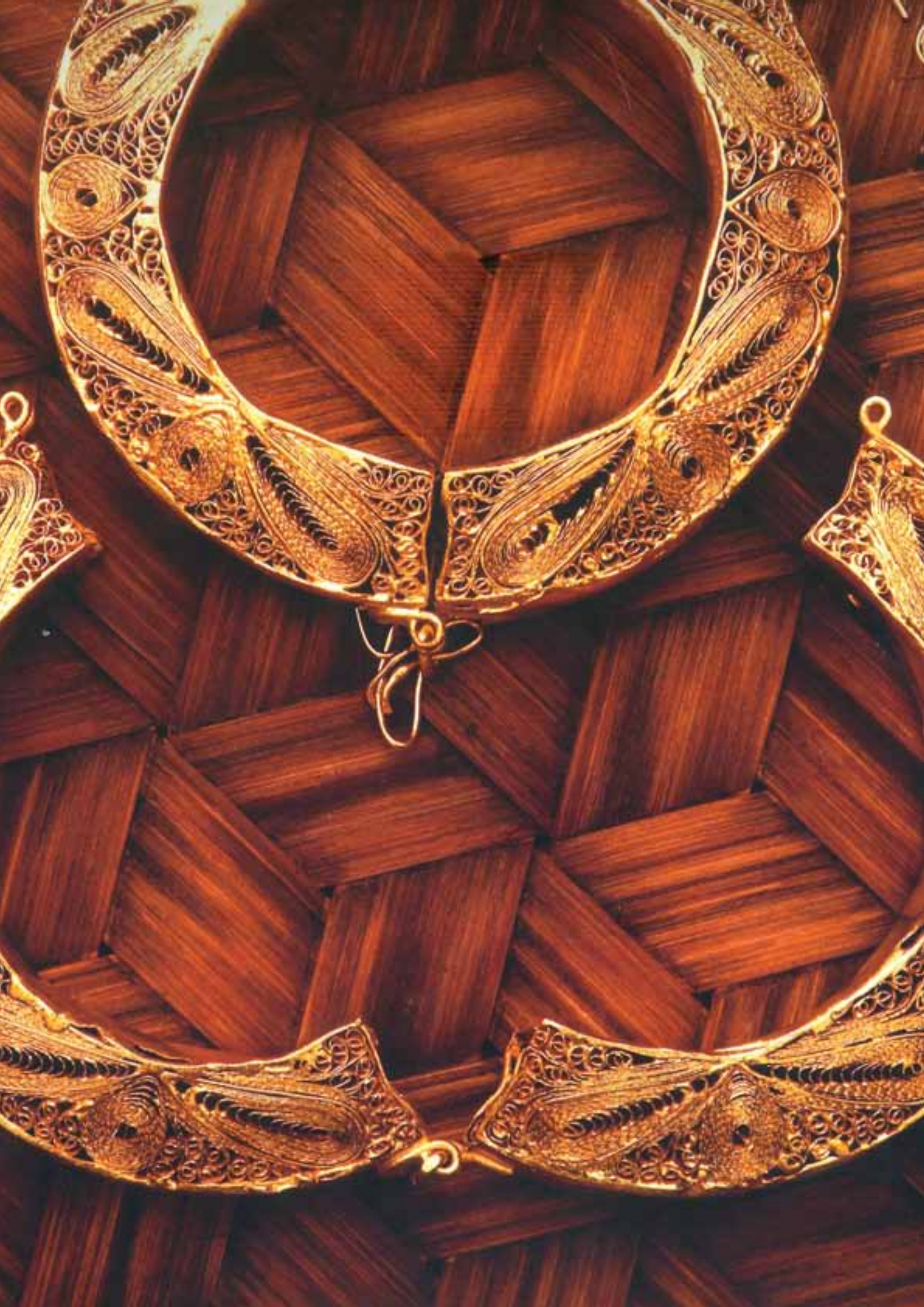
BII secara konsisten melakukan program sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman prinsip tata kelola perusahaan terbaik dan menjamin implementasi praktik GCG di seluruh lapisan organisasi

BII continuously promotes socialization programs to improve awareness of Good Corporate Governance principles as well as to ensure the implementation of GCG practices at all levels of the organization

Sulawesi Selatan / South Sulawesi

Suatu kebiasaan masyarakat Bugis untuk menampilkan status, melalui perhiasan emas, meskipun saat ini kemewahan tersebut hanya dipakai oleh para pengantin dan penari.

It has always been the custom for the Buginese communities to display status, measured by the wealth or rank in the form of gold jewelry, although nowadays such opulence is to be seen only on brides and dancers.



Laporan Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Report

“Komitmen peningkatan kualitas penerapan praktek terbaik GCG yang dilakukan secara konsisten sebagai salah satu kunci sukses BII dalam meningkatkan kinerja dan menunjukkan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan.”

“Commitment to improve the quality of implementation of GCG practices is carried out consistently as one of BII’s main achievements in improving performance and demonstrating its accountability to stakeholders.”

LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

BII berkomitmen penuh untuk senantiasa melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG – Good Corporate Governance) di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan berpedoman pada ketentuan regulator, berbagai ketentuan dan persyaratan terkait serta perkembangan terkini baik di tatanan domestik maupun regional. Komitmen penuh terhadap penerapan praktek terbaik GCG diwujudkan dalam:

- Pelaksanaan peran dan tanggung jawab yang jelas dan terpisah antara Dewan Komisaris dan Direksi.
- Terbuka dan adil terhadap pemangku kepentingan serta perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas.
- Penerapan dan penguatan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal.

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

BII is fully committed to implement Good Corporate Governance (GCG) in all levels of the organization, by referring to regulations, rules and requirements as well as to the latest domestic and regional developments. Full commitment to the implementation of corporate governance best practices is embodied in the following:

- Clear and distinctive implementation of roles and responsibilities between the Board of Commissioners and Board of Directors.
- Transparency and fairness towards stakeholders and the protection of the rights of minority shareholders.
- Risk management implementation and solidification, including internal control systems.



- Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal.
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal.
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan perseroan.
- Implementation of compliance, internal auditor and external auditor functions.
- Completeness and implementation of committee duties and internal control function units.
- Transparency of the Company's financial and non financial conditions.

BII berkomitmen penuh menerapkan praktek Tata Kelola Perusahaan yang Baik di seluruh proses bisnis untuk menciptakan pengelolaan perseroan yang profesional, transparan dan efisien dengan peningkatan keterbukaan, akuntabilitas, bertanggungjawab dan adil.

Untuk mengoptimalkan penerapan kaidah GCG diseluruh jajaran, BII senantiasa melakukan penguatan *infrastructure* dan *soft structure* GCG, perbaikan fungsi dan proses pengendalian internal yang mengarah kepada praktek terbaik GCG, penyesuaian dan pembaharuan sistem dan prosedur yang diperlukan.

TUJUAN PENERAPAN GCG

Sejalan dengan nilai-nilai perusahaan yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas operasional, BII berkomitmen untuk menjadikan GCG sebagai budaya dalam mengelola perusahaan. BII menerapkan prinsip tata kelola yang baik untuk menjamin tercapainya hasil yang optimal dalam penerapan GCG, meliputi:

BII is fully committed to implement Good Corporate Governance practices in all its business processes, to create professional, transparent and efficient management of the Company, with transparency, accountability, responsibility and fair principles.

To optimize GCG implementation at all levels, BII strives to strengthen its GCG infrastructure and soft structure, with functional improvements and internal control processes directed to best GCG practices, systems and procedures, with adjustments and required upgrading.

GCG IMPLEMENTATION OBJECTIVES

Aligned with the company's values that serve as guidelines in implementing operational activities, BII is committed to place GCG as a corporate culture principle in managing the company. BII implements Good Corporate Governance principles to ensure optimum results in implementation, including:

- Meningkatkan kepercayaan investor serta para pemilik dana.
- Meningkatkan kinerja Perseroan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatnya efisiensi operasional Perseroan serta meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan.
- Meningkatkan *corporate value*, melalui peningkatan kinerja keuangan dan minimalisasi risiko keputusan investasi yang mengandung benturan kepentingan.
- Tercapainya *stakeholder satisfaction* akibat peningkatan *corporate value*.
- Meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan Perseroan kepada Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan kepentingan para stakeholders.
- Menciptakan kejelasan hubungan kerja antara perusahaan dengan para *stakeholders*.
- Mendorong dan mendukung pengembangan usaha, pengelolaan sumber daya perusahaan dan pengelolaan risiko secara lebih efektif sehingga dapat meningkatkan nilai Perseroan.
- Increasing investors' confidence as well as that of fund owners.
- Improving the Company's performance by the creation of a better decision-making process, improving operational efficiency as well as better service to stakeholders.
- Upgrading corporate values, through financial performance improvements and minimizing the risk of investment decisions carrying conflicts of interest.
- Achieving stakeholder satisfaction as a result of corporate value improvements.
- Increasing the Company's management accountability to Shareholders by taking into account the stakeholders' interests.
- Creating clear working relations between the company and its stakeholders.
- Boosting and supporting business development, Company human resources and controlling risk management effectively so as to increase the company's value.

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA

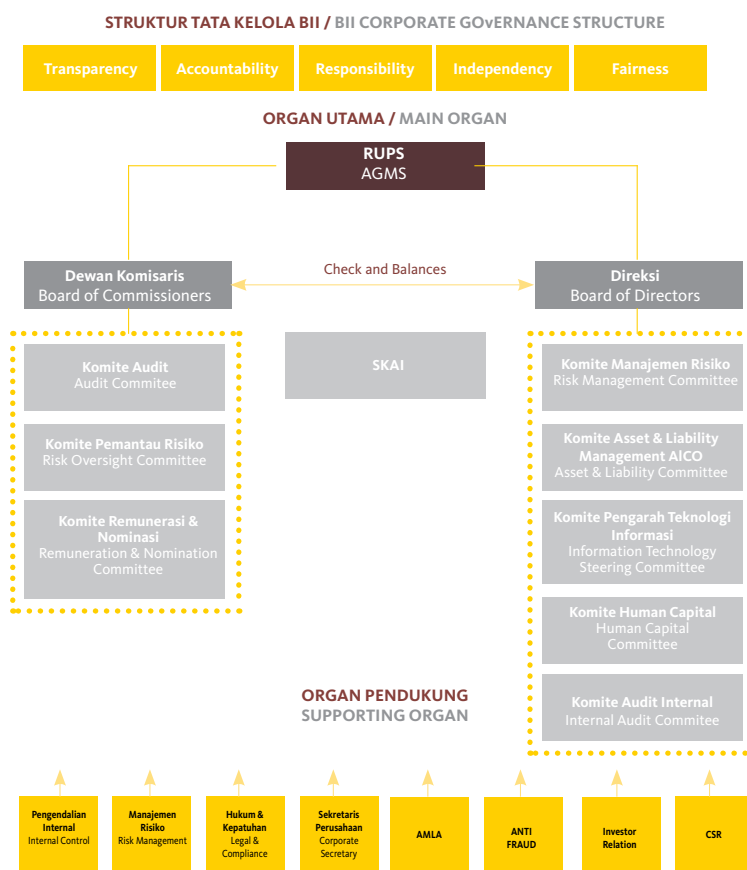
Sesuai dengan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, Organ perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. BII menganut dan menerapkan sistem kepengurusan dua badan (*two boards system*), yaitu terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan.

BII telah memiliki infrastruktur lengkap yang diperlukan dalam rangka menerapkan praktek GCG yang berkualitas sebagaimana digambarkan pada bagan berikut.

CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE AND MECHANISM

In accordance with the Laws No. 40 Year 2007 on Limited Company, the company's Organ consists of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and Board of Directors. BII follows and implements the "two boards" system, namely the Board of Commissioners and Board of Directors, each of which holds clear authorities and responsibilities based on its function as mandated by the Articles of Association and Laws.

BII has a complete infrastructure required in implementing quality GCG practices, as illustrated in the following scheme.



Mekanisme Tata Kelola Perseroan

Sebagaimana tergambar dalam struktur tersebut, forum RUPS sebagai perwujudan para pemegang saham, merupakan organ tertinggi perusahaan. Dengan kedudukan yang setara, para pemegang saham akan mempertimbangkan dengan seksama keputusannya demi kepentingan jangka panjang Perseroan. Setelah keputusan diambil, maka RUPS kemudian akan menyerahkan segala kewenangan pengawasan dan pelaksanaan keputusan tersebut kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

RUPS atau Pemegang Saham selanjutnya tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi. Pengelolaan perusahaan dan pelaksanaan atas setiap keputusan RUPS tersebut dilakukan oleh Direksi.

The Company's Corporate Governance Mechanism

As illustrated in the structure, the GMS forum as the manifestation of shareholders, is the highest organ in the company. With equal composition, the shareholders consider its decisions thoroughly for the Company's long term interests. Following the GMS' stipulations, the authorities of its supervisory duties and implementation are presented to the Board of Commissioners and Board of Directors.

GMS or Shareholders shall not hereafter intervene in duties, functions and authorities of the Board of Commissioners and Board of Directors. The company's management and implementation on GMS' stipulations are conducted by the Board of Directors.

Dewan Komisaris kemudian melakukan pengawasan dan memberikan nasehat untuk memastikan bahwa tujuan Perseroan serta keputusan RUPS tersebut dilaksanakan dan dicapai. Dengan tugas dan tanggung jawab yang sedemikian besar dalam menjaga keberlangsungan usaha, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Komisaris, sedangkan Direksi dibantu oleh Komite di tingkat Direksi serta oleh unit kerja/Divisional yang terkait.

KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

BII terus melengkapi dan menyempurnakan aturan kebijakan operasional sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penerapan praktek GCG terbaik. Dalam menjalankan segenap aktivitas bisnisnya, BII senantiasa menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG, meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan fairness, yang merupakan tuntunan sikap dan perilaku bagi segenap jajaran perseroan dan para pemangku kepentingan.

Untuk memastikan terpenuhi dan dijalankannya seluruh prinsip dasar GCG tersebut, BII telah meninjau, menyusun dan menerapkan berbagai kebijakan dan prosedur kerja, meliputi:

1. Kebijakan Umum Good Corporate Governance BII.
2. Kebijakan Budaya Kerja BII.
3. Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku BII.
4. Board Manual beserta Panduan kerja Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Panduan Kerja Komite-Komite Dewan Komisaris dan Direksi BII beserta Piagam Audit BII.
6. Panduan Sekretaris Perusahaan BII.
7. Kebijakan Umum Penanganan Benturan Kepentingan BII.
8. Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) BII.
9. Kebijakan dan Prosedur Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
10. Panduan Transparansi dan Pengungkapan BII.
11. Ketentuan Pembukaan Rahasia Bank.
12. Strategi Anti Fraud BII.
13. Peraturan Disiplin BII.
14. Kebijakan Manajemen Kelangsungan Usaha (*Business Continuity Management*).

The Board of Commissioners conducts supervisory and advisory duties to ensure that the Company's objectives and GMS stipulations are implemented and performed. With ample responsibilities and duties in maintaining business continuity, the Board of Commissioners is assisted by the Committees under the Board of Commissioners, whereas the Board of Directors is assisted by its committees as well as related units/divisions.

THE COMPANY'S CORPORATE GOVERNANCE POLICY

BII continues to complement and refine its operational policies as an effort to improve the quality of GCG practices. In implementing its business activities, BII always implements the basic principles of GCG, namely, transparency, accountability, responsibility, independency and fairness, which become guidelines for manners and conduct of all levels of the company and stakeholders.

To ensure the fulfillment and implementation of GCG basic principles, BII has reviewed, prepared and implemented several working policies and procedures, as follows:

1. BII Good Corporate Governance General Policy.
2. BII Working Culture Policy.
3. BII Code of Conduct.
4. Board Manual and Guidelines of the Board of Commissioners and Board of Directors.
5. Guidelines of the Board of Commissioners' Committees and Audit Committee Charter of BII.
6. BII Corporate Secretary Guidelines.
7. General Policy of BII Conflict of Interest Management.
8. BII Whistleblowing System Reporting Policy.
9. Policy and Procedure for Customer Complaint Settlement.
10. BII Guidelines of Transparency and Disclosures.
11. Regulation on Bank Confidentiality Disclosures.
12. BII Anti-Fraud Strategy.
13. BII Discipline Regulations.
14. Business Continuity Management.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 15. Kebijakan Produk dan/atau Aktivitas Baru (PAB) BII; 16. Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT) BII; 17. <i>Compliance Charter</i>; 18. <i>Audit Charter</i>; 19. Panduan Audit Intern (PAI) BII; 20. Kebijakan dan Prosedur Audit Teknologi Sistem Informasi; 21. Sistem Manajemen Mutu Audit Intern; 22. Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa BII, 23. Kebijakan Manajemen Kinerja, Promosi dan Remunerasi dan lainnya | <ul style="list-style-type: none"> 15. BII New Products and/or Activities Policy; 16. BII Policy and Procedure of Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Prevention Program Implementation (AML-TFP); 17. Compliance Charter; 18. Audit Charter; 19. BII Internal Audit Guidelines; 20. Policy and Procedure of Information System Technology Audit; 21. Internal Audit Quality Management System; 22. BII Policy of Goods and Services Procurement; 23. Policy of Performance Management, Promotion and Remuneration. |
|---|--|

PENILAIAN PENERAPAN GCG

Penerapan prinsip GCG merupakan salah satu faktor penilaian tingkat kesehatan bank selain profil risiko, rentabilitas dan permodalan baik bank secara individual maupun konsolidasi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia (“PBI”) No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011, serta Surat Edaran Bank Indonesia (“SE BI”) No. 13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas penerapan GCG, BII secara rutin melakukan penilaian kualitas penerapan GCG berdasarkan Pedoman Penilaian Kualitas Penerapan GCG Di Industri Perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan hasil self assessment 2013, diperoleh peringkat 1 dengan Predikat Peringkat Sangat Baik. Hasil self assessment tersebut konsistensi BII dalam menjaga kualitas penerapan GCG di seluruh lini organisasi.

BII berkomitmen untuk senantiasa berupaya meningkatkan kualitas penerapan praktek terbaik tata kelola Perusahaan, menjaga dan meningkatkan kepercayaan seluruh mitra bisnis dan memberikan hasil optimal kepada seluruh pemangku kepentingan.

GCG IMPLEMENTATION ASSESSMENT

GCG principles implementation is one of the assessment factors of bank soundness level in addition to the risk profile, rentability and capital of the bank only, or consolidated as stipulated in Bank Indonesia Regulation (“PBI”) No. 13/1/PBI/2011 dated 5 January 2011, and Circular Letter of Bank Indonesia (“SEBI”) No. 13/24/DPNP dated 25 October 2011 on the Assessment of Commercial Banks Soundness Level.

As an effort to improve GCG implementation quality, BII regularly conducts a quality assessment of GCG implementation, based on the Guidelines of Quality Assessment of GCG Implementation in the Banking Industry established by Bank Indonesia. Based on 2013 self assessment results, the Bank reached 1st ranked with the Predicate of a “Very Good” Ranking. The result of this self-assessment represents BII’s consistency in maintaining GCG implementation quality in all organization lines.

BII is committed to improve the best quality of corporate governance, maintaining and improving the trust of business partners and providing optimum results to all stakeholders.

PENGHARGAAN DI BIDANG TATAKELOLA

Keberhasilan dan konsistensi BII dalam menerapkan praktek terbaik tata kelola perusahaan yang berkualitas membuahkan penghargaan dari lembaga independen dalam berbagai perspektif, diantaranya:

- Best Financial Sector – Corporate Governance Award dalam The 5th IICD Conference and Award 2013 dari Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD).
- Anugerah Perbankan Indonesia 2013 dari Perbanas Institute dan Business Review.

ROADMAP TATA KELOLA BII

BII berkomitmen untuk terus menyempurnakan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Selain mengacu kepada praktik-praktik dan standar terbaik tata kelola perusahaan di tingkat nasional, BII juga beraspirasi kepada standar tata kelola di tingkat regional ASEAN. Untuk mencapai tujuan tersebut, BII memiliki *roadmap* tata kelola sebagai berikut:

CORPORATE GOVERNANCE AWARDS

BII success and consistency in implementing best corporate governance practices has been recognized by independent institutions in several perspectives, as follows:

- Best Financial Sector – Corporate Governance Award in the 5th IICD Conference and Award 2013 from the Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD).
- Indonesian Banking Awards 2013 from Perbanas Institute and Business Review.

BII GCG ROADMAP

BII is committed to continously improve its Good Corporate Governance practices. In addition to reference of best practices and national standard of corporate governance, BII also referred to ASEAN standard of corporate governance implementation. In order to meet this objective, BII has established the Corporate Governance Roadmap as follows:

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<p>2006</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam upaya menguatkan pengelolaan risiko operasional Bank menerbitkan Kebijakan BII <i>IT Security Guide</i>. • Menyempurnakan kebijakan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku. • Dalam upaya penerapan ketentuan <i>Know Your Customer @ Anti Money Laundering</i> Bank menerbitkan kebijakan perihal Penetapan <i>Know Your Customer Officer</i> serta menerbitkan Form Sumber dan Tujuan Penggunaan Dana. • Menerbitkan pedoman penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. • Menerbitkan kebijakan Pemberian Sanksi. • Melakukan <i>self assesment</i> dan pembuatan laporan GCG. 								
<p>2007</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menguatkan pengelolaan risiko likuiditas dengan menerbitkan kebijakan: <i>Bank Wide Liquidity Risk Management Policies And Guidelines, Liquidity Contingency Plan</i> dan Pengelolaan Likuiditas. • Menyempurnakan kebijakan Audit Internal. • Menerbitkan Kebijakan Umum Pengelolaan Batas Maksimum Pemberian Kredit/Penyediaan Dana. • Menyempurnakan Kebijakan Pendelegasian Kewenangan. • Melakukan <i>self assesment</i> dan pembuatan laporan GCG. 								
<ul style="list-style-type: none"> • The Bank established the BII Policy on IT Security Guide, in order to strengthen operational risk management. • Improved the Code of Conduct and Ethics Policy • The Bank issued a policy on the Establishment of Know Your Customer Officer, and published the forms of Funding sources and objectives, all as initiatives in implementing Know Your Customer & Anti Money Laundering. • Issued guidelines on organizing AGM. • Issued policy on punishments. • Conducted self-assessment and produced GCG reporting. 								
<ul style="list-style-type: none"> • Issued policy of: Bank Wide Liquidity Risk Management Policies and Guidelines, Liquidity Contingency Plan and Liquidity Management, all to strengthen the management of Liquidity Risk. • Improved the Internal Audit policy. • Issued General Policy on Management of Maximum Credit/ Funding Limit. • Improved the policy on delegation of Authority. • Conducted self assessment and produced GCG reporting. 								

<p>2008</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyempurnakan Manual GCG • Menerbitkan kebijakan internal perihal Standard Operating Prosedur Penyusunan Laporan Tingkat Kesehatan Bank. • Melakukan <i>self assesment</i> dan pembuatan laporan GCG. 	<ul style="list-style-type: none"> • Improved GCG Manual • Issued internal policy on Standard • Operating Procedure of the Bank's soundness reporting.
<p>2009</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerbitkan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dalam upaya menyesuaikan dengan perkembangan struktur organisasi bank yang cukup dinamis dan memenuhi ketentuan Bank Indonesia terkait penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian Bank. • Menyempurnakan Manual GCG. • Melakukan <i>self assesment</i> dan pembuatan laporan GCG. 	<ul style="list-style-type: none"> • Issued Guidelines of Risk Management Implementation in order to adjust the dynamics of Bank organizational structure development, as well as to comply with regulation of Bank Indonesia, related to the Bank's risk management implementation and prudential policies. • Improved GCG Manual. • Conducted self-assessment and produced GCG reporting.
<p>2010</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerbitkan kebijakan internal perihal Kewajiban Menyampaikan Informasi Adanya Indikasi Pelanggaran (<i>Whistleblowing</i>). • Menerbitkan Kebijakan Dan Limit Penyediaan Dana Besar Untuk Debitur Dan Obligor. • Menyempurnakan kebijakan perihal manajemen risiko khususnya Lampiran SOP Penyusunan Laporan Profil Risiko Bank Dan Konsolidasi Panduan Manual Judgement. • Penyempurnaan kebijakan perihal Pedoman Penerapan Manajemen Risiko. • Mengkinikan Kebijakan APU/PPT. <p>• Melakukan <i>self assesment</i> dan pembuatan laporan GCG.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Issued internal policy on whistleblowing • Issued policy of Funding Limits for Debtors and Obligors • Improved policy of risk management particularly the SOP attachment on Reporting the Bank's Risk Profile and consolidated Manual Judgement. • Improved policy regarding Implementation Guidelines of Risk Management • Updated policy on Anti Money Laundering/Prevention on Terrorism Funding. • Conduct self assessment and produce GCG reporting.
<p>2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menguatkan pengelolaan risiko operasional melalui penerbitan kebijakan internal perihal Kebijakan Pengamanan Teknologi Informasi. • Menyempurnakan kebijakan internal perihal Pelaksanaan Monitoring Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Pihak Terkait Bank. • Menyempurnakan kebijakan perihal benturan kepentingan. • Menyempurnakan kebijakan perihal Standar Manual Pelayanan Cabang. • Menguatkan pengelolaan risiko melalui penerbitan kebijakan internal perihal Pedoman Pelaporan <i>Risk Control Assessment</i> (RCSA) dan Key Risk Indicator (KRI). • Menerbitkan Kebijakan Umum Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). • Menguatkan pengelolaan risiko operasional dengan menerbitkan kebijakan perihal ERR (<i>Event Risk Reporting</i>) Sebagai Media Pelaporan Kejadian Risiko Operasional. • Menerbitkan kebijakan perihal Mengenal Karyawan Anda/ Know Your Employee. • Menerbitkan kebijakan internal perihal Pedoman Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) Kustodian. • Menguatkan pengelolaan risiko melalui penerbitan kebijakan Umum Pengelolaan Batas Maksimum Pemberian Kredit/ Penyediaan Dana. • Penerbitan ketentuan internal perihal IT Steering Committee. • Melakukan <i>self assesment</i> dan pembuatan laporan GCG. 	<ul style="list-style-type: none"> • Strengthened the management of operational risk through internal policy issuance regarding Security in Information Technology. • Improved internal policy regarding implementation of maximum credit limit on bank's related party. • Improved policy on conflict of interest • Improved policy on Standard of Manual Service on Branches. • Strengthened risk management through the issuance of internal policy regarding reporting guidelines of Risk Control Assessment (RCSA) and Key Risk Indicator (KRI). • Issued the General Policy regarding implementation of Anti Money Laundering (AML) program and Prevention of Terrorism Funding. • Strengthening management of operational risk by issuing policy regarding Event Risk Reporting (ERR) as media to report operational risk events. • Issued policy regarding Know Your Employee • Issued internal policy regarding guideline of Know Your Customer principles. • Strengthened risk management through issuance of General Policy on Maximum Credit/Funding Limit. • Issued internal regulation on IT Steering Committee. • Conducted self assessment and produced GCG reporting.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

2012	
<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Komite Audit Internal (Internal Audit Committee). • Menyempurnakan Piagam Komite Remunerasi & Nominasi (<i>Remuneration & Nomination Charter</i>). • Menyempurnakan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam 2 (dua) versi bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Inggris. • Menyempurnakan ketentuan internal perihal Benturan Kepentingan. • Menyempurnakan kebijakan internal perihal Komite Manajemen Risiko. • Menyempurnakan kebijakan internal perihal Kerangka dan Prosedur Penyusunan Laporan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko (<i>Risk Bank Rating/RBBR</i>). • Penerbitan Kebijakan perihal <i>Human Capital Policy & Procedure</i> Alih Daya. • Menguatkan pengelolaan risiko operasional melalui penyempurnaan kebijakan Kerangka Kerja Manajemen Risiko Operasional. • Menerbitkan kebijakan terkait Human Capital yaitu Performance Improvement Plan. • Menerbitkan kebijakan internal perihal Transaksi Afiliasi. • Menguatkan pengelolaan risiko operasional melalui penerbitan Kebijakan Keamanan Informasi Dan Standar Keamanan Informasi BII. • Penyempurnaan Struktur Organisasi Direktorat Legal & Compliance, Corporate Secretary. • Menyempurnakan kebijakan internal perihal IT <i>Steering Committee</i>. • Menerbitkan modul pembelajaran melalui <i>e-learning</i> perihal <i>Information Security Awareness</i>. • Penyempurnaan kebijakan <i>Human Capital Policy & Procedure</i>. • Menyempurnakan kebijakan dan pelaksanaan GCG pada Anak Perusahaan. • Melakukan <i>self assesment</i> dan pembuatan laporan GCG. 	<ul style="list-style-type: none"> • Established internal Audit Committee. • Improved Remuneration and Nomination Committee Charter. • Improved Guideline and Work Order of the Board of Commissioners and the Board of Directors in bilingual version: Bahasa Indonesia and English. • Improved internal regulations on Conflict of Interest. • Improved internal policy regarding Risk Management Committee. • Improved internal policy on Framework and Procedures of Reporting of the Bank's risk-based soundness (Risk Bank Rating/RBBR). • Issued policy regarding Human Capital Policy & Outsourcing Procedure. • Strengthened management of operational risk through improvement on policy of Operational Risk Management Framework. • Issued policy of Human Capital Performance regarding Performance Improvement Plan. • Issued internal policy regarding Affiliated Transactions. • Strengthened management of operational risk through the issuance of Information Security Policy and Information Security Standards of BII. • Improved Organizational Structure on Legal & Compliance Directorate, Corporate Secretary. • Improved internal policy regarding IT Steering Committee. • Issued e-Learning modules regarding Information Security Awareness. • Improved policy on Human Capital Policy & Procedure. • Improved policy and implementation of GCG in subsidiaries. • Conducted self assessment and produced GCG reporting.
2013	
<ul style="list-style-type: none"> • Menyempurnakan Piagam Komite Audit (<i>Audit Committee Charter</i>). • Menyempurnakan kebijakan internal perihal Komite Manajemen Risiko. • Menyempurnakan dan menerbitkan kebijakan internal perihal Kewajiban Menyampaikan Informasi Adanya Indikasi Pelanggaran (<i>Whistleblowing</i>). • Proses penyempurnaan Manual GCG guna menyelaraskan dengan ketentuan GCG yang terkini. • Menyelaraskan GCG BII dengan ASEAN CG Scorecard. • Menerbitkan kebijakan internal perihal Implementasi <i>Shariah Governance Framework</i> (SGF). • Menyempurnakan "BII Portal" sebagai media informasi internal. • Menyempurnakan kebijakan internal perihal Kerangka Kerja Dan Kebijakan Manajemen Teknologi Informasi BII guna meningkatkan efektifitas dan kualitas pengelolaan teknologi informasi. • Menyempurnakan kebijakan internal perihal Prosedur Peluncuran Produk dan Aktivitas. • Melakukan <i>self assesment</i> dan pembuatan laporan GCG. 	<ul style="list-style-type: none"> • Improved Audit Committee Charter. • Improved internal policy regarding Risk Management Committee. • Improved and issued internal policy regarding Whistleblower. • Improved GCG Manual to align with the current GCG regulation. • Aligned the BII GCG to ASEAN CG Scorecard. • Issued internal policy regarding implementation of Shariah Governance Framework (SGF). • Improved "BII Portal" as internal information media. • Improved internal policy regarding Framework and Policy of the Bank's Information Technology Management in order to improve effectiveness and quality of information technology management. • Improved internal policy on Product Launch Procedure and Activities. • Conducted self assessment and produced GCG reporting.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Menguatkan pengelolaan risiko melalui penyempurnaan Kebijakan <i>Risk Control and Self Assessment</i> (RCSA). • Menerbitkan kebijakan perihal Risk Appetite Statement. • Menguatkan strategi <i>anti fraud</i> melalui penerbitan Kebijakan Dan Prosedur Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i>. • Penyempurnaan Struktur Organisasi Direktorat <i>Risk Management</i>. • Menerbitkan manual Penyusunan Otomasi Laporan Profil Risiko Melalui Aplikasi RISKPRO (web based risk profile). • Menerbitkan Ketentuan Penggunaan Medium Corporate/ Commercial Scorecard. • Menerbitkan Ketentuan Penggunaan Non Bank Financial Institutional Scorecard. • Menerbitkan ketentuan Pemilihan Scorecard Segment Berdasarkan Bidang Usaha Untuk Debitur Multi Business (Non Retail Portfolio). • Menerbitkan Pedoman Penetapan Limit Override Atas Hasil Scorecard (Rating) Untuk Debitur Non-Retail Portfolio. • Menerbitkan Kerangka Kerja Validasi Model Risiko Kredit. • Menerapkan GCG sebagai salah satu indikator penilaian Laporan Tingkat Kesehatan Bank. • Menyelaraskan GCG BII dengan ASEAN CG Scorecard. | <ul style="list-style-type: none"> • Strengthened risk management through improvements on policy of Risk Control Self Assessment (RCSA). • Issued policy regarding Risk Appetite Statement. • Strengthened anti-fraud strategy through issuance of Policy and Implementation Procedure on Anti-Fraud Strategies. • Improved Organizational Structure in Risk Management Directorate. • Published the manual guidelines for Risk Profile Report by using the RISKPRO application (web based risk profile). • Issued guidelines on how to use the Medium Corporate/ Commercial Scorecard for users. • Issued the user guidance/ manual for Non Bank Financial Institutional Scorecard. • Published guidance on choosing the Scorecard Segment based on the client's industry for Multi Business (Non Retail Portfolio). • Issued the guidelines for Limit Override which was based on the Scorecard (rating) for Non-Retail Portfolio clients. • Published the framework of Credit Risk Validation Model. • Conducted GCG as one of assessment indicators in the Risk Based Risk Rating Report. • Conduct GCG as one of assessment indicator in the Risk Based Risk Rating Report. • Alignment BII GCG with ASEAN CG Scorecard. |
|--|--|

2014

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Menerbitkan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko (PPMR) versi 3. • Menerbitkan Ketentuan Penggunaan Non Retail Scorecard. • Menerbitkan Kerangka Kerja Proses Penilaian Kecukupan Modal Internal (ICAAP) versi 3. • Menerbitkan Kebijakan Stress Testing. • Melakukan penyesuaian atas Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi. • Penyempurnaan kebijakan Assets & Liabilities Management dan Assets & Liabilities Management Committee (ALCO). • Menerbitkan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) Kustodian dalam upaya dan dukungan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme. • Menyempurnakan penerapan GCG BII dengan ASEAN CG Scorecard. • Melakukan <i>self assesment</i> dan pembuatan laporan GCG. | <ul style="list-style-type: none"> • Published the 3rd version guidelines/manual for PPMR (Pedoman Penerapan Manajemen Risiko). • Issued the user guidelines or manual for Non Retail Scorecard. • Issued the 3rd version framework for ICAAP. • Published the Stress Testing policy. • Adjusted/ adapted the reputation of Risk Management Policy. • Perfected the Assets & Liabilities Management and Assets & Liabilities Management Committee (ALCO). • Published the custodian KYC (Know Your Customer) policy in order to prevent money laundering and acts of terrorism. • Refined GCG BII implementation with ASEAN CG Scorecard. • Conducted self assessment and produced GCG reporting. |
|--|--|

“Integritas hanya dapat dibentuk melalui penerapan terbaik dari praktik dan kaidah GCG”

“Integrity can only be formed from the implementation of sound GCG practices and principles.”

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan penuh yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi, dalam koridor yang ditetapkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.

RUPS memiliki wewenang antara lain untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui Laporan Tahunan BII, menunjuk Auditor Eksternal, menentukan jumlah kompensasi/remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menetapkan penggunaan laba bersih dan lain-lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ in the Limited Liability Company with full authority that is not granted by the Board of Commissioners or Board of Directors, within the boundaries specified in the Limited Liability Company Law and/or Articles of Association.

GMS has the authority, among others, to appoint and to terminate members of Board of Commissioners and Board of Directors, approves amendments to the Articles of Association, approves the Annual Report of BII, appoints External Auditors, determines the amount of compensation/remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors, specifies the use of net income and others according to the prevailing laws and regulations and the Articles of Association of the Company.



Pelaksanaan RUPS terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa). RUPS Tahunan diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Selama 2013, RUPS Tahunan telah diselenggarakan sebanyak 1 (satu) kali yaitu:

- tanggal 22 April 2013

RUPS Luar Biasa telah diselenggarakan sebanyak 5 (lima) kali yaitu:

- tanggal 22 April 2013
- tanggal 2 Mei 2013
- tanggal 23 Mei 2013
- tanggal 27 Juni 2013 dan
- tanggal 11 November 2013.

Informasi perihal penyelenggaraan RUPS Perseroan yang meliputi antara lain pengumuman tentang Pemberitahuan, Panggilan maupun penyampaian Hasil Keputusan RUPS telah disampaikan kepada otoritas terkait dan diinformasikan/dipublikasikan pada Bursa Efek Indonesia dan surat kabar dalam waktu yang telah ditentukan. Informasi ini dapat pula diakses pada website Bursa Efek Indonesia dengan alamat www.idx.co.id atau pada website BII dengan alamat www.bii.co.id.

The GMS consists of the Annual General Meeting of Shareholders (Annual GMS) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (Extraordinary GMS). AGMS is held within a period of no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year, while the EGMS may be held at any time, as the Company deems necessary.

During 2013, there was 1 (one) Annual GMS, held on:

- 22 April 2013

Extraordinary GMS was held a total of 5 (five) times:

- 22 April 2013
- 2 May 2013
- 23 May 2013
- 27 June 2013 and
- 11 November 2013.

Information regarding the Company's GMS, which includes, among others, the Notifications, Summons or Reporting of GMS Resolutions had been submitted to the relevant authorities and was informed/published in Indonesia Stock Exchange and newspapers according to the specified time. This information may also be accessed on the website of Indonesia Stock Exchange at the address of www.idx.co.id or on BII website at the address of www.bii.co.id.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 22 APRIL 2013

A. Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan Penyampaian Hasil RUPS Tahunan – 22 April 2013

Proses pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan dan pelaporan hasil RUPS Tahunan telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 22 APRIL 2013

A. Notifications, Announcements, Summons and Reporting of Annual GMS Resolutions– 22 April 2013

The process of notification, announcement, summoning and reporting of Annual GMS implemented in compliance with prevailing laws and regulations.

Pemberitahuan Notification	Pengumuman (Iklan Pemberitahuan) Announcement	Pemanggilan (Iklan Panggilan) Summon	Pelaksanaan Implementation	Hasil Resolution Laporan ke Regulator Reporting to Regulator	Publikasi di 2 (dua) Surat Kabar Publications in 2 (two) newspaper
RUPS Tahunan 22 April 2013					
<p>13-03-2013 Surat Pemberitahuan kepada Bank Indonesia (Surat No.S.2013.124/Dir Compliance), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan IDX (Surat No.S.2013.125/Dir Compliance). Pada saat yang bersamaan kami juga mengumumkan melalui website perusahaan dan website bursa.</p> <p>13-03-2013 Notification Letter to Bank Indonesia (Letter No.S.2013.124/Dir Compliance), The Financial Services Authority (OJK) and IDX. (Letter No.S.2013.125/Dir Compliance). In the same times we also upload the announcement in company and IDX website.</p>	<p>21-03-2013 Pemberitahuan melalui "Media Indonesia" dan "Investor Daily".</p> <p>21-03-2013 Announcement on daily newspapers "Media Indonesia" and "Investor Daily".</p>	<p>05-04-2013 Panggilan melalui "Media Indonesia" dan "Investor Daily".</p> <p>05-04-2013 Summon were placed in daily newspapers "Media Indonesia" and "Investor Daily".</p>	<p>Pelaksanaan RUPS Tahunan tanggal: 22 April 2013 Lokasi: Jakarta Pusat Implementation AGMS date: 22 April 2013 Location: Central Jakarta</p>	<p>24-04-2013 Hasil RUPS Tahunan dilaporkan kepada Bank Indonesia (Surat No.S.2013.230/ Presdir), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan IDX (Surat No.S.2013.231/Presdir)</p> <p>24-04-2013 Resolution of the AGMS were reported to Bank Indonesia (Letter No.S.2013.230/Presdir), The Financial Services Authority (OJK) and IDX. (Letter No.S.2013.231/ Presdir).</p>	<p>24-04-2013 Hasil RUPS Tahunan disampaikan melalui "Media Indonesia" dan "Investor Daily".</p> <p>24-04-2013 The AGMS resolutions were published through daily newspapers "Media Indonesia" and "Investor Daily".</p>
<p>Paling lambat 7 hari kalender sebelum pemberitahuan di surat kabar. At the latest 7 (seven) days before announcement on newspaper. (Pasal 3 Peraturan No. IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-60/PM/1996 tanggal 17-01-1996). (Articles 3 Regulation No IX.I.1 concerning of Planning and Conducting The GMS, attachment of Decision of the Chairman of Bapepam No. Kep-60/PM/1996 Dated on 17-01-1996).</p>	<p>Minimal 14 hari kalender sebelum panggilan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemberitahuan dan tanggal panggilan. At least 14 calendar days before the notice of the GMS is sent/served excluding the date of notification and the date of summon.</p> <p>(Pasal 11.2 Anggaran Dasar BII) (Articles 11.2 of BII's Articles of Association)</p>	<p>Minimal 14 hari kalender sebelum RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS. At least 14 calendar days before the date of the GMS excluding the date of summon and the date of GMS.</p> <p>(Pasal 11.3 Anggaran Dasar BII) (Articles 11.3 of BII's Articles of Association)</p>		<p>Paling lambat 2 hari kerja setelah RUPS. At the latest 2 (two) working days after GMS.</p> <p>(Pasal 4 Peraturan No.IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-60/PM/1996). (Articles 4 Regulation No.IX.I.1 concerning of Planning and Conducting The GMS, attachment of Decision of the Chairman of Bapepam No. Kep-60/PM/1996).</p>	<p>Paling lambat 2 hari kerja setelah RUPS. At the latest 2 (two) working days after GMS.</p> <p>(Pasal 4 Peraturan No.IX.I.tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-60/PM/1996). (Articles 4 Regulation No.IX.I.1 concerning of Planning and Conducting GMS, attachment of Decision of the Chairman of Bapepam No. Kep-60/PM/1996).</p>

B. Lokasi dan Kehadiran RUPS Tahunan - 22 April 2013

RUPS Tahunan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 22 April 2013, waktu pukul 14.00 s.d 16.00 WIB, bertempat di Function Room, Gedung Sentral Senayan III, Lantai 28, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta 10270.

RUPS Tahunan dihadiri oleh pemegang saham perseroan dan/atau kuasanya yang diwakili sejumlah 54.755.760.857 (lima puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh tujuh) saham atau sama dengan 97,29% (sembilan puluh tujuh koma dua puluh sembilan persen) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan perseroan sampai dengan tanggal 4 April 2013, yaitu total 56.281.990.760 (lima puluh enam milyar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh) saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran untuk penyelenggaraan RUPS Tahunan telah terpenuhi.

C. Agenda RUPS Tahunan - 22 April 2013

1. Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2012;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2012;
3. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2013 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan publik serta persyaratan lainnya;
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan;

B. Location and Attendance of AGMS- 22 April 2013

The Annual GMS was held on Monday, 22 April 2013, at 14.00 to 16.00 WIB (Western Indonesian Time), in the Function Room, Sentral Senayan Building III, 28th Floor, Jalan Asia Afrika No. 8, Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta 10270.

Annual GMS was attended by the shareholders of the company and/or their proxies who represent 54.755.760.857 (fifty-four billion, seven hundred fifty-five million, seven hundred and sixty thousand, eight hundred fifty-seven) of shares or equal to 97,29% (ninety-seven point twenty-nine percent) of the total shares with legitimate voting rights, which have been issued by the company up to 4 April 2013, totaling 56.281.990.760 (fifty-six billion, two hundred eighty-one million, nine hundred and ninety thousand, seven hundred and sixty) shares issued by the Company. Therefore the quorum requirement for the convening of the Annual GMS had been fulfilled.

C. Agenda of AGMS - 22 April 2013

1. Report of Board of Directors on the performance of the company for the fiscal year ended on 31 December 2012 and the ratification of the Balance Sheet and Profit/Loss calculation for the fiscal year ended on 31 December 2012;
2. Determination on the use of company's net income for the fiscal year ended on 31 December 2012;
3. Delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to audit the financial report of the Company for the 2013 fiscal year and specification of honorarium of Public Accounting Firm and other requirements;
4. Determination of honorarium and/or other allowances for the Company's Board of Commissioners;

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

5. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan :
 - a. Gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan;
 - b. Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
6. Pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi Perseroan.

D. Hasil Keputusan RUPS Tahunan - 22 April 2013

Agenda Pertama:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba/Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Suherman & Surja" (*member firm of Ernst & Young*) dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 19 Februari 2013.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat pada tahun buku 2012 mengenai tindakan pengawasan dan kepengurusannya selama tahun buku 2012 tersebut; sepanjang tindakan pengawasan dan kepengurusannya dimaksud tercermin dalam buku dan catatan Perseroan sepanjang tahun buku 2012, serta tidak melanggar praktek perbankan yang sehat (*prudential banking*) dan tidak pula termasuk dalam kategori tindak pidana.

5. Delegation of authority to the Board of Commissioners to specify:
 - a. Salary and/or other allowances for Company's Board of Directors;
 - b. Honorarium and/or other allowances for Company's Sharia Supervisory Board.
6. Delegation of tasks and authorities among the members of Company's Board of Directors.

D. Results of Resolutions of Annual GMS - 22 April 2013

First Agenda:

1. Received and approved the Company's Annual Report for the fiscal year ended on 31 December 2012.
2. Received and ratified Statement of Financial Position and Consolidated Statement of Company's Profit/Loss for the fiscal year ended on 31 December 2012, audited by Public Accounting Firm "Purwantono, Suherman&Surja" (member firm of Ernst & Young) with "Unqualified" opinion as stated in the report dated 19 February 2013.
3. Granted full acquittal and discharge of responsibility (*acquit et de charge*) to all members of Board of Commissioners and Board of Directors who served during the 2012 fiscal year regarding the performance of their supervisory and management duties during the 2012 fiscal year; as long as the performance of supervisory and management duties were reflected in the Company's records and statements throughout 2012 fiscal year, and did not violate sound prudential banking principle and were not categorized as criminal acts.

4. Menerima dan menyetujui Laporan Direksi Perseroan atas penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi yaitu: i) Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012 Seri A dan Seri B, ii) Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun 2012, sebagaimana tercantum dalam laporan Direksi Perseroan kepada Bapepam-LK atau sekarang disebut Otoritas Jasa Keuangan melalui surat tertanggal 10 Januari 2013.

Agenda Kedua:

1. a. Menyetujui pencadangan biaya sebelum laba bersih sebesar Rp23.338.856.000 untuk digunakan sebagai pemberian bonus/tantiem bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2012;
 - b. Menyetujui pelaksanaan pembagian termasuk penetapan besarnya bonus/tantiem diantara anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi, dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan sebesar Rp1.208.223.154.304 untuk :
 - a. Sebesar Rp120.822.315.430 digunakan sebagai "Cadangan Umum", guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas dan pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan.
 - b. Sebesar Rp1.087.400.838.874 dimasukkan sebagai "laba ditahan" Perseroan.
3. Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham dari laba bersih tahun buku 2012.

4. Received and approved the Report of Company's Board of Directors regarding the use of funds resulting from the public offering of Bonds, namely: i) Continuous Bonds I of Bank BII Phase II of Year 2012 of Series A and Series B, ii) Continuous Subordinated Bonds I of Bank BII Phase II of Year 2012, as stated in the report of Board of Directors to Bapepam-LK (now called "Financial Services Authority") through a letter dated 10 January 2013.

Second Agenda:

1. a. Approved the reserving of funds prior to net income with the amount of Rp23,338,856,000 to be used as bonus/tantiem for Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the 2012 fiscal year; b. A p p r o v e d the implementation of distribution including the specification of the amount of bonus/tantiem among the members of Board of Commissioners or Board of Directors with regard to the recommendation Company's Remuneration and Nomination Committee.
2. Approved the use of Company's net profit in the amount of Rp1,208,223,154,304 for:
 - a. The amount of Rp120,822,315,430 to be used as "General Reserves", to fulfill the provision in Article 70 of paragraph 1 of Limited Liability Company Law and Article 25 of Company's Articles of Association.
 - b. The amount of Rp1,087,400,838,874 to be put forth as Company's "retained earnings".
3. Approved the decision not to distribute dividends to Shareholders of Company from the net profit of 2012 fiscal year.

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

Agenda Ketiga:

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
 - a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan terafiliasi secara resmi dengan salah satu Kantor Akuntan Publik besar dunia untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2013; dan
 - b. Menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Agenda Keempat:

Menyetujui pelimpahan wewenang dan pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2013 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Besarnya honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2013.

Third Agenda:

1. Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to:
 - a. Appoint Public Accounting Firm registered at Financial Services Authority with official affiliation to one of the world's big Public Accounting Firms to audit the Company's Financial Statements of 2013 fiscal year; and
 - b. Specify the honorarium for the Public Accounting Firms and other requirements in relation to the appointment of the Public Accounting Firms.
2. Granted authorization to the Board of Commissioners and Board of Directors to take action relevant to the appointment of Public Accounting Firms in compliance with prevailing regulations.

Fourth Agenda:

Approve the delegation of authority and granting the authorization to Company's controlling shareholders to specify the honorarium and/or other allowances for Board of Commissioners for 2013 fiscal year with regard to suggestions and recommendations from Company's Remuneration and Nomination Committee. The amount of honorarium and/or other allowances for the members of said Board of Commissioners shall be stated in the 2013 fiscal year Annual Report.

Agenda Kelima:

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2013 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2013.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2013 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Besarnya honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2013.

Agenda Keenam:

Menerima dan menyetujui pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2013 akan ditetapkan oleh Direksi sendiri melalui Keputusan Direksi.

Fifth Agenda:

1. Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to specify the salary and/or other allowances for the members of Board of Directors for 2013 fiscal year with regard to the Company's Remuneration and Nomination Committee. The amount of salary and/or other allowances for the members of Board of Directors shall be stated in the 2013 fiscal year Annual Report.
2. Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to specify the honorarium and/or other allowances for the Sharia Supervisory Board for 2013 fiscal year in respect of the suggestions and recommendations of Company's Remuneration and Nomination Committee. The amount of honorarium and/or other allowances for the members of the Sharia Supervisory Board to be stated in 2013 fiscal year Annual Report.

Sixth Agenda:

Received and approved the distribution of tasks and authorities among the members of the Board of Directors for the 2013 fiscal year which will be specified by the Board of Directors themselves through the Decision of Board of Directors.

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA**
22 APRIL 2013

A. Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan Penyampaian Hasil RUPS Luar Biasa 22 April 2013

Proses pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan dan pelaporan hasil RUPS Luar Biasa telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
22 APRIL 2013

A. Notifications, Announcements, Invitations and Delivery of Resolutions of Extraordinary GMS – 22 April 2013

The process of notification, announcement, invitation and reporting of resolutions of Extraordinary GMS implemented in compliance with prevailing laws and regulations.

Pemberitahuan Notification	Pengumuman (Iklan Pemberitahuan) Announcement	Pemanggilan (Iklan Panggilan) Summon	Pelaksanaan Implementation	Hasil Resolution Laporan ke Regulator Reporting to Regulator	Publikasi di 2 (dua) Surat Kabar Publications in 2 (two) newspaper
RUPS Luar Biasa 22 April 2013					
13-03-2013 Surat Pemberitahuan kepada Bank Indonesia (Surat No.S.2013.124/Dir Compliance), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan IDX (Surat No.S.2013.125/Dir Compliance). 13-03-2013 Notification Letter to Bank Indonesia (Letter No.S.2013.124/Dir Compliance), The Financial Services Authority (OJK) and IDX. (Letter No.S.2013.125/Dir Compliance).	21-03-2013 Pemberitahuan melalui "Media Indonesia" dan "Investor Daily". 21-03-2013 Announcement on daily newspapers "Media Indonesia" and "Investor Daily".	5-04-2013 Panggilan melalui "Media Indonesia" dan "Investor Daily". 05-04-2013 Summon were placed in daily newspapers "Media Indonesia" and "Investor Daily".	Pelaksanaan RUPS Luar Biasa tanggal: 22 April 2013 Lokasi: Jakarta Pusat Implementation EGMS date: 22 April 2013 Location: Central Jakarta	24-04-2013 Hasil RUPS Luar Biasa dilaporkan kepada Bank Indonesia (Surat No.S.2013.230/Presdir), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan IDX (Surat No.S.2013.231/Presdir) 24-04-2013 Resolutions of the EGMS were reported to Bank Indonesia (Letter No.S.2013.230/Presdir), The Financial Services Authority (OJK) and IDX. (Letter No.S.2013.231/Presdir).	24-04-2013 Hasil RUPS Luar Biasa disampaikan melalui "Media Indonesia" dan "Investor Daily". 24-04-2013 The EGMS resolutions were published through daily newspapers "Media Indonesia" and "Investor Daily".

B. Lokasi dan Kehadiran RUPS Luar Biasa - 22 April 2013

RUPS Luar Biasa dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 22 April 2013, waktu pukul 14.00 s.d 16.00 WIB, bertempat di Function Room, Gedung Sentral Senayan III, Lantai 28, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta 10270.

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh pemegang saham perseroan dan/atau kuasanya yang diwakili sejumlah 54.755.760.857 (lima puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus

B. Location and Attendance of Extraordinary GMS - 22 April 2013

Extraordinary GMS was held on Monday, 22 April 2013, from 14.00 to 16.00 WIB (Western Indonesian Time), in Function Room, Sentral Senayan Building III, 28th Floor, Jalan Asia Afrika No. 8, Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta 10270.

Extraordinary GMS was attended by the shareholders of the company and/or their proxies who represent 54,755,760,857 (fifty-four billion, seven hundred fifty-five million,

lima puluh tujuh) saham atau sama dengan 97,29% (sembilan puluh tujuh koma dua puluh sembilan persen) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan perseroan sampai dengan tanggal 4 April 2013, yaitu total 56.281.990.760 (lima puluh enam milyar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh) saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran untuk penyelenggaraan RUPS Luar Biasa telah terpenuhi.

C. Agenda RUPS Luar Biasa - 22 April 2013

Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

D. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa - 22 April 2013

1. Menerima dan mengesahkan pengunduran diri Stephen Liestyo sebagai Direktur Perseroan efektif sejak tanggal 31 Januari 2013; dan mengesahkan pengakhiran masa bakti Putu Antara sebagai Komisaris Independen Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat hari ini tanggal 22 April 2013. Perseroan juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas pemikiran, kerja keras serta jasa mereka untuk kemajuan Perseroan. Khusus untuk pemberian pelunasan dan tanggung jawab (acquit et de charge) atas masa jabatan mereka selama tahun 2013, akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2013.
2. Menyetujui untuk mengangkat :
 - a. Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada Tahun 2015.

seven hundred and sixty thousand, eight hundred fifty-seven) of shares or equal to 97.29% (ninety-seven point twenty-nine percent) of the total shares with legitimate voting rights, which have been issued by the company up to 4 April 2013, totaling 56,281,990,760 (fifty-six billion, two hundred eighty-one million, nine hundred and ninety thousand, seven hundred and sixty) shares issued by the Company. Therefore the quorum requirement for the convening of the Extraordinary GMS had been fulfilled.

C. Agenda of Extraordinary GMS - 22 April 2013

The changes of Composition in Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company.

D. Resolutions of Extraordinary GMS - 22 April 2013

1. Received and ratified the resignation of Stephen Liestyo as a Company Director effective as of 31 January 2013; and ratified the termination of the term of office of Putu Antara as Company Independent Commissioner effective from the closing of the Extraordinary GMS dated 22 April 2013. The Company also expressed appreciation and gratitude for the thoughts, hard work and their services for the development of the Company. The granting of acquittal and responsibility (acquit et de charge) during their term of office in 2013 would be determined in Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year of 2013.
2. Agreed to appoint:
 - a. Achjar Iljas as Company's Independent Commissioner effective as of the closing of this Meeting until the remaining term of office of other members of Board of Commissioners who remain in office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in the year of 2015.

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

- b. Lani Darmawan sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada Tahun 2015.
3. Menetapkan bahwa dengan ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
- Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor sebagai Presiden Komisaris
 - Dato' Sri Abdul Wahid bin Omar sebagai Komisaris
 - Spencer Lee Tien Chye sebagai Komisaris
 - Umar Juoro sebagai Komisaris Independen
 - Taswin Zakaria sebagai Komisaris Independen
 - Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen
 - Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen
- dan susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
- Dato' Khairussaleh bin Ramli sebagai Presiden Direktur
 - Ghazali bin Mohd Rasad sebagai Direktur
 - Thilagavathy Nadason sebagai Direktur
 - Rita Mirasari sebagai Direktur Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan.
 - Rahardja Alimhamzah sebagai Direktur
 - Jenny Wiriyanto sebagai Direktur
 - Hedy Maria Helena Lapian sebagai Direktur
 - Ani Pangestu sebagai Direktur
 - Lani Darmawan sebagai Direktur
- dengan ketentuan bahwa khusus untuk pengangkatan Achjar Iljas selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku untuk Achjar Iljas adalah sesuai dengan keputusan dari Bank Indonesia.
- b. Lani Darmawan as Company's Director effective as of the closing of this Meeting until the remaining terms of office of other Board of Directors who remain in office, namely until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in the year of 2015.
3. Established that as of the closing of this Meeting, the composition of the Company's Board of Commissioners is as follows:
- Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor as President Commissioner
 - Dato' Sri Abdul Wahid bin Omar as Commissioner
 - Spencer Lee Tien Chye as Commissioner
 - Umar Juoro as Independent Commissioner
 - Taswin Zakaria as Independent Commissioner
 - Budhi Dyah Sitawati as Independent Commissioner
 - Achjar Iljas as Independent Commissioner
- And the composition of Company's Board of Directors to be as follows:
- Dato' Khairussaleh bin Ramli as President Director
 - Ghazali bin Mohd Rasad as Director
 - Thilagavathy Nadason as Director
 - Rita Mirasari as Compliance Director and Company's Secretary.
 - Rahardja Alimhamzah as Director
 - Jenny Wiriyanto as Director
 - Hedy Maria Helena Lapian as Director
 - Ani Pangestu as Director
 - Lani Darmawan as Director
- under the provision that the appointment of Achjar Iljas as a member of the Company's Board of Commissioner shall be effective upon approval of Bank Indonesia. Therefore the valid appointment for Achjar Iljas shall be in accordance with the decision of Bank Indonesia.

4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris (bilamana perlu), dan memberitahukan atau mendaftarkan ke instansi yang berwenang sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dimaksud, dan mengadakan penegasan yang diperlukan karenanya berhak untuk mengajukan permohonan, menandatangani segala surat-surat dan dokumen yang diperlukan, serta melakukan tindakan lainnya.

4. Granted authorization for the Company's Board of Directors with substitution rights to state in a separate deed before the Notary (if necessary), and to inform or register to the relevant agency regarding the changes of composition of the members of the relevant Board of Commissioners and Board of Directors, and to conduct necessary reaffirmation and therefore entitled file a petition, sign all kinds of necessary letters and documents, and to take other actions.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 2 MEI 2013

A. Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan Penyampaian Hasil RUPS Luar Biasa 2 Mei 2013

Proses pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan dan pelaporan hasil RUPS Luar Biasa telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2 MAY 2013

A. Notifications, Announcements, Invitations and Delivery of Resolutions of Extraordinary RUPS 2 May 2013

The process of notification, announcement, summon and reporting of resolution of Extraordinary GMS is implemented in compliance with prevailing laws and regulations.

Pemberitahuan Notification	Pengumuman (Iklan Pemberitahuan) Announcement	Pemanggilan (Iklan Panggilan) Summon	Pelaksanaan Implementation	Hasil Resolution Laporan ke Regulator Reporting to Regulator	Publikasi di 2 (dua) Surat Kabar Publications in 2 (two) newspaper
RUPS Luar Biasa 2 Mei 2013					
15-03-2013 Surat Pemberitahuan kepada Bank Indonesia (Surat No.S.2013.145/Dir Compliance), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan IDX (Surat No.S.2013.143/Dir Compliance). 15-03-2013 Notification Letter to Bank Indonesia (Letter No. S.2013.145/Dir Compliance), The Financial Services Authority (OJK) and IDX. (Letter No.S.2013.143/Dir Compliance).	27-03-2013 Pemberitahuan melalui "Media Indonesia" dan "Bisnis Indonesia". 27-03-2013 Announcement on daily newspapers "Media Indonesia" and "Bisnis Indonesia".	15-04-2013 Panggilan melalui "Media Indonesia" dan "Bisnis Indonesia".. 15-04-2013 Summon were placed in daily newspapers "Media Indonesia" and "Bisnis Indonesia".	Pelaksanaan RUPS Luar Biasa tanggal: 2 Mei 2013 Lokasi: Jakarta Pusat Implementation EGMS date: 2 May 2013 Location: Central Jakarta	06-05-2013 Hasil RUPS Luar Biasa dilaporkan kepada Bank Indonesia (Surat No.S.2013.288/Dir Compliance), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan IDX (Surat No.S.2013.289/Dir Compliance). 06-05-2013 Resolutions of the EGMS were reported to Bank Indonesia (Letter No.S.2013.288/Dir Compliance), The Financial Services Authority (OJK) and IDX. (Letter No.S.2013.289/Dir Compliance).	06-05-2013 Hasil RUPS Luar Biasa disampaikan melalui "Media Indonesia" dan "Bisnis Indonesia". 06-05-2013 The EGMS resolutions were published through daily newspapers "Media Indonesia" and "Bisnis Indonesia".

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

B. Lokasi dan Kehadiran RUPS Luar Biasa – 2 Mei 2013

RUPS Luar Biasa dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013, waktu pukul 16.00 WIB, bertempat di Function Room, Gedung Sentral Senayan III, Lantai 28, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta 10270.

Mengingat Agenda RUPS Luar Biasa adalah perubahan anggaran dasar terkait dengan rencana Penerbitan Saham baru melalui Penawaran Umum Terbatas dengan HMETD, dimana ketika Rapat dimulai sebagian besar pemegang saham telah meninggalkan ruang rapat. Maka kuorum kehadiran untuk penyelenggaraan RUPS Luar Biasa ini menjadi tidak terpenuhi.

C. Agenda RUPS Luar Biasa - 2 Mei 2013

1. Pengeluaran Saham dalam Simpanan/ Portepel dengan cara Penawaran Umum Terbatas VI (“PUT VI”) kepada para pemegang saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Rights Issue).
2. Perubahan Anggaran Dasar Pasal 4 Ayat 2 sehubungan dengan Peningkatan Modal Disetor Perseroan terkait PUT VI.

D. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa - 2 Mei 2013

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 2013 bertempat di Function Room, Sentral Senayan III lantai 28, Jl. Asia Afrika No. 8 Jakarta dengan agenda (1) Pengeluaran Saham dalam Simpanan/Portepel dengan cara Penawaran Umum Terbatas VI (“PUT VI”) kepada para pemegang saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Rights Issue); dan (2) Perubahan Anggaran Dasar Pasal 4 ayat 2 sehubungan dengan Peningkatan Modal Disetor Perseroan terkait PUT VI, tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan tidak terpenuhinya kuorum kehadiran Rapat sebagaimana disyaratkan dalam pasal 13.1 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 88 ayat 1 UUPT. (Selanjutnya Rapat ini disebut sebagai “Rapat Pertama”)

B. Location and Attendance of Extraordinary GMS– 2 May 2013

Extraordinary GMS was held on Monday, 22 April 2013, at 16.00 WIB (Western Indonesian Time), in Function Room, Sentral Senayan Building III, 28th Floor, Jalan Asia Afrika No. 8, Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta 10270.

Given that the Agenda of Extraordinary GMS was the amendment to the Articles of Association relating to the plan of Issuance of New Shares through Limited Public Offering with Pre-emptive Rights, where the majority of shareholders had left the meeting room when the meeting was started, the attendance quorum for the convening of the Extraordinary GMS was not fulfilled.

C. Agenda of Extraordinary GMS - 2 May 2013

1. Issuance of Unissued Shares/Shares in Portfolio by means of Limited Public Offering VI (“PUT VI”) with Pre-emptive Rights (Rights Issue).
2. Amendment to Articles of Association of Article 4 Paragraph 2 regarding the increase of Company’s Paid-up Capital in relation to PUT VI.

D. Resolutions of Extraordinary GMS - 2 May 2013

Company’s Extraordinary General Meeting of Shareholders was held on 2 May 2013 in Function Room, Sentral Senayan III 28th Floor, Jl. Asia Afrika No. 8 Jakarta with agenda (1) Issuance of Shares in Portfolio by means of Limited Public Offering VI (“PUT VI”) to shareholders with Pre-emptive Rights (Rights Issue); and (2) Amendment of Article 4 Paragraph 2 of the Articles of Association in relation to the Increase of Paid-up Capital in line with PUT VI, may not be implemented, as the meeting attendance quorum was not fulfilled as regulated in Article 13.1 of the Articles of Association and Article 88 of paragraph 1 UUPT. (Hereinafter this Meeting is referred as “First Meeting”)

Berkaitan dengan hal diatas, Perseroan berencana untuk menyelenggarakan Rapat kedua dalam waktu paling cepat 10 hari kalender dan paling lama 21 hari kalender setelah Rapat Pertama sesuai dengan pasal 13.4 Anggaran Dasar Perseroan. Panggilan Rapat kedua disampaikan kepada Para Pemegang Saham selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat kedua diselenggarakan.

Regarding the above-mentioned matters, Company planned to hold a second Meeting within 10 calendar days at the soonest and 21 calendar days at the latest after the First Meeting in line with Article 13.4 of the Articles of Association. Invitation to Second meeting was notified to the Shareholders no longer than 7 (seven) calendar days before the Meeting was held.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 23 MEI 2013

A. Pemberitahuan, Pengumuman, dan penyampaian hasil rups luar biasa - 23 mei 2013

Proses pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan dan pelaporan hasil RUPS Luar Biasa telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat RUPS Luar Biasa tanggal 23 Mei 2013 ini adalah RUPS Luar Biasa Kedua yang merupakan kelanjutan dari RUPS Luar Biasa tanggal 2 Mei 2013, maka berdasarkan pasal 13.4 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Kedua ini tidak diperlukan adanya Pemberitahuan. Adapun iklan Panggilan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat (tidak termasuk tanggal Panggilan dan tanggal Rapat).

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2 MAY 2013

A. Notifications, Announcements, Invitations and Delivery of Resolutions of Extraordinary GMS – 23 May 2013

The process of notification, announcement, invitation and reporting of resolutions of Extraordinary GMS implemented in compliance with the prevailing laws and regulations. Given that this Extraordinary GMS on 23 May 2013 was the second Extraordinary GMS, which was the continuation of the Extraordinary GMS on 2 May 2013, therefore based on Article 13.4 of the Company's Articles of Association, this Second Meeting did not require Notification. The Invitation Ad was published at the latest 7 (seven) days before the Meeting (not including the Summon and Meeting date)

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

Pemberitahuan Notification	Pengumuman (Iklan Pemberitahuan) Announcement	Pemanggilan (Iklan Panggilan) Summon	Pelaksanaan Implementation	Hasil Resolution	
				Laporan ke Regulator Reporting to Regulator	Publikasi di 2 (dua) Surat Kabar Publications in 2 (two) newspaper
RUPS Luar Biasa 23 Mei 2013					
-	-	15-05-2013 Panggilan Kedua melalui "Media Indonesia" dan "Bisnis Indonesia". 15-05-2013 Second summon were placed in daily newspapers "Media Indonesia" and "Bisnis Indonesia".	Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Kedua tanggal: 23 Mei 2013 Lokasi: Jakarta Pusat Implementation Second EGMS date: 23 May 2013 Location: Central Jakarta	27-05-2013 Hasil RUPS Luar Biasa Kedua dilaporkan kepada Bank Indonesia (Surat No.S.2013.006/ Dir SME), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan IDX (Surat No.S.2013.007/Dir SME) 27-05-2013 Resolution of the Second EGMS were reported to Bank Indonesia (Letter No.S.2013.006/Dir SME), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan IDX (Letter No.S.2013.007/Dir SME)	27-05-2013 Hasil RUPS Luar Biasa Kedua disampaikan melalui "Harian Ekonomi Neraca" dan "Sinar Harapan". 27-05-2013 The Second EGMS resolutions were published through daily newspapers "Harian Ekonomi Neraca" and "Sinar Harapan".

B. Lokasi dan Kehadiran RUPS Luar Biasa – 23 Mei 2013

RUPS Luar Biasa dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2013, waktu pukul 16.00 WIB, bertempat di Function Room, Gedung Sentral Senayan III, Lantai 28, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta 10270.

RUPS Luar Biasa ini adalah RUPS Kedua yang merupakan kelanjutan dari RUPS Pertama yang diadakan tanggal 2 Mei 2013, dimana RUPS Luar Biasa ini dihadiri oleh pemegang saham perseroan dan/atau kuasanya yang diwakili sejumlah 54.755.971.052 (lima puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh dua) saham atau sama dengan 97,29% (sembilan puluh tujuh koma dua puluh sembilan persen) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan perseroan sampai dengan tanggal 12 April 2013, yaitu total 56.281.990.760 (lima puluh enam milyar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh) saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran untuk penyelenggaraan RUPS Luar Biasa telah terpenuhi.

B. Location and Attendance of Extraordinary GMS – 23 May 2013

Extraordinary GMS was held on Monday, 22 April 2013, at 16.00 WIB (Western Indonesian Time), at the Function Room, Sentral Senayan Building III, 28th Floor, Jalan Asia Afrika No. 8, Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta 10270.

This Extraordinary GMS was the second GMS which was the continuation of the First GMS held on 2 May 2013, and was attended by the shareholders of the company and/or their proxies who represent 54,755,971,052 (fifty-four billion, seven hundred fifty-five million, nine hundred and seventy-one thousand, fifty-two) of shares or equal to 97.29% (ninety-seven point twenty-nine percent) of the total shares with legitimate voting rights, which have been issued by the company up to 12 April 2013, totaling 56,281,990,760 (fifty-six billion, two hundred eighty-one million, nine hundred and ninety thousand, seven hundred and sixty) shares issued by the Company. Therefore the quorum requirement for the convening of the Extraordinary GMS had been fulfilled.

C. Agenda RUPS Luar Biasa - 23 Mei 2013

1. Pengeluaran Saham dalam Simpanan/Portepel dengan cara Penawaran Umum Terbatas VI ("PUT VI") kepada para pemegang saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Rights Issue);
2. Perubahan Anggaran Dasar Pasal 4 Ayat 2 sehubungan dengan Peningkatan Modal Disetor Perseroan terkait PUT VI.

D. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa - 23 Mei 2013

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 23 Mei 2013 bertempat di Function Room, Sentral Senayan III lantai 28, Jl. Asia Afrika No. 8 Jakarta ("Rapat Kedua") di skors/ditunda untuk sementara sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian oleh Perseroan, dikarenakan Perseroan pada waktu itu belum memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk dapat melaksanakan rencana Penawaran Umum Terbatas VI dimaksud.

Berkaitan dengan hal diatas, Perseroan akan memberitahukan kepada pemegang saham dalam surat kabar tentang kelanjutan Rapat ini dalam waktu yang dipandang baik oleh Perseroan.

C. Agenda of Extraordinary GMS - 23 May 2013

1. Issuance of Unissued Shares/Shares in Portfolio through the method of Limited Public Offering VI ("PUT VI") to shareholders with Pre-emptive Rights (Rights Issue);
2. Amendment of Article 4 paragraph 2 of the Articles of Association in relation to the Increase of Paid-Up Capital regarding PUT VI.

D. RESOLUTIONS OF EXTRAORDINARY GMS - 23 MAY 2013

Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 23 May 2013 in Function Room, Sentral Senayan III 28th Floor, Jl. Asia Afrika No. 8 Jakarta ("Second Meeting") was being delayed/suspended for time being until the time was specified by the Company, because the Company at that time hadn't received effective statement from Financial Services Authority to implement the plan of said Limited Public Offering VI.

Regarding the above-mentioned matters, the Company would notify the shareholders regarding the continuation of this Meeting through a paid newspaper announcement, at a time the Company deems as appropriate.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 27 JUNI 2013

A. Pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan dan penyampaian hasil rups luar biasa - 27 Juni 2013

Proses pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan dan pelaporan hasil RUPS Luar Biasa telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat RUPS Luar Biasa tanggal 27 Juni 2013 ini adalah merupakan kelanjutan dari RUPS Luar Biasa Kedua yang pada tanggal 23 Mei 2013 diskors/ditunda, sehingga untuk penyelenggaraan RUPS Luar Biasa ini Perseroan tidak menerbitkan Iklan Pemberitahuan.

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 27 JUNE 2013

A. Notifications, Announcements, Invitations and Delivery of Resolutions of Extraordinary GMS – 27 June 2013

The process of notification, announcement, invitation, and reporting of the resolutions of the Extraordinary GMS has been implemented in compliance with prevailing laws and regulations. Given that this Extraordinary GMS of 27 June 2013 was the continuation of the delayed/suspended Second Extraordinary GMS held on 23 Mei 2013, the convening of this Extraordinary GMS did not follow the placement of any Notification Ad.

Pemberitahuan Notification	Pengumuman (Iklan Pemberitahuan) Announcement	Pemanggilan (Iklan Panggilan) Summon	Pelaksanaan Implementation	Hasil Resolution Laporan ke Regulator Reporting to Regulator	Publikasi di 2 (dua) Surat Kabar Publications in 2 (two) newspaper
RUPS Luar Biasa 27 Juni 2013					
-	-	20-06-2013 Panggilan melalui "Harian Ekonomi Neraca" dan "Sinar Harapan". 20-06-2013 Summon were placed in daily newspapers "Harian Ekonomi Neraca" and "Sinar Harapan".	Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Kedua tanggal: 27 Juni 2013 Lokasi: Jakarta Pusat Implementation Second EGMS date: 27 June 2013 Location: Central Jakarta	28-06-2013 Hasil RUPS Luar Biasa Kedua dilaporkan kepada Bank Indonesia (Surat No.S.2013.402/Dir Compliance), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan IDX (Surat No.S.2013.403/ Dir Compliance) 28-06-2013 Resolution of the Second EGMS were reported to Bank Indonesia (Letter No.S.2013.402/ Dir Compliance), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan IDX (Letter No.S.2013.403/Dir Compliance)	28-06-2013 Hasil RUPS Luar Biasa Kedua disampaikan melalui "Bisnis Indonesia" dan "Investor Daily". 28-06-2013 The Second EGMS resolutions were published through daily newspapers "Bisnis Indonesia" and "Investor Daily".

B. Lokasi dan Kehadiran RUPS Luar Biasa – 27 Juni 2013

RUPS Luar Biasa dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013, waktu pukul 16.00 WIB, bertempat di Function Room, Gedung Sentral Senayan III, Lantai 28, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta 10270.

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh pemegang saham perseroan dan/atau kuasanya yang diwakili sejumlah 54.755.676.328 (lima puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan) saham atau sama dengan 97,29% (sembilan puluh tujuh koma dua puluh sembilan persen) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan perseroan sampai dengan tanggal 12 April 2013, yaitu total 56.281.990.760 (lima puluh enam milyar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh) saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran untuk penyelenggaraan RUPS Luar Biasa telah terpenuhi.

C. Agenda RUPS Luar Biasa - 27 Juni 2013

1. Pengeluaran Saham dalam Simpanan/Portepel dengan cara Penawaran Umum Terbatas vl (“PUT vl”) kepada para pemegang saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”);
2. Perubahan Anggaran Dasar Pasal 4 Ayat 2 sehubungan dengan Peningkatan Modal Disetor Perseroan terkait PUT vl.

B. Location and Attendance of Extraordinary GMS – 27 June 2013

Extraordinary GMS was held on Thursday, 27 June 2013, at 16.00 WIB (Western Indonesian Time), in Function Room, Sentral Senayan Building III, 28th Floor, Jalan Asia Afrika No. 8, Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta 10270.

This Extraordinary GMS was attended by the shareholders of the company and/or their proxies who represent 54,755,676,328 (fifty-four billion, seven hundred fifty-five million, six hundred and seventy-six thousand, three hundred and twenty-eight) of shares or equal to 97.29% (ninety-seven point twenty-nine percent) of the total shares with legitimate voting rights, which have been issued by the company up to 12 April 2013, totaling 56.281.990.760 (fifty-six billion, two hundred eighty-one million, nine hundred and ninety thousand, seven hundred and sixty) shares issued by the Company. Therefore the quorum requirement for the convening of the Extraordinary GMS had been fulfilled.

C. Agenda of Extraordinary GMS - 27 June 2013

1. Issuance of Unissued Shares/Shares in Portfolio by means of Limited Public Offering vl (“PUT vl”) to the shareholders with Pre-emptive Rights (“HMETD”);
2. The amendment of Article 4 Paragraph 2 of the Articles of Association in relation to the Increase of Paid-Up Capital regarding PUT vl.

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

D. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa - 27 Juni 2013 Agenda Pertama:

1. Menyetujui tindakan Perseroan untuk melakukan penambahan modal saham dengan cara menerbitkan saham baru Seri D dari portepel melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penawaran Umum Terbatas vl atau "PUT vl") sesuai dengan Peraturan Bapepam - LK Nomor : IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; dengan persyaratan dan jadwal pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Prospektus yang telah dibagikan yaitu sebagai berikut :

D. Resolutions of Extraordinary GMS - 27 June 2013 First Agenda:

1. Approved the actions of Company to increase the capital stock by issuing Series D from share portfolio through Pre-emptive Rights (Limited Public Offering vl or "PUT vl") mechanism in compliance with Bapepam - LK Regulation Number: IX.D.1 on Pre-emptive Rights; with the requirement and implementation schedule as mentioned in the already distributed Prospectus as follows:

Kegiatan Activity	Tanggal Date
- RUPSLB EGMS	27-Juni-2013 27-June-2013
- Pengumuman Jadwal HMETD di Bursa Announcement of Pre-emptive Rights Schedule at the Stock Exchange	28-Juni-2013 28-June-2013
- Perdagangan saham dengan HMETD (Cum-Right) Shares trading with Pre-emptive Rights (Cum-Right)	
- Pasar Reguler & Negosiasi Regular Market & Negotiation	04-Juli-2013 04-July-2013
- Pasar Tunai - Cash Market	09-Juli-2013 09-July-2013
- Perdagangan saham tanpa HMETD (Ex-Right) Shares trading without Pre-emptive Right (Ex-Right)	
- Pasar Reguler & Negosiasi Regular Market & Negotiation	05-Juli-2013 05-July-2013
- Pasar Tunai Cash Market	10-Juli-2013 10-July-2013
- Tanggal Pencatatan yang berhak HMETD (recording date) Recording Date of those entitled to Pre-emptive Rights (recording date)	09-Juli-2013 09-July-2013
- Distribusi HMETD Granting of Pre-emptive Rights	10-Juli-2013 10-July-2013
- Pencatatan di BEI Registration with IDX	11-Juli-2013 11-July-2013 11-July-2013 to 17-July-2013
- Periode Perdagangan HMETD Trade Period of Pre-emptive Rights	11-Juli-2013 s/d 17-Juli-2013 11-July-2013 to 17-July-2013
- Periode Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD Period of Registration, Payment and Implementation of Pre-emptive Rights	11-Juli-2013 s/d 17-Juli-2013 15-July-2013 to 19-July-2013
- Periode penyerahan saham hasil pelaksanaan HMETD Period of shares delivery resulting from the implementation of Pre-emptive Rights	15-Juli-2013 s/d 19-Juli-2013
- Akhir pembayaran pemesanan saham tambahan Final payment for additional subscription	19-Juli-2013 19-July-2013
- Penjatahan Allotment	22-Juli-2013 22-July-2013
- Pengembalian Kelebihan Uang Pesanan (Refund) Refund of Excess Money of Money Order (Refund)	24-Juli-2013 24-July-2013

2. Menyetujui tindakan Perseroan untuk mengeluarkan saham baru Seri D bernilai nominal Rp. 22,5 (dua puluh dua koma lima rupiah) per saham dengan jumlah total saham yang dikeluarkan sebesar 4.690.165.897 (empat miliar enam ratus sembilan puluh juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp. 320,- (tiga ratus dua puluh rupiah) per saham sebagai pelaksanaan dari PUT VI;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi untuk menyatakan realisasi jumlah saham Seri D yang telah dikeluarkan melalui PUT VI.

Agenda Kedua:

1. Menyetujui tindakan Perseroan untuk mengubah isi Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan dengan cara pengeluaran saham baru Seri D melalui PUT VI;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam akta tersendiri di hadapan notaris terkait dengan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan sebagai realisasi dari jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PUT VI, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

2. Approved the actions of the Company to issue new Series D with a par value of Rp. 22.50 (twenty two point five Rupiah) per share with total shares being issued amounting to 4,690,165,897 (four billion six hundred and ninety million, one hundred sixty-five thousand, eight hundred and ninety-seven) shares at Offering Price of Rp. 320,- (three hundred twenty Rupiah) per share as an implementation of PUT VI;
3. Granted authorization to the Board of Commissioners with substitution rights to state realization of Series D total shares issued through PUT VI.

Second Agenda:

1. Approved the actions of the Company to amend the content of Article 4 paragraph 2 of Company's Articles of Association in relation to the increase of Issued and Paid-Up Capital of the Company through the issuance of Series D through PUT VI;
2. Granted authorization to the Board of Commissioners and/or Board of Directors with substitution rights to implement all necessary actions related to such decisions, including but not limited to statement in a separate deed before the notary related to the increase of Issued and Paid-Up Capital by the Company as a realization of total shares issued in PUT VI, to make or request to have deeds, letters, or necessary documents made, present before the relevant parties/ authorities, including notary, file a petition to the relevant parties/authorities to gain approval or to report such matters to the relevant parties/authorities as well as to register it in Company's Register as it is referred to in prevailing regulations.

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

A. Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan Penyampaian Hasil RUPS Luar Biasa 11 November 2013

Proses pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan dan pelaporan hasil RUPS Luar Biasa telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

A. Notifications, Announcements, Invitations and Delivery of Resolutions of Extraordinary GMS 11 November 2013

The process of notification, announcement, invitation and reporting of resolution of Extraordinary GMS implemented in compliance with prevailing laws and regulations.

Pemberitahuan Notification	Pengumuman (Iklan Pemberitahuan) Announcement	Pemanggilan (Iklan Panggilan) Summon	Pelaksanaan Implementation	Hasil Resolution	
				Laporan ke Regulator Reporting to Regulator	Publikasi di 2 (dua) Surat Kabar Publications in 2 (two) newspaper
RUPS Luar Biasa 11 November 2013					
30-09-2013 Surat Pemberitahuan kepada Bank Indonesia (Surat No.S.2013.568/Dir Compliance), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan IDX (Surat No.S.2013.569/Dir Compliance).	10-10-2013 Pemberitahuan melalui "Media Indonesia" dan "Harian Ekonomi Neraca". 10-10-2013 Announcement on daily newspapers "Media Indonesia" and "Harian Ekonomi Neraca".	25-10-2013 Panggilan melalui "Media Indonesia" dan "Harian Ekonomi Neraca". 25-10-2013 Summon were placed in daily newspapers "Media Indonesia" dan "Harian Ekonomi Neraca".	Pelaksanaan RUPS Luar Biasa tanggal: 11 November 2013 Lokasi: Jakarta Pusat Implementation EGMS date: 11 November 2013 Location: Central Jakarta	13-11-2013 Hasil RUPS Luar Biasa dilaporkan kepada Bank Indonesia (Surat No.S.2013.651/Dir Compliance), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan IDX (Surat No.S.2013.652)	13-11-2013 Hasil RUPS Luar Biasa disampaikan melalui "Media Indonesia" dan "Harian Ekonomi Neraca". 13-11-2013 The EGMS resolutions were published through daily newspapers "Media Indonesia" dan "Harian Ekonomi Neraca".
30-09-2013 Notification Letter to Bank Indonesia (Letter No. S.2013.568/Dir Compliance), The Financial Services Authority (OJK) and IDX. (Letter No.S.2013.569/Dir Compliance).				13-11-2013 Resolutions of the EGMS were reported to Bank Indonesia (Letter No.S.2013.651/Dir Compliance), The Financial Services Authority (OJK) and IDX. (Letter No.S.2013.652/Dir Compliance).	

B. Lokasi dan Kehadiran RUPS Luar Biasa - 11 November 2013

RUPS Luar Biasa dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 11 November 2013, waktu pukul 14.00 - 16.00 WIB, bertempat di Function Room, Gedung Sentral Senayan III, Lantai 28, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta 10270.

B. Location and Attendance of Extraordinary GMS - 11 November 2013

Extraordinary GMS was held on Monday, 11 November 2013, at 14.00 to 16.00 WIB, in Function Room, Sentral Senayan Building III, Floor 28, Jalan Asia Afrika No. 8, Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta 10270.

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh pemegang saham perseroan dan/atau kuasanya yang diwakili sejumlah 53.831.239.881 (lima puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu) saham atau sama dengan 88,29% (delapan puluh delapan koma dua puluh sembilan persen) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan perseroan sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013, yaitu total 60.972.156.657 (enam puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta seratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran untuk penyelenggaraan RUPS Luar Biasa telah terpenuhi.

C. Agenda RUPS Luar Biasa - 11 November 2013

Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

D. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa - 11 November 2013

1. Menerima dan mengesahkan pengunduran diri Dato' Sri Abdul Wahid Bin Omar selaku Komisaris Perseroan efektif sejak 29 Agustus 2013.
2. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Dato' Khairussaleh Bin Ramli selaku Presiden Direktur Perseroan, dan Rita Mirasari selaku Direktur Kepatuhan merangkap Sekretaris Perusahaan efektif sejak tanggal 11 November 2013.
3. Menyetujui pelepasan jabatan Taswin Zakaria sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, untuk selanjutnya diangkat menjadi Presiden Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada Tahun 2015.

Extraordinary GMS was attended by the shareholders of the company and or their proxies who represent 53,831,239,881 (fifty-three billion, eight hundred thirty-one million, two hundred thirty-nine thousand, eight hundred and eighty-one) shares or equal to 88.29% (eighty eight point twenty-nine percent) of the total shares with legitimate voting rights, which have been issued by the company up to 24 October 2013, totaling 60,972,156,657 (sixty billion, nine hundred and seventy-two million, one hundred and fifty-six thousand, six hundred and fifty-seven) shares issued by the Company. Therefore the quorum requirement for the convening of the Extraordinary GMS had been fulfilled.

C. Agenda of Extraordinary GMS - 11 November 2013

The changes of composition of Company's Board of Commissioners and Board of Directors.

D. Results of Resolutions of Extraordinary GMS - 11 November 2013

1. Received and ratified the resignation of Dato' Sri Abdul Wahid Bin Omar as Company's Commissioner effective as of 29 August 2013.
2. Accepted and approved the resignation of Dato' Khairussaleh Bin Ramli as Company's President Director, and Rita Mirasari, who served concurrently as Compliance Director and Corporate Secretary, effective as of 11 November 2013.
3. Agreed to release the position of Taswin Zakaria as member of Company's Board of Commissioners, hereinafter appointed as Company's President Director commencing as of the closing of this Meeting until the remaining term of office of other members of Board of Directors who are still in office, namely until the closing of Annual General Meeting of Shareholders in Year 2015.

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

4. Menyetujui untuk mengangkat Datuk Abdul Farid Bin Alias sebagai anggota Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada Tahun 2015.

5. Menetapkan bahwa sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

1. Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor sebagai Presiden Komisaris
2. Datuk Abdul Farid Bin Alias sebagai Komisaris
3. Spencer Lee Tien Chye sebagai Komisaris
4. Umar Juoro sebagai Komisaris Independen
5. Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen
6. Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen

Direksi

1. Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur
2. Ghazali bin Mohd Rasad sebagai Direktur
3. Thilagavathy Nadason sebagai Direktur
4. Rahardja Alimhamzah sebagai Direktur
5. Jenny Wiriyanto sebagai Direktur
6. Hedy Maria Helena Lopian sebagai Direktur
7. Ani Pangestu sebagai Direktur dan Pejabat Sementara Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan merangkap Sekretaris Perusahaan
8. Lani Darmawan sebagai Direktur.

Dengan ketentuan bahwa pengangkatan Achjar Iljas dan Datuk Abdul Farid Bin Alias, keduanya selaku anggota Dewan

4. Agreed to appoint Datuk Abdul Farid Bin Alias as a member of Company's Board of Commissioners effective as of the closing of this meeting until the remaining term of office of members of other Board of Commissioners who are still in office, namely, until the closing of Annual General Meeting of Shareholders in Year 2015.

5. Specified that as of the closing of the meeting, the composition of Company's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

Board of Commissioners

1. Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor as President Commissioner
2. Datuk Abdul Farid Bin Alias as Commissioner
3. Spencer Lee Tien Chye as Commissioner
4. Umar Juoro as Independent Commissioner
5. Budhi Dyah Sitawati as Independent Commissioner
6. Achjar Iljas as Independent Commissioner

Board of Directors

1. Taswin Zakaria as President Director
2. Ghazali bin Mohd Rasad as Director
3. Thilagavathy Nadason as Director
4. Rahardja Alimhamzah as Director
5. Jenny Wiriyanto as Director
6. Hedy Maria Helena Lopian as Director
7. Ani Pangestu as Director and Interim Director in charge of Compliance function with concurrent position as Corporate Secretary
8. Lani Darmawan as Director.

On condition that the appointment of Achjar Iljas and Datuk Abdul Farid Bin Alias, both as members of Company's

Komisaris Perseroan, dan Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur Perseroan akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku bagi mereka adalah sesuai dengan keputusan dari Bank Indonesia.

Dengan diangkatnya Presiden Direktur baru Perseroan, maka tugas Thilagavathy Nadason sebagai Pejabat Sementara Presiden Direktur akan berakhir sejak Bank Indonesia menyetujui pengangkatan Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur Perseroan; dan selanjutnya Thilagavathy Nadason akan kembali menjalankan tugas sebagai Direktur Perseroan.

Adapun penugasan sementara Ani Pangestu sebagai Pejabat Sementara Direktur Kepatuhan merangkap Sekretaris Perusahaan akan berakhir sejak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui pengangkatan Direktur Kepatuhan yang baru dan pengangkatan tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia, serta Perseroan menunjuk Sekretaris Perusahaan yang baru. Selanjutnya Ani Pangestu akan kembali menjalankan tugas sebagai Direktur yang membawahkan Human Capital.

6. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris (bilamana perlu), memberitahukan atau mendaftarkan ke instansi yang berwenang sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dimaksud, dan mengadakan penegasan bilamana diperlukan; dari dan oleh karenanya berhak untuk mengajukan permohonan, menandatangani segala surat-surat dan dokumen yang diperlukan, serta melakukan tindakan lainnya.

Board of Commissioners, and Taswin Zakaria as President Director of the Company shall be effective upon approval from Bank Indonesia. Thus the appointment valid for the holders of the positions is the appointment in accordance with the decision of Bank Indonesia.

With the appointment of a new President Director of the Company, the tenure of Thilagavathy Nadason as Interim President Director shall end as of the approval of Bank Indonesia towards the appointment of Taswin Zakaria as Company's President Director; and therefore Thilagavathy Nadason shall return to performing the duty of Company Director.

Temporary assignment of Ani Pangestu as Interim Compliance Director as well as Company's Secretary shall end as of the approval of Company's General Meeting of Shareholders to appoint new Compliance Director and upon the approval of such by Bank Indonesia, and upon the Company's appointment of a new Corporate Secretary. Thereinafter, Ani Pangestu shall resume the duty as Director in charge of Human Capital.

6. Granted authorization to the Company's Board of Directors with substitution rights to declare in a separate deed before the Notary (if necessary), notify or register to the relevant agency in relation to the changes in the composition of such Board of Directors and Board of Commissioners, and reaffirm if necessary; of and therefore are eligible to file a petition, sign all the necessary documents, and complete other actions.

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab itu, Dewan Komisaris wajib bertindak secara independen.

Dewan Komisaris beranggotakan para profesional yang berpengalaman dalam industri perbankan. Dewan Komisaris berkomitmen untuk melaksanakan praktik GCG yang baik dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip etika dan moral secara bersungguh-sungguh.

Dewan Komisaris memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan Anggaran Dasar yang merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan Bank Indonesia, ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), serta Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris. Dalam hal-hal tertentu Dewan Komisaris dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Direksi.

A. Jumlah, Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris

Peraturan Bank Indonesia mengenai Good Corporate Governance menyatakan bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari tiga orang dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi. Paling kurang satu orang anggota Dewan Komisaris harus berdomisili di Indonesia dan paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Selain itu sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Tenaga Kerja Asing, 50% atau lebih dari anggota Dewan Komisaris harus Warga Negara Indonesia.

BII telah memenuhi semua peraturan Bank Indonesia tersebut dimana jumlah Dewan Komisaris lebih dari 3 (tiga) orang dan tidak melebihi jumlah Direksi serta Dewan Komisaris BII dipimpin oleh Presiden Komisaris. Ada 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia dan 3 (tiga)

The Board of Commissioners (BOC) is the Company organ that is responsible to supervise and provide advice related to the duties and responsibilities of the Board of Directors. In fulfilling its duties and responsibilities, the BOC shall act independently.

BOC consists of experienced professionals in the banking industry. BOC is committed to implement good and transparent GCG practices as well as ethical and moral principles.

BOC has clear authority and responsibility in accordance to the Articles of Association which refers to Limited Liabilities Company Law, the regulations of Bank Indonesia, regulations of Financial Services Authority, the provisions of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK), as well as the Guidelines of the BOC. In certain cases the BOC may delegate authority to the Board of Directors.

A. Number, Composition & Criteria of the Board of Commissioners

Bank Indonesia's regulation on Good Corporate Governance states that the BOC should consist of at least three persons and should be no more than the number of the Board of Directors. At least one member of the Board of Commissioners must reside in Indonesia and at least 50% of the Board of Commissioners must be Independent Commissioners. Additionally, in accordance with Bank Indonesia Regulation on Foreign Workers, 50% or more of the members of the Board of Commissioners must be Indonesian citizens.

BII has complied with all Bank Indonesia's regulations, whereby more than three (3) persons assume the position of the BOC, not exceeding the number of Board of Directors, and with a President Commissioners as Chairman of BII Board of Commissioners. There are 3 (three) members

orang merupakan Komisaris Independen, serta 50% anggota Dewan Komisaris yang merupakan Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 22 April 2013 telah disahkan pengakhiran masa bakti Putu Antara sebagai Komisaris Independen Perseroan efektif sejak ditutupnya RUPS Tahunan tanggal 22 April 2013. Perseroan menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas pemikiran, kerja keras serta jasa yang telah diberikan untuk kemajuan perseroan.

Per 31 Desember 2013, anggota Dewan Komisaris BII berjumlah 6 (enam) orang, termasuk Presiden Komisaris. Adapun susunan Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan RUPS tanggal 11 November 2013 adalah sebagai berikut:

	Jabatan	Nama / Name	Position
1	Presiden Komisaris	Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor *)	President Commissioner
2	Komisaris	Datuk Abdul Farid bin Alias *) ***)	Commissioner
3	Komisaris	Spencer Lee Tien Chye *)	Commissioner
4	Komisaris Independen	Umar Juoro **)	Independent Commissioner
5	Komisaris Independen	Budhi Dyah Sitawati **)	Independent Commissioner
6	Komisaris Independen	Achjar Iljas **)	Independent Commissioner

Keterangan / Note

- *) Anggota Dewan Komisaris yang merupakan tenaga kerja asing, kewarganegaraan Malaysia dan tidak berdomisili di Indonesia.
Member of the Board of Commissioners, foreign worker, Malaysian Citizen and not domiciled in Indonesia.
- ***) Anggota Dewan Komisaris kewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
Member of the Board of Commissioners, Indonesian Citizen and domiciled in Indonesia.
- **) Efektif sebagai anggota Dewan Komisaris setelah menerima persetujuan dari otoritas yang berwenang.
Effective as member of the Board of commissioners after obtaining approval from the governing authority.

Berdasarkan RUPS tanggal 11 November 2013 telah diterima dan disahkan pengunduran diri Dato' Sri Abdul Wahid Bin Omar selaku Komisaris Perseroan efektif sejak 29 Agustus 2013. Selain itu dalam RUPS tersebut juga telah disetujui untuk pelepasan jabatan Taswin Zakaria sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan (Komisaris Independen) untuk selanjutnya diangkat mejadi Presiden Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2015.

of the BOC residing in Indonesia and 3 (three) Independent Commissioners, and 50% of the members of the Board of Commissioners are of Indonesian nationality.

The Extraordinary GMS on 22 April 2013 has approved the termination of Putu Antara's term of office as Independent Commissioner of the Company, effective from the closing of the AGMS on 22 April 2013. The company expressed appreciation and gratitude for his thoughts, hard work and service for the Company.

As of 31 December 2013, BOC of BII has 6 (six) members, including the President Commissioner. The composition of the Board of Commissioners based on the resolution of the GMS on 11 November 2013 is as follows:

Based on the GMS on 11 November 2013 the resignation of Dato 'Sri Abdul Wahid bin Omar as a Commissioner of the Company has been accepted and approved effective as of August 29, 2013. Additionally, the GMS also approved the release of Taswin Zakaria from the Company's Board of Commissioners (Independent Commissioner) to be appointed as the President Director of the Company effective from the time the Meeting closed until the end of the other Directors' term of office, which is until the closing of the Company's AGMS in 2015.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Penggantian dan/atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Anggota Dewan Komisaris telah melalui proses seleksi Fit and Proper Test Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah memenuhi kriteria yaitu memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

Khusus untuk Datuk Abdul Farid bin Alias akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Sementara itu persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas pengangkatan Achjar Iljas telah diterima melalui surat OJK No.SR-13/D.03/2014 tanggal 18 Februari 2014 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) atas Pengangkatan Komisaris Independen PT BII Tbk. dengan persyaratan relevan yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Komite Perbankan Syariah (KPS).

Sehubungan dengan persetujuan OJK tersebut, Achjar Iljas telah melakukan pengunduran diri dari KPS dan bukti pengunduran diri Achjar Iljas dari keanggotaannya pada KPS telah disampaikan kepada Departemen Perbankan Syariah-OJK pada tanggal 20 Februari 2014.

Keterangan anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing adalah sebagai berikut:

Replacement and/or the appointment of the Commissioners have considered the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.

Members of the Board of Commissioners have gone through Fit and Proper Test of Bank Indonesia and/or the Financial Services Authority as stipulated by the applied regulations and have all met the criteria of integrity, competence and adequate financial reputation.

Exclusively for Datuk Abdul Farid bin Alias, the appointment will be effective upon approval of the Financial Services Authority. The approval from Financial Services Authority (OJK) has been granted for the appointment of Achjar Iljas with OJK letter No.SR-13/D.03/2014 dated February 18, 2014 regarding the Fit and Proper Test for the appointment of an Independent Commissioner of PT BII Tbk. which requires the related individual to resign from the Sharia Banking Committee (KPS).

With OJK's approval, Achjar Iljas has resigned from the KPS and his confirmation of resignation has been submitted to the OJK's Sharia Banking Department on February 20, 2014.

Details regarding foreign members of the Board of Commissioners are as follows:

No	Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	KITAS		IMTA		Jabatan Position
			Ijin Kerja Licence	Masa Berlaku validity	Ijin Kerja Licence	Masa Berlaku validity	
	Dewan Komisaris						
1	Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor	Malaysia	Tidak dipersyaratkan untuk memiliki KITAS karena tidak berdomisili di Indonesia		KEP.16649/ MEN/P/ IMTA/2013	13 July 2014	Presiden Komisaris President Commissioner
2	Datuk Abdul Farid bin Alias *)	Malaysia	A KITAS is not required since these individuals do not reside in Indonesia		KEP.08665/ MEN/B/ IMTA/2014	27 Feb 2015	Komisaris Commissioner
3	Spencer Lee Tien Chye	Malaysia			KEP.16650/ MEN/P/ IMTA/2012	19 August 2014	Komisaris Commissioner

Keterangan | Note :

*) Efektif sebagai anggota Dewan Komisaris setelah menerima persetujuan dari otoritas yang berwenang.

*) Effective as member of the Board of Commissioners after obtaining approval from the competent authority.

B. Independensi dan Transparansi Dewan Komisaris

Independensi dan aspek Transparansi Dewan Komisaris sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan pribadi dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi serta pemegang saham pengendali Bank.

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau dengan pemegang saham pengendali atau hubungan lainnya dengan BII, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak independen.

Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

B. Independency and Transparency of The Board of Commissioners

Independency and transparency aspects of the BOC as set in the Personal Statement of all members of the Board of Commissioners.

None of the members of the BOC has any family relationship up to the second degree with the other members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors and the controlling shareholder of the Bank.

Independent Commissioner are members of the BOC who do not have any financial, organizational, share ownership and/or family relationships with other members of the BOC, the Board of Directors and/or the controlling shareholders or other relationship with BII, which may affect their ability to act independently.

Members of the BOC shall not be allowed to take advantage of the Bank for personal, family, and/or other parties that may harm or reduce the bank's profits.

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.

Members of the BOC shall not take and/or receive personal gain from the Bank other than the remuneration and other facilities set General Meeting of Shareholders.

Transparansi Hubungan Keluarga & Hubungan Keuangan

Family Relationship & Financial Relationship Transparency

No	Nama Name	Hubungan Keluarga Dengan Family Relationship with				Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship with							
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
1	Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
2	Datuk Abdul Farid bin Alias *)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
3	Spencer Lee Tien Chye	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
4	Umar Juoro	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
5	Budhi Dyah Sitawati	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
6	Achjar Iljas	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Keterangan *) Efektif sebagai anggota Dewan Komisaris setelah menerima persetujuan dari otoritas yang berwenang.

Note *) Effective as member of the Board of commissioners after obtaining approval from the governing authority.

Transparansi Kepemilikan Saham

Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan saham jika mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor baik pada BII, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan perusahaan lainnya, yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. Pengungkapan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Shareholding Transparency

Members of BOC shall disclose their share ownership if reaching 5% (five percent) or more, either at the BII, other Banks, Non Bank Financial Institutions, and other companies, domestic or overseas. Disclosure can be seen in the table below :

No	Nama Name	Perusahaan Lainnya Other Company	Bank Lain Other Bank	Lembaga Keuangan Bukan Bank Non-Bank Financial Company	%
Dewan Komisaris Board of Commissioners					
1	Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None	
2	Datuk Abdul Farid bin Alias *)	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None	
3	Spencer Lee Tien Chye	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None	
4	Umar Juoro	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None	
5	Budhi Dyah Sitawati	PT Lintas Jeram Nusantara, Jakarta	Tidak ada None	Tidak ada None	25%
		PT Bangkit Maju Wisata, Purwokerto			55%

No	Nama Name	Perusahaan Lainnya Other Company	Bank Lain Other Bank	Lembaga Keuangan Bukan Bank Non-Bank Financial Company	%
Dewan Komisaris Board of Commissioners					
		PT Apsara Selaras Investa, Jakarta			25%
		PT Bravo Outdoor Supplies & Services, Jakarta			25%
6	Achjar Iljas	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None	

Keterangan | Note : *) Efektif sebagai anggota Dewan Komisaris setelah menerima persetujuan dari otoritas yang berwenang

*) Effective as member of the Board of Commissioners after obtaining approval from the related authority.

Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam Surat Pernyataan Dewan Komisaris per 31 Desember 2013, maka kepemilikan saham Budhi Dyah Sitawati pada PT Bangkit Maju Wisata sedang dalam proses dialihkan sehingga kepemilikan saham pada perusahaan tersebut nantinya hanya sebesar 25%. Budhi Dyah Sitawati juga menginformasikan bahwa yang bersangkutan mendirikan 2 (dua) perusahaan di akhir 2013 namun belum beroperasi dan akan menginformasikan kelanjutan pendirian perusahaan tersebut pada akhir 2014 nanti.

Transparansi Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Antara Perusahaan Dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi

Dewan Komisaris tidak menjadi pengurus pada Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

No	Nama Name	Bank	WOM	BIIF
1	Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor	PK	-	-
2	Datuk Abdul Farid bin Alias *)	K	-	-
3	Spencer Lee Tien Chye	K	-	-
4	Umar Juoro	KI	-	-
5	Budhi Dyah Sitawati	KI	-	-
6	Achjar Iljas	KI	-	-

Keterangan | Note

*) : Efektif sebagai anggota Dewan Komisaris setelah menerima persetujuan dari otoritas yang berwenang.

PK : Presiden Komisaris

KI : Komisaris Independen

K : Komisaris

WOM : PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

BIIF : PT BII Finance Center

Keterangan | Note

*) : Effective as member of the Board of Commissioners after obtaining approval from the related authority.

PK : President Commissioner

KI : Independent Commissioner

K : Commissioner

WOM : PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

BIIF : PT BII Finance Center

Based on the information submitted in the Statement of the BOC on December 31, 2013, the share ownership of Budhi Dyah Sitawati in PT Bangkit Maju Wisata is in the process of being transferred so that her share in the company will only be 25%. Budhi Dyah Sitawati also informed the Bank that she has established two (2) companies in late 2013 which have not yet started operations and that she will inform the Bank of progress of the company's establishment by the end of 2014.

Relationship and Supervision Transparency Between The Company and Subsidiaries and its Affiliated Companies

None of the members of Board of Commissioners is in charge of management in the Subsidiary and Affiliated Companies as listed in the table below:

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

C. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan, atau anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Perusahaan.

Namun, rangkap jabatan diperbolehkan apabila anggota Dewan Komisaris non-independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki jabatan rangkap pada anak perusahaan.

Tidak ada anggota Dewan Komisaris yang memiliki rangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan Bank Indonesia tentang pelaksanaan Good Corporate Governance. Adapun anggota Dewan Komisaris yang memiliki rangkap jabatan lain yang bukan termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam PBI GCG adalah sebagai berikut:

C. Concurrent Position of the Board of Commissioners

Members of the BOC may only assume concurrent positions as members of the BOC, Board of Directors, or the Executive Officer at 1 (one) non-financial institution/company, or a member of the BOC, Board of Directors or Executive Officers who carry out the oversight function at 1 (one) non-bank subsidiary company that is under the Company.

Nevertheless, concurrent positions are only allowed for non-independent members of BOC that perform his/her functional duties of the shareholder of a legal entity within its business group; and/or any members of the BOC which holds a position at a nonprofit organizations or institutions, so long as he/she does not neglect the duties and responsibilities as a member of the BOC.

None of the BOC members has a concurrent position at the subsidiaries.

None of the BOC members has a concurrent position that is prohibited by the Bank Indonesia regulation regarding the implementation of Good Corporate Governance. Members of the Board of Commissioners that have concurrent positions that are not included in concurrent positions prohibited by the BI regulation on GCG are as follows:

No	Nama Name	Jabatan Position	Organization/Institution Jabatan di Perusahaan/ Organisasi/Lembaga Lain Position at Other Companies/	Perusahaan/Organisasi/Lembaga Lain Company/Organization/Other Institution
1	Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor	Presiden Komisaris President Commissioner	Chairman	Malayan Banking Berhad, Malaysia
			Chairman	Maybank Investment Bank Berhad, Malaysia
			Chairman	PADU Corporation, Malaysia
			Director	ICLIF Leadership and Governance Center, Malaysia
2	Datuk Abdul Farid bin Alias	Komisaris *) ICommissioner	Executive Director/ Group President & CEO	Malayan Banking Berhad
			Director	Maybank Investment Bank Berhad
			Director	Maybank Ageas Holdings Berhad

No	Nama Name	Jabatan Position	Organization/Institution Jabatan di Perusahaan/ Organisasi/Lembaga Lain Position at Other Companies/	Perusahaan/Organisasi/Lembaga Lain Company/Organization/Other Institution
			Director	Cagamas Holdings Berhad
			Chairman	Malaysian Electronic Payment System Sdn Bhd (MEPS)
			Chairman	ASEAN Inter-Regional Relations, ASEAN Banking Council (ABC)
			Chairman	The Association of Banks in Malaysia
			Member	Asian Banker Association (ABA) Policy Advocacy Committee
			Member	Malaysia-Pakistan Business Council
			Member	Malaysia-Thailand Business Council
			Member	Visa Senior Client Council Program
			Member	Investment Panel of Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadanan) (KWAP)
			Vice Chairman	Institut Bank-Bank Malaysia
3	Spencer Lee Tien Chye	Komisaris I Commissioner	Non-Executive	Maybank (Cambodia) Plc.
			Non-Executive Director	Boardroom Limited, Singapore
			Trustee	Maybank Foundation
4	Umar Juoro	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua	Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI)
			Anggota	Komite Ekonomi Nasional (KEN)
			Senior Fellow	The Habibie Center
5	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen Independent Commissioner	Technical Adviser	PT Prima Wahana Caraka (PwC - Tax, Indonesia)
6	Achjar Iljas	Komisaris Independen Independent Commissioner	Anggota	Komite Perbankan Syariah (KPS)**)
			Penasihat	MEK – PP Muhammadiyah
			Penasihat	IAEI
			Penasihat	Asbisindo

Keterangan | Note

*) : Efektif setelah menerima persetujuan dari otoritas yang berwenang.

**) : Per tanggal 20 Februari 2014, Achjar Iljas telah melakukan pengunduran diri dari KPS dan bukti pengunduran diri dari keanggotaannya pada KPS telah disampaikan kepada Departemen Perbankan Syariah-OJK.

*) : Effective after obtaining approval from the related authority.

**) : As per 20 February 2014, Achjar Iljas has resigned from KPS and his confirmation of resignation has been submitted to the OJK's Department of Sharia Banking.

D. Pengangkatan dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS.

D. Appointment and Term of Office the Board of Commissioners

Replacement and/or appointment of members of BOC have considered recommendations of the Remuneration and Nomination Committee as well as approval by the GMS.

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

No	Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Persetujuan Approval Date		Masa Ja- batan s/d Tenure until
			GMS RUPS	Bank Indonesia	
1	Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor	President Commissioner Presiden Komisaris	28 Januari 2010 28 January 2010	1 April 2010	RUPST 2015 AGMS 2015
2	Datuk Abdul Farid bin Alias *)	Komisaris Commissioner	11 November 2013 11 November 2013	Masih menunggu persetujuan dari otoritas yang berwenang *) Still waiting approval from the related authority*)	RUPST 2015 AGMS 2015
3	Spencer Lee Tien Chye	Komisaris Commissioner	01 Desember 2008 01 December 2008	20 Februari 2009 20 February 2009	RUPST 2015 AGMS 2015
4	Umar Juoro	Komisaris Independen Independent Commissioner	05 September 2002 05 September 2002	07 November 2002 07 November 2002	RUPST 2015 AGMS 2015
5	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen Independent Commissioner	27 Agustus 2010 27 Augustus 2010	01 April 2011 01 April 2011	RUPST 2015 AGMS 2015
6	Achjar Iljas	Komisaris Independen Independent Commissioner	22 April 2013 22 April 2013	18 Februari 2014 18 February 2014	RUPST 2015 AGMS 2015

Keterangan | Note

*) : Efektif setelah menerima persetujuan dari otoritas yang berwenang.

*) : Effective after obtaining approval from the related authority.

E. Kewenangan Dewan Komisaris

Dewan komisaris memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan antara lain sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris berwenang untuk memberikan persetujuan baik melalui rapat maupun secara tertulis terhadap tindakan-tindakan yang akan dilakukan Direksi dalam hal sebagai berikut:
 - a. Untuk membeli atau dengan cara lainnya memperoleh/mendapatkan barang-barang tidak bergerak (hak-hak atas tanah dan/atau bangunan) dan/atau perusahaan, yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang.
 - b. Untuk menjual atau dengan cara lain memindahkan hak barang-barang tidak bergerak (hak-hak atas tanah dan/atau bangunan) dan/atau perusahaan, tidak termasuk penjualan eks agunan dalam rangka penyelamatan piutang.
 - c. Untuk membebani hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan/mengagunkan kekayaan milik Bank.
 - d. Mengambil bagian atau ikut serta atau melepaskan baik sebagian

E. Authority of the Board of Commissioners

BOC has the authority as governed in the Articles of Association of the Company, including the following:

1. BOC has the authority to grant approval through BOC meeting or written approval to actions which will be carried out by the Board of Directors:
 - a. To purchase or in other manner, to obtain immovable goods (rights over land and/or buildings) and/or company(ies), which are not for the purpose of asset restructuring.
 - b. To sell or, in other manner, to transfer rights of immovable goods (rights over land and/or buildings) and/or company(ies), which are not for the purpose of asset restructuring.
 - c. To put lien/mortgage over land (security rights), to pledge or by other manner to put lien/mortgage assets of the Company as collateral.
 - d. To subscribe or to participate or to relinquish either a part or the

- atau seluruhnya dalam perseroan atau badan-badan lain atau menyelenggarakan perusahaan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang. sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Untuk meminjam uang atau menerima fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lainnya yang bukan merupakan kegiatan usaha sehari-hari Bank dalam jumlah yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Rapat Dewan Komisaris. kecuali ketentuan perundang-undangan menentukan adanya persetujuan Dewan Komisaris.
 - f. Untuk melakukan Transaksi valuta Asing (Foreign Exchange) dan derivative yang berbentuk suku bunga atau valuta asing dengan Bank-Bank baik di dalam maupun di luar negeri, dimana Bank harus menandatangani perjanjian seperti ISDA (International Swap Dealers Association), ICOM (International Currency Options Market) atau perjanjian lain yang setara.
 - g. Untuk meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang bukan merupakan kegiatan usaha Bank dalam jumlah yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Rapat Dewan Komisaris, kecuali ketentuan perundang-undangan menentukan adanya persetujuan Dewan Komisaris.
 - h. Mengeluarkan surat jaminan bank atau dengan cara lain menjadi penjamin (borg) atau avalis untuk menjamin pembayaran hutang atau kewajiban keuangan orang/pihak Lain.
 1. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam jangka waktu terbatas.
 2. Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau perundang-
- entire shares of a company or other bodies/agencies or incorporate new companies which are not within the framework of asset restructuring, in accordance with prevailing laws and regulations.
- e. To borrow money or to receive credit facilities or other banking facilities which are not the Bank's daily activities in the amount as determined from time to time by the BOC Meeting, unless applicable laws require them to do so.
 - f. To conduct Foreign Exchange Transactions and derivatives in the form of interest rate or foreign exchange again with Banks both onshore and offshore, where Bank have to sign agreements, such as ISDA (International Swap Dealers Association), ICOM (International Currency Options Market) or other similar contracts.
 - g. To lend money or to provide loan/ credit facilities or other banking facilities which is not bank's daily activities in the amount as determined from time to time by BOC Meeting, unless the applicable laws require to do so.
 - h. To issue letter of guarantee or by other means/manner to be a guarantor or avalist to guarantee debt payment or other persons/ parties financial obligation.
 1. In carrying out its duties, BOC is entitled to obtain expert assistance for a limited period of time.
 2. Based on BOC meeting decision, BOC has the right to temporarily discharge a member of the Board of Directors should one or more of the Directors act contrary to the Articles of Association and/or the prevailing laws and regulations. This

undangan yang berlaku. Pemberhentian sementara harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya untuk selanjutnya, dalam jangka waktu 45 hari kalender atau jangka waktu lainnya setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris karena anggota lainnya berhalangan, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris lainnya dalam Anggaran Dasar berlaku pula baginya.
4. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama sekali, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perusahaan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.
5. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

F. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala, melalui pemberian arahan, nasihat maupun meminta pertanggungjawaban Direksi dalam setiap keputusan yang diambil. Pengawasan tersebut dilaksanakan antara lain melalui rapat berkala Dewan Komisaris dengan Direksi atau melalui laporan-laporan yang disampaikan secara khusus oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Komite Audit, Komite Pemantau

temporary discharge should be notified to the relevant director along with the reason(s) for the discharge within a period of 45 (forty five) calendar days or other period stipulated by the prevailing laws.

3. In the event only one member of BOC is in place due to the unavailability of other members, he/she shall also perform all the duties and authorities of the President Commissioner or other member of BOC as described in the Company's Articles of Association.
4. In the event of temporary discharge, or unavailability of all members of the Board of Directors due to any causes, BOC shall temporarily manage the Company. In such a situation, BOC will have the right to conduct temporary delegation of authority to one or more of its members at their joint accountability.
5. In the event only one Commissioner is in place, all duties and authorities granted to the President Commissioner or member of BOC as stipulated in the Articles of Association shall be delegated to him/her.

F. Duties and Responsibilities of The Board of Commissioners

1. BOC is responsible for the implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors on a regular basis, through the provision of directives, advice or requesting Directors accountability for each decision made. Supervision is carried out, among others, through regular meetings between BOC and the Board of Directors or reports submitted by SKAI, Audit Committee, Risk Oversight Committee, Remuneration and Nomination

- Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, Direktur Kepatuhan atau melalui sarana komunikasi tertulis lainnya.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris secara aktif memastikan telah diterapkannya prinsip-prinsip GCG yang baik dalam setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, yang diwujudkan melalui:
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
 - b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank;
 - c. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal;
 - d. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
 - e. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
 - f. Rencana strategis Bank;
 - g. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.
 3. Dewan Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
 4. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, atau hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
 5. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah menjalankan tugasnya secara efektif, dimana tugas dan tanggung jawabnya akan diuraikan secara khusus dalam laporan ini.
 6. Pengangkatan anggota komite telah dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.
- Committee, Compliance Director or any other written communication.
2. In performing its duties and responsibilities, BOC must actively ensure the implementation of GCG principles in each of the Bank's business activities at all levels of the organization, including:
 - a. Implementation of duties and responsibilities of the BOC and Board of Directors;
 - b. Completeness and implementation of committee and working unit who manage the Bank's internal control function;
 - c. Implementation of compliance, internal and external audit functions;
 - d. Implementation of risk management, including the internal control system;
 - e. Provision of funds for related parties and large exposures;
 - f. The Bank's strategic plan;
 - g. Transparency of the Bank's financial and non-financial conditions.
 3. BOC gives direction, monitors and evaluates the implementation of the Bank's strategic policy.
 4. BOC is not involved in the decision making process of Bank's operational activities, except in the provision of funds to related parties, or other matters set forth in the Articles of Association and/or legislation in force in order to carry out the oversight function.
 5. BOC has established the Audit Committee, Risk Oversight Committee, Remuneration and Nomination Committee, which have effectively carried out their duties and responsibilities, as specifically described in this report.
 6. Appointment of committee members has been made by the Board of Directors based on decisions reached at BOC meeting.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

7. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
8. Melalui Komite Audit, Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan atau hasil pengawasan oleh otoritas lainnya.
9. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan mekanisme rapat yang menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja.
10. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

G. Pengungkapan Prosedur Penetapan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris

Prosedur Penetapan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dilaksanakan sebagai berikut:

- Komite Remunerasi & Nominasi memberikan rekomendasi dan usulan kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris mengusulkan dan menyampaikan kepada RUPS.
- RUPS memutuskan gaji/honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris.

G. Disclosures on Remuneration Procedure for the Board of Commissioners

The procedure for the remuneration for the BOC is as follows:

- The Remuneration & Nomination committee submits recommendation and advice to the GMS through the BOC.
- BOC proposes and submits to the GMS.
- GMS decides on salary/honorarium and benefits for the BOC.



H. Penilaian terhadap Kinerja Komisaris

BII mewajibkan anggota Komisaris untuk melakukan self assessment untuk mengukur kinerja masing-masing maupun kinerja Komisaris lain. Adapun hal-hal yang memerlukan penilaian adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi, Keahlian dan Pengalaman
Pengungkapan kualifikasi profesional, pengalaman, keahlian, segmen industri, dan efektivitas komite-komite yang ada di BII maupun Dewan Komisaris di dalam rapat.
2. Rencana Strategis
Keterlibatan Dewan Komisaris dalam strategi pengembangan dan kinerja perusahaan
3. Manajemen Risiko
Keterlibatan Dewan Komisaris dalam melakukan kajian terhadap manajemen risiko, Compliance dan pengendalian risiko
4. Pemantauan Kinerja Manajemen (KPI Direksi)
Keterlibatan dalam memantau kinerja Direksi dan kebijakan strategis bank dalam menjalankan bisnis selama satu tahun.

H. Assessment of the Performance of the Board of Commissioners

BII requires the Commissioners to conduct self-assessment to measure their own performance or other Commissioners' performance. Parameters used for self assessment are as follows:

1. Competence, Expertise and Experience
Disclosure of professional qualifications, experience, expertise, industry segment, and the efficacy of existing committees in BII as well as Board of Commissioners in meetings.
2. Strategic Plan
Board of Commissioners' involvement in the Company's strategic development and performance
3. Risk Management
Board of Commissioners' involvement in conducting analysis on risk management, compliance and risk control
4. Overseeing Management's Performance (The Board of Directors' KPI)
Involvement in performance monitoring of the Directors and Bank's strategic policy in conducting business during the year.

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

5. Lainnya
Informasi terkait dengan tingkat kehadiran, efektivitas tindak lanjut permasalahan yang ada, akses pada Dewan Komisaris/Direksi maupun komite-komite yang ada, kecukupan/akurasi data yang digunakan oleh Dewan Komisaris dalam memantau kinerja serta penatausahaan administrasi aktivitas Dewan Komisaris.

Hasil dari self assessment tersebut akan dijadikan acuan dalam penetapan/pengangkatan anggota Dewan Komisaris melalui tata kelola perusahaan yang ada.

I. Remunerasi untuk Setiap Anggota Dewan Komisaris

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi & Nominasi.

5. Others
Information related to the level of attendance, effectiveness of following-up issues, access to the Board of Commissioners/Board of Directors and existing committees, data adequacy/accuracy used by BOC in performance monitoring and administration of the Board of Commissioners' activities.

The results of the self assessment will be used as one reference in the assignment/appointment of members of BOC through the existing corporate governance mechanism.

I. Remuneration for Each Member of the Board of Commissioners

The amount of salary or honorarium or remuneration and/or benefits for members of BOC is set by the GMS with full consideration to the Remuneration & Nomination Committee's recommendations.

Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris

Package/Policy of Remuneration and other Facilities for BOC

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Type or Remuneration and other Facility	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun *)					
	Dewan Komisaris Board of Commissioners					
	Orang I Members			2013	2012	2011
	2013	2012	2011	Jutaan Rupiah Million Rupiah	Jutaan Rupiah Million Rupiah	Jutaan Rupiah Million Rupiah
1 Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) Gross remuneration (salary, bonus, benefits regular, bonus and other perks in the form of non natura)	7	7	7	13,152	12,832	12,956
2 Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, kesehatan dan sebagainya) yang: Other facilities in the forms of (housing, transportation, health and so on) that:				-	-	-
a. dapat dimiliki be held						
b. tidak dapat dimiliki can not be held				1,809	441	316

Notes | Keterangan: *) Sebelum dipotong pajak | Before tax deduction

Jumlah Anggota Dewan Komisaris yang Menerima Paket Remunerasi dalam 1 Tahun dikelompokkan kisaran tingkat penghasilan
Board of Commissioners Receiving Remuneration Package within 1 Year grouped in a range of income level

Jumlah Remunerasi per Orang Dalam 1 Tahun *) Remuneration per member within one year	Jumlah Komisaris Number of Commissioner
More than Rp2 billion Di atas Rp2 miliar	1
Between Rp1 billion and Rp2 Billion Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar	6
Between Rp500 million and Rp. 1 billion Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	0
Below Rp500 million Rp500 juta ke bawah	0

Notes | Keterangan:

*) Net received before tax deducted | Yang diterima secara tunai sebelum dipotong pajak (bruto)

J. Rapat Dewan Komisaris

1. Frekuensi Rapat

Sampai dengan Desember 2013, Rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan sebanyak 12 (dua belas) kali yang dihadiri secara fisik maupun melalui teknologi telekonferensi, dimana 9 (sembilan) dari 12 (dua belas) kali rapat Dewan Komisaris dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik. Terdapat 1 (satu) rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan maka Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan sehingga rapat tersebut tidak diperhitungkan dalam frekuensi Rapat Dewan Komisaris.

Dengan demikian Rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan secara berkala lebih dari 4 (empat) kali dalam tahun 2013, dan dihadiri secara fisik atau melalui teknologi telekonferensi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) kali sepanjang tahun 2013.

Dengan demikian dalam hal penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia tentang pelaksanaan GCG.

J. Meeting of the Board of Commissioners

1. Meeting Frequency

Until the end of December 2013, the BOC held a total of 12 (twelve) meetings both direct or through teleconference, whereas 9 (nine) of the 12 (twelve) BOC meetings were directly attended by all members of the BOC. There was 1 (one) BOC meeting held in Kuala Lumpur, yet as stipulated in the Articles of Association that Board of Commissioner meetings are those held in the Company is located or where its business activities are, the meeting was not taken into account in the frequency of the Board of Commissioners' meetings.

On that account, the Board of Commissioners meeting was held more than 4 (four) times in 2013, and was either directly attended or through conference calls by all members of the Board of Commissioners more than 2 (two) times in 2013.

Thus, BOC meeting frequency has met the Bank Indonesia Regulation concerning implementation of GCG.

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

2. Tingkat Kehadiran

Tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat-rapat Dewan Komisaris selama 2013 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Direksi turut menghadiri rapat Dewan Komisaris apabila terkait dengan agenda pembahasan rapat.

2. Attendance

The Board of Commissioners' attendance in meetings during 2013 can be seen in the table below. The Board of Directors also attends the meetings when the meeting agenda is related to their area of responsibility.

No	Nama Name	Jabatan Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Frekuensi Frequency	Kehadiran Present	Berhalangan Absent
			28 January	19 February	1 April	22 April	25 April	30 May	28 June	26 July	27 September	23 October	28 October	27 November			
1	Tan Sri Dato'Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor	President Commissioner Presiden Komisaris	√	**)	√	√	**)	√	√	√	√	√	√	√	12	12	0
2	Datuk Abdul Farid bin Alias *)	Commissioner Komisaris												√	1	1	0
3	Spencer Lee Tien Chye	Commissioner Komisaris	√	x	√	√	**)	√	√	√	√	√	**)	√	12	11	1
4	Umar Juoro	Independent Commissioner Komisaris Independen	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	12	0
5	Budhi Dyah Sitawati	Independent Commissioner Komisaris Independen	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	12	0
6	Achjar Iljas *)	Independent Commissioner Komisaris Independen					√	√	√	√	√	√	√	√	8	8	0

Keterangan | Note :

*) Datuk Abdul Farid bin Alias diangkat sebagai Komisaris berdasarkan RUPS tanggal 11 November 2013. Berlaku efektif setelah menerima persetujuan dari otoritas yang berwenang.
Achjar Iljas diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan RUPS tanggal 22 April 2013, dan memperoleh surat persetujuan OJK pada tanggal 18 Februari 2014.

**): Melalui teknologi telekonferensi (conference call) | Participated through teleconference

√ : Hadir | Present

x : Absen | Absent

Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi 2013

Rapat Dewan Komisaris yang dihadiri Direksi dalam pembahasan agenda khusus rapat.

Board of Commisioners Meetings 2013

Meetings of Board of Commissioners attended by the Board of Directors to discuss specific agenda.

No	Nama Name	Jabatan Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Frekuensi Frequency	Kehadiran Present	Berhalangan Absent
			28 January	19 February	1 April	22 April	25 April	30 May	28 June	26 July	27 September	23 October	28 October	27 November			
1	Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor	Presiden Komisaris President Commissioner	√	*)	√	√	*)	√	√	√	√	√	√		12	11	0
2	Datuk Abdul Farid bin Alias *	Komisaris Commissioner												√	1	1	0
3	Spencer Lee Tien Chye	Komisaris Commissioner	√	x	√	√	**	√	√	√	√	√	**	√	12	11	1
4	Umar Juoro	Komisaris Independen Independent Commissioner	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	12	0
5	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen Independent Commissioner	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	12	0
6	Achjar Iljas *	Komisaris Independen Independent Commissioner					√	√	√	√	√	√	√	√	8	8	0
Undangan dalam Agenda Khusus Rapat Invitee for Specific Agenda																	
1	Dato' Khairussaleh Bin Ramli *	Presiden Direktur President Director	√	√	√	√	**	√	√	√	x	x	x	x	8	8	0
2	Rita Mirasari *	Direktur I Director	***	√	√	√	x	√	√	√	x	x	x	x	8	7	1
3	Thilagavathy Nadason	Direktur I Director	***	√	***	***	√	√	***	***	√	√	√	√	12	12	0
4	Rahardja Alimhamzah	Direktur I Director	x	x	***	***	x	√	x	***	***	***	x	***	12	7	5
5	Ghazali bin Mohd Rasad	Direktur I Director	x	x	x	x	x	√	***	***	***	***	x	***	12	6	6
6	Jenny Wiriyanto	Direktur I Director	x	x	***	***	x	√	***	x	***	***	x	***	12	7	5
7	Hedy Maria Helena Lopian	Direktur I Director	x	x	x	x	x	x	x	x	***	***	√	***	12	4	8
8	Ani Pangestu	Direktur I Director	x	x	x	x	x	x	***	x	√	√	√	√	12	5	7
9	Lani Darmawan	Direktur I Director	x	x	***	***	x	x	***	***	***	***	x	***	12	7	5

Keterangan | Note :

*) : Datuk Abdul Farid bin Alias diangkat sebagai Komisaris berdasarkan RUPS tanggal 11 November 2013. Berlaku efektif setelah menerima persetujuan dari otoritas yang berwenang.
Achjar Iljas diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan RUPS tanggal 22 April 2013, dan memperoleh surat persetujuan OJK pada tanggal 18 Februari 2014.

Pengunduran diri Dato' Khairussaleh Bin Ramli selaku Presiden Direktur dan Rita Mirasari selaku Direktur Keptuhan telah diterima dan disetujui berdasarkan RUPS tanggal 11 November 2013.

**): Melalui teknologi telekonferensi (conference call) | Participated through teleconference

***): Agenda Khusus | Only Specific Agenda

√ : Hadir | Present

x : Absen | Absent

3. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Segala keputusan rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.

Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik serta tidak pernah ada perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris.

Dengan demikian dalam hal pengambilan keputusan serta dokumentasi hasil rapat Dewan Komisaris telah dilakukan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.

4. Agenda Rapat

Dewan Komisaris memiliki Agenda Rapat Dewan Komisaris secara tahunan. Agenda tersebut dapat disesuaikan pada Rapat Dewan Komisaris secara bulanan.

Secara garis besar Agenda Rapat Dewan Komisaris selama 2013 sebagai berikut:

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Dewan Komisaris Agenda of the Board of Commissioners Meetings
28 January 2013	No. 01/KOM/01.2013 Minutes of BOC Meeting held on 3 December 2012 Matters Arising from the Minutes of BOC Meeting held on 3 December 2012 CEO Update & Review of Group Overall Financial Performance for December 2012 Cost Allocation Methodology & SCMP Impact Update Compliance Effectiveness Report Report from Chairman of the Committees BOC Annual Outline Agenda for the Year 2013 Others
19 February 2013	No. 02/KOM/02.2013 BII's Audited Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2012
1 April 2013	No. 04/KOM/04.2013 Minutes of BOC Meeting held on February 2013 Matters Arising from the Minutes of BOC Meeting held on February 2013 CEO Update & Review of Group Overall Financial Performance for February 2013 GWB Update IT Strategy Update BII Syariah Strategy and Business Plan GCG Report Report from Chairman of Committees BOC Annual Outline Agenda for the Year 2013 Others

3. Decision Making Mechanism

Decision making in meetings of BOC has been based on consensus and agreement. All decisions of BOC shall be binding for all members of the Board of Commissioners.

The resolutions of BOC meeting have been included in the Minutes of Meetings and were well documented with no dissenting opinions encountered during the meetings of BOC.

Therefore, all decision making processes and documentation of meetings of BOC have complied with Bank Indonesia regulations.

4. Meeting Agenda

BOC has an annual Agenda of Board of Commissioners' meetings. This agenda can be adjusted according to the monthly BOC meeting.

The outline for the Board of Commissioners Meetings agenda in 2013 are as follows:

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Dewan Komisaris Agenda of the Board of Commissioners Meetings
22 April 2013	No. 05/KOM/04.2013 Minutes of BOC Meeting held on 01 April 2013 Matters Arising from the Minutes of BOC Meeting held on 01 April 2013 CEO Update & Review of Group Overall Financial Performance for March 2013 WOM Update Retail Banking Update BNM CRR Update Report from Chairman of Committees BOC Annual Outline Agenda for the Year 2013 Others
25 April 2013	No. 06/KOM/02.2013 BII's Financial Statements for three-month period ended 31 March 2013
30 May 2013	No. 07/KOM/05.2013 Minutes of BOC Meeting held on 22 and 25 April 2013 Matters Arising from the Minutes of BOC Meeting held on 22 April 2013 CEO Update & Review of Group Overall Financial Performance for April 2013 Global Markets Strategy Core Banking Replacement WOM Strategy Options BOC Manual Review Basel II Progress Update Report from Chairman of the Committees BOC Annual Outline Agenda for the Year 2013 Others Additional Loan Limit and Purchase of BIIIF Bond Badminton Sponsorship
28 June 2013	No. 08/KOM/06.2013 Minutes of BOC Meeting held on 30 May 2013 Matters Arising from the Minutes of BOC Meeting held on 30 May 2013 CEO Update & Review of Group Overall Financial Performance for May 2013 Revised RBB to Bank Indonesia Operations Update Human Capital – Productivity Commercial Banking Update Report from Chairman of Committees BOC Annual Outline Agenda for the Year 2013
26 July 2013	No. 09/KOM/07.2013 Minutes of BOC Meeting held on 28 June 2013 Matters Arising from the Minutes of BOC Meeting held on 28 June 2013 BII's Financial Statement for six-month period ended 30 June 2013 CEO Update & Review of Group Overall Financial Performance for June 2013 IT Projects Update BNM CRR Update GCG Self Assessment Report from Chairman of Committees BOC Annual Outline Agenda for the Year 2013 Others Tax Audit Progress Update Regional Cash Management System Trade Finance Strategy
27 September 2013	No. 10/KOM/09.2013 Minutes of BOC Meeting held on 26 July 2013 Matters Arising from the Minutes of BOC Meeting held on 26 July 2013 CEO Update & Review of Group Overall Financial Performance for August 2013 Preliminary Review of AOP 2014 Business Banking Update HC – Productivity Update Report from Chairman of Committees BOC Annual Outline Agenda for the Year 2013 Others
23 Oktober 2013	No. 11/KOM/09.2013
28 Oktober 2013	No. 12/KOM/10.2013 BII's Financial Statements for nine-month period ended September 30, 2013 (unaudited)
27 November 2013	No. 13/KOM/09.2013

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

K. Keikutsertaan Dewan Komisaris Dalam Pelatihan

Selama 2013, training & pelatihan yang telah diikuti Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

K. Participation of BOC in Training

Throughout 2013, BOC participated in various training programs as detailed below:

Keikutsertaan Dewan Komisaris Dalam Pelatihan 2013
Participation of Board of Commissioners in Training 2013

No	Nama Name	Jenis Training/Seminar Training/Seminar	Waktu & Tempat Pelaksanaan Date & venue
1	Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor	Maybank Group Directors' Training	21-23 November 2013 Grand Hyatt, Kuala Lumpur, Malaysia
2	Datuk Abdul Farid bin Alias *	-	-
3	Spencer Lee Tien Chye	Risk Management Workshop	17 September 2013 Sentral Senayan 3, Lt. 28, Jakarta, Indonesia
		Maybank Group Directors' Training	21-23 November 2013 Grand Hyatt, Kuala Lumpur, Malaysia
4	Umar Juoro	Seminar Economic Outlook 2013: Peranan Perbankan Dalam Pengembangan UMKM di KTI	11 April 2013 BII Makassar
		Seminar Economic Outlook 2013 - "Optimalisasi Peranan Bank Dalam Pengembangan UMKM"	12 Juni 2013 Planet Holiday Hotel Batam - Galaxy Ball Room
		Seminar Economic Outlook 2013: Seminar UMKM BII	10 Juli 2013 Hotel Sahira, Bogor
		Risk Management Workshop	17 September 2013 Sentral Senayan 3, Lt. 28, Jakarta, Indonesia
		Maybank Group Directors' Training	21-23 November 2013 Grand Hyatt, Kuala Lumpur, Malaysia
5	Budhi Dyah Sitawati	Peluncuran Buku Dan Talkshow: Mencapai Sustainable Growth Melalui Praktik Tata Kelola Perusahaan Berbasis Budaya	18 Juli 2013 Sentral Senayan 3, Lantai 28, Jakarta
		Risk Management Workshop	17 September 2013 Ballroom Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta
		Maybank Group Directors' Training	21-23 November 2013 Grand Hyatt, Kuala Lumpur, Malaysia
6	Achjar Iljas	Seminar Risk Management in Islamic Banking	24 Juli 2013 Jakarta
		Risk Management Workshop	17 September 2013 Sentral Senayan 3, Lt. 28, Jakarta, Indonesia

REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS SELAMA TAHUN 2013

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian internal Perseroan, Dewan Komisaris baik melalui rapat-rapat Dewan Komisaris maupun pembahasan-pembahasan dalam Komite-komite yang dimilikinya (Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi maupun Komite Pemantau Risiko) berperan aktif memberikan nasihat maupun rekomendasi-rekomendasi bagi kemajuan Perseroan. Beberapa rekomendasi dan masukan penting selama 2013 dapat diringkas sebagai berikut:

1. Dalam rangka memastikan pemenuhan Good Corporate Governance, Dewan Komisaris turut mengevaluasi dan memberikan persetujuan atas Laporan GCG Perseroan Tahun 2012, Rencana Bisnis Bank Tahun 2013 dan Revisi Rencana Bisnis Bank Tahun 2013, Rencana Bisnis Bank Tahun 2014, Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk Periode yang berakhir pada 31 Maret 2013, Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk Periode yang berakhir pada 30 Juni 2013 dan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk Periode yang berakhir pada 30 September 2013. Dewan Komisaris juga memperhatikan dan menyetujui rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi terkait dengan pergantian anggota Direksi/Dewan Komisaris dan perubahan susunan keanggotaan komite-komite, serta memonitor kemajuan dari inisiatif-inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan peringkat BII dalam Risk Based Bank Rating.
2. Dewan Komisaris memberikan saran dan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan guna memperbaiki efisiensi dan produktivitas Bank dan mendorong pengelolaan biaya secara strategis melalui Strategic Cost Management Program (SCMP).

BOC RECOMMENDATIONS IN 2013

In conducting its supervisory function, particularly related to the implementation of the Company's internal control, the BOC actively provides input and recommendations through BOC meetings as well as discussions in the Committees (Audit Committee, Remuneration and Nomination Committee, and Risk Oversight Committee) for the Company's progress. Some important recommendations and feedback in 2013 can be summarized as follows:

1. To ensure compliance with Good Corporate Governance, the BOC has conducted an evaluation and approved the 2012 Corporate Governance Report, the 2013 Bank Business Plan and Revision of the 2013 Bank Business Plan, the 2014 Bank Business Plan, Consolidated Financial Statements for the period ended 31 March 2013, consolidated Financial Statements for the Period ended 30 June 2013 and Consolidated Financial Statements for the Period ended 30 September 2013. The BOC also considered and approved the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee related to the change of the Board of Directors/Board of Commissioners and the changes in organizational structure of the committees, as well as overseeing the progress of the initiatives undertaken to improve BII's rank in the Risk-Based Bank Rating.
2. The Board of Commissioners provided advice and recommendations regarding things that need to be undertaken to improve the Bank's efficiency and productivity, and encouraged strategic cost management through a Strategic Cost Management Program (SCMP).

3. Dewan Komisaris memberikan arahan dalam penetapan strategi perseroan hingga tahun 2015 dan mengevaluasi kemajuan dari inisiatif-inisiatif program IMPACT yang dicanangkan dalam rangka transformasi BII menjadi leading relationship bank. Dewan Komisaris juga memonitor pencapaian Balanced Scorecard Direksi dari waktu ke waktu.
 4. Dewan Komisaris merekomendasikan pembentukan Yayasan BII untuk menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), dan memberikan saran-saran untuk meningkatkan efektifitas program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan BII.
 5. Dewan Komisaris memberikan masukan mengenai hal-hal yang perlu menjadi perhatian Direksi dalam mengelola anak perusahaan serta merekomendasikan pengembangan opsi-opsi untuk anak perusahaan, termasuk sinergi yang lebih erat antara anak perusahaan dengan BII dan pendayagunaan kapabilitas yang dimiliki didalam Grup Maybank.
 6. Dewan Komisaris mendorong perkembangan Perbankan Syariah untuk mencapai visi menjadi salah satu bank terkemuka dalam Perbankan Syariah di Indonesia, dan memberikan arahan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mempercepat pengembangan Perbankan Syariah di BII.
 7. Terkait dengan perkembangan Teknologi Informasi (TI), Dewan Komisaris memberikan masukan dan rekomendasi terhadap kemajuan proyek-proyek strategis TI, khususnya proyek peningkatan Core Banking System.
3. BOC provided guidance in setting the company's strategy to 2015 and evaluated the progress of the initiatives launched by the IMPACT program in order to transform BII be the leading relationship bank. The BOC also oversaw the achievement of the Balanced Scorecard of the Board of Directors from time to time.
 4. The BOC recommended the establishment of the BII Foundation to run Corporate Social Responsibility (CSR), and provide suggestions for the improvement of BII's CSR program effectiveness.
 5. The BOC provided input on matters that required the attention of the Board of Directors in managing subsidiaries and recommended development options for the subsidiary, including closer synergy between the subsidiaries with BII as well as the utilization of capabilities within the Maybank Group.
 6. The BOC encouraged the development of Sharia Banking to achieve the vision of becoming one of the leading banks in Islamic Banking in Indonesia, and provided direction on areas that needs to be considered to accelerate the development of Sharia Banking in BII.
 7. In Information Technology (IT), the BOC provided input and advice to the progress of IT strategic projects, particularly the project of improving the Core Banking System.

8. Dewan Komisaris mengusulkan parameter-parameter yang perlu diperhatikan dalam pengembangan jaringan cabang maupun jaringan elektronik dan memonitor perkembangan kinerja jaringan pelayanan Bank dari waktu ke waktu.
 9. Dari sisi pengembangan Sumber Daya Manusia, Dewan Komisaris mendorong upaya-upaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan produktivitas karyawan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan karyawan melalui penugasan internasional.
 10. Guna mendukung ekspansi bisnis Perseroan, Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rencana korporasi Perseroan sepanjang tahun 2013 yaitu penerbitan obligasi berkelanjutan Tahap II serta Penerbitan Saham Baru melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Dewan Komisaris juga menyetujui untuk tidak membagikan dividen atas laba tahun 2013 guna memperkuat struktur permodalan Bank.
8. The BOC proposed parameters that need to be considered in the development of the branch network and electronic network, and from time to time monitors the performance of the Bank's network of service.
 9. In the area of Human Resources, the BOC encouraged continuous efforts to improve employee productivity, to develop employees' knowledge and skills for international assignments.
 10. To support the Company's business expansion, the BOC granted its approval for the Company's corporate plan throughout 2013, namely the issuance of Continuous Bonds Phase II and the issuance of New Shares through the mechanism of limited offering with Pre-emptive Rights. The BOC also approved the decision to refrain from distributing dividends from 2013 profits, to strengthen the Bank's capital structure.

Komite Audit Audit Committee

1. Dasar Pembentukan Komite Audit:

1. Peraturan Bapepam-LK No IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012.
2. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 beserta Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum, sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013.

2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit:

Pedoman dan tata tertib dituangkan dalam Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) yang disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 28 Juni 2013. Piagam tersebut memuat antara lain tujuan, wewenang dan keanggotaan komite, tugas dan tanggung jawab, prosedur kerja dan rapat serta ketentuan lain-lain.

3. Struktur, Keanggotaan dan Keahlian anggota Komite Audit:

Nama	Jabatan pada Komite Audit Position in Audit Committee	Periode Jabatan Term of Position	Keterangan/Keahlian Description/Expertise
Budhi Dyah Sitawati (BS)	Ketua merangkap Anggota Chairperson and Member	2012 -2015	Komisaris Independen Independent Commissioner
Spencer Lee Tien Chye (SC)	Anggota *) I Member *)	2012 – 2015	Komisaris I Commissioner
Agus Kretarto (AK)	Anggota I Member	2012 – 2015	Pihak Independen – Bidang Akuntansi dan Perbankan Independent Party – Accounting and Banking
Nina Diyanti Anwar (NDA)	Anggota merangkap Sekretaris Member and Secretary	2012 – 2015	Pihak Independen – Bidang Akuntansi dan Perbankan Independent Party – Accounting and Banking

*) tidak lagi sebagai Anggota Komite Audit sejak tanggal 13 Februari 2014

*) no longer serve as member of the Audit Committee as of 13 February 2014

1. Basis to Establish the Audit Committee:

1. BAPEPAM-LK Regulation No.IX.I.5 regarding Establishment and Guidelines of Audit Committees, an attachment to the Decree of Chairman of BAPEPAM-LK No.Kep-29/PM/2004 dated 24 September 2004 as amended by the Decree of Chairman of BAPEPAM-LK No.Kep-643/BL/2012 dated 7 December 2012.
2. Bank Indonesia Regulation No.8/4/PBI/2006 dated 30 January 2006 as amended by Bank Indonesia Regulation No.8/14/2006 dated 5 October 2006 and Bank Indonesia Circular Letter No.9/12/DPNP dated 30 May 2007 regarding Implementation of GCG for Commercial Banks as amended by Bank Indonesia Circular Letter No. 15/15/DPNP dated 29 April 2013.

2. Guidelines and Work Procedure of Audit Committee:

The guidelines and work procedure of the committee are set forth in Audit Committee Charter, approved by the Board of Commissioners on 28 June 2013. The Charter contains, among others, purpose, authority, and membership of the committee, duties and responsibilities, work procedure, meetings, and other provisions.

3. Composition, Membership, and Expertise of the Members of Audit Committee:

4. Independensi Anggota Komite Audit, dalam bentuk tabel sebagai berikut:

4. Independence of the Members of Audit Committee, as described in the following table:

No	Kriteria Independensi Criteria of Independence	Anggota Komite Audit Members of Audit Committee			
		BD	SL *)	AK	ND
1	Bukan pemegang saham baik langsung ataupun tidak langsung; jika anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut. Not being a shareholder directly or indirectly, and if, because of particular legal event an Audit Committee member be in possession of Company shares, the shares shall be transferred to other party no later than 6 (six) months after such event transpire.	√	√	√	√
2	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi maupun pemegang saham utama Perusahaan. Not being affiliated with any member of the Board of Commissioners, Board of Directors or main shareholders of the Company.	√	X	√	√
3	Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Does not have business relationship directly or indirectly related to the business of the Company.	√	X	√	√
4	Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen. Not being an employee or has authority and responsibility to plan, lead, run or supervise the Company within the latest 6 (six) months except for the Independent Commissioner	√	√	√	√

Keterangan / Note: Kolom kosong anggota komite diisi dengan / Empty column under committee member should be completed with: P = Ya/Yes
; x = Tidak/No
*) no longer serve as member of the Audit Committee as of 13 February 2014

5. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit;

Berdasarkan Piagam Komite Audit, Komite Audit bertanggung jawab untuk memberikan pendapat secara profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

5. Duties and Responsibilities of Audit Committee;

Based on the Audit Committee Charter, the Audit Committee is responsible for providing professional and independent opinions to the Board of Commissioners on reports or matters reported by the Board of Directors, and identifying matters that require close attention of the Board of Commissioners.

Tugas Utama Komite Audit meliputi:

1. Membuat rencana kegiatan tahunannya.
2. Menelaah kualitas dan transparansi informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya, termasuk menilai kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang berlaku.

The main duties of Audit Committee are:

1. Develop annual activity plan.
2. Review the quality and transparency of financial information to be issued by the Bank, such as financial statements, financial projection, and other financial information, including reviewing the data's compliance with prevailing accounting standards.

3. Melakukan penelaahan atas kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
4. Melakukan penelaahan berkala terhadap Piagam Audit Intern, rencana kerja tahunan audit intern dan pelaksanaannya oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
5. Memberi masukan dalam proses pemilihan Auditor Ekstern (Auditor Independen) dengan menelaah independensi dan obyektifitas, kualitas pelayanan serta kewajaran imbalan jasa yang diajukan oleh Auditor Ekstern.
6. Melakukan penelaahan dan pemantauan atas tindak-lanjut hasil pemeriksaan SKAI, Auditor Ekstern, Bank Indonesia, serta auditor lainnya (BNM).
7. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan Bank dan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank serta adanya potensi benturan kepentingan.

6. Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Audit

1. Frekuensi Rapat Komite Audit Selama 2013, Komite Audit menyelenggarakan 16 (enam belas) kali rapat, yang terdiri dari rapat Komite Audit dengan SKAI & Internal Audit Committee, Auditor Eksternal, Unit kerja Finance & Accounting maupun dengan unit kerja terkait lainnya seperti Kepatuhan dan Anti Fraud.

Rapat Komite Audit diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank dan hanya dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Pengambilan keputusan pada rapat komite telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau berdasarkan suara terbanyak.

6. Audit Committee Meeting Frequency & Level of Attendance

1. In 2013, the Audit Committee held 16 (sixteen) meetings, with participants from SKAI & Internal Audit Committee, External Auditor, Finance & Accounting division and other working units from Compliance and Anti-Fraud.

The Audit Committee Meeting is held in accord with the Bank Regulatory requirements and only legitimate if attended with more than 51% (fifty one over one hundred) of the total number of participants, including the Independent Commissioners and Independent Parties.

The decision process in the Audit Committee Meeting is based on consensus.

2. Tingkat Kehadiran Anggota Komite Audit Dalam Rapat
Tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Audit dalam Rapat Komite Audit adalah sebagai berikut:

2. The Participants' Level of Attendance in the Audit Committee
The level of attendance for every Audit Committee member is as follows:

No	Anggota Komite Audit Members of Audit Committee	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Tingkat Kehadiran (%) Level of Attendance (%)
		18 Jan 2013	22 Jan 2013	18 Feb 2013	18 Feb 2013	27 Mar 2013	18 Apr 2013	24 Apr 2013	27 May 2013	19 Jun 2013	22 Jul 2013	25 Jul 2013	23 Sep 2013	21 Oct 2013	25 Oct 2013	11 Nov 2013	26 Nov 2013		
1.	Budhi Dyah Sitawati	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	x	√	16	94%
2.	Putu Antara*)	√	√	√	√	x	√	x										7	71%
3.	Spencer Lee Tien Chye	x	√	√	√	√	√	x	√	√	√	x	√	√	x	x	√	16	69%
4.	Achjar Iljas **)								√	√	√	x	√	√	√	√	√	9	89%
5.	Agus Kretarto	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	16	100%
6.	Nina Diyanti Anwar	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	16	100%

Keterangan/Note:

P = Hadir/Present ; x = Tidak hadir/Absent

Blocked columns signify officials who yet to or no longer serve as Member.

*) Berakhir masa jabatannya sejak keputusan RUPS LB 22 April 2013

***) invitee

3. Agenda Rapat Komite Audit
Agenda Rapat Komite Audit sepanjang tahun 2013 adalah sebagai berikut:

3. The Meeting Agenda of the Audit Committee
The Agenda across the Audit Committee Meeting throughout 2013 was as follows:

No	Tanggal Rapat Komite Audit Date of the Audit Committee Meeting	Agenda Utama Rapat Komite Audit	Main Agenda of Audit Committee Meeting
1	18 Jan 2013	Penelaahan atas Laporan Keuangan 31 Desember 2012	Review of Financial Statements for year ended December 31, 2012
2	22 Jan 2013	Temuan audit IT dan Laporan-laporan Internal Audit sampai tanggal 31 Desember 2012	IT Audit Findings and Internal Audit Reports up to 31 December 2012
3	18 Feb 2013	Diskusi atas Laporan Keuangan 31 Desember 2012	Discussion on Financial Statements for year ended December 31, 2012
4	18 Feb 2013	Penilaian Kerja CAE 2012, Penyesuaian AOP Q1-2013, Audit tematik transaksi FX pada GMTS, BTS dan non BTS; Global Market, Interest Rate & Liquidity Management, Interest Rate Derivatives, Market & Liquidity Risk Management; IT Audit Banking System	CAE performance appraisal for 2012, Rolling Forecast Q1-2013, Thematic Audit on FX transactions k on GMTS, BTS and non BTS; Global Market, Interest Rate & Liquidity Management, Interest Rate Derivatives, Market & Liquidity Risk Management; IT Audit Banking System
5	27 Mar 2013	Hasil Peer Review & PWC QAR tracking; Piagam Audit Internal; Update kebijakan whistle blowing & evaluasi implementasi di 2012 dan Laporan Internal Audit sampai 28 Februari 2013	Peer Review Result & PWC QAR tracking; Internal Audit Charter; Update on Whistle Blowing Policy & evaluation on its implementation in 2012; and Internal Audit reports up to 28 February 2013

No	Tanggal Rapat Komite Audit Date of the Audit Committee Meeting	Agenda Utama Rapat Komite Audit	Main Agenda of Audit Committee Meeting
6	18 Apr 2013	Inisiatif SKAI untuk memperbaiki rating GCG; Branch Treasury Sales –Task Force update dan Laporan Internal Audit sampai tanggal 31 Maret 2013	SKAI's initiatives update to improve the GCG rating; Branch Treasury Sales – Task Force update and Internal Audit reports up to 31 March 2013
7	24 Apr 2013	Penelaahan atas Laporan Keuangan 31 Maret 2013	Review of Financial Statements as of March 31, 2013
8	27 Mei 2013	Inisiatif strategis update; KPI 2013 untuk dapat diketahui Komite Audit; rencana Tindak lanjut hasil pertemuan dengan BI dan Laporan-laporan Internal Audit sampai dengan tanggal 30 April 2013	Strategic Initiative updates; 2013's KPI for Audit Committee's acknowledgement; Action Plan to follow up the meeting results with BI and Internal Audit Reports up to 30 April 2013
9	19 Juni 2013	Peninjauan AOP; PMR pada debitur NPL, Monitoring dan Continuous Audit atas 2 debitur; Update atas KYC/AML and Laporan-laporan Internal Audit sampai tanggal 31 Mei 2013	AOP Rolling Forecast; PMR on NPL debtors; Monitoring and Continuous Audit on 2 Debtors; Update on KYC/AML and Internal Audit Reports up to 31 May 2013
10	22 Juli 2013	Laporan-laporan Internal Audit sampai tanggal 30 Juni 2013 dan tindak lanjutnya oleh Manajemen dan IAC	Internal Audit Reports up to 30 June 2013 and the follow up by Management and IAC
11	25 Juli 2013	Penelaahan atas Laporan Keuangan 30 Juni 2013	Review of Financial Statements as of June 30, 2013
12	23 Sept 2013	Eksternal review atas SKAI untuk periode 2011-2013; Presentasi Tindak Lanjut atas rekomendasi Komite Audit dan Laporan-laporan Internal Audit sampai tanggal 30 Agustus 2013	Internal Audit's External review for period 2011-2013; Follow up presentation on AC's recommendation and Internal Audit reports up to 30 August 2013
13	21 Okt 2013	Evaluasi atas AOP of 2013 and Laporan-laporan Internal Audit sampai tanggal 30 September 2013	Evaluation on AOP 2013 and Internal Audit Reports up to 30 September 2013
14	25 Okt 2013	Penelaahan atas Laporan Keuangan 30 September 2012	Review of Financial Statements as of 30 September, 2013
15	11 Nov 2013	Pemilihan Kantor Akuntan untuk Quality Assurance Review atas SKAI	Selection of Accounting Firm for Quality Assurance review of Internal Audit Group
16	26 Nov 2013	Presentasi BQA oleh Head BOCS; AOP 2014; Evaluasi atas AOP Q3-2013; Rating ROCAM audit Cabang; Audit IT-E custody implementasi review; Tax Management (Kantor Pusat); audit tematik atas KYC dan laporan-laporan Internal Audit sampai tanggal 30 Oktober 2013	BQA presentation by BOCS Head; AOP 2014; AOP rolling forecast Q3-2013; Branch Audit ROCAM rating; Audit IT-E custody implementation review; Tax Management (Head Office); Thematic Audit on KYC and Internal Audit reports up to 30 Oktober 2013

7. Program dan Kegiatan Komite Audit:

Selama tahun 2013, Komite Audit melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Hal tersebut dapat dilihat melalui program kerja beserta realisasinya sebagai berikut:

7. Programs and Activities of Audit Committee:

During 2013, Audit Committee carried out activities in accordance to its duties and responsibilities. The work programs and implementation are as follows:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Melakukan penelaahan dan membahas laporan keuangan triwulanan, semesteran dan tahunan yang akan dipublikasikan Review and discuss quarter, semester, and annual financial statements to be published	Melakukan pembahasan dan penelaahan Laporan Keuangan triwulan 1, 2, 3 dan 4 (tahunan) yang akan dipublikasikan, melalui rapat dengan Direktur Keuangan, Divisi Akuntansi & Keuangan dan/atau Kantor Akuntan Publik (Auditor Independen) Discussion and review of Financial Reports for the 1 st , 2 nd , 3 rd , and 4 th quarter (annual) to be published by the Bank were done through meetings with Director of Finance, Accounting & Financial Division, and/or Public Accounting Office (Independent Auditor)
2	Turut serta dalam proses pemilihan Auditor Independen tahun buku 2013 Take part in the process to select Independent Auditor for financial year 2013	Komite Audit telah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kembali KAP Purwanto, Suherman & Surja (Anggota Ernst & Young Global) untuk melakukan review atas laporan Keuangan 30 Juni 2013 serta melakukan audit atas Laporan Keuangan untuk tahun buku 2013 The Audit Committee has evaluated and provided recommendation to the Board of Commissioners to re-appoint Purwanto, Suherman & Surja (member of Ernst & Young Global) to conduct review on Financial statements of 30 June 2013 and to audit Financial Statements of the financial year 2013.
3	Melakukan review atas penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan membantu Dewan Komisaris dalam penyusunan Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Review the Bank's Business Plan (RBB) and assist the Board of Commissioners in preparing the Business Plan Implementation Monitoring Report.	Melakukan review atas Rencana Bisnis Bank dan membantu Dewan Komisaris menyiapkan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis semester II tahun 2012 dan semester I tahun 2013 untuk disampaikan kepada BI/OJK Review the Bank's Business Plan and assist the Board of Commissioners in preparing the Business Plan Monitoring Report for Semester II of 2012 and Semester I 2013, to be submitted to BI/OJK
4	Melakukan evaluasi atas rencana kerja SKAI, efektifitas fungsi audit dan mereview laporan & membahas hasil audit SKAI Evaluate IAU's work plan as well as audit effectiveness and function, and review and discuss IAU's audit findings report	Mengevaluasi rencana audit tahun 2013 sebelum diketahui oleh Dewan Komisaris; melakukan review dan pembahasan dengan SKAI atas hasil auditnya Evaluate 2013 audit plan prior to submission to the Board of Commissioners; review and discuss audit findings with IAU
5	Memantau tindak lanjut Manajemen atas rekomendasi dari hasil audit Bank Indonesia, Audit Eksternal dan SKAI Monitor follow-up actions taken by the Management on audit recommendations from Bank Indonesia, External Audit, and IAU.	Membahas dengan SKAI & Internal Audit Committee atas tindak lanjut hasil pemeriksaan Audit Eksternal dan Internal serta memantau tindak lanjut atas rekomendasi BI/OJK Discuss with IAU and Internal Audit Committee the follow-up actions of audit results from External and Internal Audit as well as recommendations from BI/OJK.

Komite Pemantau Risiko Risk Oversight Committee

1. Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko:

Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 beserta Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013.

2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko:

Pedoman dan tata tertib dituangkan dalam Piagam Komite Pemantau Risiko (Risk Oversight Committee Charter) yang disetujui oleh Dewan Komisaris. Piagam tersebut memuat antara lain struktur dan keanggotaan komite, tujuan dan tugas komite, ruang lingkup tanggung jawab, pengaturan rapat dan ketentuan lain-lain.

3. Struktur, Keanggotaan dan Keahlian anggota Komite Pemantau Risiko:

1. The Ground of Establishment of Risk Oversight Committee:

The Regulation of Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 on 30 January 2006 as amended by the Regulation of Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 on 5 October 2006 as well as Circular Letter of Bank Indonesia No. 9/12/DPNP on 30 May 2007 concerning the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) For Commercial Banks as amended by Circular Letter of Bank Indonesia No.15/15/DPNP dated 29 April 2013.

2. Guidelines of Risk Oversight Committee:

Guidelines and regulations are set forth in the Risk Oversight Committee Charter, which is approved by the Board of Commissioners. The charter contains among others the committee structure and membership, objectives and tasks of the committee, scope of responsibilities, meeting arrangements and other provisions.

3. Structure, Membership and Expertise of the Risk Oversight Committee:

Nama Name	Jabatan pada Komite Pemantau Risiko Position in the Risk Oversight Committee	Periode Jabatan Period of Office	Keterangan/Keahlian Note/Expertise
Taswin Zakaria (TZ)	Ketua merangkap Anggota Chairman and Member	2012 -2015 (a)	Komisaris Independen Independent Commissioner
Putu Antara (PA)	Anggota I Member	2012 - 2013 (b)	Komisaris Independen Independent Commissioner
Umar Juoro (UJ)	Anggota I Member	2012 - 2015	Komisaris Independen Independent Commissioner
Spencer Lee Tien Chye (SC)	Anggota I Member	2012 - 2015	Komisaris I Commissioner
Budhi Dyah Sitawati (BS)	Anggota I Member	2015 - 2015 (c)	Komisaris Independen Independent Commissioner
Achjar Iljas (AI)	Ketua merangkap Anggota Chairman and Member	2013 - 2015 (d)	Komisaris Independen Independent Commissioner
Farid Harianto (FH)	Anggota	2012 - 2015	Pihak Independen – Bidang Manajemen Risiko Independent Party – Field of Risk Management
Agus Kretarto (AK)	Sekretaris merangkap Anggota	2012 - 2015	Pihak Independen – Bidang Keuangan Independent Party– Field of Finance

Keterangan:

- (a) Tidak lagi sebagai Ketua sejak diangkat oleh RUPS Luar Biasa tanggal 11 November 2013 sebagai Presiden Direktur.
- (b) Tidak lagi sebagai Anggota sejak selesai masa baktinya sebagai Komisaris Independen berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 22 April 2013.

Keterangan:

- (a) No longer serve as Chairman effective as of the approval of EGMS in 11 November 2013
- (b) No longer serve as Independent Commissioner as of the EGMS in 22 April 2013.

- (c) Bertindak sebagai Pejabat Sementara Ketua sejak November 2013 sampai dengan pengangkatan Achjar Ilijas sebagai Komisaris Independen mendapat persetujuan dari otoritas yang berwenang.
- (d) Jabatan sebagai Ketua merangkap Anggota efektif bila pengangkatan sebagai Komisaris Independen mendapat persetujuan dari otoritas yang berwenang.

- (c) Acting as the temporary Chairman since November 2013 until the approval of Achjar Ilijas as the independent Commissioner with the approval of the authority.
- (d) Independent Commissioner is approved by the authority.

4. Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko dalam bentuk tabel sbb:

No	Kriteria Independensi Independence Criteria	Anggota Komite Pemantau Risiko Members of the Risk Oversight Committee							
		TZ	PA	UJ	SL	BD	AI	FH	AK
1	Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Does not have shareholding relation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders or with the Bank, which may influence the capacity to act independently.	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Does not have financial relation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders or with the Bank, which may influence the capacity to act independently.	√	√	√	X	√	√	√	√
3	Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Does not have management relation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders or with the Bank, which may influence the capacity to act independently.	√	√	√	X	√	√	√	√
4	Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Does not have family relation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders or with the Bank, which may influence the capacity to act independently.	√	√	√	√	√	√	√	√

Keterangan:
Kolom kosong anggota komite diisi dengan : v = Ya ; x = Tidak

Note:
Empty column of committee member is filled with: v = Yes; x = No

4. Duties and Responsibilities of the Risk Oversight Committee

Under the Risk Oversight Committee, duties and responsibilities of the Risk Oversight Committee are as follows:

5. Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko;

Berdasarkan Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko, tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

- 1) Mengevaluasi dan mengkaji kebijakan dan strategi manajemen risiko untuk dipresentasikan dan dimintakan persetujuan Dewan Komisaris:

5. Duties and Responsibilities of the Risk Oversight Committee;

Under the Risk Oversight Committee, duties and responsibilities of the Risk Oversight Committee is as follows:

- 1) Evaluating and reviewing the policies and strategies of risk management to be presented and requested for approval of the Board of Commissioners:

Komite Pemantau Risiko
Risk Oversight Committee

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Kerangka dan kebijakan Manajemen Risiko Bank b. Kebijakan serta limit treasury dan Financial Institution c. Kebijakan kredit d. Kebijakan di bidang risiko operasional termasuk Teknologi Informasi e. Kebijakan di bidang risiko likuiditas f. Kebijakan di bidang risiko pasar <ol style="list-style-type: none"> 2) Melakukan review dan menilai kebijakan dan prosedur untuk melaksanakan program stress testing, dan mereview efektivitas program stress testing. 3) Mengevaluasi kesesuaian antara pelaksanaan manajemen risiko dengan kebijakan manajemen risikonya. 4) Mengevaluasi kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian serta kesesuaian terhadap kerangka kerja kebijakan dan sistem pengendalian yang dibangun oleh unit-unit terkait. 5) Melakukan review atas Rencana Bisnis Bank sebelum mendapat persetujuan Dewan Komisaris. 6) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan unit-unit Manajemen Risiko. 7) Memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan informasi pemantauan risiko dan pelaksanaan tanggung jawabnya. 8) Hal-hal lain yang dipandang perlu oleh Dewan Komisaris ataupun Anggota Komite Pemantau Risiko. | <ul style="list-style-type: none"> a. Bank Risk Management framework and policy b. Policies as well as limit of treasury and Financial Institution c. Credit Policies d. Policies on operational risk including Information Technology e. Policies dealing with liquidity risk f. Policies dealing with market risk <ol style="list-style-type: none"> 2) Conducting reviews and assessing the policies and procedures to conduct stress testing, and reviewing effectiveness of stress testing program. 3) Evaluating the alignment between risk management implementation and the policy of risk management. 4) Evaluating compliance with the principles of prudence and alignment with the policy framework and control system built in by the relevant units. 5) Conducting reviews on Bank Business Plan prior to obtaining approval by the Board of Commissioners. 6) Monitoring and evaluating the implementation of Risk Management Committee and units of Risk Management. 7) Providing feedback to the Board of Commissioners relevant to the information of risk monitoring and the implementation of its responsibilities. 8) Other matters deemed necessary by the Board of Commissioners and the Risk Oversight Committee. |
|---|--|

6. Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko;
Selama 2013 telah diadakan rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 10 kali.

6. Frequency of Risk Oversight Committee Meetings;
During 2013 ROC held 10 meetings.

No	Nama / Name	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Frekuensi Kehadiran Rapat	Tingkat Kehadiran (%)
		Jan 22	Feb 18	Mar 27	Apr 18	Mei 27	Jun 19	Jul 22	Sep 23	Okt 21	Nov 26		
1.	Taswin Zakaria	√	√	√	√	√	√	√	√	x		9	89%
2.	Putu Antara	√	√	x	√							4	100%
3.	Umar Juoro	x	√	x	√	√	√	√	√	√	x	10	90%
4.	Spencer Lee Tien Chye	√	√ *)	√	√	√	√	√	√	√	√	10	100%
5.	Budhi Dyah Sitawati	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10	100%
6.	Achjar Iljas **)					√	√	√	√	√	√	6	100%
7.	Farid Harianto	x	√	x	√	x	√	√	x	√	√	10	70%
8.	Agus Kretarto	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10	100%

Keterangan / Note :

√ = Hadir/ Attendance; x = Tidak hadir/ Absent; *) melalui teknologi telekonferensi dalam rapat/through teleconference technology in the meeting

**) Undangan/Invitee

Kolom yang diblok menunjukkan yang bersangkutan belum atau tidak lagi sebagai Anggota/ Highlighted column shows the person was/not yet as member

7. Program dan Kegiatan Komite Pemantau Risiko:

Pada dasarnya program Komite Pemantau Risiko adalah dalam rangka mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko oleh Komite Manajemen Risiko dan Unit Manajemen Risiko.

Kegiatan utama Komite Pemantau Risiko dilaksanakan dengan rapat-rapat, yang selama tahun 2013 dilakukan sebanyak 10 kali rapat resmi seperti tersebut pada butir 6.

Adapun pokok bahasan masing-masing rapat adalah:

- 1) Tanggal 22 Januari 2013:
 - a. Enterprise Risk Dashboard (ERD), Risk Heat Map, Profile Risiko dan Tingkat Kesehatan Berdasarkan Risiko (RBBR) Desember 2012.
 - b. Portfolio kredit setiap segmen (Consumer, Commercial, Corporate & SME) termasuk dari anak-anak perusahaan.
 - c. Aplikasi kredit.
 - d. Wholesale banking accounts.
 - e. Manajemen risiko pasar dan likuiditas.
- 2) Tanggal 18 Februari 2013:
 - a. ERD.
 - b. Portfolio kredit setiap segmen termasuk dari anak-anak perusahaan.
 - c. Reviu wholesale banking accounts.
 - d. Dashboard manajemen risiko operasional.
 - e. Manajemen risiko pasar dan likuiditas.
 - f. Aspek tata kelola (GCG).
- 3) Tanggal 27 Maret 2013:
 - a. Kerangka kerja Manajemen Risiko Trading.
 - b. Kerangka kerja ICAAP.
 - c. Kerangka kerja validasi Model Risiko Kredit.

7. Programs and Activities of the Risk Oversight Committee:

In essence, the program of the Risk Oversight Committee is to evaluate the alignment between the policies and implementations of risk management, as well as to supervise and review the implementation of risk management performed by the Risk Management Committee and Risk Management Unit.

The main activities of the Risk Oversight Committee are carried out in meetings, which in the year of 2013 have been implemented 10 times in official meetings, as referred to in paragraph 6.

The subjects of each meeting are as follows:

- 1) On 22 January 2013:
 - a. Enterprise Risk Dashboard (ERD), Risk Heat Map, Risk Profile and Risk Based Bank Rating (RBBR) December 2012.
 - b. Credit portfolios by segment (Consumer, Commercial, Corporate & SME) including subsidiaries.
 - c. Credit applications.
 - d. Wholesale banking accounts.
 - e. Market and Liquidity Risk Management.
- 2) On 18 February 2013:
 - a. ERD.
 - b. Credit portfolio for each segment and from subsidiaries.
 - c. Review of wholesale banking accounts.
 - d. Dashboard of operational risk management.
 - e. Market and Liquidity Risk Management.
 - f. Good Corporate Governance (GCG).
- 3) On 27 March 2013:
 - a. Framework of Trading Risk Management.
 - b. Framework of ICAAP.
 - c. Framework of Credit Risk Model validation.

Komite Pemantau Risiko
Risk Oversight Committee

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> d. Addendum Kebijakan Perkreditan. e. Industry Outlook & Exposure Limit. f. Kampanye budaya risiko. g. ERD. h. Portfolio kredit tiap segmen dan dari anak-anak perusahaan. i. Manajemen risiko pasar dan likuiditas. j. Dashboard manajemen risiko operasional. k. Gold Pawn Broking. l. Aspek GCG. | <ul style="list-style-type: none"> d. Addendum to the Credit Policy. e. Industry Outlook & Exposure Limit. f. Risk culture campaigns. g. ERD. h. Credit portfolio for each segment and from subsidiaries. i. Market and Liquidity Risk Management. j. Dashboard of operational risk management. k. Gold Pawn Broking. l. GCG Aspect. |
| <p>4) Tanggal 18 April 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Profil Risiko triwulan I/2013. b. ERD dan Risk Heat Map. c. Portfolio kredit setiap segmen dan dari anak-anak perusahaan. d. Manajemen risiko pasar dan likuiditas. e. Dashboard manajemen risiko operasional. f. Risk Appetite Statement. g. BNM finding progress. h. Laporan Group Stress Testing. | <p>4) On 18 April 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Risk Profile of Quarter I/2013. b. ERD and Risk Heat Map. c. Credit portfolio by segment and subsidiaries. d. Market and Liquidity Risk Management. e. Dashboard of operational risk management. f. Risk Appetite Statement. g. BNM finding progress. h. Group Stress Testing Report. |
| <p>5) Tanggal 27 Mei 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ERD b. Portfolio kredit setiap segmen dan dari anak-anak perusahaan. c. Manajemen risiko pasar dan likuiditas. d. Dashboard manajemen risiko operasional. e. Aspek GCG f. Centralized Credit Risk rating System. g. WOM car refinancing h. Bisnis mikro. | <p>5) On 27 May 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ERD b. Credit portfolio for each segment and from subsidiaries. c. Market and Liquidity Risk Management. d. Dashboard of operational risk management. e. GCG Aspect f. Centralized Credit Risk Rating System. g. WOM car refinancing h. Micro Business. |
| <p>6) Tanggal 19 Juni 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ERD. b. Portfolio kredit setiap segmen dan dari anak-anak perusahaan. c. Manajemen risiko pasar dan likuiditas. d. Dashboard manajemen risiko operasional. e. Basel II. f. Perbandingan Expert Judgment | <p>6) On 19 June 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ERD. b. Credit portfolio for each segment and from subsidiaries. c. Market and Liquidity Risk Management. d. Dashboard of operational risk management. e. Basel II. f. Comparison of Expert Judgment |

Model (EJM) dan Foundation Internal Rate Based (FIRB) Scorecard.

- 7) Tanggal 22 Juli 2013:
 - a. Simulasi kenaikan BI rate.
 - b. RBBR triwulan II/2013.
 - c. ERD dan Risk Heat Map.
 - d. Portfolio kredit setiap segmen dan dari anak-anak perusahaan.
 - e. Manajemen risiko pasar dan likuiditas.
 - f. Dashboard manajemen risiko operasional.
 - g. Kepatuhan.
- 8) Tanggal 23 September 2013:
 - a. ERD.
 - b. Portfolio kredit setiap segmen dan dari anak-anak perusahaan.
 - c. Manajemen risikopasaranlikuiditas.
 - d. Dashboard manajemen risiko operasional.
 - e. Business Continuity Management Program.
 - f. Update tentang GCG.
 - g. Rencana Manajemen Risiko untuk situasi "Non BAU".
- 9) Tanggal 21 Oktober 2013:
 - a. ERD
 - b. Profil Risiko triwulan III/2013.
 - c. Portfolio kredit setiap segmen dan dari anak-anak perusahaan.
 - d. Manajemen risiko pasar dan likuiditas.
 - e. Dashboard manajemen risiko operasional.
 - f. Update tentang GCG.
- 10) Tanggal 26 November 2013:
 - a. ERD
 - b. Portfolio kredit setiap segmen dan dari anak-anak perusahaan.
 - c. Manajemen risiko pasar dan likuiditas.
 - d. Review Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.
 - e. Kerangka manajemen modal.

Model (EJM) and Foundation of Internal Rate Based (FIRB) Scorecard.

- 7) On 22 July 2013:
 - a. Simulation of the increase in BI rate.
 - b. RBBR quarter II/2013.
 - c. ERD and Risk Heat Map.
 - d. Credit portfolio for each segment and from subsidiaries.
 - e. Market and Liquidity Risk Management.
 - f. Dashboard of operational risk management.
 - g. Compliance.
- 8) On 23 September 2013:
 - a. ERD.
 - b. Credit portfolio for each segment and from subsidiaries.
 - c. Market and Liquidity Risk Management.
 - d. Dashboard of operational risk management.
 - e. Business Continuity Management Program.
 - f. Update on GCG.
 - g. Risk Management Plan for the situation of "Non BAU".
- 9) On 21 October 2013:
 - a. ERD
 - b. Risk Profile of Quarter III/2013.
 - c. Credit portfolio for each segment and from subsidiaries.
 - d. Market and liquidity risk management.
 - e. Dashboard of operational risk management.
 - f. Update on GCG.
- 10) On 26 November 2013:
 - a. ERD
 - b. Credit portfolio for each segment and from subsidiaries.
 - c. Market and Liquidity Risk Management.
 - d. Reviews of Guidelines for Risk Management Implementation.
 - e. Capital management framework

Komite Remunerasi Dan Nominasi

Remuneration and Nomination Committee

LAPORAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Komite di tingkat Dewan Komisaris yang membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan khususnya hal-hal terkait dengan kebijakan remunerasi dan nominasi.

A. DASAR PEMBENTUKAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

1. Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 beserta Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 sebagaimana telah diubah melalui Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum.
2. Pedoman Kerja Komite Remunerasi & Nominasi (Komite Remunerasi dan Nominasi Charter).

B. STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

1. Pengangkatan

- Surat Keputusan Direksi No.SK.2012.003/DIR COMPLIANCE tanggal 19 April 2012 tentang Penetapan Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Periode 2012 – 2015.
- No.SK.2013.006/DIR COMPLIANCE tanggal 1 Juni 2013 tentang Perubahan Atas Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi (Remuneration and Nomination Committee) Periode 2012 – 2015.

2. Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

- a. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang GCG, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua

REPORT OF REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

The Remuneration and Nomination Committee is a committee under BOC that supports the performance of oversight duties and functions, in particular relating to remuneration and nomination matters.

A. BASIS OF ESTABLISHMENT OF THE REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

1. Bank Indonesia Regulation No.8/4/PBI/2006 dated 30 January 2006, as amended by Bank Indonesia Regulation No.8/14/PBI/2006 dated 5 October 2006 and Bank Indonesia Circular Letter No.9/12/DPNP dated 30 May 2007, as amended by Bank Indonesia Circular Letter No.15/15/DPNP dated 29 April 2013 regarding Implementation of GCG for Commercial Banks.
2. Guidelines of Remuneration and Nomination Committee (Remuneration and Nomination Committee Charter)

B. STRUCTURE AND MEMBERSHIP OF REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

1. Appointment

- Board of Directors Decision No.SK.2012.003/DIR COMPLIANCE dated 19 April 2012 regarding the Establishment of Remuneration and Nomination Committee Membership Structure for period 2012-2015.
- No.SK.2013.006/DIR COMPLIANCE dated 1 June 2013 on the Change of Membership Structure of Remuneration and Nomination Committee for Period 2012 – 2015.

2. Composition of Remuneration and Nomination Committee

- a. Pursuant to regulation of Bank Indonesia on GCG, Remuneration and Nomination Committee shall consist of at least one Independent Commissioner concurrently as Chairman and member,

merangkap anggota, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumberdaya manusia atau seorang perwakilan pegawai.

- b. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi BII telah ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.
- c. Masa jabatan dari Ketua dan Anggota Komite tergantung pada masa jabatan dari Komisaris dan Karyawan Eksekutif yang bersangkutan. Namun, Dewan Komisaris memiliki hak, dari waktu ke waktu, untuk mengganti mereka.
- d. Dewan Komisaris wajib mengkaji ulang masa jabatan dan kinerja Komite dan semua anggota Komite minimal satu kali dalam satu tahun untuk menentukan apakah Komite telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pedoman kerja.
- e. Tidak ada Anggota Direksi yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
- f. Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

one Commissioner and one Executive Officer in charge of human capital or one representative from employees.

- b. BII has established that members of the Remuneration and Nomination Committee consist of over 3 (three) persons, and therefore requires the presence of at least 2 (two) Independent Commissioners.
- c. The term of service of Chairman and Members of the Committee would follow the term of office of the related Commissioners and Executive Officer. Nonetheless, the BOC has the right to replace them from time to time.
- d. BOC must review the Committee's term of service and performance as well as the performance of the Committee and Committee members at least once a year to determine whether the Committee has performed its function as stated in the charter.
- e. None of the BOD member serves as member of Remuneration and Nomination Committee.
- f. All members of the Remuneration and Nomination Committee possess integrity and good moral conduct.

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi (RNC) sesuai SK Direksi No.SK.2012.003/DIR COMPLIANCE terdiri dari:

In accordance with BOD Decision Letter No.SK.2012.003/DIR COMPLIANCE the composition of Remuneration and Nomination Committee (RNC) are as follows:

No	Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Note
1	Umar Juoro	Ketua Chairman	Komisaris Independen Independent Commissioner
2	Budhi Dyah Sitawati	Anggota Member	Komisaris Independen Independent Commissioner
3	Dato' Sri Abdul Wahid bin Omar	Anggota Member	Komisaris Commissioner
4	Paulus Danang Yanri Hatmoko	Anggota merangkap Sekretaris Eksekutif Member and Executive Secretary	Pejabat Eksekutif Executive Officer

Pada RNC Meeting tanggal 15 April 2013 terdapat perubahan susunan keanggotaan di mana Ibu Yardley Young menjadi Pejabat Eksekutif sebagai anggota RNC. Sedangkan Bapak Paulus Danang Yanri Hatmoko ditetapkan sebagai Sekretaris Eksekutif dari RNC.

A change in membership composition took place during RNC Meeting on 15 April 2013, wherein Yardley Young joined RNC as an Executive Officer, while Paulus Danang Yanri Hatmoko was appointed as Executive Secretary of RNC.

Komite Remunerasi Dan Nominasi

Remuneration and Nomination Committee

Dengan adanya pengunduran diri Dato' Sri Abdul Wahid bin Omar sebagai anggota Dewan Komisaris BII, maka keanggotaan dalam RNC digantikan oleh Presiden Komisaris BII, yaitu Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor yang telah ditetapkan pada RNC Meeting tanggal 27 Mei 2013.

With the resignation of Dato' Sri Abdul Wahid bin Omar as a member of BII BOC, his membership in RNC is taken over by BII's President Commissioner Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor, as ratified in RNC Meeting on 27 May 2013.

Perubahan ini ditetapkan dalam SK Direksi No.SK.2013.006/DIR COMPLIANCE sehingga susuna anggota RNC menjadi sebagai berikut:

The change was set forth in BOD Decision Letter No.SK.2013.006/DIR COMPLIANCE, and therefore the composition of RNC is as follows:

No	Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Note
1	Umar Juoro	Ketua Chairman	Komisaris Independen Independent Commissioner
2	Budhi Dyah Sitawati	Member Anggota	Komisaris Independen Independent Commissioner
3	Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor	Anggota Member	Komisaris Commissioner
4	Yardley	Member Anggota	Executive Officer Pejabat Eksekutif
5	Paulus Danang Yanri Hatmoko	Sekretaris Eksekutif dan Non Anggota Non Member and Executive Secretary	Sekretaris Eksekutif dan Non Anggota Non Member and Executive Secretary

3. Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh Pihak Independen anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

3. Independency of Members of the Remuneration and Nomination Committee

No Independent Parties of the Remuneration and Nomination Committee have any financial, management, ownership, and/or family relations with the BOC, BOD, and/or Controlling Shareholders or relations with the Bank that may affect their ability to take actions independently.

Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Independency of Members of The Remuneration And Nomination Committee

Kriteria Independensi	Anggota Committee					Independency Criteria
	UJ	BDS	TSD	YY	PDY	
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	√	√	√	√	√	Do not have share ownership relationship with members of Board of Commissioners, Board of Directors and/or controlling shareholders or with the Bank, as this relationship may affect its independency in performing their duties.
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	√	√	X	√	√	Do not have financial relationship with members of Board of Commissioners, Board of Directors and/or controlling shareholders or with the Bank, as this relationship may affect its independency in performing their duties.
Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	√	√	X	√	√	Do not have management relationship with members of Board of Commissioners, Board of Directors and/or controlling shareholders or with the Bank, as this relationship may affect its independency in performing their duties
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	√	√	√	√	√	Do not have family relationship with members of Board of Commissioners, Board of Directors and/ or controlling shareholders or with the Bank, as this relationship may affect its independency in performing their duties.

Description | Keterangan:

UJ = Umar Juoro; BDS = Budhi Dyah Sitawati; TSD = Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin; YY = Yardley Young; PDY = Paulus Danang Yanri Hatmoko
√ = Benar; X = Tidak Benar

Dengan demikian Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang terkait dengan persyaratan, susunan keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite.

Therefore, the Remuneration and Nomination Committee has met all requirements of Bank Indonesia pertaining to requirements, composition, competence, and independency of Committee members.

4. Kewajiban anggota Komite

Setiap anggota dari Komite wajib untuk:

- Menggunakan waktu yang mencukupi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diemban dengan optimal.
- Patuh pada standar etika yang tercantum pada Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku perusahaan.

5. Pelaporan

- Ketua komite wajib memberikan rekomendasi komite dan melaporkan setiap perkembangan kepada Dewan Komisaris.
- Pada setiap akhir tahun finansial berjalan, Komite wajib untuk mengkaji ulang setiap laporan yang berkaitan dengan Komite dan laporan tersebut wajib dimasukkan dan dipublikasikan di laporan tahunan Bank.

4. Obligations of Committee Members

Each member of the Committee is obliged to:

- Allocate sufficient time to be able to perform their duties and responsibilities optimally.
- Comply with the standard of ethics as stated in the company's Code of Ethics and Conduct.

5. Reporting

- Chairman of the Committee shall provide committee recommendations and report to the BOC.
- At the end of every financial year, the Committee needs to review all reports related

C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

1. Nominasi

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan nominasi dan prosedur untuk penunjukan dan/atau penggantian Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Independen, Dewan Pengawas Syariah, dan Executive Vice President untuk diajukan pada Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Memberikan rekomendasi mengenai kandidat untuk mengisi posisi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, yang didasarkan pada kompetensi, kemampuan, dan pengalaman masing-masing individu yang dinominasikan, untuk kemudian diajukan pada Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kandidat untuk menjadi anggota Komite Independen yang didasarkan pada kompetensi, kemampuan, dan pengalaman dari individu yang dinominasikan.
- d. Mengkaji dan memberikan persetujuan kepada kandidat yang sesuai untuk menjabat sebagai Executive Vice President berdasarkan dukungan dari Dewan Direksi.
- e. Mengawasi Dewan Komisaris terkait dengan jumlah, kompetensi, kemampuan, dan keseimbangan (dari status independen dan non-independen).
- f. Membantu dan/atau merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai promosi, konfirmasi dan penghentian masa tugas dari anggota Dewan Direksi.
- g. Mengkaji kandidat-kandidat potensial untuk posisi pengganti pada nominasi Presiden Komisaris dan Presiden Direktur bagi anak perusahaan.

C. DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

1. Nomination

- a. Develop and make recommendations to BOC regarding policies and procedures to appoint and/or to replace members of the BOC, BOD, Independent Committees, Sharia Supervisory Board, and Executive Vice President, to be submitted at the General Meeting of Shareholders.
- b. Provide recommendations on candidates to occupy the position of members of BOC, BOD, and Sharia Supervisory Board based on competencies, capabilities, and experience of the respective candidates, to be submitted at the Annual General Meeting of Shareholders.
- c. Provide recommendation to BOC regarding candidates become a member of Independent Committees based on competencies, capabilities, and experience of the respective candidates.
- d. Review and grant approval to candidates deemed appropriate as Executive Vice President with endorsement from the BOD.
- e. Oversee the BOC in terms of number, competencies, capabilities, and balance (between independent and non-independent members).
- f. Assist and/or recommend to BOC regarding promotions, confirmation, and termination of members of the BOD.
- g. Review potential candidates as replacements for the nomination of President Commissioner and President Director of subsidiaries.

2. Remunerasi

- a. Melakukan evaluasi dari kebijakan remunerasi dan/atau rencana dan syarat dan ketentuan masa tugas bagi Dewan Direksi, Komite Independen dan Dewan Pengawas Syariah.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan kebijakan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, untuk kemudian diajukan pada Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan karyawan secara umum, untuk kemudian diajukan kepada Dewan Direksi.
- d. Memastikan keselarasan antara keputusan remunerasi dengan kinerja finansial dan hasil pencadangan, hasil penilaian kinerja, kesetaraan dengan kelompok yang setara, dan juga sasaran jangka panjang dan strategi Bank.
- e. Memberikan rekomendasi paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris kepada pemegang saham mayoritas.
- f. Mengajukan dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai kepangkatan bagi Dewan Direksi.

3. Manajemen Kinerja

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kerangka Pengelolaan Kinerja dan/atau model yang juga termasuk penentuan sasaran, kriteria keberhasilan, dan juga tolak ukur bagi scorecard Dewan Direksi pada tiap tahun finansial.
- b. Menilai dan melakukan evaluasi terhadap keseluruhan kinerja, pengembangan, dan keefektifan dari anggota Dewan Direksi, dan juga prosedur penilaian yang bersangkutan minimal satu kali dalam satu tahun.
- c. Melakukan identifikasi dan memberikan rekomendasi terhadap setiap sistem pengukuran terbaru untuk meningkatkan keefektifan dari proses penilaian kinerja bagi Dewan Direksi.

2. Remuneration

- a. Evaluate remuneration policy and/or plan and terms and conditions of BOD, Independent Committees, and Sharia Supervisory Board office term.
- b. Provide recommendation to BOC regarding remuneration policy for members of the BOC and BOD, to be further submitted at the Annual General Meeting of Shareholders.
- c. Provide recommendations to BOC regarding remuneration policy for Executive Officers and the employees in general, to be submitted to the BOD.
- d. Ensure alignment between remuneration decisions with financial performance and provisioning, performance appraisal results, appropriateness with peers, and the Bank's long-term objectives and strategy.
- e. Provide recommendation on remuneration packages for members of BOC to majority shareholders.
- f. Propose and recommend to BOC official rank and banding of BOD.

3. Performance Management

- a. Provide recommendation to BOC regarding Performance Management Framework and/or model, which includes setting the objectives, criteria of accomplishment, and benchmarks for BOD Scorecard each financial year.
- b. Assess and evaluate the overall performance, development, and effectiveness of BOD members, as well as the evaluation procedure, at least once every year.
- c. Identify and provide recommendations on the latest appraisal system to improve the effectiveness of the BOD performance appraisal process.

Komite Remunerasi Dan Nominasi

Remuneration and Nomination Committee

4. Rencana Suksesi dan Pengelolaan Talent

- a. Mengkaji proses pengelolaan Talent, diantaranya termasuk membangun rencana suksesi dan pengembangan bagi anggota Dewan Direksi dan juga proyek-proyek besar lainnya yang berkenaan dengan Human Capital dan/atau inisiatif untuk mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.
- b. Memonitor dan memberikan masukan kepada Dewan Direksi sehubungan dengan Kerangka Pengembangan Kepemimpinan, rencana suksesi dan pengembangan bagi Dewan untuk memastikan kelanjutan dari rencana suksesi.
- c. Memastikan anggota Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Independen, Dewan Pengawas Syariah agar mendapatkan pengembangan yang sesuai dan berkelanjutan serta mengetahui perkembangan terbaru di industri.
- d. Mengawasi kebijakan pengembangan perusahaan untuk memastikannya sejalan dengan sasaran dan strategi keseluruhan Human Capital.

5. Lain-lain

- a. Menyetujui penunjukan konsultan eksternal dan/atau penasihat yang berkaitan dengan area tanggung jawab Komite.
- b. Melakukan identifikasi dan membuat rekomendasi untuk solusi yang sesuai dalam mengatasi setiap permasalahan dan/atau konflik kepentingan yang mempengaruhi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.
- c. Mengimplementasikan tugas dan/atau tanggung jawab lainnya yang dibebankan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.
- d. Mengkaji proyek-proyek besar berkaitan dengan Human Capital atau inisiatif yang mengacu pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

4. Succession Planning and Talent Management

- a. Review talent management process, including formulation of succession planning and development programs for members of the BOD as well as other major projects relating to Human Capital and/or initiative to support the implementation of Good Corporate Governance principles.
- b. Monitor and provide input to the BOD regarding Leadership Development Framework, succession planning, and development plans for BOD to ensure the continuance of succession planning.
- c. Ensure that members of the BOC, BOD, Independent Committees, and Sharia Supervisory Board receive suitable and sustainable development programs, and monitor the recent updates of the industry.
- d. Supervise the company's development policies to assure their compatibility with Human Capital's overall goals and strategy.

5. Others

- a. Approve the appointment of external consultants and/or advisors for matters that are within the Committee's scope of responsibilities.
- b. Identify and develop recommendations on appropriate solutions to address all problems and/or conflicts of interest that may affect the BOC and BOD.
- c. Carry out other duties and/or responsibilities assigned by BOC from time to time.
- d. Review major projects relating to Human Capital or initiatives related to Good Corporate Governance principles.

D. PROGRAM KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI BESERTA REALISASINYA

Selama 2013, program kerja beserta realisasi yang telah dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi meliputi:

1. Melakukan evaluasi dan review terhadap kinerja Direksi selama tahun 2012 dalam Balanced Scorecard 2012.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris perihal kebijakan remunerasi serta pembaharuan kontrak anggota Dewan Direksi di tahun 2013.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai alokasi pembayaran bonus kinerja dan kenaikan gaji untuk karyawan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Melakukan review terhadap kebijakan remunerasi Dewan Komisaris serta pembaharuan kontrak bagi anggota Dewan Komisaris di tahun 2013.
5. Menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja terhadap penilaian kinerja bagi Direksi pada Balanced Scorecard 2013.
6. Melakukan nominasi serta memberikan rekomendasi dalam pengangkatan anggota dari komite independen.
7. Melakukan nominasi serta memberikan rekomendasi calon Direktur Kepatuhan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dan disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham.

E. RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

1. Frekuensi dan Kuorum

- a. Sesuai dengan charter komite, komite diwajibkan mengadakan rapat minimal 4 (empat) kali dalam satu tahun, sesuai dengan kebutuhan Bank. Selama 2013, Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi telah diadakan 13 (tiga belas) kali.

D. WORK PROGRAM OF REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE AND ITS REALIZATION

During 2013, the work program and realization carried out by the Remuneration and Nomination Committee was:

1. Evaluated and reviewed the performance of BOD during 2012 using Balanced Scorecard 2012.
2. Provided recommendations to the BOD regarding remuneration policy and updated the contracts of BOD for 2013.
3. Provided recommendation to the BOD regarding performance bonuses and salary raises for employees, members of the BOC, and BOD.
4. Reviewed remuneration policy of the BOC and updated the contracts of BOC for 2013.
5. Included Performance Achievement Indicators for performance appraisal of the BOD in 2013 Balanced Scorecard.
6. Nominated and provided recommendations on the appointment of members of independent committees.
7. Nominated and provided recommendations on candidates for Compliance Director to BOC, to be submitted at and approved by the General Meeting of Shareholders.

E. MEETING OF REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

1. Meeting Frequency and Quorum

- a. As stipulated by committee charter, the committee needs to conduct meetings at least 4 (four) times in one year, according to the Bank's requirements. During 2013, the Remuneration and Nomination Committee convened 13 (thirteen) times.

Komite Remunerasi Dan Nominasi

Remuneration and Nomination Committee

- b. Semua rapat harus dihadiri oleh minimal 51% dari jumlah anggota, termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif.
- c. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi dapat mengadakan rapat kapanpun dirasa perlu bila ada masalah penting yang perlu segera didiskusikan dan diputuskan oleh Komite.

2. Notifikasi

- a. Sebelum diadakannya rapat Komite, salah satu anggota akan mengirimkan pemberitahuan tertulis untuk menginformasikan tanggal, waktu, tempat, dan objektif dari rapat tersebut. Pemberitahuan ini wajib untuk diberikan kepada setiap anggota Komite sedikitnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan.
- b. Periode pemberian notifikasi dapat dipersingkat dalam kasus adanya kepentingan yang bersifat emergensi atau jika disetujui oleh semua anggota Komite.

3. Agenda & Laporan

- a. Agenda dan laporan wajib untuk diberikan kepada setiap anggota Komite sedikitnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat yang dijadwalkan atau jika terjadi kasus rapat emergensi maka diberikan pada saat rapat berjalan.

4. Metode Resolusi

- a. Semua rapat wajib dipimpin oleh Ketua Komite.
- b. Jika Ketua berhalangan hadir, maka anggota lainnya dalam Komite harus memilih satu anggota untuk memimpin rapat.

- b. All meetings need to be attended by 51% of the total members at a minimum, including 1 (one) Independent Commissioner and Executive Officer.
- c. Chairman of Remuneration and Nomination Committee may hold a meeting at any time deemed necessary to discuss and deliberate on urgent matters immediately.

2. Notification

- a. Prior to Committee meeting, one member shall announce in written form the date, time, place, and objective of the meeting. The announcement has to be delivered to each member of the Committee at least 5 (five) working days prior to the scheduled meeting.
- b. Notice period may be shortened in the event of emergency or with the approval of all members of the Committee.

3. Meeting Agenda and Report

- a. Meeting agenda and report must be provided to all members of the Committee at least 5 (five) working days prior to the scheduled meeting; in the event of emergency, meeting agenda and report may be provided during the meeting.

4. Resolution Methods

- a. All meetings are chaired by Chairman of the Committee.
- b. If the Chairman is unable to attend, the other members of the Committee need to elect one member to chair the meeting.

- c. Keputusan yang dihasilkan dari rapat harus didapat dari persetujuan penuh. Dalam keadaan di mana persetujuan sepenuhnya tidak dapat terpenuhi maka resolusi dari Komite harus diputuskan berdasarkan suara mayoritas dari seluruh anggota.
 - d. Setiap anggota yang memiliki kepentingan pada subjek-subjek tertentu tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak suara mereka, jika terjadi hal tersebut maka jumlah suara yang tidak dapat digunakan tidak akan dimasukkan ke dalam jumlah suara anggota yang sah untuk dihitung.
 - e. Setiap rekomendasi Komite wajib diberikan kepada seluruh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
 - f. Spesialis dan/atau konsultan internal atau eksternal, Direksi dan tiap karyawan lainnya dapat diundang untuk menghadiri rapat dimana kehadiran mereka dianggap layak seperti diputuskan oleh Ketua Komite.
- c. Decisions need to be unanimous. If the full consensus cannot be reached, the resolution of the Committee is determined based on the majority votes of all members.
 - d. Any member who maintains an interest on certain subjects may not use their voting rights. Under such circumstance, the votes of the members with interests will be set aside as invalid votes.
 - e. All recommendations of the Committee must be submitted to the BOC to obtain approval.
 - f. Specialists and/or internal or external consultants, BOD, and other employees may be invited to attend meetings if their attendance is deemed necessary, as decided by the Chairperson of the Committee.

5. Notulen Rapat

- a. Setiap diskusi yang terjadi pada rapat Komite didokumentasikan melalui Notulen Rapat. Notulen rapat berisikan agenda, poin-poin diskusi penting, semua keputusan yang diambil, dan pandangan yang bertentangan. Notulen ditandatangani oleh semua anggota Komite yang hadir pada rapat.
- b. Notulen Rapat wajib ditanda-tangani oleh Ketua dan semua anggota yang hadir pada saat rapat dan disimpan sebagai catatan setelah disetujui oleh ketua dan salinan dari notulen akan didistribusikan kepada setiap anggota Komite.
- c. Pendapat yang bertentangan (jika ada) wajib untuk di dokumentasikan dengan layak dalam Notulen.

5. Minutes of Meeting

- a. All discussions during the meetings of the Committee are recorded in Minutes of Meeting. The Minutes of Meetings contain details of agenda, key discussion points, decisions taken, and dissenting opinions. All members of the Committee who attend shall sign Minutes of Meetings.
- b. The Minutes of Meetings must be signed by the Chairman and all attending members during the meeting and kept as a record following approval from the Chairman; a copy is distributed to all members of the Committee.
- c. Dissenting opinions (if any) must be documented properly in the Minutes of Meeting.

Komite Remunerasi Dan Nominasi

Remuneration and Nomination Committee

Tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dalam Rapat adalah sebagai berikut:

The record of attendance of the members of Remuneration and Nomination Committee is as follows:

No.	Anggota RNC Member	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Frekuensi Rapat Meeting Frequency
		28 Jan	19 Feb	22 Feb	22 Mar	15 Apr	27 Mei	27 Jun	16 Jul	04 Sep	27 Sep	23 Oct	21 Nov	27 Nov	
1	Umar Juoro	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	13
2	Dato' Sri Abdul Wahid bin Omar	√	√	√	√	√	X	-	-	-	-	-	-	-	6
3	Budhi Dyah Sitawati	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	13
4	Paulus Danang Yanri Hatmoko	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	13
New Members															
1	Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor	-	-	-	-	-	-	√	√	√	√	√	√	√	7
2	Yardley Young	-	-	-	-	-	√	√	√	√	X	√	X	√	8

Direksi Board of Directors

Direksi merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pengelolaan Bank dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya melalui RUPS. Anggota Direksi diangkat melalui RUPS yang pelaksanaannya mengikuti tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar serta sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan Bank Indonesia dan Undang-Undang yang berlaku.

Direksi memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan Anggaran Dasar yang merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) serta pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang selalu dikinikan secara berkala.

A. Jumlah, Komposisi dan Kriteria Direksi Number, Composition and Criteria of the Board of Directors

Berdasarkan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 11 November 2013 maka telah disetujui pengunduran diri Dato' Khairussaleh Bin Ramli selaku Presiden Direktur dan Rita Mirasari selaku Direktur Kepatuhan merangkap Sekretaris Perusahaan efektif sejak tanggal 11 November 2013.

Selanjutnya dalam RUPS Luar Biasa tersebut disetujui pula pelepasan jabatan Taswin Zakaria sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk selanjutnya diangkat menjadi Presiden Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada Tahun 2015. Thilagavathy Nadason ditunjuk sebagai Pejabat Sementara Presiden Direktur sampai dengan disetujuinya pengangkatan Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur oleh Regulator.

Penugasan sementara Ani Pangestu sebagai Pejabat Sementara Direktur Kepatuhan merangkap Sekretaris Perusahaan sampai dengan RUPS menyetujui pengangkatan Direktur

The Board of Directors (BOD) is the Company organ that is fully responsible for the Bank's operations and is accountable to the GMS. Members of the BOD are appointed in GMS. The process follows the procedure of nomination, appointment, replacement, and termination of members as regulated in the Articles of Association and is in accordance with the terms and conditions of Bank Indonesia regulations and other prevailing laws.

The BOD has the authority and responsibility that are clearly defined according to the Articles of Association, which refer to the Law of Limited Liability Company, Bank Indonesia provisions, Financial Services Authority, provisions of Capital Market and Financial Institution Supervisory Body (Bapepam-LK) and the Board of Directors' Internal Guidelines, updated periodically.

A. Number, Composition and Criteria of the Board of Directors

Resolutions of the Company's Extraordinary GMS on 11 November 2013 approved the resignation of Dato' Khairussaleh Bin Ramli as President Director and Rita Mirasari as Director of Compliance and Corporate Secretary, effective as of 11 November 2013.

The Extraordinary GMS also approved the release of Taswin Zakaria as a member of the Company's Board of Commissioners to be appointed as President Director. The appointment is effective as of the closing of the Meeting until the remaining tenure of other members of the Board of Directors who remain in office, namely until the closing of Company Annual General Meeting of Shareholders in 2015. Thilagavathy Nadason is appointed as Interim Executive President Director until the approval of Taswin Zakaria as President Director.

The temporary assignment of Ani Pangestu as Interim Director of Compliance and Corporate Secretary until the GMS approves the appointment of the new Compliance Director has obtained

Direksi

Board of Directors

Kepatuhan yang baru dan pengangkatan tersebut telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta perseroan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan yang baru.

Dengan demikian berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 11 November 2013, jumlah anggota Direksi BII adalah 8 (delapan) orang yang dipimpin oleh seorang Presiden Direktur dengan komposisi sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama / Name	Position
1	Presiden Direktur	Taswin Zakaria*)	President Director
2	Direktur dan Pejabat Sementara Presiden Direktur	Thilagavathy Nadason	Director
3	Direktur	Ghazali bin Mohd Rasad	Director
4	Direktur	Rahardja Alimhamzah	Director
5	Direktur	Jenny Wiriyanto	Director
6	Direktur	Hedy Maria Helena Lopian	Director
7	Direktur dan Pejabat Sementara Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	Ani Pangestu	Director and Acting Compliance Director
8	Direktur	Lani Darmawan	Director

Keterangan : *) Taswin Zakaria telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Presiden Direktur efektif sejak 12 Maret 2014
 Note: *) Taswin Zakaria has got the approval from Financial Services Authority as President Director effective as of 12 March 2014

Selanjutnya berdasarkan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 12 Maret 2014 telah disetujui pengangkatan Dhien Tjahajani sebagai anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2015. Dhien Tjahajani ditetapkan sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan (Direktur Kepatuhan). Pengangkatan tersebut akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Penugasan Sementara Ani Pangestu sebagai Direktur Kepatuhan akan berakhir sejak Otoritas Jasa Keuangan menyetujui pengangkatan Dhien Tjahajani sebagai Direktur Kepatuhan yang baru.

Berdasarkan RUPS Luar Biasa tersebut pula telah diterima dan disahkan pengunduran diri Hedy Maria Helena Lopian dan Rahardja Alimhamzah

approval from the Financial Services Authority, and the company has appointed the new Corporate Secretary.

With these changes based on the resolutions of the Company's Extraordinary GMS on 11 November 2013, the Board of Directors consists of 8 (eight) executives, led by a President Director, with the following composition:

Further, based on Extraordinary GMS held on 12 March 2014, the appointment of Dhien Tjahajani as a member of the Board of Directors received approval and became effective as of the closing of the meeting until the remaining period of other members of BOD who remain in office, namely after the closing of Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2015. Dhien Tjahajani is appointed as Director in charge of Compliance Function (Director of Compliance). The appointment shall be effective after approval from Financial Services Authority.

Temporary assignment of Ani Pangestu as Director of Compliance shall end as of the approval of Financial Services Authority on the appointment of Dhien Tjahajani as the new Director of Compliance.

The Extraordinary GMS also accepted and validated the resignation of Hedy Maria Helena Lopian and Rahardja Alimhamzah as Directors

selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2014.

Dengan demikian berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 12 Maret 2014, jumlah anggota Direksi BII adalah 9 (sembilan) orang yang dipimpin oleh seorang Presiden Direktur dengan susunan sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama / Name	Position
1	Presiden Direktur	Taswin Zakaria	President Director
2	Direktur dan Pejabat Sementara Presiden Direktur	Thilagavathy Nadason	Director
3	Direktur	Ghazali bin Mohd Rasad	Director
4	Direktur	Jenny Wiriyanto	Director
5	Direktur dan Pejabat Sementara Direktur Kepatuhan merangkap Sekretaris Perusahaan	Ani Pangestu	Director
6	Direktur	Lani Darmawan	Director
7	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Dhien Tjahajani	Director
8	Direktur	Hedy Maria Helena Lopian	Director
9	Direktur	Rahardja Alimhamzah	Director

Taswin Zakaria telah mendapat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Presiden Direktur efektif sejak 12 Maret 2014. Dengan demikian penugasan sementara Thilagavathy Nadason sebagai Pejabat Sementara Presiden Direktur berakhir sejak Otoritas Jasa Keuangan menyetujui pengangkatan Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur. Thilagavathy Nadason akan kembali menjalankan tugas sebagai Direktur Perseroan.

Berdasarkan Curriculum vitae yang ditandatangani masing-masing anggota Direksi maka seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia mengenai Good Corporate Governance maka jumlah, komposisi dan kriteria Direksi telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:

1. Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.

of the Company, effective as of the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2014.

Therefore, based on the resolutions of the Company's Extraordinary GMS on 12 March 2014, the Board of Directors of BII consists of 9 (nine) executives, led by a President Director, with the following composition:

Taswin Zakaria received approval from the Financial Services Authority as President Director effective as of 12 March 2014. With this approval, temporary assignment of Thilagavathy Nadason as Interim Executive of President Director is concluded. Thilagavathy Nadason shall resume the role as Director of the Company.

Viewing the Curriculum Vitae signed by each member of the Board of Directors, all members of the Board of Directors possess at minimum 5 (five) years' experience in operational activities as a Bank Executive Officer.

Pursuant to Bank Indonesia Regulation regarding Good Corporate Governance, the number, composition, and criteria of Board of Directors have met the requirements of Bank Indonesia and/or Financial Services Authority, as follows:

1. All members of the Board of Directors domicile in Indonesia.

Direksi

Board of Directors

2. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.
 3. Anggota Direksi telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, reputasi keuangan dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
 4. Rincian kualifikasi Direktur disajikan dalam profil singkat Direksi pada Laporan Tahunan ini.
 5. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
 6. Seluruh anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
2. The Board of Directors shall comprise a minimum of 3 (three) persons.
 3. Members of the Board of Directors have satisfied the requirements of integrity, competence, financial reputation, and have passed the Fit and Proper Test conducted to attain approval from Bank Indonesia.
 4. Details of qualification of the Directors are presented in an executive profile of the Board of Directors in this Annual Report.
 5. Replacement and/or appointment of members of the Board of Directors have taken into account recommendations from Remuneration and Nomination Committee.
 6. No member of the Board of Directors may confer a general authorization to another party, which would result in the transfer of duties and functions of Board of Directors.

Dari susunan Direksi BII, terdapat 2 (dua) Direktur berkewarganegaraan asing yaitu Thilagavathy Nadason dan Ghazali bin Mohd Rasad yang telah memenuhi persyaratan Bank Indonesia terkait Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing, dengan data-data sebagai berikut:

Based on the composition of BII's BOD, 2 (two) Directors are of foreign citizenship, namely Thilagavathy Nadason and Ghazali bin Mohd Rasad, who have met requirements of Bank Indonesia regarding Employment of Foreign Workers, with the following details:

Keterangan Direksi Berkewarganegaraan Asing | Data of Directors of Foreign Citizenship

No	Nama / Name	Kewarganegaraan Citizenship	KITAP / KITAS	IMTA		Jabatan Position
				No. Ijin Licence	Masa Berlaku validity	
1	Thilagavathy Nadason	Malaysia	KITAP 2D11JCo010-H (berlaku sampai dengan 7 Agustus 2014)	KEP.13681MEN/P/IMTA/2013	7 Agustus 2014	Direktur Director
2	Ghazali bin Mohd Rasad	Malaysia	KITAS 2C21E9077-M (berlaku sampai dengan 25 Mei 2014) (KITAP)	KEP.04436/MEN/P/IMTA/2014	25 Mei 2015	Direktur Director

B. Pengangkatan dan Masa Jabatan Direksi

Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.

B. Board of Directors' Appointment and Term of Office

The replacement and/or appointment of members of the BOD have taken into account recommendations from Nomination Committee or Remuneration and Nomination Committee.

Masa jabatan masing-masing Anggota Direksi adalah sebagai berikut:

Term of Office of each Member of the Board of Directors is:

No	Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Persetujuan Approval Date		Tenure until Masa Jabatan s/d
			RUPS I GMS	Bank Indonesia	
1	Taswin Zakaria	Presiden Direktur I President Director	11 November 2013	12 Maret 2014	RUPST 2015
2	Thilagavathy Nadason	Direktur I Director	20 March 2009	4 August 2009	RUPST 2015
3	Ghazali bin Mohd Rasad	Direktur I Director	20 March 2009	18 May 2009	RUPST 2015
4	Jenny Wiriyanto	Direktur I Director	29 May 2009	20 October 2009	RUPST 2015
5	Ani Pangestu	Direktur I Director	16 January 2012	26 April 2012	RUPST 2015
6	Lani Darmawan	Direktur I Director	20 March 2009	18 May 2009	RUPST 2015
7	Dhien Tjahajani*)	Direktur I Director	12 March 2014	Dalam proses	RUPST 2015
8	Hedy Maria Helena Lopian	Direktur I Director	27 August 2010	27 April 2011	RUPST 2014
9	Rahardja Alimhamzah	Direktur Director	20 March 2009	18 May 2009	RUPST 2014

Catatan: *) Dhien Tjahajani dalam proses F & P dari Otoritas Jasa Keuangan

Note: *) Dhien Tjahajani is under the F & P Process with Financial Services Authority

C. Rangkap Jabatan Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance yakni menjadi anggota Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.

Dalam hal ini rangkap jabatan sebagaimana diperkenankan dalam PBI tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum oleh Lani Darmawan sebagai Presiden Komisaris pada PT BII Finance Center. Lani Darmawan bertanggung jawab terhadap pengawasan serta menjalankan tugas fungsional menjadi Presiden Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Perseroan yaitu PT BII Finance Center tanpa mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.

Anggota Direksi tidak ada yang menjadi anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

C. Concurrent Positions of the Board of Directors

No member of BOD holds a concurrent position, with the exception of matters stipulated by Bank Indonesia regulations regarding the implementation of Good Corporate Governance, namely serving as member of the Board of Commissioners for the purpose to perform oversight function on investments in non-bank subsidiaries that are controlled by the Bank.

In this regard, a concurrent position as allowed by BI Regulation regarding the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks is assumed by Lani Darmawan who also serves as President Commissioner in PT BII Finance Center. Lani Darmawan is responsible for the oversight and functional duties of President Commissioner of the non-bank subsidiary controlled by the Company, PT BII Finance Center, without setting aside the performance of duties and responsibilities as a member of the Bank's Board of Directors.

None of the members of the Board of Directors serve as members of the Audit Committee, Risk Oversight Committee, or Remuneration and Nomination Committee.

Direksi

Board of Directors

D. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Antara Perusahaan dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi

Antara Perusahaan dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi terdapat hubungan kepengurusan sebagai berikut:

No	Nama / Name	BII	WOM	BII Finance
1	Taswin Zakaria	PD	-	-
2	Thilagavathy Nadason	D	-	-
3	Ghazali bin Mohd Rasad	D	-	-
4	Jenny Wiriyanto	D	-	-
5	Lani Darmawan	D	-	PK
6	Ani Pangestu	D	-	-
7	Dhien Tjahajani*)	D	-	-
8	Hedy Maria Helena Lopian	D	-	-
9	Rahardja Alimhamzah	D	-	-

Keterangan / Note :

BII – PT Bank Internasional Indonesia, Tbk. | WOM – PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk. | BII Finance

PD – Presiden Direktur | D – Direktur | PK – Presiden Komisaris

*) Dalam proses Fit & Proper Test dari Otoritas Jasa Keuangan

PD – Presiden Direktur / President Director | D – Direktur / Director | PK – Presiden Komisaris / President Commissioner

*) Under Fit & Proper Test process with Financial Services Authority

D. Management and Supervisory Relationships Between the Company, Subsidiaries, and Affiliated Companies

The management relationship between Subsidiaries and Affiliated Companies is as follows:

E. Independensi dan Transparansi Direksi

Independensi dan aspek Transparansi Direksi sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan pribadi dari seluruh anggota Direksi. Seluruh anggota Direksi BII tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Anggota Direksi tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada BII maupun pada bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri).

Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Anggota Direksi berkomitmen terhadap pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku. Anggota Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

E. Independency and Transparency of the Board of Directors

Independency and transparency of the Board of Directors are stated in the personal Statement Letter of members of the Board of Directors. No BOD members have financial relationship or familial relationship until the second degree with other members of the BOD and/or members of the BOC.

Members of the BOD, individually or collectively, do not own more than 25% (twenty five percent) of paid-in capital in another company. Members of the BOD do not have 5% (five percent) shares or more in BII or other banks and companies (domestic or overseas).

The BOD does not delegate duties to other parties that would result in the transfer of duties and functions of the BOD.

Anggota Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.

Members of the BOD do not receive and/or take personal gain from the Bank other than remuneration and other facilities set forth by the General Meeting of Shareholders.

Transparansi Hubungan Keluarga | Transparency of Family Relation

No	Nama Name	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Lainnya Other Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
1	Taswin Zakaria	-	√	-	√	-	√
2	Thilagavathy Nadason	-	√	-	√	-	√
3	Ghazali bin Mohd Rasad	-	√	-	√	-	√
4	Jenny Wiriyanto	-	√	-	√	-	√
5	Lani Darmawan	-	√	-	√	-	√
6	Ani Pangestu	-	√	-	√	-	√
7	Dhien Tjahajani*)	-	√	-	√	-	√
8	Hedy Maria Helena Lopian	-	√	-	√	-	√
9	Rahardja Alimhamzah	-	√	-	√	-	√

Transparansi Hubungan Keuangan | Transparency of Financial Relation

No	Nama Name	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Lainnya Other Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
1	Taswin Zakaria	-	√	-	√	-	√
2	Thilagavathy Nadason	-	√	-	√	-	√
3	Ghazali bin Mohd Rasad	-	√	-	√	-	√
4	Jenny Wiriyanto	-	√	-	√	-	√
5	Lani Darmawan	-	√	-	√	-	√
6	Ani Pangestu	-	√	-	√	-	√
7	Dhien Tjahajani*)	-	√	-	√	-	√
8	Hedy Maria Helena Lopian	-	√	-	√	-	√
9	Rahardja Alimhamzah	-	√	-	√	-	√

Transparansi Kepemilikan Saham

Anggota Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Pengungkapan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Transparency of Shares Ownership

Members of the BOD are required to disclose share ownership that amounts to 5% (five percent) or more, in the Bank and in other banks and companies, domestic and overseas. The disclosure is presented in the following table:

Direksi

Board of Directors

Saham Mencapai 5% atau lebih dari Modal Disetor

Share ownership in excess of 5% or more from Paid Up Capital

No	Nama / Name	Perusahaan Lainnya Other Company	Bank Lain / Other Bank	Pemegang Saham Lainnya Non-Bank Financial Institution
1	Taswin Zakaria	Tidak ada / None	Tidak ada / None	Tidak ada / None
2	Thilagavathy Nadason	Tidak ada / None	Tidak ada / None	Tidak ada / None
3	Ghazali bin Mohd Rasad	Tidak ada / None	Tidak ada / None	Tidak ada / None
4	Jenny Wiriyanto	Tidak ada / None	Tidak ada / None	Tidak ada / None
5	Lani Darmawan	Tidak ada / None	Tidak ada / None	Tidak ada / None
6	Ani Pangestu	Tidak ada / None	Tidak ada / None	Tidak ada / None
7	Dhien Tjahajani*)	Tidak ada / None	Tidak ada / None	Tidak ada / None
8	Hedy Maria Helena Lopian	Tidak ada / None	Tidak ada / None	Tidak ada / None
9	Rahardja Alimhamzah	Tidak ada / None	Tidak ada / None	Tidak ada / None

Namun demikian salah satu anggota Direksi, Thilagavathy Nadason memiliki saham dalam portofolio yang bersangkutan dengan kepemilikannya sangat kecil dan kurang dari 5% pada bank lain dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

One of the members of the BOD, Thilagavathy Nadason has share ownership in a minor amount but is less than 5% in other banks and other companies, domestic and overseas.

F. Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam pengembangan bisnis dan pengelolaan risiko Bank secara profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian bank dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi untuk meningkatkan shareholders value.
2. Direksi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan Bank sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar serta senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, baik yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Departemen Keuangan, Bapepam-LK dan otoritas lainnya yang berwenang.
3. Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

F. Duties and Responsibilities of the Board of Directors

1. BOD is fully responsible for the Bank's business development and risk management, by promoting prudential banking and GCG principles in all banking activities at all levels of the organization, in order to maximize shareholder value.
2. BOD carries out its duties and responsibilities relating to the Bank's management in accordance with its authorities as stipulated by the Articles of Association and has consistently complied with the prevailing laws and regulations issued by Bank Indonesia, Ministry of Finance, Bapepam-LK, or other related authorities.
3. The BOD follows up audit findings and recommendations provided by the Bank's Internal Audit Unit, external auditor, and result of supervision from Bank Indonesia and/or other competent authorities.

4. Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) serta Satuan Kerja Kepatuhan.
 5. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Perusahaan membentuk komite dibawah Direksi sebagai berikut:
 - a. Komite Manajemen Risiko.
 - b. Komite Aset dan Liabilities Management (ALCO).
 - c. Komite Teknologi Informasi.
 - d. Komite Human Capital.
 - e. Komite Audit Internal.
 Informasi lengkap mengenai komite-komite ini akan dipaparkan pada bagian Komite-Komite.
 6. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
 7. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai menggunakan media yang mudah diakses pegawai.
 8. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan yang Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
 9. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
 10. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat direksi.
 11. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
 12. Direksi hanya merangkap jabatan menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada Entitas Anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.
4. The BOD has established an Internal Audit Unit (IAU), Risk Management Unit, and Compliance Unit.
 5. To support the implementation of duties and responsibilities of BOD, the Company has organized the following committees under the BOD:
 - a. Risk Management Committee.
 - b. Asset and Liability Management Committee (ALCO).
 - c. Information Technology Committee.
 - d. Human Capital Committee.
 - e. Internal Audit Committee.
 Detailed information on the committees is available in a separate section for Committees.
 6. The BOD is accountable to the shareholders through GMS for the execution of duties.
 7. The BOD discloses the Bank's strategic policies in human capital to its employees using easily accessible media.
 8. The BOD does not use individual and/or professional advisory services as consultants unless for specific projects, stipulated with a clear contract that includes scope of activities, obligations, period of project, costs, and independent as well as competent consultants to execute special projects.
 9. BOD provides complete, accurate, updated, and timely data and information to the BOC.
 10. The BOD has guidelines and procedures that contain work ethics, work schedules, and plan of BOD meetings.
 11. The BOD does not delegate duties to other parties that would result in the transfer of duties and functions of the BOD.
 12. The BOD only serves concurrently as BOC for the purpose of oversight implementation on investments in non-bank Subsidiaries controlled by the Bank.

Direksi

Board of Directors

13. Direksi bertanggung jawab atas setiap informasi yang menyangkut Bank yang disampaikan kepada publik oleh Sekretaris Perusahaan.
 14. Direksi wajib:
 - a. Membuat daftar Pemegang Saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi.
 - b. Membuat Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 UU PT dan dokumen keuangan Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.
 - c. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perusahaan lainnya.
 15. Anggota Direksi memiliki kewajiban pelaporan kepada Direksi Bank mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Bank dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.
13. The BOD is responsible for any information of the Bank disseminated to the public by the Corporate Secretary.
 14. The BOD must:
 - a. Prepare list of Shareholders, Special Register, GMS Resolutions and Minutes of BOD meetings.
 - b. Prepare Annual Report as prescribed in Article 6 of Limited Liability Company Law and the Bank's financial documentation as stipulated by the Law on Corporate Documentation.
 - c. Maintain all lists, Minutes of Meeting, and documents of the Bank as stated in point 'a' and point 'b' above as well as other documents of the Company.
 15. Members of the BOD shall report the shareholding of their family members and/or the presence of their family members within the Bank and other companies, to be recorded in a special register.

G. Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi

Secara garis besar ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota direksi dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nama Name	Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Scope of Duties and Responsibilities
1	Taswin Zakaria	Presiden Direktur President Director
2	Thilagavathy Nadason	Direktur Finance Finance Director
3	Ghazali bin Mohd Rasad	Direktur Operations & IT Operations and IT Director
4	Jenny Wiriyanto	Direktur Business Banking Business Banking Director
5	Lani Darmawan	Direktur Retail Banking Retail Banking Director
6	Ani Pangestu	Direktur Human Capital Human Capital Director
7	Dhien Tjahajani*)	Direktur Legal & Compliance, Corporate Secretary Legal & Compliance, Corporate Secretary Director
8	Hedy Maria Helena Lapijan	Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director
9	Rahardja Alimhamzah	Direktur Global Banking Global Banking Director

* Subject to approval of Financial Service Authority

H. Kewenangan Direksi

Direksi memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar diantaranya sebagai berikut:

1. Direksi berhak mewakili Bank di dalam dan

G. Scope of Work and Responsibility of Each BOD Member

In general, the scope of work and responsibilities of members of the BOD is as follows

H. Authority of the Board of Directors

The BOD has the following authorities as stipulated by the Articles of Association:

1. The BOD is entitled to represent the Bank within and outside of the Court for all and any

di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Bank dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa persetujuan Dewan Komisaris diperlukan dalam beberapa hal sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut dibawah ini disyaratkan persetujuan dari rapat Dewan Komisaris atau persetujuan tertulis dari seluruh anggota Dewan Komisaris, yakni:

- a. Untuk membeli atau dengan cara lainnya memperoleh/mendapatkan barang-barang tidak bergerak (hak-hak atas tanah dan/atau bangunan) dan/atau perusahaan, yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang.
- b. Untuk menjual atau dengan cara lain memindahkan hak barang-barang tidak bergerak (hak-hak atas tanah dan/atau bangunan) dan/atau perusahaan, tidak termasuk penjualan eks agunan dalam rangka penyelamatan piutang.
- c. Untuk membebani hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan/mengagunkan kekayaan milik perseroan.
- d. Mengambil bagian atau ikut serta atau melepaskan baik sebagian atau seluruhnya dalam Bank atau badan-badan lain atau menyelenggarakan perusahaan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Untuk meminjam uang atau menerima fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lainnya yang bukan merupakan kegiatan usaha sehari-hari Bank dalam jumlah yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Rapat Dewan Komisaris; kecuali ketentuan perundang-undangan menentukan adanya persetujuan Dewan Komisaris.
- f. Untuk melakukan Transaksi valuta Asing (Foreign Exchange) dan derivative yang berbentuk suku bunga atau valuta asing dengan Bank-Bank baik di dalam maupun di luar negeri, dimana Bank harus

matters, bind the Company with other parties, and take all acts concerning the management and ownership, with the condition that approval from the BOC is required for certain matters as prescribed in the Articles of Association.

The actions below shall obtain prior approval from the meetings of BOC or written approval from all members of the BOC:

- a. To purchase or in other manner acquire/ obtain immovable objects (rights over lands and/or buildings) and/or companies other than for the purpose of securing receivables.
- b. To sell or in other manner transfer the rights of immovable objects (rights on lands and/or buildings) and or companies, excluding the sale of ex-collateral, for the purpose of securing receivables.
- c. To put liens, provide as collateral, or in other manner pledge the company's assets.
- d. To subscribe or participate or release part or entire shares in the Bank or other entities or to incorporate new companies that do not manifest the purpose of securing receivables, in accordance with prevailing laws and regulations.
- e. To borrow or receive loans or other banking activities other than the Bank's daily activities in the amount as determined from time to time by the BOC meetings, with the exception of laws stipulating approval from BOC.
- f. To perform Foreign Exchange Transactions or derivatives in the form of interest rate or currency with domestic and foreign Banks, where the Bank acts as the signatory in agreements such as ISDA (International

menandatangani perjanjian seperti ISDA (International Swap Dealers Association), ICOM (International Currency Options Market) atau perjanjian lain yang setara.

- g. Untuk meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang bukan merupakan kegiatan usaha Bank dalam jumlah yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Rapat Dewan Komisaris; kecuali ketentuan perundang-undangan menentukan adanya persetujuan Dewan Komisaris;

Mengeluarkan surat jaminan bank atau dengan cara lain menjadi penjamin (borg) atau avalis untuk menjamin pembayaran hutang atau kewajiban keuangan orang/pihak lain.

2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah nilai total kekayaan Bank (setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban) sebagaimana dinyatakan dalam neraca Bank yang terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri maupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku harus mendapat Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Bank dan disetujui oleh sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dalam hal korum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Bank dan disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dan dalam hal korum dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Bank, korum, jumlah suara untuk

Swap Dealers Association), ICOM (International Currency Options Market), or other equivalent agreements.

- g. To lend money or to provide loan facilities or other banking facilities other than the Bank's business in the amount as determined from time to time by BOC meetings; with the exception of laws stipulating approval from BOC.

To issue letter of guarantee or by other means act as guarantor or avalist to guarantee payment of debt or financial obligations of other persons/parties.

2. Legal action to transfer, release the rights, or pledge as collateral the entire or more than 50% (fifty percent) of the total assets of the Bank (after deducting all liabilities) as stated in the Bank's last balance sheet audited by public accountant firm, either in 1 (one) transaction or multiple and separate transactions, or interrelated transactions within 1 (one) fiscal year, must be approved by the General Meeting of Shareholders attended by the shareholders or their proxies that constitute at minimum $\frac{3}{4}$ (three quarters) of the total shares with valid voting rights issued by the Company and approved by at least $\frac{3}{4}$ (three quarters) of the total votes casted legally in the Meeting.

In the event that the above mentioned quorum is not met, then the second GMS may announce the resolutions if attended by shareholders or their proxies representing at least $\frac{2}{3}$ (two-third) of the total shares with valid voting rights issued by the Bank and approved by more than $\frac{3}{4}$ (three quarters) of the total votes cast legally in the Meeting.

If the quorum requirement is not met in the second GMS as mentioned above, then upon the Bank's request, a quorum, total votes

mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.

3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Bank sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 di atas wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit ditempat kedudukan Bank sesuai dengan pertimbangan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
 4. Dalam rangka pengendalian umum sebagaimana ditetapkan dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank tanggung jawab Direksi adalah menciptakan struktur pengendalian intern, menjamin terselenggaranya fungsi audit intern dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan Audit sesuai dengan kebijakan ataupun pengarahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
 5. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa;
 6. Direksi dapat mengangkat baik perorangan maupun 1 (satu) kelompok orang dalam bentuk komite untuk melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha tertentu Bank.
 7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
 8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis
3. The legal action to transfer or to pledge as collateral to relinquish the rights on the Bank's assets as stated in point 2 above must be announced in 2 (two) newspapers published in Indonesian, 1 (one) newspaper shall have wide circulation in Indonesia and 1 (one) at the domicile of the Bank, in accordance with the consideration of the BOD, no later than 30 (thirty) calendar days from the event of such legal act.
 4. In order to exert general control as stated in the Standard of Implementation of Internal Audit Function of the Bank, the responsibility of the BOD is to create an internal control structure, ensure the implementation of internal audit function at all levels of management, and follow up Audit findings in line with the policies or directives from the BOC.
 5. For certain actions, the BOD is entitled to appoint one or more persons to act as a representative or attorney, delegating the authority to such a person by virtue of the power of attorney.
 6. The BOD may appoint a person or 1 (one) group of persons that constitute a committee to perform certain management activities of the Bank.
 7. The distribution of duties and authorities to members of the BOD is set by the General Meeting of Shareholders, and General Meeting of Shareholders can delegate such authority to the BOC.
 8. In the event that BII's interests are conflicting with personal interests of a member of the

required for decision making, invitation, and date of the subsequent GMS will be determined by the Chairman of Bapepam.

Direksi Board of Directors

Bank, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

Dalam hal BII mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang Anggota Direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Bank diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam nomer 8 di atas.

BOD, the Bank shall be represented by other members of the BOD.

Further, in the event that the Bank has conflicting interests with all members of the BOD, the Bank shall be represented by the BOC, without prejudice to the stipulation of point 8 stated above.

I. Pengungkapan Prosedur Penetapan Remunerasi Anggota Direksi

Prosedur Penetapan Remunerasi dilaksanakan sebagai berikut:



J. Besarnya Remunerasi Untuk Setiap Anggota Direksi

Ketentuan tentang besarnya gaji atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi disetujui oleh RUPS. Dalam hal penetapan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi dilimpahkan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris, maka hal tersebut ditetapkan dalam RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

I. Disclosure on the Procedures of Remuneration Determination of Members of the Board of Directors

The procedure to determine remuneration is as follows:

J. Amount of Remuneration for Each Member of the Board of Directors

The amount of salaries or remuneration and/or benefits for members of the BOD is approved by the GMS. In the event that the authority to determine salaries and benefits for members of the BOD is transferred by GMS to the BOC, the matter will be determined in GMS based on recommendations from the Remuneration and Nomination Committee.

K. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi anggota Direksi

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain meliputi:

- a. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (benefit), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya; dan
- b. fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Sesuai Keputusan RUPS, Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi untuk tahun 2013 disajikan sebagaimana tabel berikut:

K. Package/Remuneration Policy and Other Facilities for Members of the Board of Directors

Package/remuneration policy and other facilities for members of BOC and BOD consists, among others, of:

- a. Financial remuneration, including salaries and other fixed income, such as benefits, share-based compensation, tantiem, and other forms of remuneration; and
- b. Other facilities in the form of in-kind/financial, namely other non-fixed income, including housing benefits, transportation, health insurance, and other facilities that can be owned or cannot be owned.

According to the decision of GMS, package/remuneration policy and other facilities for BOD during the year 2013 are as follows:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Type or Remuneration and other Facility	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun *)					
	Direksi Board of Director					
	Orang Members			2013	2012	2011
	2013	2012	2011	Jutaan Rupiah Million Rupiah	Jutaan Rupiah Million Rupiah	Jutaan Rupiah Million Rupiah
1 Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) Gross remuneration (salary, bonus, benefits regular, bonus and other perks in the form of non natura)	9	10	9	52,816	42,552	43,955
2 Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, kesehatan dan sebagainya) yang: Other facilities in the forms of (housing, transportation, health and so on) that:						
a. dapat dimiliki be held				-	-	-
b. tidak dapat dimiliki can not be held				3,157	3,153	1,888

Notes | Keterangan:

*) Before tax deduction | Sebelum dipotong pajak

L. Jumlah Anggota Direksi yang Menerima Paket Remunerasi dalam 1 (satu) Tahun yang dikelompokkan sesuai kisaran tingkat penghasilan

L. Number of Board of Directors Members Receiving Remuneration Package grouped in a range of income levels

Direksi

Board of Directors

Jumlah Remunerasi per Orang Dalam 1 Tahun *) Remuneration per member within one year	Jumlah Direksi Number of Directors
More than Rp2 billion Di atas Rp2 miliar	9
Between Rp1 billion and Rp2 Billion Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar	0
Between Rp500 million and Rp. 1 billion Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	0
Rp500 juta ke bawah Below Rp500 million	0

Keterangan Notes :

*) Yang diterima secara tunai sebelum dipotong pajak (bruto) | Net received before tax deducted

M. Penilaian terhadap Kinerja Direksi

BII menggunakan pendekatan Balanced Scorecard dalam melaksanakan implementasi strategi dan monitoring kinerja. Hal ini sejalan dengan kebijaksanaan perusahaan yang menilai prestasi dan penghargaan berdasarkan basis kinerja. Sasaran strategik dikonversikan menjadi Key Performance Indicator (KPI) yang disepakati bersama oleh jajaran Direksi dan diturunkan sampai jajaran paling bawah. Hal tersebut untuk memastikan bahwa strategi dapat fokus dan berjalan dengan baik.

Kerangka KPI 2013 yang digunakan telah disusun agar dapat dengan mudah mencapai tujuan strategi yang ditetapkan dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

1. Financial Perspective (pemantauan biaya)
2. Business Process Improvement
3. Customer perspective
4. Talent Management and Employee Engagement

Prosedur penilaian dan persetujuan KPI ditetapkan oleh Direksi. Komite Remunerasi dan Nominasi akan melakukan penilaian atas KPI tersebut yang kemudian dilanjutkan dengan proses persetujuan dari Dewan Komisaris.

M. Performance Assessment of the Board of Directors

BII uses a Balanced Scorecard in performance strategy implementation and monitoring. The approach is in line with the policy of the company of performance-based rewards and recognition. The strategic objectives are translated into Key Performance Indicators (KPI) agreed to by all members of the BOD and deployed across levels in order to ensure that the strategy remains focused and carried out effectively.

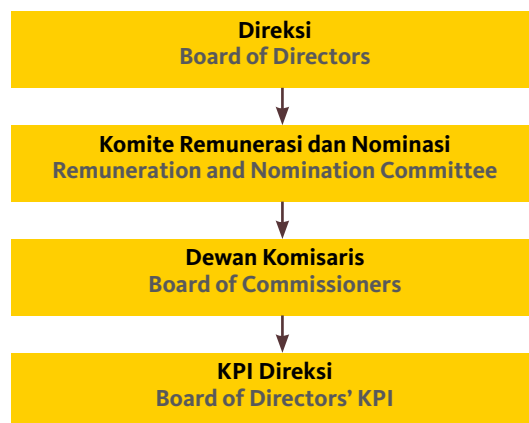
The KPI framework for 2013 was formulated with the purpose to facilitate strategy realization and adopts the following assessment criteria:

1. Financial Perspective
2. Business Process Improvement
3. Customer perspective
4. Talent Management and Employee Engagement

KPI assessment and approval follows a certain procedure. After establishment by the BOD, the Remuneration and Nomination Committee conducts an evaluation on the KPI, which is then submitted to the BOC for approval.

KPI Direksi untuk tahun 2013 telah disetujui oleh rapat Dewan Komisaris.

The KPI of the BOD in 2013 has been approved by the BOC meeting.



N. Rapat Direksi

Selama 2013 telah diselenggarakan 33 (tiga puluh tiga) kali rapat Direksi, dengan perincian daftar hadir anggota Direksi sebagai berikut:

N. Meetings of the Board of Directors

In 2013, the BOD held 33 (thirty three) meetings, with the following details of attendance:

No	Nama Name	Jumlah Rapat Meeting Held	Jumlah Kehadiran Attendance	Tidak Hadir Absent	Persentase Percentage
1	Dato' Khairussaleh Ramli (KR)	22	22	0	100%
2	Rahardja Alimhamzah (RA)	33	31	2	94%
3	Rita Mirasari (RM)	25	22	3	88%
4	Ghazali bin Mohd Rasad (GMR)	33	26	7	79%
5	Jenny Wiriyanto (JW)	33	28	5	85%
6	Hedy Maria Helena Lapian (HL)	33	30	3	91%
7	Thilagavathy Nadason (TN)	33	30	3	91%
8	Ani Pangestu (AP)	33	29	4	88%
9	Lani Darmawan (LD)	23	18	5	78%

Rincian Kehadiran Masing-masing Anggota Direksi 2013

Details of Attendance of Each Member of the Board of Directors in 2013

NO	DATE	KR	RA	RM	GMR	JW	HL	TN	AP	LD	NOTE
1	15 Januari	√	√	√	√	X	√	√	√	**)	SL on gardening leave, JW on annual leave
2	23 Januari	√	√	√	X	√	√	√	√	**)	SL on gardening leave, GMR on leave
3	29 - 30 Februari	√	√	√	√	√	√	√	√	**)	SL on gardening leave
4	5 Februari	√	√	√	√	X	√	√	√	**)	JW absent
5	14 Februari	√	√	√	√	√	√	√	√	**)	-
6	20 Februari	√	√	√	√	√	√	√	√	**)	-
7	13 Maret	√	√	X	√	√	√	√	√	**)	RM on leave
8	21 Maret	√	√	√	√	√	√	√	√	**)	-
9	9 April	√	√	√	√	√	√	√	X	**)	AP absent
10	16 April	√	√	√	√	√	√	√	X	**)	AP absent
11	14 April	√	√	√	√	√	√	X	√	√	TN absent

Direksi Board of Directors

NO	DATE	KR	RA	RM	GMR	JW	HL	TN	AP	LD	NOTE
12	21 Mei	√	√	√	X	√	√	X	√	√	GMR absent, TN absent
13	28 Mei	√	√	√	√	√	√	√	√	X	LD on leave
14	11 Juni	√	√	X	√	√	√	√	√	√	RM absent
15	18 Juni	√	√	√	√	√	X	X	√	√	TN on training, HL on leave
16	25 Juni	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
17	5 Juli	√	√	√	√	X	√	√	√	√	GMR absent, JW absent
18	9 Juli	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
19	30 Juli	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
20	2 Agustus	√	√	√	√	√	√	√	√	X	LD on leave
21	14 Agustus	√	√	X	X	X	√	√	√	√	GMR on leave, RM on leave, JW on leave
22	27 Agustus	√	√	√	√	√	X	√	√	√	HL on leave
23	10 September	X	√	√	X	√	√	√	√	√	KR on gardening leave, GMR on business trip
24	18 September	X	√	√	√	√	√	√	√	√	KR on gardening leave
25	24 September	X	√	√	√	√	√	√	√	√	KR on gardening leave
26	8 Oktober	X	√	X	√	√	√	√	√	√	KR on gardening leave, RM on gardening leave
27	16 Oktober	X	√	X	X	√	√	√	√	√	KR on gardening leave, RM on gardening leave, GMR absent
28	22 Oktober	X	X	X	√	√	√	√	√	√	KR on gardening leave, RM on gardening leave, RA absent
29	30 Oktober	X	√	X	X	√	√	√	X	X	KR on gardening leave, RM on gardening leave, GMR absent, AP absent, LD absent
30	12 November	*)	√	*)	√	√	√	√	X	X	AP on business trip, LD on leave
31	22 November	*)	√	*)	√	X	√	√	√	X	JW on leave, LD on business trip
32	17 Desember	*)	√	*)	√	√	√	√	√	√	KR on gardening leave, RM on gardening leave
33	24 Desember	*)	X	*)	√	√	X	√	√	√	RA absent, HL absent
TOTAL		22	33	25	33	33	33	33	33	23	
ATTEND		22	31	22	26	28	30	30	29	18	
ABSENT		0	1	3	7	5	3	3	4	5	
Percentage		100%	94%	88%	79%	85%	91%	91%	88%	78%	

Keterangan:

√ : Attendance

X : Absent

**) : Through conference call

O. Agenda Rapat Direksi

O. Meeting Agenda of the Board of Directors

Tanggal Rapat Direksi	Agenda Rapat
15 Januari 2013	No.01/DIR/01.2013 Minutes and Matters Arising from BOD Meeting on 14 December 2012 Revision to Limit Authority Threshold Policy Others
23 Januari 2013	No.02/DIR/01.2013 Minutes and Matters Arising from BOD Meeting on 14 December 2012 & 27 December 2012 Mumbai IT Project

Tanggal Rapat Direksi	Agenda Rapat
	BII & Directorate Business Performance Review Others
29 & 30 Januari 2013	No.03/DIR/01.2013 ATM Project Conversion Update New regulations of Bank Indonesia Streamline Credit Process Implementation Update Others
5 Februari 2013	No.04/DIR/02.2013 Approval for Funding Requirments of BII Finance Center for FY 2013 Others
14 Februari 2013	No.05/DIR/02.2013 Minutes of BOD Meeting on 15 January 2013 Matters Arising from BOD Meeting on 15 January 2013 Audited Financial Statement 31 December 2012 Capital Injection amounting to USD 25 million to BII Mumbai Branch Others
20 Februari 2013	No.06/DIR/02.2013 Minutes of BOD Meeting on 23 January 2013 Matters Arising from BOD Meeting on 23 January 2013 General Meeting of Shareholders BII & Directorate Performance Review & Update New Audit Rating Methodology Business Impact of LTV rules on Shariah Mortgage & Shariah Auto Loan Others
13 Maret 2013	No.07/DIR/02.2013 Minutes of BOD Meeting on 29&30 January and 14 February 2013 Matters Arising from BOD Meeting on 29&30 January and 14 February 2013 Project Indomie Risk Culture Bali Marathon Others
21 Maret 2013	No.08/DIR/03.2013 Minutes of BOD Meeting on 20 February 2013 Matters Arising from BOD Meeting on 20 February 2013 BII & Directorate Performance Review & Update Peers Comparison CAC Centralization Branch Location Strategy & Capital Allocation Implication Others
09 April 2014	No.09/DIR/04.2013 Minutes of BOD Meeting on 13 March 2013 Matters Arising from BOD Meeting on 13 March 2013 Findings Of BII Thematic Review Consultancy for Centralization of Accounting & Reporting BII's Risk Heat Map Parameter Workshop Others
16 April 2014	No.10/DIR/04.2013

Direksi
Board of Directors

Tanggal Rapat Direksi	Agenda Rapat
	Minutes of BOD Meeting on 21 March 2013
	Matters Arising from BOD Meeting on 21 March 2013
	AGM & EGM of BII Finance
	BII's Group Performance Update 1Q13
	Automated Credit Process (Loan Origination System/LOS)
	Managing FX Risk on Capital Injection to Mumbai Branch
	Others
14 May 2013	No.11/DIR/05.2013
	Minutes of BOD meeting on 9 & 16 April 2013
	Matters Arising from BOD Meeting on 9 & 16 April 2013
	Marketing Communication Strategy of BII
	TIGER Rollout Budget
	Procedures and limit granted by Power of Attorney (PoA) to represent Bank
	Highlight Audit Issues
	Others
21 May 2013	No.12/DIR/05.2013
	BII & Directorate Business Performance Review Update
	Core Banking Business Case
	Employee Engagement Activities Proposal
	Others
28 May 2013	No.13/DIR/05.2013
	BTS Strategy
	Maybank Group Performance 1Q13
	Renaming of BII Maybank
	Others
11 June 2013	No.14/DIR/06.2013
	Thematic Review Update
	Simulation on potential Increase in BI Rate- Implications to Business Strategy
	Balance Sheet and P&L
	M2U Project
	Others
18 June 2013	No.15/DIR/06.2013
	Minutes of BOD meeting 14 & 21 May '13
	Matters Arising from BOD meeting 14 & 21 May '13
	BII & Directorate Business Performance Review Update
	Regional Cash Management System Business Case
	Credit Policy -TOR of SCC BII Mumbai
	MIS Steering Committee & Data Governance
	Highlight of Audit Issues
	AML/CFT Policy
	Branch Expansion Plan
	Others
25 June 2013	No.16/DIR/06.2013
	Branch Expansion Plan
	Data Centre Project
	Core Banking Replacement Project Resources
	Scholarship Progress Update

Tanggal Rapat Direksi	Agenda Rapat
	RBB Revision
	Others
5 July 2013	No.17/DIR/07.2013
	Mumbai Branch Reactivation Preparation
9 July 2013	No.18/DIR/07.2013
	Region Expansion -Denpasar & Nusra Regions
	Pre-exit Meeting BI Audit Phase I-2013
	AOP 2014 Budget Plenary
	Others
30 July 2013	No.19/DIR/07.2013
	Minutes of BOD Meeting 28 May, 11 and 25 June 2013
	Matters Arising from Previous BOD meetings
	Branch FX (BFX) Project Charter
	Business Case of New Branch Micro Banking
	Highlight Audit Issues
	President Director Innovation Award (PIA)
	Others
02 Agustus 2013	No.20/DIR/08.2013
	Minutes of BOD Meeting 5 July 2013
	Bali Marathon -Execution Report
	Additional Working Capital for UUS
	Others
14 August 2013	No.21/DIR/08.2013
	Minutes of BOD Meeting 9 July 2013
	Micro Banking Update
	Others
27 Agustus 2013	No.22/DIR/08.2013
	FATCA Briefing
	Directorate Performance Update and Peers Comparison
	Others- Rebranding socialization
10 September 2013	No.23/DIR/09.2013
	Minutes of BOD Meeting on 30 July, 2 August and 14 August 2013
	Matters Arising from Previous BOD Meetings
	Branch Opening Rule by BI
	GTRMS BII (kondor+) Budget
	BII 2008-2010 Tax Audit Update
	Others
18 September 2013	No.24/DIR/09.2013
	Minutes of BOD Meeting on 27 August 2013
	BII CSR Foundation
	BII Agenda and Desk Calendar 2014
	World Cup Sponsorship
	TOR of Risk Management Committee
	Mauritius Core Banking Project
	Others

Direksi
Board of Directors

Tanggal Rapat Direksi	Agenda Rapat
24 September 2013	No.25/DIR/09.2013
	Mauritius Core Banking Project
	Maybank Bali Marathon
	Others
08 Oktober 2013	No.26/DIR/10.2013
	Minutes of BOD Meeting on 10 & 18 September 2013
	Brand Spirit and Brand Communication Guideline
	Budget Process
	LPS Submission
	Others
16 Oktober 2013	No.27/DIR/10.2013
	IT Capex Budget 2014
	BII Performance Review
	FSCM Mobile Banking
	Follow Up of Dharmawangsa meeting on Reputation and Teamwork issues
	Others
22 Oktober 2013	No.28/DIR/10.2013
	Minutes of BOD Meeting 24 September 2013
	Sales Incentive Plan 2013
	Service Incentive Scheme
	Directorate Performance Update
	Others
30 October 2013	No.29/DIR/10.2013
	BII's 2014 AOP
12 November 2013	No.30/DIR/11.2013
	Minutes of BOD meeting 8 Oct '13
	BII's 2014 AOP
	Insurance Renewal
22 November 2013	No.31/DIR/11.2013
	Minutes of BOD Meeting on 16 October '13
	Appointment of MSS as Outsource Party for BII Maybank Purpose
	Capital Plan FY2014-2017
	Rencana Business Bank (RBB) 2014-2016
	Sales Incentive Plan for Commercial
	Others
17 December 2013	No.32/DIR/12.2013
	Minutes of BOD Meeting on 22 October, 30 October, 12 November and 22 November 2013
	Creative Advertising Agency Selection
	2013 Annual Report
	Liquidity Contingency Plan (LCP) Test
	Others
24 December 2013	No.33/DIR/12.2013
	Group & Directorate Performance Review November 2013
	Others

P. Mekanisme Pengambilan Keputusan Decision Making Mechanism

- Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.
- Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pencantuman dissenting opinions apabila ada.
- Tidak terdapat dissenting opinions selama penyelenggaraan Rapat di tahun 2013.

Q. Keikutsertaan Direksi dalam Pelatihan

Selama 2013, training & pelatihan yang telah diikuti Direksi adalah sebagai berikut:

P. Mekanisme Pengambilan Keputusan Decision Making Mechanism

- Decision making process of the BOD is done by means of amicable deliberation or by means of majority votes provided that consensus is not reached.
- The results of BOD meetings are recorded in minutes of meetings and are well documented, including the notes on dissenting opinion, if occurs.
- There were no dissention opinions during metings in 2013.

Q. Board Participation In Training

In 2013, the training programs attended by BOD are:

No	Nama Name	Training/Seminar/Workshop Training/Seminar/Workshop	Waktu & Tempat Pelaksanaan Date & venue
1	Taswin Zakaria	Risk Management workshop	17 September 2013 Sentral Senayan 3, Lantai 28, Jakarta, Indonesia
		BOD+ELT Offsite & TTEP	28 - 29 Oktober 2013 Bogor, Indonesia
2	Thilagavathy Nadason	Top Team Effectiveness Program (TTEP)	February 2013 Sepang, Malaysia
		MGIP - Induction Program	3 April 2013 Jakarta, Indonesia
		BII Fresh Strategic Direction	12 May 2013 Bogor, Indonesia
		Global Senior Management Program (Sequence 1)	19 - 24 May 2013 Chicago, USA
		Global Senior Management Program (Sequence 2)	16 - 21 June 2013 Madrid, Spain
		BOD+ELT Offsite & TTEP	28 - 29 Oktober 2013 Bogor, Indonesia
2	Rahardja Alimhamzah	MGIP - Induction Program	3 April 2013 Jakarta, Indonesia
		Workshop on Pay Practices in India	29 Agustus 2013 Indonesia
		Client Coverage Team Effectiveness Program '13 #1	6-8 September 2013 Bangkok
		BII Guest Lecturing Session	11 September 2013 Bandung, Indonesia
		Embedded Risk Units Workshop (ERU)	3 Oktober 2013 Jakarta, Indonesia
		BoD+ELT offsite & TTEP	28 - 29 Oktober 2013 Bogor, Indonesia
	BOD+ELT Offsite & TTEP	28 - 29 Oktober 2013 Bogor, Indonesia	

Direksi
Board of Directors

No	Nama Name	Training/Seminar/Workshop Training/Seminar/Workshop	Waktu & Tempat Pelaksanaan Date & venue
3	Ghazali bin Mohd Rasad	Top Team Effectiveness Programme	24-25 Februari 2013 Selangor, Malaysia
		Branch Quality Assurance Workshop	14-17 Maret 2013 Makasar, Indonesia
		Core Banking Workshop	1-3 September 2013 Kuala Lumpur
		Regional Operations Conference	4-5 September 2013 Singapore
		Finacle Confluence Workshop	9-11 September 2013 Bali, Indonesia
5	Rita Mirasari	BOD+ELT Offsite & TTEP	28 - 29 Oktober 2013 Bogor, Indonesia
		Business Contingency Plan for Banking	25 Maret 2013 Hotel The Ritz Carlton
		MGIP - Induction Program	3 April 2013 Sentral Senayan 3, Lantai 28, Jakarta, Indonesia
		Seminar Economic Outlook 2013: Peranan Perbankan Dalam Pengembangan UMKM di KTI	11 April 2013 Makassar, Indonesia
		Seminar Economic Outlook 2013 : Optimalisasi Peranan Bank Dalam Pengembangan UMKM	12 Juni 2013 Batam, Indonesia
6	Lani Darmawan	Maybank Group Induction Program	3 April 2013 Jakarta, Indonesia
		Embedded Risk Units Workshop (ERU)	3 Oktober 2013 Jakarta, Indonesia
		BOD+ELT Offsite & TTEP	28 - 29 Oktober 2013 Bogor, Indonesia
7	Jenny Wiriyanto	Peran Perbankan Dalam Pengembangan UKM di Kawasan Timur Indonesia	11 April 2013 Grand Clarion Hotel, Makasar
		Seminar Optimalisasi Peranan Bank Dalam Pengembangan UMKM	12 Juni 2013 Planet Holiday Hotel, Batam
		Seminar Optimalisasi Peranan Bank Dalam Pengembangan UMKM	10 Juli 2013 Sahira Butik Hotel, Bogor
		APEC WEF Conference	5 -7 September 2013 Nusa Dua, Bali
		Inaugural Regional CFS Senior Management Workshop	22-24 November 2013 Sunway Lagoon Resort
		The Small Business Banking Executive Programme	14-15 November 2013 Singapore
8	Hedi Maria Helena Lopian	BOD+ELT Offsite & TTEP	28 - 29 Oktober 2013 Bogor, Indonesia
		Top Team Effectiveness Programme (TTEP)	24-25 Februari 2013 Sepang, Malaysia
		BII Maybank Economic Briefing 2013	27 Februari 2013 Jakarta, Indonesia
		BII Maybank Induction Program	3 April 2013 Jakarta, Indonesia
		IIF Asia/Pacific Chief Risk Officers Forum	6-7 May 2013 Singapore
		Embedded Risk Units Workshop (ERU)	3 Oktober 2013 Jakarta, Indonesia
		BOD+ELT Offsite & TTEP	28 - 29 Oktober 2013 Bogor, Indonesia

Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Self Assessment Report Good Corporate Governance (GCG) Implementation

HASIL SELF ASSESSMENT GCG

Pada tahun 2013, Bank melakukan Penilaian Sendiri (Self Assessment) terhadap pelaksanaan GCG sesuai periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran, maka Bank melakukan penilaian sendiri (self assessment) secara berkala paling kurang terhadap 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG dan informasi lainnya yang terkait penerapan GCG Bank. Kesebelas Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan.
6. Penerapan fungsi audit intern.
7. Penerapan fungsi audit ekstern.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposures).
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal; dan
11. Rencana strategis Bank.

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip GCG, dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas suatu permasalahan terhadap penerapan GCG pada Bank secara bank-wide, sesuai skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Penilaian tersebut dikelompokkan dalam suatu governance system yang terdiri dari 3 (tiga) aspek governance yaitu governance structure, governance process, dan governance outcome.

GCG ASSESSMENT RESULT

In 2013, the Bank conducted Self Assessment on GCG implementation, following the period of Bank Health Level done every semester for positions at end of June and December, as stipulated by Bank Indonesia Circular Letter No.15/15/DPNP dated 29 April 2013 regarding the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.

To evaluate the implementation of 5 (five) basic principles of GCG, namely transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness, the Bank performs periodic self-assessment on at least 11 (eleven) GCG Implementation Evaluation Aspects and other information relating to the Bank's GCG implementation. The eleven GCG Implementation Evaluation Aspects are:

1. Performance of duties and responsibilities of the Board of Commissioners
2. Performance of duties and responsibilities of the Board of Directors.
3. Adequacy and the performance of duties by the Committees.
4. Management of Conflicts of Interest
5. Implementation of Compliance function
6. Implementation of internal audit function
7. Implementation of external audit function
8. Implementation of risk management including internal control system
9. Provisioning of funds to related parties and large exposures
10. Transparency of the Bank's financial and non-financial conditions, report of GCG implementation, and internal reporting; and
11. The Bank's strategic plan.

GCG assessment is an assessment towards the Bank's management quality on the implementation of GCG principles by taking into account significance or importance of a subject matter to the implementation of GCG bank-wide according to the scale, characteristics, and complexity of the Bank's business. The assessment is grouped into a governance system that consists of 3 (three) aspects, namely, governance structure, governance process, and governance outcome.

Assessment Terhadap Anggota Dewan Komisaris Dan/Atau Direksi

Assessment on members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG BII 2013 untuk posisi Juni 2013 dan Desember 2013 adalah sebagai berikut:

The result of Self Assessment on BII GCG Implementation in 2013, for the positions of June 2013 and December 2013 is:

Posisi : Juni 2013 Position: June 2013			
Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG Result of Self-Assessment of GCG Implementation			
	Peringkat Rating	Definisi Peringkat Rating Definition	
Individual Standalone	1	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank. Reflecting the Bank's management has made the implementation of GCG is generally very good. This is reflected in a very adequate fulfillment of the principles of GCG. If there is a weakness in the application of the principles of GCG, it is generally not a significant drawback and can immediately be improved by the Bank's management.	
Konsolidasi Consolidated	1	Mencerminkan Manajemen Perusahaan Anak telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Perusahaan Anak. Reflecting the managements of Subsidiaries have made the implementation of GCG is generally very good. This is reflected in a very adequate fulfillment of the principles of GCG. If there is a weakness in the application of the principles of GCG, it is generally not a significant drawback and can immediately be improved by the managements of subsidiaries.	

Terdapat perbedaan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG posisi Juni 2013 antara Bank dengan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dimana berdasarkan hasil penilaian Bank diperoleh peringkat 1 dan berdasarkan hasil penilaian Bank Indonesia diperoleh nilai 2. Atas adanya perbedaan tersebut Bank melakukan beberapa tindak lanjut yang diperlukan.

There was a discrepancy between the Bank's result of Self Assessment on GCG Implementation for the position of June 2013 and the result from Bank Indonesia and/or Financial Services Authority; the Bank accomplished rating 1 based on its self-assessment and rating 2 based on Bank Indonesia's assessment. The Bank has taken necessary measures to address the gap.

Posisi : Desember 2013 Position: December 2013			
Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG Result of Self-Assessment of GCG Implementation			
	Peringkat Rating	Definisi Peringkat Rating Definition	
Individual Standalone	1	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank. Reflecting the Bank's management has made the implementation of GCG is generally very good. This is reflected in a very adequate fulfillment of the principles of GCG. If there is a weakness in the application of the principles of GCG, it is generally not a significant drawback and can immediately be improved by the Bank's management.	
Konsolidasi Consolidated	1	Mencerminkan Manajemen Perusahaan Anak telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Perusahaan Anak. Reflecting the managements of Subsidiaries have made the implementation of GCG is generally very good. This is reflected in a very adequate fulfillment of the principles of GCG. If there is a weakness in the application of the principles of GCG, it is generally not a significant drawback and can immediately be improved by the managements of subsidiaries.	

Hasil Penilaian sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG beserta analisis selengkapnya untuk posisi Juni 2013 dan Desember 2013 telah disampaikan ke Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

The result of Self Assessment on GCG Implementation and its full analysis for the positions of June 2013 and December 2013 have been submitted to Bank Indonesia and Financial Services Authority in compliance with the prevailing regulations from both regulators.

Matriks Peringkat Faktor GCG | Matrix of GCG Rating

Rating	Definisi	
1	<p>Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank</p>	<p>Reflecting the implementation of GCG by the Bank's management, which is generally very good. This is reflected in a very adequate fulfillment of the principles of GCG. If there is a weakness in the application of the principles of GCG, it is generally not a significant drawback and can immediately be improved by the Bank's management.</p>
2	<p>Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.</p>	<p>Reflecting the implementation of GCG by the Bank's management, which is generally good. This is reflected in an adequate fulfillment of the principles of good corporate governance. If there is a weakness in the application of the principles of good corporate governance, the general weakness of the less significant and can be solved with normal action by the Bank's management.</p>
3	<p>Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.</p>	<p>Reflecting the implementation of GCG by the Bank's management, which is generally adequate. This is reflected in an adequate fulfillment of the principles of good corporate governance. If there is a weakness in the application of the principles of good corporate governance, the general weakness of the significant and require considerable attention from the management of the Bank.</p>
4	<p>Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.</p>	<p>Reflecting the implementation of GCG by the Bank's management, which is generally mediocre. This is reflected in the inadequate fulfillment of the principles of good corporate governance. There are weaknesses in the application of the principles of good corporate governance, the general weakness of the significant and require a thorough repair by the Bank's management</p>
5	<p>Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Bank.</p>	<p>Reflecting the implementation of GCG by the Bank's management, which is generally not good. This is reflected in the inadequate fulfillment of the principles of good corporate governance. Weaknesses in the application of the principles of good corporate governance, the general weakness of the very significant and difficult to be fixed by the Bank's management.</p>

Lembar Persetujuan Approval Sheet

Laporan Penilaian Sendiri
Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Tahun 2013
Self Assessment Report
Good Corporate Governance (GCG) Implementation Year 2013
PT Bank Internasional Indonesia Tbk

Direksi Board of Directors



Taswin Zakaria
Presiden Direktur
President Director



Thilagavathy Nadason
Direktur
Director



Rahardja Alimhamzah*)
Direktur
Director



Ghazali bin Mohd Rasad
Direktur
Director



Jenny Wiriyanto
Direktur
Director



Hedy Maria Helena Lopian*)
Direktur
Director



Ani Pangestu
Direktur
Director



Lani Darmawan
Direktur
Director

*) Pengunduran diri efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2014
Tendered his/her resignation effective as of the closing of 2014 Annual General Meeting of Shareholders

Lembar Persetujuan Approval Sheet

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Tahun 2013

Good Corporate Governance (GCG) Report Year 2013
PT Bank Internasional Indonesia Tbk

Dewan Komisaris Board of Commissioners



Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor
Presiden Komisaris
President Commissioner



Datuk Abdul Farid bin Alias *)
Komisaris
Commissioner



Spencer Lee Tien Chye
Komisaris
Commissioner



Umar Juoro
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Budhi Dyah Sitawati
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Achjar Iljas
Komisaris Independen
Independent Commissioner

*) Efektif setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
Will be effective following the approval from the Financial Service Authority

Komite-Komite di Bawah Direksi

Committees Under the Board of Directors

KOMITE MANAJEMEN RISIKO (RMC)

Direksi membentuk Komite Manajemen Risiko untuk mengelola secara efektif potensi risiko yang mungkin timbul serta untuk menetapkan, meninjau pelaksanaan dan terus memperbaiki kebijakan dan metodologi yang digunakan untuk mengelola potensi risiko.

Dasar Pembentukan Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko yang mencakup struktur dan keanggotaan, tugas & wewenang serta proses rapat komite dibentuk melalui surat edaran No.SE.2013.044/Dir Risk Mgmt tanggal 11 Oktober 2013 perihal Komite Manajemen Risiko dan merupakan pembaharuan dari surat edaran yang telah ada sebelumnya.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE (RMC)

The Board of Directors established Risk Management Committee to manage risk potential that may arise effectively, and to stipulate, review the implementation and continue to improve the policies and methodology, which are applied to manage risk potentials.

Risk Management Committee Establishment Basis

Risk Management Committee's structure and membership, duties and authorities, as well as the committee meeting process, was established through circular letter No.SE.2013.044/Dir Risk Mgmt dated 11 October 2013 regarding the Risk Management Committee and as a substitute for the previous circular letter.

Struktur Dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

Risk Management Committee Structure and Membership

No	Jabatan Position	Keterangan Description
Anggota Member		
1	Ketua Chairman	Presiden Direktur President Director
2	Wakil Ketua/Anggota vice Chariman/Member	Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director
3	Anggota Member	Finance Director
4	Anggota Member	Global Banking Director
5	Anggota Member	Business Banking Director
6	Anggota Member	Retail Banking Director
7	Anggota Member	Legal & Compliance, Corporate Secretary Director
8	Anggota Member	Operation & IT Director
9	Anggota Member	Human Capital Director
Undangan Tetap Permanent Invitees		
1	Internal Audit Head (SKAI)	
2	Basel & Enterprise Risk Management Head	
3	Credit Review Management Head	
4	Corporate & SME Credit Policy and Portfolio Management Head	
5	Retail Credit Policy and Portfolio Management Head	
6	Operational Risk Management Head	
7	Market & Liquidity Risk Management Head	
Undangan Tidak Tetap Invitee		
1	Pihak internal BII lain jika diperlukan	
Sekretariat Secretary		
1	Basel & Enterprise Risk Management	

Tujuan Komite Manajemen Risiko

- a. Menyetujui kebijakan manajemen risiko Bank dan anak perusahaan, termasuk strategi kerangka kerja, metodologi, system dan tools pengelolaan risiko termasuk rencana-rencana kontijensi dan memastikan penerapannya yang meliputi risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi dan risiko kepatuhan.
- b. Melakukan kajian terhadap risiko bank dan anak perusahaan secara keseluruhan termasuk eksposur atas kredit secara berkala dan memastikan bahwa eksposur dikelola dengan baik.
- c. Menetapkan koreksi atau ratifikasi atas keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.
- d. Memastikan kecukupan sumber daya serta sistem dalam penerapan manajemen risiko.
- e. Membangun budaya manajemen risiko pada seluruh level organisasi.

Tugas dan Wewenang Komite Manajemen Risiko

- a. Mengkaji skenario stress testing dan dampak risikonya terhadap kecukupan modal, profitabilitas dan kualitas aset serta merekomendasikan tindakan perbaikan yang diperlukan.
- b. Menyetujui tindakan strategis yang timbul dari peraturan eksternal yang berdampak terhadap praktek manajemen risiko.
- c. Menyetujui langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah risiko yang menjadi perhatian Bank Indonesia.
- d. Menyetujui produk kredit baru dan layanannya.
- e. Menyetujui Kebijakan Perkreditan tingkat segmentasi (Credit Policy Level 2).
- f. Menyetujui limit industri.
- g. Mengkaji dan melakukan penilaian terhadap proses manajemen risiko operasional dan langkah mitigasi risiko.
- h. Mengkaji dan menyetujui kebijakan kredit (termasuk Credit Program / PDA) dan acuan risiko yang mencakup risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional dari aktifitas bisnis.
- i. Menyetujui pendelegasian limit wewenang kredit.

Risk Management Committee Objectives

- a. To approve the risk management policy of the Bank and subsidiaries, including strategy of framework, methodology, systems and tools of risk management, as well as contingency plans, and ensure the implementation of credit risk, operational risk, market risk, liquidity risk, legal risk, reputation risk, strategic risk and compliance risk.
- b. To review overall risks faced by the Bank and subsidiaries, including exposure to credit periodically, and to ensure it is well managed.
- c. To stipulate the correction or ratification on business decisions which were not in line with normal procedures.
- d. To ensure the adequacy of human resources as well as a risk management implementation system.
- e. To build a risk management culture in all organization levels.

Risk Management Committee Duties and Authorities

- a. To review the stress testing scenario and its risk impact on capital adequacy, profitability and asset quality, as well as to recommend required improvement measures.
- b. To approve strategic measures which arise from the external regulations that impact risk management practices.
- c. To approve improvement measures to resolve risk issues, which come to the attention of Bank Indonesia.
- d. To approve new credit products and services.
- e. To approve segmented Credit Policy (Credit Policy Level 2)
- f. To approve industry limits.
- g. To review and assess the operational risk management process and risk mitigation measures.
- h. To review and approve credit policy (including Credit Program / PDA) and risk reference, which includes credit risk, market risk and operational risk from business activities.
- i. To approve the delegation of credit authority limits.

Komite-Komite di Bawah Direksi

Committees Under the Board of Directors

- j. Menyetujui metodologi dan model penentuan bunga kredit.
 - k. Menyetujui model pengukuran risiko.
 - l. Melakukan pengawasan dan memberikan arahan strategis terhadap inisiatif bisnis dan proyek bisnis utama dan memastikan hal tersebut mendapatkan dukungan yang diperlukan dari seluruh Unit terkait di BII Maybank agar sejalan dengan tujuan perusahaan.
 - m. Melaksanakan tanggung jawab lainnya yang didelegasikan oleh BoD dan ROC.
- j. To approve the methodology and determination model of credit interests.
 - k. To approve risk measurement models.
 - l. To supervise and provide strategic direction on business initiatives and main business projects and to ensure required support from all related Units in BII Maybank, so as to be in line with the company's objectives.
 - m. To implement other responsibilities delegated by the BoD and ROC.

Rapat Komite Manajemen Risiko

- a. Komite Manajemen Risiko melakukan rapat rutin minimal 4 (empat) kali dalam setahun dan rapat non-rutin/luar biasa bilamana diperlukan.
- b. Rapat Komite Manajemen Risiko dipimpin oleh Ketua dan dalam hal Ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua.
- c. Setiap anggota dapat meminta rapat luar biasa untuk membahas agenda yang mendesak dengan memberitahu sekretaris komite dalam waktu tidak kurang dari 24 jam.
- d. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh minimal 51% dari anggota; termasuk dan dihadiri oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua.
- e. Keputusan adalah berdasarkan musyawarah mufakat.
- f. Hasil rapat harus dinyatakan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- g. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) selama pertemuan komite harus secara jelas dinyatakan dengan jelas didalam risalah rapat.

Risk Management Committee Meetings

- a. The Risk Management Committee held a regular meeting at least 4 (four) times a year and non-regular/extraordinary meeting whenever necessary.
- b. Risk Management Committee meeting is chaired by the Chairman and in an event of his/her absence; the vice Chairman will then chair the meeting.
- c. Every member can request an extraordinary meeting to discuss urgent agenda by notification to the committee's secretary within not less than 24 hours.
- d. The meeting is legal and has the rights to make a decision, which is binding if attended and/or represented by a minimum of 51% of the members; including and attended by the Chairman and/or vice Chairman.
- e. The decision is based on a consensus agreement.
- f. The meeting result has to be stated in the Minutes of Meeting and well documented.
- g. Any dissenting opinions during the committee meeting must be clearly stated in the Minutes of Meeting.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Manajemen Risiko

Selama 2013 telah diadakan Rapat Komite Manajemen Risiko sebanyak 12 (dua belas) kali.

Tingkat Kehadiran Direksi Pada Rapat Komite Manajemen Risiko.

Risk Management Committee Meeting Frequency and Attendance

During 2013, Risk Management Committee held 12 (twelve) meetings.

Attendance Level of the Board of Directors in Risk Management Committee Meeting.

No	Nama Name	Jadwal Rapat RMC 2013 / RMC Meeting Schedule in 2013											Frekuensi kehadiran Rapat Frequency Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Percentage of Attendance	
		18-Jan-13	14-Feb-13	22-Mar-13	17-Apr-13	24-May-13	26-Jun-13	18-Jul-13	18-Ags-13	20-Sep-13	17-Oct-13	25-Nov-13			19-Dec-13
1	Khairussaleh Ramli	√	√	√	√	√	x	√	√	Mengundurkan diri Resigned			7	92%	
2	Hedy Lopian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	100%	
3	Ghazali Mohd. Rasad	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	100%	
4	Jenny Wiriyanto	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	100%	
5	Rahardja Alimhamzah	x	√	x	√	x	√	√	√	√	√	√	9	75%	
6	Rita Mirasari	√	√	√	√	√	√	√	√	Mengundurkan diri Resigned			9	100%	
7	Lani Darmawan	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	11	92%	
8	Thila Nadason	√	√	√	√	x	√	√	√	√	√	√	11	92%	
9	Ani Pangestu	Belum menjadi anggota RMC Not yet a member of the RMC							√	√	√	√	√	5	100%
10	Taswin Zakaria											√			

Keterangan | Description:

√ : Hadir | Present

x : Tidak Hadir | Absent

Taswin Zakaria diangkat sebagai Presiden Direktur berdasarkan RUPS 11 November 2013

Taswin Zakaria appointed as President Director based on RUPS 11 November 2013

Keputusan Komite Manajemen Risiko

- Keputusan yang tertulis dalam risalah rapat disirkulasikan kepada seluruh anggota untuk mendapatkan masukan lebih lanjut yang kemudian akan dikaji terlebih dahulu pada agenda rapat berikutnya, sebelum kemudian ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua. Notulen/risalah rapat adalah hasil keputusan yang sah untuk kemudian disirkulasikan kepada Direksi dan Unit terkait.
- Keputusan yang sah mengikat semua anggota baik yang hadir maupun yang tidak hadir.
- Apabila diperlukan, keputusan rapat Komite Manajemen Risiko ditindaklanjuti dengan Keputusan, Surat Edaran, Memorandum oleh unit kerja yang terkait.

Risk Management Committee Decisions

- Written decisions in the Minutes of Meeting are circulated to all members to get further input, later to be first reviewed in the next agenda, prior to the sign-off by the Chairman/vice Chairman. Minutes of the meetings are legitimate decisions that will be circulated to the Directors and relevant work units and are well documented.
- The legal decision is binding for all attendees and absent members.
- If required, the decision of Risk Management Committee will be followed up with Decisions, Circular Letters, and Memorandum by related units.

Komite-Komite di Bawah Direksi

Committees Under the Board of Directors

Tanggung jawab Sekretaris Komite

- a. Membuat undangan rapat dan menyusun agenda rapat.
- b. Mempersiapkan dan mengumpulkan bahan-bahan rapat.
- c. Mencatat, merumuskan dan menyajikan hasil rapat serta mendokumentasikan perbedaan pendapat (bila ada) dalam rapat.
- d. Mendistribusikan hasil rapat kepada semua anggota komite, Direksi dan unit kerja terkait.

Committee Secretary Responsibilities

- a. To prepare meeting invitations and prepare meeting agendas.
- b. To prepare and compile meeting materials.
- c. To record, formulate and present the meeting results as well as to record the dissenting opinions (if any) in the meeting.
- d. To distribute the meeting results to all committee members, the Board of Directors and related units.

Agenda Rapat Komite Manajemen Risiko

Risk Management Committee Meeting Agenda

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
1	18 January 2013	Confirmation of last RMC Minutes of Meeting Risk Control Self Assessment (RCSA) RBBR & Risk Profile ERD dipresentasikan Risk Heat Map RBBR & Risk Profile Unit Usaha Syariah Consumer portfolio (termasuk anak perusahaan) Commercial portfolio Corporate portfolio SME portfolio Market & Liquidity Risk Management ORM Dashboard Business Continuity Management
2	14 February 2013	Confirmation of last RMC Minutes of Meeting Matters arising from previous RMC: a. The adjustment of item "Conflict of Interest" from 2 to 3 on GCG of WOM b. ORM RCSA threshold (to be elaborated in RCSA session) Risk Control Self Assessment (RCSA) Trading Book Limit Policy Commercial Property Financing Gold Pawn Broking (Ar Rahnu) MMQ Mortgage ERD Retail Portfolio (incl.subsidiaries) Commercial Portfolio Corporate Portfolio SME Portfolio Market & Liquidity Risk Management ORM Dashboard GCG Progress Update GWB Credit Portfolio WOM 2012 Performance Summary

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
3	22 March 2013	Confirmation of last RMC Minutes of Meeting Matters arising from previous RMC : Segregation of SME and EB segment portfolio (to be elaborated in SME & EB session) Risk Appetite Statement (RAS) Penambahan Kalimat dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) ICAAP Framework Model validation Framework Interbank Limit Policy Trading Risk Management Framework (TRMF) and Trading Risk Book Policy Statement (TBPS) Level 2 Retail Credit Policy Manual (RCPM) Micro Loan Product Development Assessment (PDA) WOM Refinancing ERD Top Operational Risk Assessment (TORA) Risk Culture Campaign 2013 Industry Outlook and Exposure Limit Industry Financing Program Update GCG Update as of February 2013 Retail Portfolio (incl.subsidiaries) Commercial Portfolio Corporate Portfolio SME Portfolio Market & Liquidity Risk Management Operational Risk Management Dashboard
4	17 April 2013	Confirmation of last RMC Minutes of Meeting Matters arising from previous RMC: WOM Refinancing Update Micro Business Benchmark Business Continuity Management Framework Non-Retail Credit Authority for the Settlement & Recovery of Problem Loans Foreign Exchange Risk Management Policy (FXMP) Fixed Income Securities (FIS) Policy Annual Review BII Corporate Leasing iB Surya+ Kiosk Financing for Micro Business Risk Heat Map Bank & Subsidiaries ERD Risk Profile Bank, Syariah & Subsidiaries Group Stress Testing Market & Liquidity Risk Management Update BNM Finding Progress Retail Credit Policy & Portfolio Management Commercial Portfolio Corporate Portfolio SME Portfolio Market & Liquidity Risk Management Operational Risk Management Dashboard
5	24 May 2013	Confirmation of last RMC Minutes of Meeting Matters arising from previous RMC: Kiosk Financing Update FSCM Product Program Ratification on Mortgage and Credit Card IRB Scorecard ERD Rating Override Threshold Business Banking Credit Portfolio (Thematic) GCG Progress update Retail Banking Portfolio WOM Finance Commercial Portfolio Global Banking Portfolio Business Banking Portfolio Market & Liquidity Risk Management Operational Risk Management Dashboard Centralized Credit Risk Rating System (CCRRS)

Komite-Komite di Bawah Direksi

Committees Under the Board of Directors

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
6	26 June 2013	<ul style="list-style-type: none"> Confirmation of last RMC Minutes of Meeting Matters arising from previous RMC: BII Corporate Leasing iB BII Mumbai: ORM Framework, IRRBB Policy, and TRM Framework New Product Procedure Product Development Assessment Mortgage Recovery Performance ERD Basel Streering Committee - Term of Reference Project RBPAS (Risk Based Pricing Approval Structure) BII Finance Credit Portfolio (thematic) TORA : Risk of Critical System Failure & Risk of Skillful Resources Availability Retail Banking Portfolio (Bank & Subsidiaries) WOM Finance Portfolio Global Banking Portfolio Business Banking Portfolio Syariah Banking Portfolio
7	18 July 2013	<ul style="list-style-type: none"> Confirmation of last RMC Minutes of Meeting Non Retail Scorecard: Merging 5 Policies into 1 Policy for Non Retail Scorecard Implementation and Revision of Policy Capping Non Bank Institutional Counterparty (NBIC) Policy Scoring Policy for Retail Behavior Score for Credit Collection Strategy Product Development Assessment Mortgage: Deviation Criteria RBBR (Bank & Subsidiaries) Syariah Risk Profile ERD (Bank & Subsidiaries) Risk Heat Map (BII, WOM Finance, and BII Finance) Risk Culture Campaign video Retail Banking WOM Finance Global Banking Portfolio Business Banking Portfolio Syariah Banking Portfolio Market & Liquidity Risk Management Operational Risk Management Dashboard
8	21 August 2013	<ul style="list-style-type: none"> Confirmation of last RMC Minutes of Meeting Market Risk Management Policy & Liquidity Risk Management Policy for Subsidiaries Kebijakan Kredit Tingkat 3 Global Banking & Business Banking TKI Product Program & PRK Plus (FSCM) Business Continuity Management Basel II IRB Project Cost Allocation for 2014 ERD Legal Lending Limit Interest Rates Derivatives Retail Banking WOM Finance Global Banking Portfolio Business Banking Portfolio Syariah Banking Portfolio Market & Liquidity Risk Management Operational Risk Management Dashboard
9	20 September 2013	<ul style="list-style-type: none"> Confirmation of last RMC Minutes of Meeting Matter Arising: Micro Business Portfolio Update Micro Business: Policy Approval Unsecured Loan - PITA Portfolio Cap Renewal PDA for WOMF Joint Financing Ad-Hoc Stress Testing Report New Central Tendency ERD KRI Policy Update Thematic Agenda: Global Banking Credit Portfolio WOM Finance Credit Review Non BAU Monitoring Plan Retail Banking WOM Finance Global Banking Portfolio Business Banking Portfolio Syariah Banking Portfolio Market & Liquidity Risk Management Operational Risk Management Dashboard

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
10	17 Oktober 2013	<p>Confirmation of last RMC Minutes of Meeting Matter Arising: Festive Season Program Monitoring Investment Policy BII Mumbai PDA Mortgage Changing: New Policy related to PBI Regulation Mortgage Policy Scoring Implementation Changes in PDA for BII - BII Financing Shariah: Shariah Governance Framework (SGF), ERD, Risk Profile, Portfolio Bank: Risk Profile, Risk Heat Map, ERD WOM: Risk Heat Map, Risk Profile, Portfolio BII Finance: Risk Heat Map, Risk Profile, Portfolio Model validation Credit Card - AB scorecard Thematic Agenda: Industry Outlook and Exposure Limit Retail Banking Portfolio (Bank & Subsidiaries) Global Banking Portfolio Business Banking Portfolio Market & Liquidity Risk Management Operational Risk Management Dashboard</p>
11	25 November 2013	<p>Confirmation of last RMC Minutes of Meeting Changes in PDA for Credit Card & Mortgage Retail Banking Portfolio (Bank & BII Finance) WOM Finance Portfolio Shariah: ERD & Portfolio Bank: ERD Pedoman Penerapan Manajemen Risiko (PPMR) Threshold Review - Risk Profile Market & Liquidity Risk Management Market & Liquidity Risk Management (thematic agenda) Business Banking Portfolio Business Banking Credit Portfolio (thematic agenda) BCM Program Implementation update</p>
12	19 Desember 2013	<p>Confirmation of last RMC Minutes of Meeting IRRBB Policy Liquidity Risk Policy Annual Review Revisi KPB Bab 3.1.2 Penetapan Kewenangan Pemutus Kredit yang Mengundurkan Diri / Mutasi Central Tendency Policy Capping for Stale Rating & Policy Capping for Non -Audited Financial Statement ERD (Bank & Subsidiaries) Linkage BPR RCSA Policy, KRI Policy & IMDC Policy - BII India Shariah: ERD & Portfolio Market & Liquidity Risk Management WOM Finance Portfolio Retail Banking Portfolio (Bank & BII Finance) BII Finance Credit Portfolio (thematic agenda) Operational Risk Management Dashboard IT Risk Update (thematic agenda) Business Banking Global Banking Portfolio</p>

Assets & Liabilities Management Committee (ALCO) dan Assets & Liabilities Management (ALM)

Assets & Liabilities Management Committee (ALCO) and Assets & Liabilities Management (ALM)

ASSETS & LIABILITIES MANAGEMENT COMMITTEE (ALCO) DAN ASSETS & LIABILITIES MANAGEMENT (ALM)

ALCO adalah komite yang dibentuk oleh Direksi. Penyempurnaan fungsi dan tanggung jawab ALCO telah dilakukan melalui Surat Edaran No.SE.2012.003/PRES DIR tanggal 6 Juni 2012 tentang *Assets & Liabilities Management Dan Assets & Liabilities Management Committee (ALCO)*.

Assets & Liabilities Management (ALM) adalah penerapan manajemen keuangan dan risiko dalam pengelolaan posisi neraca Bank (*on dan off balance sheet*) untuk memperoleh profil *risk/reward* yang paling optimum sehingga dapat meningkatkan *shareholder value*.

Fokus area *Assets & Liabilities Management (ALM)* adalah sebagai berikut:

- Manajemen risiko suku bunga
- Manajemen risiko likuiditas
- Manajemen pengelolaan modal
- Manajemen atas eksposur mata uang

Terdapat 2 aspek berkaitan dengan fungsi *Assets & Liabilities Management (ALM)*, yaitu:

1. Fungsi pengambilan keputusan :
Assets & Liabilities Management Committee (ALCO)
2. Fungsi *support* ALM :
ALM Support Unit

KOMPOSISI KEANGGOTAAN ALCO ADALAH :

Ketua : Presiden Direktur
Wakil Ketua : *Treasurer*
Anggota : - Direktur Manajemen Risiko
- Direktur *Global Banking*
- Direktur *Business Banking*
- Direktur *Retail Banking*
- Direktur Keuangan
- Direktur Operasional & IT

Sekretaris : Kepala Unit Kerja *Corporate Finance & Capital Management*

Undangan Tetap : - Direktur Hukum & Kepatuhan,
Sekretaris Perusahaan

ASSETS & LIABILITIES MANAGEMENT COMMITTEE (ALCO) AND ASSETS & LIABILITIES MANAGEMENT (ALM)

ALCO is a committee established by The BOD. Management has improved the functions and responsibilities of ALCO based on SE No.2014.002/ PRES DIR dated 26 February 2014 concerning *Assets & Liabilities Management and Assets & Liabilities Management Committee (ALCO)*.

Assets & Liabilities Management (ALM) is the implementation of financial and risk management in managing the Bank's balance sheet position (*on and off balance sheet*) to obtain the optimum *risk/reward* profile in order to enhance shareholder value.

Focus Area of *Assets & Liabilities Management (ALM)* is as follows:

- Interest rate risk management
- Liquidity risk management
- Capital management
- Currency exposure management

There are 2 aspects related to the function of *Assets & Liabilities Management (ALM)*, namely:

1. The decision making function: *Assets & Liabilities Management Committee (ALCO)*
2. ALM Support function :
ALM Support Unit

ALCO MEMBERSHIP COMPOSITION IS AS FOLLOWS:

Chairman : President Director
vice Chairman : Treasurer
Member : - Director, Risk Management
- Director, Global Banking
- Director, Business Banking
- Director, Retail Banking
- Director, Finance
- Director, Operations & IT

Secretary : Head, Corporate Finance & Capital Management

Invitees : - Director, Legal & Compliance,
Corporate Secretary

- | | |
|--|---|
| - Direktur Human Capital | - Director, Human Capital |
| - Kepala Unit Kerja <i>Economic Research</i> | - Head, Economic Research |
| - Kepala Unit Kerja <i>Cross Markets Trading</i> | - Head, Cross Market Trading |
| - Kepala Unit Kerja <i>GM Rates</i> | - Head, GM Rates |
| - Kepala Unit Kerja <i>Market @ Liquidity Risk Management</i> | - Head, Market & Liquidity Risk Management |
| - Kepala Unit Kerja <i>Business Units (Global Banking, Business Banking, Retail Banking)</i> | - Head, Business Units (Global Banking, Business Banking, Retail Banking) |
| - Kepala Unit Kerja <i>Syariah Banking</i> | - Head, Syariah Banking |
| - Kepala Unit Kerja <i>Funding Product Management</i> | - Head, Funding Product Management |
| - <i>Subsidiaries</i> | - Subsidiaries |

Secara rinci ALCO memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberikan arah strategis dari ALM dan memastikan tindak lanjut taktis untuk menciptakan struktur *balance sheet* yang terus berubah untuk mencapai tujuan kinerja di dalam parameter-parameter risiko yang ditentukan.
2. Membuat metodologi pengukuran dalam skala keseluruhan bank dalam hal risiko pasar (suku bunga, nilai tukar dan nilai surat-surat berharga) dan risiko likuiditas.
3. Menyetujui kebijakan, strategi dan pedoman risiko suku bunga.
4. Menyetujui kebijakan, strategi dan pedoman likuiditas dan pendanaan.
5. Menentukan limit keseluruhan untuk tiap mata uang dalam pengelolaan risiko pasar dan risiko likuiditas, memonitor dan memutuskan untuk menyetujui/tidak menyetujui eksekusi limit jika dan saat terjadi eksekusi limit, sesuai dengan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan.
6. Membuat standar dan kebijakan *untuk internal transfer pricing*.
7. Memonitor dan mengelola konsolidasi posisi likuiditas dan suku bunga dari bank.
8. Menentukan tingkat suku bunga *earning assets* dan *liabilities* untuk memastikan agar tingkat suku bunga dapat mendorong tercapainya penggunaan dana dan biaya

In detail, the responsibilities of ALCO are :

1. Provide strategic direction for the ALM and ensure tactical follow-through to create an evolving balance sheet structure to meet performance objectives within prescribed risk parameters.
2. Establish Bank-wide risk measurement methodology for market risks (interest rate, foreign exchange and debt securities) and liquidity risk.
3. Approve interest rate risk management strategy, policies and guidelines.
4. Approve funding and liquidity strategy, policies and guidelines.
5. Set overall limits per currency for market risks and liquidity risks, monitor and decide to approve/disapprove limit excess if and when they occur, in accordance with established risk management policy.
6. Set framework, policy and implementation guide for internal transfer pricing.
7. Monitor and manage the consolidated liquidity and interest rate position of the Bank.
8. Set pricing of earning assets and liabilities to ensure pricing achieves optimum use of funds and cost of funds and liquidity

Assets & Liabilities Management Committee (ALCO) dan Assets & Liabilities Management (ALM)
Assets & Liabilities Management Committee (ALCO) and Assets & Liabilities Management (ALM)

- | | |
|--|--|
| <p>pendanaan yang optimum serta terpenuhinya sasaran likuiditas, dan untuk mendapatkan struktur <i>balance sheet</i> yang konsisten dengan strategi ALM.</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Menentukan kebijakan mengenai biaya (<i>fee</i>) yang dikenakan dalam berbagai produk dan jenis layanan. 10. Mengelola struktur modal bank dan penggunaan modal di antara berbagai unit bisnis. 11. Mengelola portofolio investasi bank. 12. Di mana dan pada waktu dapat diterapkan, melakukan <i>hedging</i> terhadap modal yang ditanamkan dan keuntungan dalam mata uang asing. 13. Memonitor kepatuhan bank terhadap peraturan dan pedoman yang relevan dari pemerintah dan Bank Indonesia. 14. Menyetujui produk-produk baru dalam hal penentuan tingkat suku bunga dan hal-hal yang berkaitan dengan eksposur terhadap resiko pasar dan likuiditas. 15. Meninjau kembali dan merumuskan strategi dalam mengelola risiko pasar dan risiko likuiditas yang berkaitan dengan profil neraca, modal dan struktur pendanaan bank. 16. Meninjau kembali dan memonitor <i>assets</i> dan <i>liabilities</i> dari anak perusahaan untuk mencapai tujuan bank secara keseluruhan. 17. Memonitor kegiatan operasional cabang luar negeri untuk memastikan kepatuhan kegiatan operasional terhadap peraturan lokal dan peraturan dari Bank Indonesia. | <p>objectives and to maintain balance sheet structure consistent with ALM strategy.</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Set policy on fees of various products and services 10. Manage the Bank capital structure and use of capital among various business units 11. Manage the Bank's investment portfolio. 12. Where and when applicable, hedge invested capital and profits in foreign currency. 13. Monitor compliance by the Bank to relevant government and Central Bank regulations and guidelines. 14. Approve new products in terms of pricing and liquidity, and market risk exposure. 15. Review and formulate broad strategies to manage market and liquidity risk associated with balance sheet profile, capital and funding structure of the Bank. 16. Review and monitor consolidated assets and liabilities of subsidiaries to achieve group wide asset and liability management. 17. Monitor the operations of overseas branches to ensure compliance with local regulatory and Central Bank of Indonesia regulations and guidelines. |
|--|--|

Pada tahun 2013, ALCO bertemu sebanyak 16 kali, dengan perincian sebagai berikut:

- 15 Januari 2013 (Spesial ALCO)
- 30 Januari 2013
- 4 Maret 2013
- 20 Maret 2013
- 24 April 2013
- 22 Mei 2013
- 13 Juni 2013 (Spesial ALCO)
- 26 Juni 2013
- 12 Juli 2013 (Spesial ALCO)
- 24 Juli 2013
- 28 Agustus 2013
- 30 Agustus 2013 (Spesial ALCO)
- 25 September 2013
- 23 Oktober 2013
- 12 November 2013 (Spesial ALCO)
- 28 November 2013

In 2013, ALCO held 16 meetings, with the following details:

- 15 January 2013 (Special ALCO)
- 30 January 2013
- 4 March 2013
- 20 March 2013
- 24 April 2013
- 22 May 2013
- 13 June 2013 (Special ALCO)
- 26 June 2013
- 12 July 2013 (Special ALCO)
- 24 July 2013
- 28 August 2013
- 30 August 2013 (Special ALCO)
- 25 September 2013
- 23 October 2013
- 12 November 2013 (Special ALCO)
- 28 November 2013

Daftar kehadiran keanggotaan ALCO dalam rapat ALCO sepanjang tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Attendance List of ALCO Meetings 2013 is as follows:

No	Nama Name	Tanggal / Date																Jumlah Rapat total Meeting
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		15-Jan-13	30-Jan-13	4-Mar-13	20-Mar-13	24-Apr-13	22-May-13	13-Jun-13	26-Jun-13	12-Jul-13	24-Jul-13	28-Aug-13	30-Aug-13	28-Sep-13	23-Oct-13	12-Nov-13	28-Nov-13	
	ALCO MEMBER																	
1	Presiden Direktur President Director	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√				12
2	Treasurer Treasurer	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	15
3	Direktur Keuangan *) Finance Director	√	√	√	√	-	-	√	√	√	√	√	√	-	√	√	√	13
4	Direktur Perbankan Korporasi Corporate Banking Director	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	16
5	Direktur Perbankan Bisnis Business Banking Director	-	√	√	√	-	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	13
6	Direktur Perbankan Ritel Retail Banking Director	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	15
7	Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director	√	√	√	√	√	√	-	√	√	√	-	-	√	-	√	√	12
8	Direktur Operasional & IT Operations & IT Director	√	√	√	√	√	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	14

*) menjabat sebagai Pjs Presiden Direktur sejak tanggal 5 September 2013

Agenda ALCO minimum mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Review atas notulen rapat sebelumnya dan persoalan yang timbul (jika ada).
- Meninjau dan melakukan analisis prospek ekonomi, politik dan pasar termasuk evaluasi atas *country risk*.
- Meninjau kembali atas kepatuhan dan peraturan yang berlaku
- Meninjau proposal dan eksekusi limit
- Memberikan persetujuan untuk proposal Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), *Base Lending Rate* (BLR), dan proposal suku bunga Kredit dan Deposit
- Melakukan analisis likuiditas dan *liquidity gap*
- Rasio konsentrasi likuiditas
- Eksposur atas risiko pasar dan likuiditas

ALCO agenda contains at least the following :

- Review the previous Minutes of the Meeting and follow-up on any issues (if any) arising.
- Review and analyze the prospect of economy, politics, and market including the evaluation of country risk.
- Review of compliance and regulatory issues.
- Review of limit proposal and excess.
- Approval for proposal in regard to prime lending rate (SBDK), Base Lending Rate (BLR) and Loan & Deposit Rate.
- Liquidity and liquidity gap analysis
- Liquidity concentration ratio
- Market and liquidity risk exposures

Assets & Liabilities Management Committee (ALCO) dan Assets & Liabilities Management (ALM) Assets & Liabilities Management Committee (ALCO) and Assets & Liabilities Management (ALM)

- Melakukan analisis mismatch suku bunga dan analisis sensitivitas
- Meninjau tingkat suku bunga kredit dan simpanan nasabah
- Perkembangan produk-produk pesaing dan tingkat suku bunganya
- Pengelolaan dari risiko perdagangan
- Update dari portfolio AFS
- Update posisi keuangan Grup
- Analisa atas neraca beserta perubahan komposisinya
- Neraca tertimbang berdasarkan risiko, aset yang disesuaikan dengan risiko dan return on capital
- Analisa net interest income.
- Interest rate mismatch and sensitivity analysis
- Loans and deposit rates
- Competitors product development and pricing
- Trading risk management
- Update on AFS portfolio
- Group financial update
- Balance sheet and composition changes analysis
- Risk weighted balance sheet, risk adjusted assets and return on capital
- Net interest income analysis

Metodologi *Fund Transfer Pricing* (FTP) telah diperbaharui pada tahun 2013 untuk meningkatkan transparansi, memperbaiki *strategic liquidity* dan *strategic pricing* dengan tujuan memberikan *transfer pricing* yang adil dan wajar kepada seluruh unit bisnis. Implementasi dari metodologi FTP baru dilakukan secara paralel dengan metodologi yang berlaku selama tahun 2013 sebagai uji coba sebelum pemindahan ke metodologi baru pada tanggal 1 Januari 2014.

Fund transfer pricing methodology was revised in 2013 to enhance transparency, improve strategic liquidity and strategic pricing, provide fair and equitable transfer pricing for all business lines. The implementation of new methodology FTP was conducted in parallel with the previous methodology for full 2013 as a bridge before full cut off as of 1 January 2014.

Matrix wewenang untuk produk *Funding* juga dilakukan perbaikan untuk menyelaraskan dengan tujuan Bank dalam proses standardisasi penentuan *pricing*, mengelola efektifitas dan tingkat kompetitif dalam mempertahankan simpanan nasabah dan pengelolaan biaya dana secara efisien.

Authority matrices for funding management is enhanced to align with the objective of providing standardized pricing, manage effectiveness and competitiveness of retaining third party funds and manage efficiency in cost of funds.

Perbaikan dalam proses menganalisa dan *stress-testing* dari pergerakan suku bunga terhadap *pricing* melalui simulasi dan proses analisa dengan kolaborasi dari unit bisnis, operasional dan *risks*.

Improvements in the process of analysis and stress-testing interest rate movements in pricing, through simulation and analytic processes with collaboration from business units, operation and risks.

Diikutsertakannya kantor cabang dan anak perusahaan di dalam ALCO Grup Perusahaan. Sejak bulan April 2013, laporan bulanan dari anak perusahaan dimasukkan dalam materi informasi ALCO dan pada Agustus 2013 *Term of Reference* dari anak perusahaan juga diselaraskan dengan Grup ALCO.

Inclusion of branches and subsidiaries within the purview of ALCO group. Since April 2013, monthly reports from subsidiaries are included in the ALCO information pack while in August 2013, terms of reference for subsidiaries are also aligned within ALCO group.

IT Steering Committee (ITSC)

IT Steering Committee (ITSC)

IT STEERING COMMITTEE (ITSC)

IT Steering Committee adalah komite yang dibentuk oleh Direksi dan berfungsi memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai rencana strategis Teknologi Informasi (TI) yang disesuaikan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank serta memantau efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan TI.

A. Dasar Pembentukan ITSC

- PBI No.9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
- SE BI No.9/30/DPNP tanggal 12 Desember 2007 perihal Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
- Surat Edaran No.SE.2012.021/DIR OPS & IT tanggal 12 Oktober 2012 tentang IT Steering Committee (ITSC).

B. Struktur Keanggotaan ITSC

Susunan Keanggotaan dan Undangan Tetap ITSC adalah sebagai berikut:

1. Anggota IT Steering Committee dan yang mempunyai hak suara; dan
2. Undangan Tetap dalam ITSC.

IT STEERING COMMITTEE (ITSC)

IT Steering Committee is a committee established by the Board of Directors and has the function to provide recommendations to the Board of Directors on Information Technology (IT) strategic plans aligned with the Bank's business activity strategic plans, as well as to monitor the effectiveness and efficiency of IT policy implementation.

A. ITSC Establishment Basis

- PBI No.9/15/PBI/2007 dated 30 November 2007 on Risk Management Implementation in Information Technology of Commercial Banks.
- SE BI no.9/20/DPNP dated 12 December 2007 on the Risk Management Implementation in Information Technology by Commercial Banks.
- Circular Letter No.SE.2012.021/DIR OPS & IT dated 12 October 2012 on IT Steering Committee (ITSC).

B. ITSC Memberships Structure

The following is the Membership Composition and Fixed Invitation of ITSC:

1. IT Steering Committee Member with (voting rights), and
2. Fixed Invitation in ITSC.

No	Nama Name	Jabatan Position
Anggota IT Steering Committee dan yang mempunyai hak suara Members of IT Steering Committee and has a voting		
1	Presiden Direktur President Director	Ketua Chairman
2	Direktur Operations & IT Operations and IT Director	Wakil Ketua Co Chairman
3	Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director	Anggota Member
4	Direktur Keuangan Finance Director	Anggota Member
5	Direktur Perbankan Korporasi Corporate Banking Director	Anggota Member
6	Direktur Perbankan Konsumer Consumer Banking Director	Anggota Member
7	Direktur Perbankan SME dan Komersial SME & Commercial Banking Director	Anggota Member
8	Kepala Unit Kerja IT Information Technology Head	Member Anggota

IT Steering Committee (ITSC)

IT Steering Committee (ITSC)

Undangan Tetap Dalam Rapat IT Steering Committee IT Steering Committee Regular Attendees	
1	Direktur Legal & Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan Legal & Compliance, Corporate Secretary Director
2	Direktur Human Capital Human Capital Director
3	Ketua SKAI Chief of SKAI
4	Front End Development Head
5	IT Planning & Services Head
6	IT Operations & Services Head
7	Project Management Head
8	Information Security Head
9	Back End Development Head

Keterangan:

Struktur Keanggotaan ITSC berdasarkan Surat Edaran No.SE.2012.021/DIR OPS & IT tanggal 12 Oktober 2012 tentang IT Steering Committee ITSC. Berdasarkan Surat Edaran No.SE.2013.039/Dir Ops & IT tanggal 5 Desember 2013 perihal Struktur Organisasi Direktorat Operations & IT maka unit kerja IT Planning & Services penyebutannya menjadi IT System & Network Services.

Selain undangan tetap, IT Steering Committee dapat mengundang pejabat yang terkait dengan pokok bahasan yang akan disampaikan dalam rapat.

Untuk memenuhi kuorum maka setiap pelaksanaan rapat IT Steering Committee paling sedikit dihadiri oleh 5 orang dari anggota IT Steering Committee dan dalam kondisi anggota tidak bisa hadir dapat didelegasikan kepada pejabat penggantinya.

C. Wewenang dan Tanggung Jawab IT Steering Committee

Wewenang dan tanggung jawab IT Steering Committee adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi yang mencakup:

- Rencana Strategis TI (Information Technology Strategic Plan) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank. Dalam memberikan rekomendasi, IT Steering Committee memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas serta hal-hal sebagai berikut:

Description:

The ITSC Membership Structure is based on the Circular Letter No.SE.2012.021/DIR OPS & IT dated 12 October 2012 on IT Steering Committee ITSC. Based on Circular Letter No.SE.2013.039/Dir Ops & IT dated 5 December 2013 regarding the Organization Structure of Operations & IT Directorate, thus the IT Planning & Services unit becomes IT System & Network Services.

In addition to its fixed invitation, IT Steering Committee can invite related officers regarding matters to be discussed in the meeting.

To meet the quorum, the implementation of IT Steering Committee meeting must be attended at least by 5 members of IT Steering Committee and in the event of members' absence, a substitute can be delegated.

C. Authorities and Responsibilities of IT Steering Committee

The authorities and responsibilities of IT Steering Committee are to recommend to the Board of Directors the following:

- IT Strategic Plan, in line with the Bank business activity strategic plan. In providing a recommendation, the IT Steering Committee takes into account efficiency factors, effectiveness as well as the following matters:

- Rencana pelaksanaan (road-map) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Bank. Road map terdiri dari kondisi saat ini (current state), kondisi yang ingin dicapai (future state) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai future state.
 - Sumber daya yang dibutuhkan.
 - Keuntungan/manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
- b. Perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank.
 - c. Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI. IT Steering Committee juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank) misalnya pergantian core banking application, server production dan topologi jaringan.
 - d. Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati dalam Service Level Agreement, IT Steering Committee melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek-proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien.
 - e. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.
 - f. Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI dan investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.
 - g. Pemantauan atas kinerja TI, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektivitas & efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI.
 - h. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara. IT Steering Committee dapat memfasilitasi hubungan antara kedua satuan kerja tersebut.
- Roadmap implementation plan to reach IT requirements, which supports the Bank's business strategy. The roadmap consists of a current state, future state, as well as measures to achieve the future state.
 - Required human resources.
 - Benefits/advantages to be achieved during implementation of plan.
- b. Formulation of IT main policies and procedures, such as IT security policy and risk management related to the use of IT in the Bank.
 - c. The relevancy of approved IT projects with IT Strategic Plan. The IT Steering Committee also sets the priority status of critical IT projects (significantly impacting on the Bank's operational activities) such as the replacement of core banking applications, server production and networks.
 - d. The relevancy of IT projects with the planned projects in the Service Level Agreement. The IT Steering Committee provides recommendations with results from analysis of main IT projects thus enabling the Board of Directors to make efficient decisions.
 - e. The relevancy of IT to management information system requirements supporting the Bank's business activity management.
 - f. The effectiveness of risk-minimizing measures on the Bank's investments in IT sectors which were provided to contribute the Bank's business objectives.
 - g. IT performance monitoring and improvements efforts, such as the detection of IT obsolescence and measurement of effectiveness & efficiency of IT security policy implementation.
 - h. Efforts to settle IT issues, which cannot be settled by the users and units. The IT Steering Committee can facilitate the relations between both working units.

IT Steering Committee (ITSC)

IT Steering Committee (ITSC)

- i. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Apabila sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI maka IT Steering Committee harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.
- j. Melakukan evaluasi dan persetujuan untuk pelaksanaan proyek-proyek TI yang membutuhkan investasi lebih besar dari 1 Milyar rupiah.
- k. Untuk setiap proyek TI yang sudah disetujui dalam IT Steering Committee, sudah merupakan persetujuan untuk business casenya sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran No.SE.2011.014/DIR FIN & IT tentang Persetujuan Pengeluaran Biaya, sehingga penandatanganan dokumen business case hanya sampai direktur terkait dengan melampirkan risalah IT Steering Committee.

D. Aktivitas IT Steering Committee

1. Frekuensi Rapat

IT Steering Committee melakukan pertemuan minimum setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk membicarakan masalah penting/mendesak secara efektif dan efisien sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah ditentukan.

IT Steering Committee dapat memutuskan untuk merubah frekuensi pertemuan agar dapat mengakomodasi permasalahan IT lebih awal.

Selama 2013, ITSC telah menyelenggarakan Rapat sebanyak 12 (dua belas) kali rapat.

2. Data Kehadiran Rapat Anggota ITSC

- i. The adequacy and allocation of the Bank's human resources. In the event of inadequate human resources, and the Bank intends to procure other parties' services for IT development, the IT Steering Committee will ensure that the Bank has the related policies and procedures.
- j. To evaluate and approve IT projects with investments of over 1 Billion Rupiah.
- k. For every approved IT projects by the IT Steering Committee, represented the approval of its business case as stipulated in the Circular Letter No.SE.2011.014/DIR FIN & IT on the Approval of Expense, thus the signing of business case documents is placed before the related Director only by the enclosure of IT Steering Committee minutes.

D. IT Steering Committee Activities

1. Meeting Frequency

The IT Steering Committee held at least 3 (three) meetings a month to discuss important matters effectively and efficiently, in accordance with its authorities and responsibilities as set forth.

The IT Steering Committee can make any decision to amend the meeting frequency so as to accommodate IT issues at an earlier stage.

During 2013, ITSC held 12 (twelve) meetings.

2. ITSC Members Meeting Attendance

No	Nama Name	2013												Jumlah Kehadiran Total Attendance
		1 8 January	2 5 February	3 5 March	4 2 April	5 6 May	6 5 June	7 2 July	8 2 August	9 3 September	10 1 Oktober	11 6 November	12 12 Desember	
Anggota IT Steering Committee IT Steering Committee Member														
1	Khairussaleh Ramli* President Director	√	√	√	x	√	√	√	√	√	x			8
2	Ghazali Bin Mohd Rasad Operations and IT Director	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
3	Hedy Maria Helena Lopian Risk Management Director	√	√	√	√	x	√	√	√	x	√	√	√	10
4	Thilagavathy Nadason Finance Director	√	√	√	√	√	√	√	√	x	√	√		11
5	Rahardja Alimhamzah Wholesale Banking Director	√	√	√	√	√	x	x	√	√	√	√	√	10
6	Stephen Liestyo ** Consumer Banking Director	x												-
7	Jenny Wiriyanto SME Banking Director	x	√	√	√	√	√	√	√	x	√	√	√	10
8	YB Hariantono Information Technology Head	√	√	√	√	√	x	√	√	√	√	√	√	11
9	Lani Darmawan*** Retail Banking Director	√	√	√	√	√	x	√	x	√	√	√	√	10
Undangan Tetap Invitee														
1	Rita Mirasari **** Legal & Compliance, Corporate Secretary Director	√	√	√	√	√	x	√	√	√	x			8
2	Ani Pangestu Human Capital Director	√	x	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	8
3	Antonius Gunadi ***** Chief of SKAI	x	x	√	√	√	√	√	√					6
4	Toto Prasetio IT Front End Development Head	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	x	11
5	Ignatius Adelbertus IT Back End Development Head	x	√	√	√	√	√	x	√	√	√	x	√	9
6	Dedy Curyani IT System & Network Services Head	√	√	√	√	x	√	√	√	√	√	√	√	11
7	Mimi Trisnawati Project Management Head	x	√	√	x	√	√	√	x	√	√	√	√	9
8	Mia Esti Sri Rezeki IT Operations & Services Head	x	x	√	x	x	√	√	√	√	√	x	x	6
9	R. Wisakti Gunawan IT Security Head	x	√	√	√	x	√	√	√	√	√	x	x	8
10	Taswin Zakaria ***** President Director											√	√	2

IT Steering Committee (ITSC)
IT Steering Committee (ITSC)

Keterangan:

- * Penyebutan unit kerja dan direktorat sesuai dengan No.SE.2013.039/Dir Ops & IT tanggal 5 Desember 2013 perihal Struktur Organisasi Direktorat Operations & IT dan No.SE.2014.001/Presdir tanggal 5 Februari 2014 perihal Struktur Organisasi PT BII Tbk.
- * Berdasarkan Surat Edaran No.SE.2013.039/Dir Ops & IT tanggal 5 Desember 2013 perihal Struktur Organisasi Direktorat Operations & IT maka unit kerja IT Planning & Services penyebutannya menjadi IT System & Network Services.

Description:

- * Working units and directorates in accordance with No.SE.2013.039/Dir Ops & IT dated 5 December 2013 regarding the Organizational Structure of Operations & IT Directorate and No.SE.2014.001/Presdir dated 5 February 2014 regarding the Organization Structure of PT BII Tbk.
- * Based on Circular Letter No.SE.2013.039/Dir Ops & IT dated 5 December 2013 regarding the Organization Structure of Operations & IT Directorate, thus the IT Planning & Services unit became IT System & Network Services.

*	:	Efektif mengundurkan diri per 11 November 2013 Resigned effective as of 11 November 2013.
**	:	Efektif mengundurkan diri per 31 Januari 2013 Resigned effective as of 31 January 2013.
***	:	Berdasarkan RUPS 22 April 2013 Lani Darmawan efektif menjadi Direksi dan telah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia melalui surat Bank Indonesia No.15/62/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 25 Maret 2013. Kehadiran Lani Darmawan pada Rapat ITSC bulan Januari - April 2013 dalam kapasitasnya sebagai invitee dan pada bulan Mei - Desember 2013 kehadiran Ibu Lani Darmawan sebagai anggota ITSC. Based on AGMS in 22 April 2013, Lani Darmawan was appointed as Director and approved from Bank Indonesia through Bank Indonesia Letter No.15/62/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 25 Maret 2013. Lani Darmawan presence in the ITSC meeting on January - April 2013, she was an invitee while on May - December 2013, her presence as member of the ITSC.
****	:	Efektif mengundurkan diri per 11 November 2013 dan telah ditunjuk Ani Pangestu sebagai Pejabat Sementara Direktur Kepatuhan Resigned effective as of 11 November 2013 and have already appointed Ani Pangestu as acting Compliance Director.
*****	:	Antonius Gunadi efektif mengundurkan diri per 26 Agustus 2013 dan telah ditunjuk Pejabat Sementara Kepala SKAI Cesilia Posmaria Sitinjak Antonius Gunadi resigned effective as of 26 Agustus 2013 and have already appointed Cesilia Posmaria Sitinjak as acting Head, SKAI.
*****	:	November 2013 ditunjuk sebagai Presiden Direktur subject to approval regulator Based on AGMS on 11 November, appointed as President Director (subject to approval regulator) Berdasarkan RUPS per 11
X	:	Tidak Hadir Absent
v	:	Hadir Present

3. Risalah Rapat

Setiap rapat dibuat Risalah Rapat dan didistribusikan kepada seluruh anggota IT Steering Committee dan peserta lain yang hadir dalam pertemuan tersebut.

3. Minutes of Meeting

Minutes of Meeting are prepared for every meeting and distributed to all members of the IT Steering Committee and others who attended meetings.

4. Agenda Rapat ITSC 2013 ITSC Meeting Agenda in 2013

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
1	8 January 2013	No.M.2013.003/ DIR OPS & IT - IT a. Review ITSC MOM 4 December 2012 b. Core Banking Assessment c. IT SC Approval d. Other Information
2	5 February 2013	No.M.2013.007/ DIR OPS & IT - IT a. Matters Arising on ITSC January 2013 b. ITSC Approval c. IT Projects 2012 Updates d. Other Information
3	5 March 2013	No.M.2013.008/ DIR OPS & IT - IT a. Matters Arising on ITSC February 2013 b. ITSC Approval c. IT Projects 2012 Updates d. Other Information
4	2 April 2013	No.M.2013.009/ DIR OPS & IT - IT a. Matters Arising on ITSC 5 March 2013 b. ITSC Approval c. Other Information
5	6 May 2013	No.M.2013.010/ DIR OPS & IT - IT a. Review ITSC MOM 2 April 2013 b. ITSC Approval c. Other Information
6	5 June 2013	No.M.2013.011/ DIR OPS & IT - IT a. Review ITSC MOM 6 May 2013 b. ITSC Approval c. Other Information
7	2 July 2013	No.M.2013.012/ DIR OPS & IT - IT a. Matters Arising on ITSC 5 June 2013 b. ITSC Approval c. Other Information
8	2 August 2013	No.M.2013.013/ DIR OPS & IT - IT a. Matters Arising on ITSC 5 June 2013 b. Matters Arising on ITSC 2 July 2013 c. Matters Arising on ITSC 2 August 2013 d. ITSC Approval e. Other Information
9	3 September 2013	No.M.2013.014/ DIR OPS & IT - IT a. Matters Arising on ITSC 2 August 2013 b. ITSC Approval c. Other Information
10	1 October 2013	No.M.2013.015/ DIR OPS & IT - IT a. Matters Arising on ITSC 3 September 2013 b. ITSC Approval c. Other Information
11	6 November 2013	No.M.2013.016/ DIR OPS & IT - IT a. Matters Arising on ITSC 1 October 2013 b. ITSC Approval c. Other Information
12	12 December 2013	No.M.2013.017/ DIR OPS & IT - IT a. Matters Arising on ITSC 6 November 2013 b. ITSC Approval c. Other Information

Komite Human Capital Human Capital Committee

A. DASAR PEMBENTUKAN

Pembentukan Komite Human Capital berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK.2012/PRES DIR tentang komisi Human Capital yang diperbarui dengan Memorandum No.M.2012.192/DIR HC – Strategic Center tentang Pembaruan Surat Keputusan Direksi mengenai Komisi Human Capital. Komite Human Capital bertanggung jawab kepada Direksi.

B. TUJUAN PEMBENTUKAN

Direksi membentuk Komite Human Capital untuk mendapatkan arahan-arahan strategis dan pengambilan keputusan-keputusan penting dalam hal pengembangan organisasi, Compensation & Benefit, Talent Management, Succession Management, remunerasi dan nominasi anggota top management serta kebijakan baru terkait dengan pemberdayaan SDM di BII dan pokok persoalan kunci di bidang SDM yang berdampak terhadap risiko keuangan dan/atau reputasi organisasi.

C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB HCC

- a. Menyediakan arahan tingkat tinggi dengan mempertimbangkan kebijakan Human Capital yang strategis dan arahan untuk mempengaruhi kegiatan organisasi bank dan sumber daya manusia di dalamnya.
- b. Membuat keputusan bagi top management dan mengatur program pengembangan untuk mereka.
- c. Menyediakan arahan dan membuat keputusan strategis pada permasalahan Human Capital.

D. PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA HCC

1. Frekuensi dan Kuorum

- Komite harus bertemu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- Kuorum untuk pertemuan komite harus dihadiri oleh minimal 4 anggota.

A. BASIS OF ESTABLISHMENT

The Human Capital Committee was established by virtue of Decision Letter of Board of Directors No. SK.2012/PRES DIR on Human Capital Commission, which was updated by Memorandum No.M.2012.192/DIR HC – Strategic Center regarding Update on Board of Directors' Decision Letter on Human Capital Commission. The Human Capital Committee reports to the Board of Directors.

B. PURPOSE OF ESTABLISHMENT

The Board of Directors established the Human Capital Committee to acquire strategic direction and important decision-making, such as in terms of organizational development, Compensation & Benefits, Talent Management, Succession Management, remuneration and nomination for top management, as well as new policies related to Human Resources empowerment in BII, and other core issues in Human Resources that may impact the organization's financial risk and/or reputational risk.

C. HCC DUTIES AND RESPONSIBILITIES

- a. Provide high-level directives by taking into consideration strategic Human Capital policies and directions that affect the Bank's organizational activities and staff.
- b. Make decisions and arrange development programs for top management.
- c. Provide strategic direction and decisions on matters related to Human Capital.

D. GUIDELINES AND PROCEDURES OF HCC

1. Frequency and Quorum

- The committee meets at least 2 (two) times every year.
- The meetings need to be attended by a minimum of 4 members of the Committee to achieve a quorum.

- Ketua dapat mengadakan pertemuan apabila ada permasalahan mendesak yang harus didiskusikan dan diputuskan oleh komite atau anggota komite dapat mengajukan pertemuan melalui sekretaris dan ketua.
 - Dalam ketidakhadiran ketua (absen), sekretaris akan memimpin pertemuan komite.
 - Pertemuan komite tidak boleh dilakukan dalam hal ketua atau sekretaris tidak hadir.
- 2. Pemberitahuan**
- Sebelum mengajukan pertemuan komite, sekretaris akan mengirimkan pemberitahuan tertulis mengenai pertemuan menjelaskan tanggal, waktu, dan tujuan pertemuan. Pemberitahuan ini harus diberitahukan kepada setiap anggota selambat-lambatnya 5 hari kerja sebelum pertemuan.
 - Akan tetapi, jangka waktu pemberitahuan seperti itu dapat diperpendek dalam kasus darurat atau apabila disetujui oleh semua anggota komite.
- 3. Agenda dan Laporan**
- Agenda dan laporan harus diberikan kepada anggota komite paling lambat 5 hari kerja sebelum jadwal pertemuan.
- 4. Metode Penyelesaian**
- Semua pertemuan harus dipimpin oleh ketua.
 - Dalam kasus ketua tidak dapat hadir, sekretaris ditunjuk sebagai ketua pertemuan.
 - Setiap hal atau permasalahan mendesak yang didiskusikan dalam komite harus diketahui sebelumnya oleh Direktur Human Capital.
- Chairman of the Committee may hold meetings for urgent matters that require discussion and deliberation of the Committee, or Committee members may propose to meet through Secretary and Chairman
 - If the Chairman is absent, the secretary shall lead the Committee meeting.
 - A Committee meeting may not commence without the attendance of Chairman or secretary.
- 2. Notification**
- Prior to proposing a committee meeting, Secretary shall distribute written notification regarding the meeting, containing the date, time, and purpose of meeting. The notification needs to be distributed to all members at least five days before the meeting.
 - Nevertheless, the period of notice may be shortened under urgent circumstances or if approved by all members of the Committee.
- 3. Agenda and Report**
- Meeting agenda and report need to be provided to members of the Committee at least 5 working days before the scheduled meeting.
- 4. Method of Resolution**
- Chairman leads all meetings.
 - If the Chairman is absent, secretary shall act as the leader of the meeting
 - Any urgent matters discussed by the Committee need to be arranged beforehand and made known to the Director of Human Capital.

Komite Human Capital
Human Capital Committee

E. STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE HUMAN CAPITAL

E. STRUCTURE OF HUMAN CAPITAL COMMITTEE

Jabatan Position	Pemegang Jabatan Occupant
Ketua merangkap anggota	Presiden Direktur President Director
Anggota	Direktur Human Capital Human Capital Director Direktur Business Banking Business Banking Director Direktur Global Banking Global Banking Director Direktur Retail Banking Retail Banking Director Direktur Finance Finance Director Direktur Operations and IT Operations and IT Director
Sekretaris	Eksekutif Human Capital Human Capital Executive
<p>Catatan/Note: Nama Direktorat merujuk pada Surat Edaran No.SE.2014.001/PRES DIR tanggal 5 Februari 2014 perihal Struktur Organisasi PT Bank Internasional Indonesia, Tbk. Names of Directorates refer to Circular Letter No.SE.2014.001/PRES DIR dated 5 February 2014 regarding Organizational Structure of PT Bank Internasional Indonesia, Tbk.</p>	

F. FREKUENSI & DATA KEHADIRAN RAPAT HCC

Frekuensi Rapat

Frekuensi Rapat HCC selama 2013 sebagai berikut:

F. HCC MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE

Meeting Frequency

The meeting frequency of HCC during 2013 was as follows:

Bulan Month	Target Meeting Meeting Target	Aktual Meeting Actual Meeting
Januari / January	1	2
Februari / February	1	2
Maret / March	1	1
April	1	2
Mei / May	1	1
Juni / June	1	1
Juli / July	1	1
Agustus / August	1	2
September	1	1
Oktober / October	1	2
November	-	1

Data Kehadiran Rapat HCC

HCC Meeting Attendance

No.	Nama Anggota Member	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Frekuensi Rapat
		8/1	31/1	5/2	18/2	5/3	10/4	23/4	6/5	5/6	2/7	15/8	22/8	3/9	2/10	17/10	6/11	
1	Khairussaleh Ramli	* √	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x	x	13
2	Rahardja Alihamzah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	x	√	√	√	√	√	√	15
3	Thila Nadason	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	16
4	Ghazali Moh. Rasad	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	x	√	√	x	√	√	14
5	Ani Pangestu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	16
6	Jenny Wiriyanto	x	x	√	x	√	√	√	√	√	√	√	x	x	√	√	x	10
7	Lani Darmawan				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	13
8	Stephen Liestyo	x	x															-
9	Herman Cahyadi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15
10	Lenny Ang																√	1
Kuorum I Quorum		Ya Yes	Ya Yes	Ya Yes	Ya Yes	Ya Yes	Ya Yes	Ya Yes	Ya Yes	Ya Yes	Ya Yes	Ya Yes	Ya Yes	Ya Yes	Ya Yes	Ya Yes	Ya Yes	

Keterangan :

- * Khairussaleh Ramli efektif mengundurkan diri per 11 November 2013. Ibu Thila Nadason ditunjuk sebagai Pejabat Sementara Presiden Direktur efektif per 5 September 2013.
- ☒ Kehadiran Lani Darmawan pada Rapat HCC pada tanggal 18 Februari 2013, 5 Maret 2013 dan 10 April 2014 dalam kapasitasnya sebagai anggota dengan catatan menunggu hasil fit & proper test dari BI. Berdasarkan RUPS 22 April 2013, Lani Darmawan efektif menjadi Direksi dan telah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia melalui surat Bank Indonesia No.15/62/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 25 Maret 2013.
- * Stephen Liestyo efektif mengundurkan diri per 31 Januari 2013.
- * Per 1 November 2013, jabatan Sekretaris Komite Human Capital yang sebelumnya dijabat oleh Herman Cahyadi diserahkan ke pejabat Human Capital lainnya yakni Lenny Ang.

Note:

- * Khairussaleh Ramli resigned effective 11 November 2013. Ms. Thila Nadason was appointed Interim President Director effective 5 September 2013.
- ☒ The attendance of Lani Darmawan in HCC meetings on 18 February 2013, 5 March 2013, and 10 April 2014 was in her capacity as a member, with note of awaiting the fit and proper test result from BI. Based on GMS 22 April 2013, Lani Darmawan effectively assumed her role as a Director following approval from Bank Indonesia by Bank Indonesia letter No.15/62/GBI/DPIP/Rahasia dated 25 March 2013.
- * Stephen Liestyo resigned effective 31 January 2013.
- * As of 1 November 2013, the role of Secretary of Human Capital Committee, previously occupied by Herman Cahyadi, was transferred to other Human Capital executive, Lenny Ang.

Komite Human Capital
Human Capital Committee

G. CAKUPAN AGENDA RAPAT HCC TAHUN 2013 **G. HCC MEETING AGENDA IN 2013**

Tanggal / Date	Agenda
8 Januari 2013 8 January 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matters arising December 2012 2. 2012 Best Employee Awards 3. 2013 UMP Cost Implication 4. Update on MCP for Talent Management 5. 2012 EES Result 6. Job Evaluation – New Grading Communication 7. Performance Management Update 8. Annual Dinner & Regional Annual Dinner 9. Other Matters Arising
31 Januari 2013 31 January 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Performance Calibration of Band F and Above 2. MCP Successor Calibration
5 Februari 2013 5 February 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matters arising December 2012 2. EES Result 3. Core values TIGER Campaign and Internalization 4. Executive Leader Coach 5. Retail Banking Structure 6. Other Matters Arising
18 Februari 2013 18 February 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2012 Performance Bonus
5 Maret 2013 5 March 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2012 ICES (INTERNAL Customer Engagement Survey) 2. Sales Incentive Plan 3. Merit Increase Guideline 4. Per Day Travel Allowance 5. Other Matters Arising
10 April 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Annual Review 2. Other Matters Arising
23 April 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. BII Country Talent Review
6 Mei 2013 6 May 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Action Planning ICES/EES BII 2. BII Anniversary 3. Career Path for Executive Secretary 4. Other Matters Arising
5 Juni 2013 5 June 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2012 Branch Performance Incentive Plan 2. Direct Incentive Scheme for Service Team 3. Service Champion 4. Micro Banking – Sales Incentive Plan 5. Mentoring Program – List Mentor-Mentee 6. Other Matters Arising
2 Juli 2013 2 July 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Human Capital Dashboard 2. The “Transitioning Leaders to CEO” Program 3. Other Matters Arising
15 Agustus 2013 15 August 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Productivity per LoB 2. 1st SIP Payout 3. Promotion vP & Above (Retail Banking)
22 Agustus 2013 22 August 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sales Incentive Plan – Commercial Sales Team
3 September 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Talent Retention Survey 2. Corporate Title Nomenclature 3. Risk Appetite Statement 4. Sharia Organization Structure 5. Update on Disciplinary/Industrial Issue 6. Other Matters Arising
2 Oktober 2013 2 October 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Annual Review – Off Cycle 2. Other Matters Arising

Tanggal Date	Agenda
17 Oktober 2013	1. Grade Alignment
2 October 2013	2. MCP Review (Operations & IT and HC Directorate)
	3. Annual Review – Off Cycle
	4. Transport Allowance
	5. Retention Program (Basel, Retail Banking Fraud & QA Management)
	6. LTV and FTV Regulation
	7. Update on Travel Management Policy
	8. 2013 End-Year Performance Management
	9. Preparation of BII Awards Night
	10. 2013 EES and ICES Plan
	11. Ask Your Management
6 November 2013	1. Transport Allowance (lanjutan)
	2. LTV and FTV Regulation (lanjutan)
	3. Update on Travel Management Policy (lanjutan)
	4. 2013 End-Year Performance Management (lanjutan)
	5. Preparation of BII Night Award Night (lanjutan)
	6. 2013 EES and ICES Plan (lanjutan)
	7. Ask Senior Management (lanjutan)
	8. Sales Incentive Program

H. PROGRAM KERJA HCC DAN REALISASINYA TAHUN 2013

Selama tahun 2013, Komite Human Capital telah menghasilkan keputusan terkait dengan kebijakan di bidang SDM sebagai berikut:

1. Penentuan remunerasi karyawan dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan kemampuan internal Bank.
2. Pengelolaan kinerja karyawan secara keseluruhan.
3. Program engagement untuk karyawan.
4. Program retensi dan pengembangan bagi karyawan berpotensi.
5. Program insentif/reward berbasis kinerja untuk karyawan.
6. Penetapan penggantian pejabat eksekutif.
7. Meninjau peraturan terkait tenaga kerja beserta dampaknya.

I. KUORUM DAN VALIDASI KEPUTUSAN RAPAT HCC

Selama tahun 2013, setiap rapat HCC selalu memenuhi kuorum dan setiap keputusan telah dijalankan berdasarkan hasil rapat.

H. HCC WORK PROGRAM AND ITS REALIZATION IN 2013

During 2013, Human Capital Committee agreed on the following decisions related to Human Resources policies:

1. Determining employee remuneration by taking into account market conditions and the Bank's internal capacity.
2. Overall employee performance management.
3. Engagement program for employees.
4. Retention and development programs for potential employees.
5. Performance-based incentive/reward program for employees.
6. Deliberation on succession of executive officers.
7. Review regulations related to labor and the regulatory impacts.

I. HCC MEETING QUORUM AND DECISION VALIDATION

During 2013, all HCC meetings achieved quorum requirements and all decisions made were implemented accordingly.

Internal Audit Committee

Internal Audit Committee

1. Dasar Pembentukan Internal Audit Committee

Internal Audit Committee (IAC) diprakarsai oleh Manajemen untuk memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh unit kerja atas temuan audit dari audit internal dan regulator (BI, Bapepam dan BNM).

IAC dibentuk sesuai dengan keputusan Manajemen pada bulan Mei 2012, dengan tujuan sebagai berikut:

- Untuk memastikan bahwa manajemen telah menanggapi semua temuan audit dan rekomendasi yang diberikan oleh auditor (regulator dan internal).
- Untuk memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi telah ditindaklanjuti tepat waktu dan efektif.
- Untuk memastikan efektivitas dari tindaklanjut yang dilakukan oleh unit kerja atas rekomendasi yang diberikan oleh auditor.
- Untuk melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komite Audit.

2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Internal Audit Committee

Pedoman dan Tata Tertib Kerja IAC diatur dalam Term Of Reference (TOR) yang disahkan tanggal 5 Mei 2012.

IAC wajib mengadakan meeting secara berkala minimal satu (1) kali sebulan.

Jika Ketua berhalangan hadir, maka Direktur Risk Management akan memimpin meeting.

1. Internal Audit Committee Establishment Basis

The Internal Audit Committee (IAC) was established by Management to monitor the follow up of working units on audit findings from internal audit and regulators (BI, Bapepam and BNM).

IAC is established in accordance with a Management decree in May 2012, with the following objectives:

- To ensure the follow up by management on audit findings and recommendations provided by the auditors (regulators and internal).
- To ensure an effective and timely follow up on audit findings.
- To ensure the effectiveness of the follow up by working units on the auditor's recommendations.
- To carry out other duties specified by the Audit Committee.

2. Policy And Work Charter Of Internal Audit Committee

The Guidelines and Work Charter of IAC are stipulated in the Term Of Reference (TOR) legalized on 5 May 2012.

IAC shall hold periodical meetings at least once a month.

If the Chairman is absent, the Risk Management Director will chair the meeting.

3. Struktur, Keanggotaan anggota Komite Internal Audit Structure, Memberships of Internal Audit Committee

Chairman	:	Thilagavathy Nadason	(Direktur Finance) (Finance Director)
Members	:	Hedy Lopian*	(Direktur Risk Management) (Risk Management Director)
		Rita Mirasari**	(Direktur Legal & Compliance, Corporate Secretary) (Legal & Compliance, Corporate Secretary)
		Ghazali Bin Mohd Rasad	(Direktur Operations & IT) (Operations & IT Director)
		Jenny Wiriyanto	(Direktur Business Banking) (Business Banking Director)
		Andreas Pranawadjati** Indro Tri Sutanto Leonardi Widjaja	(Compliance Head) (KYC & AML Head) (Operational Risk Management Head)
In Attendance	:	Antonius Gunadi**	(Chief Audit Executive)
Secretary	:	Novita Budi Astuti**	(Head of Audit Secretariat, Audit)

Keterangan / Note : * Pengunduran diri sebagai direktur terhitung efektif sejak ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2014
The resignation as director of the company effective as the closing of the company's Annual General Meeting of Shareholders in 2014
** Per 31 Maret 2014 status sudah mengundurkan diri
Resign as per 31 March 2014
Struktur keanggotaan Komite IAC akan diperbaharui dan dilengkapi dalam waktu dekat.
IAC member structure will be renewal and completed in short period

4. Tugas & Tanggung jawab Internal Audit Committee

1. Untuk membahas laporan audit dari auditor internal, auditor eksternal, dan regulator.
2. Komite harus terus di-update mengenai hal-hal terkait audit dan diinformasikan secepatnya jika terjadi kasus apapun.
3. Untuk mengawasi efektivitas tindakan manajemen sehubungan dengan temuan audit.
4. Untuk menindaklanjuti dan memantau status tindakan pada rekomendasi yang dibuat oleh auditor internal, auditor eksternal dan regulator.
5. Untuk membahas ringkasan laporan audit sebelum diajukan ke Komite Audit.
6. Untuk mereview ringkasan dari status dan temuan audit yang masih belum diselesaikan.

4. Duties & Responsibilities of Internal Audit Committee

1. To discuss the audit reports from internal auditors, external auditors, and regulators.
2. Continually update related audit matters and quickly inform management of any cases.
3. To supervise the effectiveness of management measures on audit findings.
4. To follow up and monitor measurement actions on recommendations from the internal auditors, external auditors and regulators.
5. To discuss the summary of audit reports prior to presentation to the Audit Committee.
6. To review the summary of audit findings status and outstanding.

Internal Audit Committee

Internal Audit Committee

5. Frekuensi & Data Kehadiran Rapat Internal Audit Committee

Sesuai dengan TOR IAC, rapat diadakan secara berkala, minimal satu (1) kali dalam sebulan. Selama tahun 2013 telah diadakan 13 kali rapat IAC.

5. Internal Audit Committee Meeting Frequency and Attendance

In accordance with the IAC TOR, the meeting is held periodically, at least once a month. During 2013, the IAC held 13 meetings.

No.	Anggota Internal Audit Committee Members of Internal Audit Committee	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Frekuensi Rapat Meeting Frequency
		09-Jan	06-Feb	06-Mar	08-Apr	03-Mei	15-Mei	04-Jun	10-Jul	16-Jul	18-Sep	18-Okt	13-Nov	16-Des	
1	Thilagavathy Nadason	√	√	√	√	√	x	√	√	√	x	x	√	√	10x hadir/presence
2	Hedy Lopian	√	√	√	√	√	√	x	x	√	√	√	√	x	10x hadir/presence
3	Rita Mirasari*	√	√	√	√	√	√	x	√	√	√	x	-	-	9x hadir/presence
4	Ghazali bin Mohd Rasad	x	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12x hadir/presence
5	Jenny Wiriyanto	x	√	√	√	x	x	x	x	x	√	x	x	√	5x hadir/presence
6	Andreas Pranawadjati	√	√	√	√	√	√	√	√	x	√	√	√	x	11x hadir/presence
7	Indro Tri Sutanto	√	√	√	√	x	√	√	x	√	√	√	x	√	11x hadir/presence
8	Adi Suryo Djoko	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	x	√	12x hadir/presence
9	Ani Pangestu**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	2x hadir/presence

Keterangan:/Description:

√ = hadir / presence
x = tidak hadir / absent

* Rita Mirasari = mengundurkan diri sebagai Direktur Kepatuhan efektif sejak RUPS 11 November 2013 / resigned as Compliance Director effective as of GMS on 11 November 2013

**Ani Pangestu = sebagai pejabat Sementara Direktur Kepatuhan merangkap Sekretaris Perusahaan efektif sejak 27 September 2013 / Interim Director of Compliance Concurrent as Corporate Secretary effective as of 27 September 2013

6. Cakupan Agenda Rapat Internal Audit Committee Tahun 2013

1. Laporan audit dari auditor internal yang diterbitkan bulan November 2012 – Desember 2013.
2. Status update untuk temuan audit external (BI & Bapepam) dan temuan audit BNM.
3. Corrective Action Status yaitu untuk temuan-temuan yang berpotensi tidak dapat diselesaikan sesuai tanggal penyelesaian akan diajukan ke IAC untuk mendapatkan persetujuan perubahan tanggal penyelesaian. Persetujuan perubahan tanggal penyelesaian adalah berdasarkan pertimbangan dari anggota IAC.
4. Update Bisnis Unit tentang tindak lanjut atas rekomendasi SKAI (contoh; AMLA, Compliance, dan SID Crash Program)

6. The Meeting Agenda of Internal Audit Committee in 2013

1. Audit report from the internal auditors, published November 2012 - December 2013.
2. The updated status of external audit findings (BI & Bapepam) and BNM audit findings.
3. The Corrective Action Status for findings that have the potential to be unresolved as per settlement dates, to be presented to IAC for approval on the amendment of settlement date. The settlement date amendment is based on the consideration of IAC members.
4. The update by the Business Unit on the follow up of the recommendations by IAU (for example; AMLA, Compliance, and SID Crash Program).

7. Program Kerja Internal Audit Committee dan Realisasinya tahun 2013

7. Internal Audit Committee Work Program and Realization in 2013

No.	Program Kerja / Work Program	Realisasi / Realization
1.	Meeting bulanan / Monthly meetings	13 x (Januari – Desember 2013)
2.	Membahas laporan audit dari auditor internal / Discussion on audit report from the internal auditors	Setiap bulan / Monthly
3.	Menindaklanjuti dan memantau status tindak lanjut pada rekomendasi yang dibuat oleh auditor internal, auditor eksternal dan regulator. / Follow up and monitoring on follow up status on the recommendations by the internal auditors, external auditors and regulators.	Setiap ada update status / For every update status
4.	Mengikuti rapat Komite Audit sebagai perwakilan Manajemen/ Attend the Audit Committee meeting as the management representatives	Sesuai dengan rapat Komite Audit yang dilakukan sepanjang tahun 2013 / In accordance with the Audit Committee meeting during 2013

8. Kuorum dan Validasi Keputusan Rapat Internal Audit Committee

Ketentuan mengenai Kuorum adalah:

1. Kehadiran lima (5) anggota harus membentuk kuorum yang diperlukan untuk meeting.
2. Keanggotaan secara otomatis berlaku bagi pemegang jabatan pejabat sementara (Acting Head).

Semua rekomendasi yang diberikan dalam rapat IAC, disampaikan kepada unit terkait untuk ditindaklanjuti dan pada rapat berikutnya disampaikan kembali untuk diputuskan apakah tindak lanjut yang dilakukan oleh unit terkait sudah memadai. Hasil rekomendasi pada rapat IAC akan disampaikan pada rapat Komite Audit.

8. Quorum and Validation of the Decision of Internal Audit Committee Meeting

The following are regulations for a Quorum:

1. Attendance of five (5) members shall form the required quorum for a meeting.
2. Membership automatically prevails for the interim position (Acting Head).

All recommendations must be provided in an IAC meeting, presented to related units for follow up and for the next meeting represented for a decision and assessment on the adequacy of working unit follow up. The recommendation results of the IAC meeting will be presented to the Audit Committee meeting.

Fungsi kepatuhan Compliance Function

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan merupakan salah satu unsur penting dalam upaya peningkatan kinerja BII yang optimal. Kompleksitas kegiatan usaha BII yang semakin meningkat memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh BII, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha BII.

Pelaksanaan fungsi kepatuhan senantiasa menekankan pada peran aktif dari seluruh elemen organisasi kepatuhan yang terdiri dari direktur yang membawahi fungsi kepatuhan (Direktur Kepatuhan), kepala unit kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan sebagaimana tertuang dalam PBI No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum ("PBI Fungsi Kepatuhan").

Seiring dengan meningkatnya risiko dalam pengelolaan perbankan Indonesia, BII senantiasa berupaya menerapkan budaya kepatuhan (compliance culture) dan kepedulian terhadap kepatuhan (compliance awareness) di semua tingkat organisasi dan kegiatan usaha BII, baik dalam bentuk advisory, pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan regulator maupun dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan kepada unit-unit kerja dengan didasari kesadaran bahwa kepatuhan merupakan tanggung jawab seluruh lini organisasi di BII dan kesadaran individu dalam Bank mematuhi peraturan senantiasa menjadi prioritas. Setiap perilaku individu senantiasa berpijak pada core values dan berpedoman pada code of conduct dan code of ethic.

Agar pelaksanaan pengelolaan risiko kepatuhan berjalan dengan efektif dan kepastian penanganan transaksi/kegiatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, maka Direktur Kepatuhan, Kepala Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan merupakan pihak yang independen dari satuan kerja lainnya.

Melalui program-program kepatuhan yang terencana dan terintegrasi, BII berkomitmen membangun budaya kepatuhan dan terus mengembangkan pengelolaan risiko yang efektif. Hal tersebut antara lain dituangkan

Implementation of the compliance function is one of the key elements to bolster optimum performance of BII. The rising complexity of BII's business has imparted a significant impact on the Bank's risk exposure, and therefore efforts for risk mitigation of BII's business activities are required.

In its implementation, compliance function consistently emphasizes the active roles of all elements of the compliance organization, which consists of a director in charge of compliance function (Compliance Director), head of compliance unit, and compliance working unit as provisioned in BI Regulation No. 13/2/PBI/2011 dated 12 January 2011 on the Implementation of Compliance Function in Commercial Banks ("BI Regulation on Compliance Function").

In line with increased risks to the management of Indonesia's banking industry, BII continuously strives to embed compliance culture and compliance awareness at all levels of BII's organizations and business activities. The Bank provides advisory, monitoring on the Bank's compliance with regulatory requirements, and socialization as well as training for working units, based on the understanding that compliance is a shared responsibility of all lines of BII's organizations and that compliance with regulations should always be a priority of all staff in BII. All individual conduct should consistently be founded upon core values, code of conduct, and code of ethics.

To have smooth and effective implementation of compliance risk management, and to ensure that transactions/activities that pose the potential of conflicts of interest are appropriately addressed, the Compliance Director, Head of Compliance Working Unit, and Compliance Working Unit work independently.

With planned and integrated programs, BII is committed to build a compliance culture and effective risk management practices. This commitment is reflected by, among others, the formulation of compliance framework,

melalui tatanan kerangka kerja kepatuhan (compliance framework), compliance charter, annual compliance plan sebagai bagian dari strategi pelaksanaan fungsi kepatuhan yang berkesinambungan melalui pengembangan budaya kepatuhan dalam rangka mengelola risiko kepatuhan.

Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan

Strategi Fungsi Kepatuhan diterapkan sesuai 4 (empat) pilar fungsi kepatuhan berikut ini:

1. Membangun dan mewujudkan agar terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua fungsi pada organisasi dan kegiatan usaha bank;
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh sebuah Bank;
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan prosedur yang dijalankan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator serta perundang-undangan yang berlaku;
4. Memastikan kepatuhan terhadap komitmen bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lainnya.

Secara ringkas pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan diwujudkan melalui program kerja tahunan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Secara lengkap Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan telah disampaikan ke Bank Indonesia melalui Laporan Kepatuhan secara semesteran.

Peran Dewan Komisaris dan Direksi

Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank serta memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan Bank.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan di BII, antara lain dengan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan paling kurang dua kali dalam setahun melalui laporan semesteran Direktur Kepatuhan. Pengawasan aktif juga dilakukan melalui rapat-rapat yang dilakukan, baik rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi maupun rapat

the compliance charter, and the annual compliance plan – all are part of the compliance implementation strategy carried out in a sustainable manner through the development of a compliance culture, aimed to manage compliance risk.

Implementation of Duties of Compliance Function

The strategy of Compliance Function is applied in line with the following 4 (four) pillars:

1. To build and realize Compliance Culture in all organizational functions and subsidiary entities;
2. To manage Compliance Risk of the Bank;
3. To ensure that policies and procedures implemented by the Bank are in line with regulatory requirements and prevailing laws;
4. To ensure compliance to the Bank's commitment to Bank Indonesia and/or other oversight authorities.

In brief, the implementation of compliance function is carried out through an annual work plan of the Director in charge of Compliance Function. Report of Compliance Function Implementation is submitted to Bank Indonesia every semester.

Role of the Board of Commissioners and Board of Directors

The Board of Directors must nurture and realize Compliance Culture at all levels of the organization and in all activities of the Bank, as well as ensuring that the Bank's compliance function is executed.

The Board of Commissioners conducts active oversight over the implementation of compliance function in BII, among others by evaluating compliance function implementation at least two times per year, by reviewing the semester report from Compliance Director. Active oversight is also realized through meetings of the Board of Commissioners, Board of Directors,

Fungsi kepatuhan Compliance Function

komite-komite. Berdasarkan hasil evaluasi, Dewan Komisaris memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan BII.

Dengan demikian Dewan Komisaris dan Direksi berperan aktif dalam memastikan pengelolaan risiko kepatuhan telah berjalan efektif dan memastikan terlaksananya budaya kepatuhan di seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.

Direktur Kepatuhan

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 12 Maret 2014, telah disetujui pengangkatan Dhien Tjahajani sebagai anggota Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2015. Pengangkatan Dhien Tjahajani selaku Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagaimana diketahui Direktur Kepatuhan yang sebelumnya adalah Rita Mirasari mengajukan pengunduran diri dan sesuai dengan salah satu hasil Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 11 November 2013, maka pengunduran diri Rita Mirasari sebagai Direktur Kepatuhan BII yang diajukan sejak September 2013 telah disetujui dan Ani Pangestu Direktur yang saat ini membawahkan Fungsi Human Capital ditunjuk sebagai Pejabat Sementara Direktur Kepatuhan sampai ditetapkannya pengganti yang permanen. Penunjukkan sementara mulai berlaku efektif sejak tanggal 27 September 2013. Hal tersebut telah dilaporkan ke regulator melalui Surat BII No.S.2013.574/Dir Compliance tanggal 3 Oktober 2013 perihal Pemberitahuan Pengunduran Diri Direktur Legal & Compliance, Corporate Secretary dan Penugasan Sementara Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT BII Tbk.

Penugasan sementara Ani Pangestu sebagai Pejabat Sementara Direktur Kepatuhan akan berakhir sejak Otoritas Jasa Keuangan menyetujui pengangkatan Dhien Tjahajani sebagai Direktur

and committees. Based on evaluation, Board of Commissioners provide recommendations to improve the quality of BII's compliance function.

Therefore, the Board of Commissioners and Board of Directors are actively involved in ensuring that the compliance risk management has been running effectively and ensuring that compliance culture in the organization and activities of the Bank is in place.

Compliance Director

The Extraordinary General Meeting of Shareholders on 12 March 2014 approved the appointment of Dhien Tjahajani as a member of the Board of Directors, effective as of the closing of the EGMS until the remaining period of the other members of the Board of Directors, which is the closing of the General Meeting of Shareholders of the Company in 2015. The appointment of Dhien Tjahajani as the Director in charge of Compliance Function will be effective upon approval from the Financial Services Authority.

As notified, the previous Compliance Director, Rita Mirasari submitted her resignation and based on one of the resolutions of the General Shareholders Meeting on 11 November 2013, the resignation of Rita Mirasari as Compliance Director of BII, submitted in September 2013, was approved. The resignation has also obtained approval from Ani Pangestu, the Director currently in charge of Human Capital Function and has since been appointed as Interim Executive of Compliance Director until the appointment of a permanent replacement. The temporary appointment was effective as of 27 September 2013. These events have been reported to the regulator by BII Letter No.S.2013.574/Dir Compliance dated 3 October 2013 regarding Notification of Resignation of the Legal & Compliance Director, Corporate Secretary, and Temporary Assignment of the Director In Charge of Compliance Function PT BII Tbk.

Temporary appointment of Ani Pangestu as Interim Executive of Compliance Director shall end as of the approval from Financial Services Authority on the appointment of Dhien Tjahajani

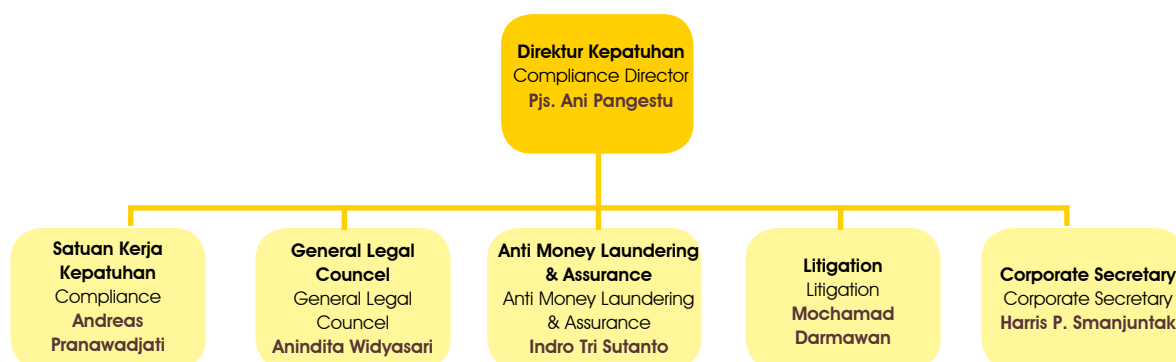
Kepatuhan yang baru. Selanjutnya Ani Pangestu akan kembali menjalankan tugasnya sebagai Direktur yang membawahkan Human Capital.

Direktur Kepatuhan memenuhi kriteria independensi dan kriteria lain sesuai dengan PBI No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, yaitu:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Tidak ada rangkap jabatan dengan Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur.

Riwayat hidup Direktur Kepatuhan dapat dilihat pada bagian Data Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Struktur Organisasi Unit Kerja Di Bawah Direktur Kepatuhan



Keterangan:

Struktur Organisasi Unit Kerja di bawah Direktur Kepatuhan tersebut sebagaimana yang diterbitkan melalui No.SE.2013.005/Dir Compliance tanggal 12 Agustus 2013 perihal Struktur Organisasi Direktorat Legal & Compliance, Corporate Secretary dan SE BII No.SE.2013.016/Presdir tanggal 11 September 2013 perihal Struktur Organisasi BII.

as the new Compliance Director. Thereafter, Ani Pangestu shall resume her duties as Director in charge of Human Capital.

The Compliance Director shall meet the following criteria of independence and other criteria according to BI Regulation No.13/2/PBI/2011 dated 12 January 2011 on Implementation of Compliance Function for Commercial Banks:

1. Has no financial, management, shareholding, and/or familiar relationship until the second degree with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or controlling shareholders or relationship with the Bank that may impact his/her performance to take independent actions.
2. Does not serve concurrent positions as President Director or Vice President Director.

The profile of Compliance Director is available in the Corporate Data section of this Annual Report.

Organization Structure of the Working Unit under Compliance Director

Note:

The Structure of Working Unit Organization under the Compliance Director is in accordance with document No.SE.2013.005/Dir Compliance dated 12 August 2013 regarding Organizational Structure of Legal & Compliance Directorate, Corporate Secretary, and BII Circular Letter No.SE.2013.016/Presdir dated 11 September 2013 regarding BII Organizational Structure.

Fungsi kepatuhan

Compliance Function

Berdasarkan struktur organisasi di atas, Direktur Kepatuhan tidak membawahi fungsi-fungsi yang berhubungan dengan kegiatan operasional dan bisnis. Hal ini sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 perihal Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum yang menyatakan bahwa Direktur Kepatuhan tidak diperkenankan membawahi fungsi operasional dan bisnis berikut ini :

- a. Bisnis dan operasional;
- b. Manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank;
- c. Treasury;
- d. Keuangan dan Akuntansi;
- e. Logistik dan pengadaan barang/jasa;
- f. Teknologi informasi; dan
- g. Audit intern.

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan paling kurang mencakup:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundangundangan yang berlaku;
7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

As evident in the organizational structure, the Compliance Director is not in charge of the functions that are related to business and operational activities, as regulated by Bank Indonesia in regulation No. 13/2/PBI/2011 dated 12 January 2011 regarding Implementation of Compliance Function in Commercial Banks, which asserts that the Compliance Director may not be in charge of the following operational and business functions:

- a. Business and operations;
- b. Risk Management that takes decision-making relating to the Bank's business activities;
- c. Treasury;
- d. Financial and Accounting;
- e. Logistics and goods/services procurement;
- f. Information technology; and
- g. Internal audit.

Duties and Responsibilities of Compliance Director

The duties and responsibilities of Compliance Director should at least consist of the following:

1. Formulate strategy to promote Compliance Culture in the Bank;
2. Propose compliance policies or compliance principles to be established by the Board of Directors;
3. Establish compliance system and procedure to be used to develop the Bank's internal guidelines and provisions;
4. Ensure that all policies, provisions, systems, procedures, and business activities of the Bank are in line with regulations from Bank Indonesia and prevailing laws, including Sharia principle for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;
5. Minimize the Bank's Compliance Risk;
6. Take preventive actions to ensure that the policies and/or decisions made by the Bank's Board of Directors are not in breach of any provisions of Bank Indonesia and prevailing laws;
7. Conduct other duties relating to Compliance Function.

Tugas dan tanggung jawab tersebut tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan fungsi kepatuhan di Bank, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan dan Unit Kerja Anti Money Laundering & Assurance untuk memastikan tingkat kepatuhan terhadap peraturan BI dan perundang-undangan yang berlaku untuk bank serta melakukan pemantauan terhadap pemenuhan komitmen yang telah dibuat kepada otoritas yang berwenang.

Satuan Kerja Kepatuhan

BII telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko kepatuhan, yang pada akhirnya bertujuan untuk membangun budaya kepatuhan di seluruh unit organisasi sehingga pengelolaan kepatuhan menjadi disiplin yang dilaksanakan dalam pelaksanaan transaksi dan aktivitas operasional.

Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (pencegahan) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepatuhan terhadap Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Fungsi Kepatuhan merupakan bagian dari kerangka manajemen risiko yang bertanggungjawab untuk mengelola risiko kepatuhan melalui koordinasi dengan unit kerja lain, yaitu diantaranya dengan meningkatkan budaya kepatuhan pada seluruh tingkatan, baik dalam bentuk advisory, pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan regulator maupun dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan kepada unit-unit kerja.

The duties and responsibilities do not undermine the rights and obligations of Compliance Director as member of the Bank's Board of Directors as regulated by Law on Limited Liability Companies.

In implementing the duties and responsibilities related to the Bank's compliance function, Compliance Director is supported by Compliance and Anti Money Laundering & Assurance Working Units to oversee the Bank's level of compliance with BI regulations and applicable laws and to monitor the fulfilment of commitment made to authorities.

Compliance Working Unit

BII has formed a Compliance Working Unit that is responsible to manage compliance risk, with the end goal to build compliance culture in all units of the organization, and that compliance management is part of the daily discipline when performing transactions and other operational activities.

In carrying out its duties, Compliance Working Unit has taken a series of "*ex-ante*" (preventive) actions or steps to ensure that the policies, provisions, systems, procedures, and business activities of the Bank are in line with regulations from Bank Indonesia and prevailing laws, including Sharia principle for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, and to ensure the Bank's compliance with the commitment made to Bank Indonesia and/or other supervisory authorities.

Compliance Function is part of the risk management framework that is responsible for managing compliance risk in coordination with other working units; among others by improving compliance culture at all levels through advisories, monitoring the Bank's regulatory compliance, and socialization as well as training for working units.

Fungsi kepatuhan

Compliance Function

Kepala Satuan Kerja Kepatuhan

Sesuai ketentuan Bank Indonesia maka Kepala Satuan Kerja Kepatuhan Bank telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Memenuhi persyaratan independensi;
- b. Menguasai ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan; dan
- d. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan (compliance culture).

Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian kepala satuan kerja Kepatuhan telah dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Ringkasan Profil Kepala Satuan Kerja Kepatuhan

Andreas Pranawadjati, Compliance Head
Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Katholik Atmajaya Jakarta pada tahun 1995.

Berpengalaman di industri perbankan lebih dari 16 tahun. Memulai karir di HSBC dengan jabatan terakhir sebagai Financial Reporting Manager, dilanjutkan dengan berbagai posisi di Standard Chartered Bank dengan jabatan terakhir sebagai Head of Compliance for Wholesalebank. Bergabung dengan PT Bank Internasional Indonesia Tbk pada tanggal 2 Januari 2012.

Head of Compliance Working Unit

In accordance with Bank Indonesia regulation, Head of the Bank's Compliance Working Unit has met the following criteria:

- a. Met the independence criteria;
- b. Has sufficient knowledge of Bank Indonesia regulations and prevailing laws;
- c. Does not undertake other duties outside Compliance Function; and
- d. Has a strong commitment to carry out and develop Compliance Culture.

Appointment, termination, or replacement of the head of Compliance working unit has been reported to Bank Indonesia.

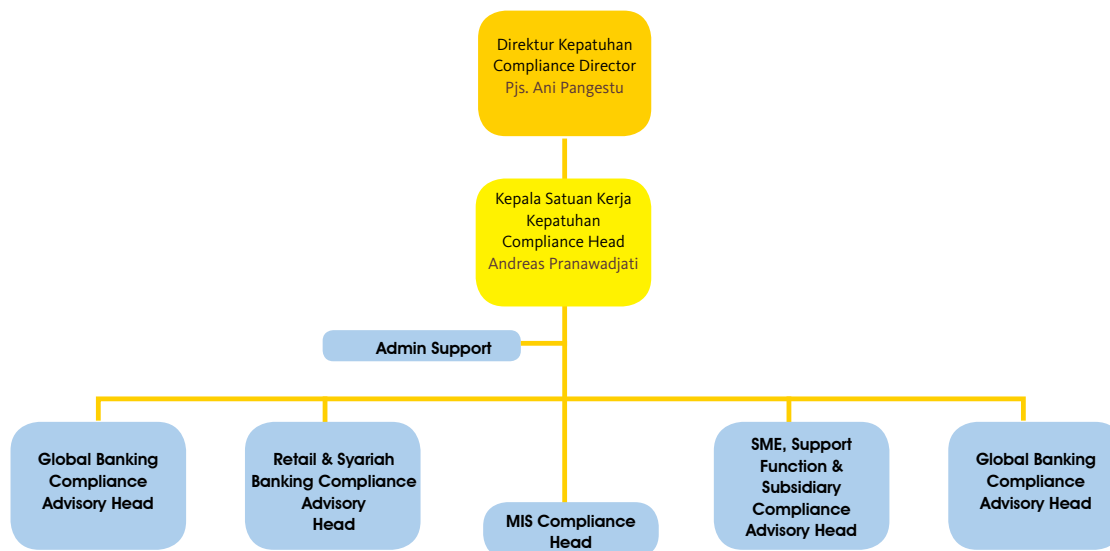
Head of Compliance Working Unit Profile in Brief

Andreas Pranawadjati, Compliance Head
Indonesian Citizen, obtained Bachelor's Degree in Economic Management from Atmajaya Catholic University, Jakarta, 1995.

Has over 16 years' experience in the banking industry. Started his career in HSBC with last position as Financial Reporting Manager, continued with various positions in Standard Chartered Bank, and last position as Head of Compliance for Wholesale banks. Joined PT Bank International Indonesia Tbk on 2 January 2012.

Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan

Organizational Structure of Compliance Working Unit



Keterangan:

Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan sebagaimana yang diterbitkan melalui No.SE.2013.005/Dir Compliance tanggal 12 Agustus 2013 perihal Struktur Organisasi Direktorat Legal & Compliance, Corporate Secretary.

Description:

Structure of Compliance Working Unit Organization as issued through No.SE.2013.005/Dir Compliance dated 12 August 2013 regarding Organizational Structure of Legal & Compliance Directorate, Corporate Secretary

Kerangka Kerja Kepatuhan

Kerangka kerja Kepatuhan menyajikan kebijakan dan pedoman kepatuhan serta pengawasan bagi Bank. Kebijakan dan Pedoman Kepatuhan ini bertujuan untuk memastikan ketaatan pada hukum, peraturan, perundang-undangan, kebijakan internal dan kode etik dan pedoman tingkah laku. Prinsip, kebijakan dan prosedur disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan best practice yang berlaku dalam rangka mengidentifikasi, menilai, memonitor dan mengontrol risiko kepatuhan secara terus menerus di seluruh kegiatan usaha dan aktivitas di Bank.

Bank melaksanakan upaya/initiative strategis sebagai tolak ukur pelaksanaan mitigasi risiko kepatuhan sejalan dengan perkembangan, tantangan serta risiko usaha bank yang semakin besar dan kompleks. Upaya yang dilakukan dapat bersifat ex-ante maupun ex-post.

Compliance Framework

Compliance Framework provides compliance policies, guidelines, and oversight for the Bank. Compliance Guidelines and Policies aim to ensure compliance with laws, regulations, internal policies, code of ethics, and code of conduct. The principle, policies, and procedures are formulated in accordance with provisions of Bank Indonesia Regulation No.13/2/PBI/2011 on the Implementation of Compliance Function for Commercial Banks and the best practices in identifying, assessing, monitoring, and controlling compliance risk in a continuous manner over the Bank's entire businesses and activities.

The Bank carries out strategic initiatives that reflect compliance risk mitigation implementation in line with the developments, challenges, and business risks of the Bank that have become greater and more complex. The efforts are both ex-ante and ex-post.

Fungsi kepatuhan

Compliance Function

Fungsi Kepatuhan maupun peran satuan kerja kepatuhan ke depannya selain memiliki kemampuan pemantauan yang bersifat ex-ante serta melakukan pengelolaan Risiko Kepatuhan secara berkesinambungan selaras dengan penerapan manajemen risiko di bank secara keseluruhan.

Pilar Kerangka Kerja

Kerangka kerja berdasarkan tiga pilar sebagai berikut:

Pilar Pillars	Unsur Elements
Struktur Organisasi Organizational Structure	Charter, struktur dan akuntabilitas, cakupan Pengawasan, wewenang, standar, kewenangan dan peranan serta tanggungjawab kepatuhan dan struktur organisasi. Charter, structure and accountability, oversight coverage, authority, standards, roles and responsibilities of compliance and organizational structure.
Kegiatan dan Aktivitas Kepatuhan Compliance activities	Compliance Program, Compliance Operation Manual (Standard Operating Procedure), Retensi Dokumen, Produk & Aktivitas Baru dan Whistle Blowing. Compliance Program, Compliance Operation Manual (Standard Operating Procedure), Document Retention, Product & New Activity and Whistleblowing
Sosialisasi, Komunikasi, Komitmen Perbaikan dan Database Peraturan Socialization, Communication, Improvement Commitment and Regulation Database	Komunikasi dan Pelatihan, Regulasi Data base & Pengkinian, Review Berkala & Perbaikan yang berkelanjutan. Communication and Training, Regulation Database, Periodical review & continuous improvement.

Framework Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Framework pengelolaan Risiko Kepatuhan dilakukan melalui pendekatan yang didasarkan pada tiga lini pertahanan sebagai berikut:

Risk Taking Units	Risk Control Units	Internal Audit
1st Line of Defense	2nd Line of Defense	3rd Line of Defense
Manajemen Risiko Kepatuhan Compliance Risk Management		

Risk Taking Unit merupakan pertahanan lini pertama/first line of defense yang bertanggung jawab untuk pengelolaan Risiko Kepatuhan yang melekat di setiap kegiatan usahanya.

Satuan Kerja Kepatuhan merupakan pertahanan lini kedua/second line of defense, mengawasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan manajemen risiko kepatuhan diseluruh aktivitas dan kegiatan usaha Bank.

Compliance Function and compliance working unit will consistently carry out ex-ante monitoring programs and implement Compliance Risk management in a sustainable manner, in line with the overall risk management implementation of the Bank.

Framework Pillars

The compliance framework is in accordance with the following three pillars:

Compliance Risk Management Framework

Framework of Compliance Risk management takes the three lines of defense approach, as follows:

Risk Taking Unit is the first line of defense: it is responsible to manage Compliance Risk associated with its business activities.

Compliance Working unit is the second line of defense, monitoring the implementation of Compliance Function and compliance risk management in all activities and businesses of the Bank.

Fungsi pengelolaan kepatuhan Bank yang dilakukan oleh Risk Taking Unit maupun pengelolaan manajemen risiko kepatuhan oleh satuan kerja kepatuhan merupakan objek audit yang direview secara berkala oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), yang merupakan pertahanan lini ketiga/third line of defense.

Pedoman Pelaksanaan Kepatuhan

Satuan kerja Kepatuhan memiliki pedoman dalam pelaksanaan Kepatuhan yaitu:

1. Charter Kepatuhan
Charter Kepatuhan sebagai standar umum kepatuhan untuk dapat diterapkan oleh seluruh unit kerja Bank. Kepatuhan adalah bagian dari budaya Bank dan oleh karena itu merupakan tanggung jawab setiap staf Bank. Charter Kepatuhan merupakan standar umum kepatuhan untuk dapat diterapkan oleh seluruh unit kerja BII. Charter Kepatuhan menjelaskan prinsip-prinsip dasar untuk mendukung aktivitas kepatuhan yang sehat di Bank dan entitas anak perusahaan sesuai ketentuan dan best practices yang berlaku. Adanya Charter Kepatuhan menunjukkan komitmen BII untuk mendukung kinerja dan standar etika yang tertinggi, serta kepatuhan terhadap standar hukum dan peraturan yang berlaku di dalam standard profesional. Selain itu Charter Kepatuhan juga menegaskan kembali Satuan Kerja Kepatuhan sebagai suatu unit kerja independen dalam Bank.
2. Compliance Handbook
Compliance Handbook merupakan pedoman/petunjuk bagi compliance officer dalam melakukan setiap penugasan yang menjadi tanggung jawabnya. Compliance Handbook direview dan disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Compliance management implemented by Risk Taking Unit and compliance risk management performed by Compliance unit are audit objects reviewed periodically by Internal Audit Unit, which is the third line of defense.

Guidelines for the Implementation of Compliance

Compliance Working Unit follows guidelines in implementing Compliance:

1. Compliance Charter
Compliance Charter is the general standard of compliance to be implemented by all units of the Bank. Compliance is part of the Bank's culture and therefore a responsibility of each staff member. Compliance Charter explains the basic principles to support robust compliance activities in the Bank and its subsidiaries according to industry regulations and best practices. Compliance Charter reflects BII's commitment to the highest performance and ethical standards, and prevailing compliance regulations and professional standards. Compliance Charter also highlights the position of the Compliance Working Unit as an independent unit of the Bank.
2. Compliance Handbook
The Compliance Handbook is guidance/instruction for compliance officers in performing their responsibilities. Compliance Handbook is reviewed and adjusted with current conditions accordingly.

Fungsi kepatuhan Compliance Function

3. Laporan Rencana Kerja Kepatuhan (Annual Compliance Plan)
Laporan Rencana Kerja Kepatuhan dimuat dalam rencana bisnis Bank, paling kurang terdiri dari:
- rencana evaluasi pedoman internal; dan
 - rencana kegiatan untuk mendorong dan/atau memelihara Budaya Kepatuhan, termasuk rencana sosialisasi ketentuan.
- Tata cara penyampaian rencana kerja kepatuhan yang dimuat dalam rencana bisnis Bank dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Rencana Bisnis Bank.

Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan pada dasarnya mencakup 4 fungsi pengawasan berikut ini:

- Membangun dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua fungsi dalam organisasi dan kegiatan usaha bank.
- Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh sebuah Bank.
- Memastikan agar kebijakan, ketentuan prosedur yang dijalankan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator serta perundang-undangan yang berlaku.
- Memastikan kepatuhan terhadap komitmen bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lainnya.

Berikut ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan dan unit kerja Anti Money Laundering & Assurance agar fungsi kepatuhan berjalan sebagaimana mestinya:

3. Annual Compliance Plan
Compliance Plan is set forth in the Bank's business plan and at a minimum consists of:
- Internal guideline evaluation plan; and
 - Activity plan to promote and/or maintain Compliance Culture, including regulation socialization plan.
- The procedure to submit a compliance plan as stated in the Bank's business plan is carried out in accordance with Bank Indonesia regulations regarding the Bank's Business Plan.

Duties & Implementation of Compliance Function

In principle, compliance functions cover 4 areas, as follows:

- Build and implement Compliance Culture in all functions of the organizations and activities of the Bank.
- Manage Compliance Risk of the Bank.
- Ensure that policies and procedures have complied with Regulatory requirements and prevailing laws.
- Ensure the Bank's compliance with the commitment to Bank Indonesia and/or other supervisory authorities.

The following is list of activities conducted by Compliance Unit and Anti Money Laundering & Assurance Unit, to ensure sound quality of compliance implementation:

Aktivitas Activity	Semester 1 - 2013 Semester 1 - 2013	Semester 2 - 2013 Semester 2 - 2013
MENINGKATKAN BUDAYA KEPATUHAN		
Pelatihan yang diberikan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Training by Compliance Unit	21 kali 21 trainings	31 kali 31 trainings
Pelatihan yang diikuti karyawan Satuan Kerja Kepatuhan Trainings attended by staff of Compliance Unit	9 kali 9 trainings	15 kali 15 trainings
Pelatihan oleh Unit Kerja AMLA: Training by AMLA Unit:		
Workshop Workshop	52 peserta 52 participants	47 peserta 47 participants
Pelatihan Perorangan (tatap muka) Individual Training (face-to-face)	9 kali 9 trainings	18 kali 18 trainings
E-learning E-learning	5,455 peserta 5,455 participants	5,468 peserta 5,468 participants

Assessment dan FGD (Focus Group Discussion) Assessment and FGD (Focus Group Discussion)	3 cabang 3 branch offices	3 cabang 3 branch offices
Pelatihan yang diikuti karyawan Unit Kerja AMLA Training attended by AMLA Unit staff	5 kali 5 trainings	4 kali 4 trainings
Compliance Review/Testing dan Advisory	Testing dan advisory dilakukan melalui tanya jawab serta kunjungan ke KC Eka Jiwa, Juanda, Semarang, dan Fatmawati, SS2 dan SS3 Testing and advisory are done through interviews and visit to branch offices in Eka Jiwa, Juanda, Semarang, Fatmawati, SS2, and SS3	Compliance review dilaksanakan dengan focus training ke cabang disertai dengan tanya jawab (lihat lampiran training) Compliance review is conducted by focused training to branches followed by discussion session (see attachment on training)
PENGLOLAAN RISIKO RISK MANAGEMENT		
Penyampaian informasi ketentuan Bank Indonesia Information submission as required by Bank Indonesia	15 peraturan 15 regulations	29 peraturan 29 regulations
Profil Risiko Kepatuhan Profile of Compliance Risk	Low to Moderate Low to Moderate	Low to Moderate Low to Moderate
MEMASTIKAN KEBIJAKAN/ PROSEDUR SESUAI PERATURAN REGULATOR ENSURE POLICIES/PROCEDURES ALIGNMENT WITH REGULATORY REQUIREMENTS		
Kajian oleh Satuan Kerja Kepatuhan terhadap Ketentuan Internal Review by Compliance Unit on Internal Policies	157 kajian 157 reviews	191 kajian 191 reviews
Kajian ad-hoc Ad-hoc review	23 kajian 23 reviews	10 kajian 10 reviews
Kajian oleh Unit Kerja AMLA terhadap Ketentuan Internal Review by AMLA unit on Internal Policies	21 kajian 21 reviews	15 kajian 15 reviews
CPSA CPSA General General Spesifik Specific	77 peserta 77 participants 77 peserta 77 participants	77 peserta 77 participants 77 peserta 77 participants
PEMANTAUAN KOMITMEN BANK ATAS PEMERIKSAAN REGULATOR MONITORING ON COMMITMENT TO REGULATOR'S REVIEW		
Persentase Temuan Bank Indonesia yang sudah ditindaklanjuti Percentage of followed-up findings of Bank Indonesia	94,5%	91,77%
Persentase Temuan BNM yang sudah dipenuhi	20%	40%

Secara ringkas pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan diwujudkan melalui program/rencana kerja tahunan Direktur Kepatuhan. Rencana kerja kepatuhan tersebut dimuat pula dalam rencana bisnis Bank yang paling kurang terdiri dari rencana evaluasi pedoman internal dan rencana kegiatan untuk mendorong dan/atau memelihara Budaya Kepatuhan, termasuk rencana sosialisasi ketentuan. Secara lengkap Laporan Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan telah disampaikan ke Bank Indonesia melalui Laporan Kepatuhan secara semesteran.

RISIKO YANG DIHADAPI DAN MITIGASINYA

Atas ketentuan yang dikeluarkan oleh regulator, Bank mengidentifikasi adanya risiko berupa denda dan atau teguran yang dapat dikenakan bila Bank tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana diminta dalam ketentuan tersebut.

In brief, implementation of compliance function is carried out through the annual program/work plan of Compliance Director. Compliance plan is also stated in the Bank's business plan and at a minimum consists of plan for internal guideline evaluation and programs to promote and/or maintain Compliance Culture, including policy socialization. The full report of the duties and implementation of Compliance Function is administered to Bank Indonesia by means of Compliance Report every semester.

RISKS AND MITIGATION ACTIONS

For the policies issued by regulators, Bank identifies risks of fine or warnings that may be imposed if the Bank fails to perform its obligations as required by regulations.

Fungsi kepatuhan Compliance Function

RISIKO YANG DIHADAPI RISKS	MITIGASI YANG DILAKUKAN MITIGATION ACTIONS	
	SEMESTER 1-2013	SEMESTER 2-2013
Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Risk Management Certification (SMR)		
<p>Pemenuhan SMR Per akhir Semester 1, terdapat 84 karyawan yang belum bersertifikasi, sedangkan per akhir Semester 2 ada 13 karyawan.</p> <p>SMR Fulfillment There were 84 staff and 13 staff not certified as of the end of Semester 1 and 2, respectively</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi karyawan yang belum bersertifikasi dengan bantuan Divisi Organisation Learning sebagai PIC. - Penjadwalan ujian bagi karyawan yang belum bersertifikasi. - Identify uncertified employees with the assistance from Organisation Learning Division as the PIC. - Schedule certification for uncertified employees. 	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi karyawan yang belum bersertifikasi dengan bantuan Divisi Organisation Learning sebagai PIC. - Penjadwalan ujian bagi karyawan yang belum bersertifikasi. - Identify uncertified employees with the assistance from Organisation Learning Division as the PIC. - Schedule certification for uncertified employees.
<p>Kewajiban pemenuhan SMR sesuai dengan tingkatan kepegawaian berdasarkan struktur organisasi SMR requirement based on employees' levels in accordance with organizational structure</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan surat edaran (SE) mengenai SMR disesuaikan dengan struktur organisasi yang terkini. - Pada tahun 2014 akan dilakukan mapping per direktorat dengan bantuan Divisi Organisation Learning sebagai PIC. - Formulate circular letter on SMR that is adjusted to the latest organisational structure. - In 2014 will conduct mapping by directorate with the assistance from Organisation Learning Division as the PIC.
Pemenuhan ketentuan baru Fulfilment of New Requirements		
<p>Transfer Dana Fund Transfer</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait guna mengidentifikasi gap yang ada serta tindak lanjut yang diperlukan - Melakukan tindak lanjut guna memastikan kerjasama transfer dana dengan penyelenggara di luar negeri telah mendapatkan ijin dari otoritas setempat - Memastikan kerjasama yang dilakukan telah mengakomodir ketentuan Bank Indonesia - Coordinate with related unit to identify gaps and necessary follow up - Take follow up actions to ensure cooperation of funds transfer with overseas provider has obtained approval from local authority - Ensure that the cooperation has accommodate policies from Bank Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penyesuaian ketentuan internal terkait Transfer Dana dan Penyelenggaraan Transfer Dana - Adjust internal policies regarding Funds Transfer and Implementation of Funds Transfer
<p>APMK - Penyesuaian kepemilikan kartu kredit berdasarkan batas minimum usia, pendapatan bulanan, plafon kartu kredit, dan penerbit kartu kredit - Penggunaan Teknologi CHIP untuk kartu debit PIN untuk kartu kredit</p> <p>APMK - Adjustment of credit card ownership based on requirements of age limit, monthly income, credit card plafond, and credit card issuer - Use of CHIP technology for debit cards - PIN for credit cards</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengkinian data pemilik kartu existing terus dilakukan - Melakukan penyesuaian back-end system kartu kredit. - Proses penggantian/ penerbitan kartu - Penyesuaian terminal ATM dan EDC - On-going data update of the existing credit card holders - Adjust credit card back-end system. - Process of card replacement/issuance - Adjust ATM and EDC terminals 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengkinian data pemilik kartu existing terus dilakukan - Melakukan penyesuaian back-end system kartu kredit. - Proses penggantian/ penerbitan kartu - Penyesuaian terminal ATM dan EDC - On-going data update of the existing credit card holders - Adjust credit card back-end system. - Process of card replacement/issuance - Adjust ATM and EDC terminals
Pelaporan Reporting		

LHBU

- Kesalahan kode saat pelaporan
 - Keterlambatan penyampaian laporan
 - Coding error during reporting
 - Delayed submission of report
- Sosialisasi kepada petugas cabang terkait mengenai pelaporan LHBU dan proses rekonsiliasi yang perlu dijalankan.
 - Socialization to branch staff on LHBU reporting and the required reconciliation process.
- Sosialisasi kepada unit kerja pelapor agar selalu menekankan dual control sebelum laporan disampaikan.
 - Pembuatan log-book penyampaian laporan.
 - Socialization to reporting unit to always conduct dual control prior to report submission.
 - Create log-book for reporting

LKPBU

- Keterlambatan penyampaian laporan karena pengerjaan secara manual
 - Kesalahan pengisian data
 - Keterlambatan penyampaian laporan
 - Delayed submission of report due to manual processing
 - Error in data completion
 - Delayed submission of report
- Membuat Program Bantu.
 - Penekanan pelaksanaan dual control sebelum laporan disampaikan.
 - Develop assisting program.
 - Emphasizes on dual control prior to report submission
- Pembuatan kalender pelaporan.
 - Create calendar for reporting

SID

- Crash Program
 - Crash Program
- Identifikasi dan perbaikan kesalahan
 - Perbaikan sistem dan proses pelaporan dan proses pelaporan
 - Identify and correct errors
 - Improve system and reporting process
- Identifikasi DTU bekerjasama dengan Tim SID Bank Indonesia.
 - Berkoordinasi dengan unit kerja dan cabang terkait guna mengetahui sumber kesalahan terkait dengan DTU tersebut.
 - Memperbaiki kesalahan serta melakukan pembaharuan (update) versi aplikasi program pelaporan SID.
 - Melakukan perbaikan dan enhancement sistem pelaporan SID untuk pelaporan debitur auto loan serta perbaikan proses.
- **Data tidak Update (DTU)**
Total DTU hingga Juni 2013 sebanyak 72.823, sedangkan perbaikan hingga Desember 2013 sebanyak 71.669. DTU yang belum diperbaiki per akhir 2013 sebanyak 1.154.
 - **Data not Updated (DTU).**
Total DTU as of June 2013 was 72,823; as of December 2013 data correction has been done on 71,669 DTU leaving 1,154 remaining DTU as of the end of 2013.
- Identify DTU in cooperation with Bank Indonesia SDI Team
 - Coordinate with related unit and branches to identify root cause of DTU.
 - Correct data errors by conducting version update on SID reporting program application.
 - Conduct SID reporting system improvement and enhancement for auto loan debtors reporting as well as process improvement.

Fungsi kepatuhan Compliance Function

Unit Kerja AMLA

RISIKO YANG DIHADAPI RISKS	MITIGASI YANG DILAKUKAN MITIGATION ACTIONS 2013
<p>Peningkatan jumlah kasus atas Penggunaan Rekening sebagai alat penipuan Increase of cases of Accounts Used for Fraud</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan proses dalam pembukaan rekening untuk penggunaan identitas yang tidak jelas (contoh: nama individu sama dengan nama perusahaan, nama sama dengan nama pejabat negara, nasabah pria menggunakan nama wanita, tanda tangan di kartu identitas sangat mudah dan sederhana). - Penambahan proses berupa permintaan dokumen KK, atau copy kartu kredit. - Pengembangan pada sistem teller (DBDS) berupa kewajiban untuk dilakukannya proses CDD ulang yaitu untuk rekening yang baru dibuka 0-3 bulan, menerima dana dalam jumlah besar dan nasabah melakukan penarikan tunai untuk pertama kali di counter teller. - Add the process in account opening for cases where obscure identities occur (e.g. name of customer is duplicate with name of company; similar name with state officials; male customer using female name; signature in ID card too simple and easy). - Add the requirements of KK (family card) or copy of credit card - Develop new system for tellers (DBDS), requiring repeat CDD process for newly opened accounts between 0-3 months that are already receiving large sums of funds and customers perform cash withdrawal for the first time at teller counter.
<p>Terdapat peningkatan permintaan data/informasi nasabah (khususnya PEP) oleh PPATK dan KPK yang terindikasi kasus korupsi dan pencucian uang Requests from PPATK and KPK for more data/customer information (especially PEP) indicated of corruption and money laundering</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukannya uji petik nasabah-nasabah PNS dan PEP serta berisiko tinggi lain - Proses analisa dan review yang lebih ketat terhadap hasil uji petik nasabah-nasabah PNS dan PEP - Pemenuhan permintaan data/informasi nasabah juga dilengkapi dengan analisa dan review serta pelaporan transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK menjadi prioritas kerja tim AMLA - Conduct sample testing for public officials customers, PEP, and other high-risk customers - Implement stricter analysis and review processes on the testing results of public civil servant and PEP customers - Customer data/information provision is complemented with analysis and review; report of suspicious financial transaction to PPATK is the priority of AMLA team
<p>Kualitas hasil analisa transaksi mencurigakan pada aplikasi MIS-OOP oleh Cabang yang perlu ditingkatkan Quality of analysis on suspicious transactions in MIS-OOP completed by Branch offices needs to be improved</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyempurnaan kolom analisa MIS-OOP didasarkan pada per kolom informasi sehingga diharapkan setiap informasi yang disyaratkan petugas Cabang untuk melengkapi akan terisi dengan lengkap - Memasukkan hasil analisa MIS-OOP yang tidak lengkap ke dalam laporan dashboard rapat bulanan unit kerja Service & Delivery (SND) dan Operational Risk (ORM) dengan para Regional Business Head untuk ditindaklanjuti - Memasukkan proses analisa transaksi mencurigakan MIS-OOP menjadi salah satu obyek pemeriksaan SKAI dalam audit tematik KYC oleh SKAI - Refine MIS-OOP analysis column by information; it is expected that each required information can be fully completed by Branch staff - Record incomplete MIS-OOP analysis results in the dashboard for monthly meeting of Service & Develivery Unit (SND) and Operational Risk (ORM) with Regional Business Heads for follow-up - Include MIS-OOP suspicious transaction analysis process as one of IAU's audit object under KYC thematic audit
<p>Pemenuhan training e-learning AML/KYC untuk karyawan-karyawan baru E-learning training of AML/KYC for new employees</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan penegasan kembali mengenai perlunya setiap karyawan baru mengerjakan dan lulus training e-learning AML/KYC. - Berkoordinasi dengan pihak HC-OL untuk melakukan pemantauan dan memasukkan dalam aspek penilaian KYC Rating serta menjadi salah satu bahan yg dimasukkan ke dalam dashboard rapat bulanan unit kerja Service & Delivery (SND) dan Operational Risk (ORM) dengan para Regional Business Head untuk ditindaklanjuti. - Highlights the importance of having new employees to attend and pass the AML/KYC e-learning training. - Coordinate with HC-OL to conduct monitoring and include KYC Rating as one the performance measurements; include KYC Rating in the dashboard for monthly meeting of Service & Develivery Unit (SND) and Operational Risk (ORM) with Regional Business Heads for follow-up.

POTENSI RISIKO YANG AKAN DIHADAPI DAN MITIGASINYA

Identifikasi atas beberapa hal yang berpotensi menimbulkan risiko kepatuhan baik berupa denda finansial bahkan risiko reputasi Bank. Berikut potensi risiko dan mitigasi yang diperkirakan akan dihadapi:

RISK POTENTIAL AND MITIGATION ACTIONS

Identification of matters that may pose compliance risk in the form of financial sanctions or may impact the Bank's reputation. The following are risk potentials and their mitigation efforts:

POTENSI RISIKO RISKS	MITIGASI YANG DILAKUKAN MITIGATION ACTIONS
Satuan Kerja Kepatuhan Compliance Unit	
XBLR untuk Bank Konvensional XBLR for Conventional Banks	<ul style="list-style-type: none"> - Project telah dijalankan dan vendor telah ditunjuk, namun hingga Desember 2013, Bank Indonesia baru mengirim iterasi tahap 2 sehingga kami masih menunggu informasi selanjutnya dari Bank Indonesia. - The project has commenced and vendor has been appointed, however until December 2013 Bank Indonesia has only sent phase 2 iteration; the Bank is still waiting for further information from Bank Indonesia.
Permodalan Capital	<ul style="list-style-type: none"> - Bank telah membuat simulasi kebutuhan modal dan telah didiskusikan dalam BOD meeting (rapat BOD). - The Bank has simulated capital needs and is communicating the results with BOD.
IRR (Integrated Risk Rating) IRR (Integrated Risk Rating)	<p>Bank mempersiapkan diri sebagai konsolidator informasi yang dibutuhkan dalam IRR (baik terhadap perusahaan anak dan perusahaan terkait).</p> <ul style="list-style-type: none"> - The Bank is taking preparations to act as information consolidator required in IRR (for subsidiaries and related companies).
Unit Kerja AMLA AMLA Unit	
Keterlambatan Pelaporan CTR Delayed CTR Reporting	<ul style="list-style-type: none"> - Bank mempersingkat proses pelaporan dari 14 hari kerja menjadi 10-12 hari kerja. - Melakukan proses cross check pelaporan CTR antara data pelaporan GRIPS lokal dengan data GRIPS PPAK. - The Bank has reduced reporting process from 14 working days to 10-12 working days. - Conduct CTR cross check between data of local GRIPS reporting with GRIPS data from PPAK

Kepatuhan Regulasi Utama

Compliance to Major Regulations

Parameter Indicator	Pemenuhan Ketentuan Regulator Regulatory Requirement	December 2013	Keterangan Description
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Capital Adequacy Ratio (CAR)	Min 8%		Terpenuhi Comply
<ul style="list-style-type: none"> • CAR untuk risiko kredit & operasional CAR for Credit & Operational Risk 		12.87%	
<ul style="list-style-type: none"> • CAR risiko kredit, operasional & risiko pasar CAR for Credit Risk, Operational & Market Risk 		12.76%	
Legal Lending Limit Related Parties	Max 10% of capital	5.36%	Terpenuhi Comply
Legal Lending Limit Not a related party individual	20% of capital	12.63%	Terpenuhi Comply
Legal Lending Limit Not a related party group	25% of capital	13.26%	Terpenuhi Comply
Liquidity NOP	Max 20%	4.42%	Terpenuhi Comply
NPL Ratio			
<ul style="list-style-type: none"> • NPL gross 	Max 5%	2.15%	Terpenuhi Comply
<ul style="list-style-type: none"> • NPL Net 		1.60%	Terpenuhi Comply
Reserves – Primary	Min 8%	8.12%	Terpenuhi Comply
Reserves – Secondary	Min 2.5%	10.09%	Terpenuhi Comply
Reserves – Foreign Currency	Min 8%	8.15%	Terpenuhi Comply

UNIT KERJA ANTI MONEY LAUNDERING & ASSURANCE

A. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)

Terkait pelaksanaan dan penerapan Program APU dan PPT sebagaimana mengacu kepada regulasi UU PPTPPU No. 8 tahun 2010, UU PPTPPT No. 9 tahun 2013 dan ketentuan PBI No.14/27/PBI/2012, 28 Desember 2012 dan SE BI No.11/31/DPNP, 31 November 2009, Unit Kerja AMLA (UKK Kantor Pusat) pada periode tahun 2013 telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejalan dengan fungsi dan peran aktif pemantauan pelaksanaan Program APU dan PPT oleh BOD dan BOC, Unit Kerja AMLA (UKK Kantor Psat) mempunyai agenda pembahasan terkait pelaksanaan dan penerapan Program APU dan PPT di tingkat Cabang (baik dalam maupun luar negeri), unit kerja di kantor pusat dan anak perusahaan pada forum-forum antara lain:
 - a. Update terkait dengan pelaksanaan Program APU dan PPT kepada BOD dan BOC.
 - b. Rapat rutin bulanan terkait dengan pelaksanaan APU dan PPT dengan Direktur Kepatuhan,
 - c. Rapat bulanan Internal Audit Committee (IAC), yang beranggotakan beberapa direktur dan pejabat-pejabat eksekutif dari unit-unit kerja terkait.
 - d. Rapat Komite Audit, yang beranggotakan beberapa komisaris serta anggota tetap komite audit (materi APU dan PPT disampaikan minimal per semester).
 - e. Rapat rutin bulanan dengan unit kerja Service & Delivery (S&D) melalui sarana teleconference antara Regional Business Head seluruh wilayah (region), Head S&D, Operational Risk dan direktur terkait.

ANTI MONEY LAUNDERING & ASSURANCE UNIT

IMPLEMENTATION OF ANTI MONEY LAUNDERING PROGRAM POLICY (AML) AND TERRORISM FINANCING COMBATING (TFC)

With regard to the implementation of AML and TFC Program referred to the regulation of Laws PPTPPU No. 8 year 2010, Laws PPTPPT No. 9 year 2013 and PBI regulation No.14/27/PBI/2012, 28 December 2012 and SE BI No.11/31/DPNP, 31 November 2009, AMLA Unit (UKK of Head Office) in the period of 2013 has conducted the following activities:

1. In line with the functions and active roles of monitoring of the AML and CFT implementation program by the BOD and BOC, the AMLA Unit (UKK of Head Office) has the agenda on the implementation of AML and CFT at Branches level (both local and overseas), units at Head Office and subsidiaries in the following forums:
 - a. Update on AML and CFT implementation to BOD and BOC.
 - b. Monthly meeting on AML and CFT implementation with the Compliance Director.
 - c. Monthly meeting of Internal Audit Committee (IAC), composed of members of directors and executive officers from related units.
 - d. Audit Committee meeting, which was composed of members of commissioners and permanent members of audit committee (the AML and CFT materials was presented at least by semester).
 - e. Monthly meeting with Service & Delivery (S&D) unit through teleconference between Regional Business Head in all regions, Head of S&D, Operational Risk and related directors.

2. Mengembangkan kebijakan secara berkesinambungan sesuai regulasi terkini regulator (BI/PPATK) dan best practice, antara lain :
 - a. Menetapkan Kebijakan Umum Program APU dan PPT dan Prosedur Pelaksanaannya.
 - b. Melakukan review dan memberikan rekomendasi kebijakan dan prosedur (SE/SOP) unit kerja lain sehingga sejalan dengan penerapan Kebijakan Program APU dan PPT.
 - c. Memberikan rekomendasi dan masukan sebagai tindak lanjut atas pertanyaan dari kantor cabang/unit kerja.
 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Program APU dan PPT, melalui metode-metode sbb :
 - a. Melakukan assessment dan pemantauan ke cabang (hasil assessment dilaporkan ke Direktur Kepatuhan). Di beberapa cabang dilakukan observasi bersama dengan Unit Kerja SKAI.
 - b. Menetapkan program KYC Rating sebagai salah satu metode pemantauan pelaksanaan kebijakan Program APU dan PPT di cabang, meliputi pemantauan prosedur penerimaan nasabah, pemantauan transaksi, pengkinian data nasabah (high risk dan non high risk) dan kewajiban pelatihan karyawan.
 4. Menetapkan dan mengembangkan metode pemantauan profil dan transaksi nasabah antara lain :
 - a. Pemantauan transaksi melalui sistem aplikasi sbb :
 - Melalui sistem aplikasi MIS yang dapat diakses oleh cabang dan Unit Kerja AMLA dalam mengidentifikasi transaksi tergolong kurang wajar/mencurigakan,
2. Develop a sustainable policy in accordance with the latest regulatory (BI/PPATK) and best practices, among others:
 - a. To establish the General Policy of AML and CFT Program and its Implementation Procdures.
 - b. To review and provide recommendations on policies and procedures (SE/SOP) of other working units to be in line with the implementation of AML and CFT Program.
 - c. To provide recommendations and input as a follow up on inquiries from branch offices/working units.
 3. To monitor and evaluate AML and CFT Program implementation, through the following methods:
 - a. Assessment and monitoring of branches (the assessment results reported to the Compliance Director). Observation was conducted in several branches with IAU.
 - b. Establish the KYC Rating program as one of monitoring methods of AML and CFT Program implementation at branches, covering the monitoring of new customer acquisition, transaction monitoring, customer data update (high risk and non high risk) and employee training.
 4. Establish and develop the monitoring methods of customer profiles and transactions, as follows:
 - a. Monitoring of transactions through application system, such as:
 - MIS application system which can be accessed by branches and AMLA Unit to identify suspicious transactions,

Fungsi kepatuhan Compliance Function

- Melalui sistem aplikasi FAML yang hanya dapat diakses oleh Unit Kerja AMLA untuk mengidentifikasi transaksi kurang wajar/mencurigakan dengan melakukan kombinasi parameter-parameter profil nasabah berdasarkan risk based yang telah ditetapkan.
 - b. Melakukan pemantauan analisa uji petik transaksi berdasarkan skala risk based.
 - c. Melakukan pengkinian data Bank koresponden.
5. Melakukan pengembangan sistem dan manajemen data/informasi antara lain :
- a. Mengembangkan sistem aplikasi kewajiban pelaporan transfer (LTKL) kepada PPAJK.
 - b. Melakukan pengelompokan risk rating nasabah dalam 2 kriteria yaitu high risk dan low risk yang hasilnya menjadi dasar dalam penetapan target pengkinian data nasabah setiap tahunnya, dengan berdasarkan skala prioritas.
 - c. Secara berkala dan berkesinambungan (per-semester) melakukan otomatisasi update profil data nasabah berdasarkan historical transaksi nasabah.
6. Melakukan kewajiban pelaporan Bank ke PPAJK, antara lain :
- a. Melaporkan hasil pemantauan terhadap transaksi keuangan yang tergolong mencurigakan (LTKM/STR),
 - b. Melaporkan transaksi tunai dengan jumlah tertentu (LTKT/CTR),
 - c. Melaporkan transaksi transfer dana (LTKL).
7. Memberikan pelatihan/sosialisasi Program APU dan PPT sebagai berikut :
- a. Metode training/sosialisasi tatap muka,
 - Workshop (setahun 2 batch) bagi KYC officer cabang dan kantor pusat,
 - Focus Group Discussion (FGD) ke cabang-cabang.
 - Regular class Program APU dan PPT yang diadakan oleh Unit Kerja HC,
- FAML application system which can only be accessed by AMLA Unit to identify suspicious transactions by combining parameters of customer profiles, based on risk-based set forth.
 - b. Monitor the analysis of transactions test-based on risk-based scales.
 - c. Update the Bank's correspondence data
5. Develop system and data/information management, such as:
- a. Develop the application system of transfer reporting obligations (LTKL) to PPAJK.
 - b. Place the customer risk rating into 2 criteria, namely, high risk and low risk, with the results as the basis to determine customer data upgrading every year, based on priority scales.
 - c. Periodically and sustainably (per-semester) update customer data profiles automatically, based on customer transaction history.
6. Provide Bank's reporting to PPAJK, such as:
- a. Reporting monitoring of suspicious financial transactions (LTKM/STR),
 - b. To report cash transactions for certain amounts (LTKT/CTR),
 - c. To report fund transfer transactions (LTKL).
7. Provide training/socialization of AML and CFT Program, as follows:
- a. Face-to-face training methods,
 - Workshop (2 batches a year) for KYC officers at branches and Head Office,
 - Focus Group Discussion (FGD) at branches.
 - Regular class of AML and CFT Program, held by HC Unit,

- Melakukan training koordinasi bersama dengan Unit Kerja terkait.
- b. Metode *e-learning* yang memantau kewajiban pelatihan Program APU dan PPT bagi karyawan.

- Coordinate training with related Units.
- b. E-learning method to monitor the obligation of AML and CFT Program for employees.

B. PELAKSANAAN PENERAPAN KEBIJAKAN STRATEGI ANTI FRAUD

Sejalan dengan SE BI No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum, selama periode tahun 2013 telah dijalankan program penerapan strategi anti fraud sebagai berikut:

1. Pencegahan

Untuk mengendalikan risiko terjadinya fraud, unit kerja Anti Fraud telah melakukan langkah-langkah pencegahan untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan fraud oleh seluruh pihak terkait, antara lain sebagai berikut:

a. *Anti fraud statement & awareness*

Mengkomunikasikan anti fraud awareness kepada nasabah melalui media :

- ATM Message, Billing Statement, SMS Message terkait dengan penggunaan kartu kredit/debet dan informasi PBI
- Menyediakan media informasi bagi nasabah, rekanan, dan /atau pihak ketiga melalui Website BII:www.bii.co.id – Tentang Whistleblowing
- ATM Message: ‘Hati-hati dengan kejahatan disekitar anda. Informasi penting untuk kenyamanan dan keamanan anda’

Menumbuhkan program *awareness* kepada seluruh karyawan :

- Mengkomunikasikan mengenai segala bentuk pencegahan fraud antara lain melalui desktop wallpaper, bulletin BII News, pesan manajemen (CEO Message)
- Meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan penerapan strategi anti fraud melalui pelatihan karyawan :
 - Pelatihan ODP diselenggarakan oleh Organization Learning – Human Capital
 - Forum Group Discussion (FGD) diselenggarakan oleh unit kerja AMLA

B. ANTI FRAUD STRATEGY POLICY IMPLEMENTATION

Pursuant to SE BI No.13/28/DPNP dated 9 December 2011 on the Anti-Fraud Strategy Implementation for Commercial Banks, during 2013 the following are conducted on the anti-fraud strategy implementation:

1. Prevention

To control risk of fraud, the Anti-Fraud unit has taken prevention measures to build awareness of the importance to prevent fraud by all related parties, among others:

a. Anti fraud statement & awareness

To communicate anti-fraud awareness to customers through the following media:

- ATM Message, Billing Statements, SMS Messages related to the usage of credit cards/debit cards and PBI information.
- To provide information media for customers, partners, and/or third parties through BII Website: www.bii.co.id - On Whistleblowing
- ATM Message: ‘Cautious on the criminality around you. Important information for your comfort and safety’

To build awareness program for all employees:

- To communicate every instance of fraud prevention through desktop wallpapers, BII bulletin News, CEO Messages
- To communicate understanding on anti-fraud strategy implementation policy through employee training:
 - ODP training held by Organization Learning - Human Capital
 - Forum Group Discussion (FGD) held by AMLA Unit

Fungsi kepatuhan Compliance Function

- Pelatihan Branch Transaction Control (BTC) yang diselenggarakan oleh unit kerja BOCS dan Human Capital - Organization Learning
 - Pelatihan workshop ORM - Sosialisasi kebijakan dan prosedur
- Branch transaction Control training (BTC) held by BOCS unit and Human Capital - Organization Learning
 - ORM workshop training - Socialization on policies and procedures
- b. Identifikasi Kerawanan
- Telah dilakukan langkah-langkah tindak lanjut identifikasi dan analisis kerawanan untuk mengantisipasi risiko kejadian fraud baik yang berasal dari internal maupun eksternal Bank, antara lain:
- Melakukan assessment penerapan strategi anti fraud beberapa kantor cabang sesuai tingkatan risiko.
 - Mengembangkan alat bantu pemantauan dan ketentuan operasional untuk meningkatkan pengamanan dan kenyamanan atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah
- c. Know Your Customer (KYC) dan Know Your Employee (KYE)
- Salah satu upaya pengendalian risiko fraud dari aspek nasabah dan sumber daya manusia, telah dijalankan proses penerapan :
- Prinsip Mengenal Nasabah
Proses penerapan KYC dari sisi penerimaan, pemantauan profil dan transaksi serta pelaporan transaksi yang mencurigakan
 - Prinsip Mengenal Karyawan
Menjalankan penerapan proses rekrutmen dan pemantauan profil karyawan (perilaku dan gaya hidup).
- b. Identification on vulnerability
- The identification measures and vulnerability analysis has been implemented to anticipate risk of fraud, both internally as well as externally, such as:
- Implement & assess the Anti-Fraud Strategy towards the Bank's branches in accordance with each risk level.
 - To develop monitoring tools and operational guidance to improve safety and comfort for every transaction by the Bank's customers.
- c. Know Your Customer (KYC) and Know Your Employee (KYE)
- An effort has been implemented to control risk on fraud from customer aspects and human resources, such as:
- Know Your Customer Principles
KYC implementation process from acquisition, profile monitoring and transactions as well as suspicious transaction reporting
 - Know Your Employee Principles
Implementation of recruitment process and employee profile monitoring (manners and lifestyles).
2. Deteksi
- Perangkat ini ditujukan untuk mengidentifikasi dan menemukan kejadian fraud dengan mekanisme, antara lain mencakup:
- a. Whistleblowing
- Mekanisme ini ditujukan untuk meningkatkan efektifitas penerapan sistem pengendalian *fraud* dengan menitikberatkan pada pengungkapan laporan pengaduan.
2. Detection
- This instrument is intended to identify and finding fraud with mechanisms, such as:
- a. Whistleblowing
- This mechanism is intended to improve the effectiveness of fraud control system implementation by emphasizing whistleblowing disclosures.

Selama tahun 2013 terdapat laporan Whistleblowing sebanyak 4 laporan dan telah dilakukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

b. Surprise audit

Selama tahun 2013 SKAI telah melakukan surprise audit untuk memastikan bahwa kegiatan operasional kantor cabang telah dilakukan dengan benar serta perlengkapan dan pelayanan petugas garda depan telah berjalan secara memadai.

3. **Investigasi, Pelaporan dan Sanksi**

Perangkat ini ditujukan untuk menggali informasi, sistem pelaporan termasuk penerapan sanksi atas kejadian fraud.

Selama periode 2013 terdapat kejadian dengan indikasi internal fraud sebanyak 10 kejadian. Tindak lanjut seluruh kejadian internal fraud di maksud telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut juga telah disampaikan kepada Bank Indonesia sebagai bagian dari laporan penerapan strategi anti fraud tahun 2013.

4. **Pemantauan, Evaluasi dan Tindak lanjut**

Penerapan strategi anti fraud selama tahun 2013 telah disampaikan di dalam Forum IAC (Internal Audit Committee).

Atas kejadian fraud yang pernah terjadi telah dilakukan tindak lanjut dengan memperbaiki kelemahan-kelemahan prosedur yang ada dan memperkuat sistem pengendalian intern agar dapat dicegah tidak terulangnya kembali fraud karena kelemahan yang serupa.

During 2013, there were 4 whistleblowing reports and a follow up has been done in accordance with the prevailing laws.

b. Surprise audit

During 2013 IAU has conducted a surprise audit to ensure that the operations of branch offices has been done properly and the frontliners' completeness and services are adequate.

3. **Investigations, Reportings and Sanctions**

This instrument is intended to find information, reporting systems and sanctions for fraud.

During 2013, there were 10 indicated internal instances of fraud. The follow up on all internal fraud has been done in accordance with the prevailing laws. Internal Fraud was reported to Bank Indonesia (OJK) as part of the Anti-Fraud Strategy implementation in 2013.

4. **Monitoring, Evaluation and Follow up**

The anti-fraud strategy implementation in 2013 has been presented to the IAC Forum (Internal Audit Committee).

The follow up procedure has been done on fraud by the improvements of weaknesses in existing procedures and strengthen the internal control system so as to prevent the re-occurrence of fraud with similar causes.

Sekretariat Perusahaan Corporate Secretary

Sampai dengan tanggal 26 September 2013, Perusahaan telah menunjuk Rita Mirasari sebagai Corporate Secretary (Sekretaris Perusahaan) yang bertugas sebagai Penghubung antara Perusahaan dengan Bapepam dan LK, BEI dan institusi terkait lainnya serta masyarakat. Sedangkan sejak tanggal 27 September 2013, Ani Pangestu - yang juga menjabat sebagai Direktur HC - telah ditunjuk sebagai Pejabat Sementara Corporate Secretary menggantikan Rita Mirasari yang mengundurkan diri sebagai Direktur Perseroan pada bulan September 2013. Penunjukan ini telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia melalui surat No.2013.565/DIR COMPLIANCE tanggal 30 September 2013 dan juga telah diumumkan dalam surat kabar Sinar Harapan tanggal 30 September 2013. Adapun Profil Sekretaris Perusahaan dapat dilihat di bagian Data Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Pembentukan Corporate Secretary tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan Bapepam No. IX.1.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi BII No.SK.2009.001/Deputy Presdir-Communication tanggal 28 Mei 2009 juncto Surat Keputusan Direksi BII No. SK.2013.007/PRESDIR tertanggal 27 September 2013.

Sekretaris Perusahaan bertugas antara lain memonitor kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan dan ketentuan pasar modal serta memastikan bahwa Direksi mengetahui perubahan peraturan yang terjadi serta implikasinya.

Secara garis besar Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) bertugas antara lain:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Memberikan masukan kepada Direksi Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Until 26 September 2013, the Company had appointed Rita Mirasari as the Corporate Secretary, who served as a Liaison between the Company and OJK, IDX and other relevant institutions as well as the public. Meanwhile, as of 27 September 2013, Ani Pangestu – who also served as HC Director – has been appointed as Acting Corporate Secretary, replacing Rita Mirasari who resigned as Company's Director in September 2013. This appointment had been reported to the Financial Services Authority and Indonesia Stock Exchange by a letter No.2013.565/DIR COMPLIANCE on 30 September 2013 and had also been announced in Sinar Harapan newspaper on 30 September 2013. The profile of Corporate the Corporate Secretary may be viewed in the Company's Data section of this Annual Report.

The appointment of the Corporate Secretary was performed in compliance with the regulation of Bapepam No. IX.1.4 on Corporate Secretary Appointment and certified by Decision Letter of BII Board of Directors No.SK.2009.001/Deputy Presdir-Communication on 28 May 2009 juncto Decision Letter of BII Board of Directors No.SK.2013.007/PRESDIR dated 27 September 2013.

Corporate Secretary is, among others, to monitor the compliance of Company with the regulations and provisions of Capital Market and to ascertain that the Board of Directors is aware of any amendment of the regulations and the implications.

Overall, the duties of the Corporate Secretary are as follows:

1. Stay updated on the development of the Capital Market, particularly the prevailing regulations in Capital Markets.
2. Provide services to the public on information required by investors in relation to the condition of Publicly Listed Companies.
3. Provide feedback to the Board of Directors of Publicly Listed Companies to comply with the Law No. 8 of 1995 on Capital Markets and its implementing regulations.

4. Sebagai penghubung atau contact person antara Perusahaan sebagai Emiten atau Perusahaan Publik dengan OJK, SRO maupun masyarakat.

Corporate Secretary dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh unit kerja Corporate Secretary yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang ditunjuk sebagai Corporate Secretary. Unit Kerja Corporate Secretary dipimpin oleh Corporate Secretary Head, Harris P. Simanjuntak yang profil lengkapnya dapat dilihat di bagian Data Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

SASARAN KERJA UNIT KERJA CORPORATE SECRETARY

Unit Kerja Corporate Secretary memiliki sasaran kerja:

1. Bertindak sebagai contact person Perusahaan dengan pemangku kepentingan (stakeholders) termasuk regulator sehubungan dengan status Perusahaan sebagai Perusahaan Perbankan Publik.
2. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kegiatan usaha Perusahaan termasuk penyampaian keterbukaan informasi kepada otoritas maupun masyarakat telah dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan status Perusahaan sebagai Perusahaan Perbankan Publik.
3. Tercapainya tertib administrasi dan kelengkapan serta keamanan dokumen penting Perseroan.
4. Terpenuhinya hak-hak pemegang saham serta kewajiban Perseroan kepada pemegang saham melalui kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan perbankan publik.
5. Tersedianya informasi yang memadai bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk bahan pengambilan keputusan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta memastikan prosedur pengambilan keputusan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga keputusan yang dihasilkan sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Act as a liaison or a contact person between Company as a Publicly Listed Company with Financial Services Authority, SRO or the public.

The Corporate Secretary in performing its duties is supported by the working unit of Corporate Secretary which is directly accountable to the Director Appointed as Corporate Secretary. The Working Unit of Corporate Secretary is led by the Corporate Secretary Head, Harris P. Simanjuntak, whose full profile may be viewed in this Annual Report.

WORKING OBJECTIVES OF CORPORATE SECRETARY WORKING UNIT

Corporate Secretary Working Unit work objectives are as follows:

1. As a contact person of the Company for stakeholders, including regulators, in relation to the Company's status as a Public Banking Company.
2. Implement efforts to ensure that the Company's activities, including delivery of information disclosure to the authority or the public, is carried out in line with prevailing laws relevant to the Company's status as a Public Banking Company.
3. Achievement of an orderly administration and the completeness and the safety of important Company documents.
4. Fulfillment of shareholders rights and obligations of the Company to the shareholders through compliance of the Company with prevailing laws and regulations that apply to Public Banking Companies.
5. Availability of adequate information for the Board of Directors and/or Board of Commissioners as materials for decision-making by the Board of Directors and/or Board of Commissioners and ascertain the procedure of decision-making is in line with prevailing provisions so that the decision reached is legitimate and accountable.

6. Menyelenggarakan Rapat-rapat Direksi dan/atau Rapat Dewan Komisaris, termasuk mencatat jalannya Rapat serta mengelola Risalah Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 7. Terselenggaranya dengan baik Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) BII, rapat-rapat Direksi dan atau Dewan Komisaris serta event-event kegiatan lainnya yang melibatkan Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.
 8. Terselenggaranya pengelolaan dokumen yang baik terkait dengan pencatatan kepemilikan saham dalam Daftar Pemegang Saham maupun Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-undang Perseroan terbatas serta dokumen terkait dengan aksi korporasi.
 9. Mengikuti perkembangan pasar modal dan memberikan masukan/pandangan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris terkait dengan ketentuan pasar modal khususnya aspek keterbukaan informasi maupun pelaporan aksi-aksi korporasi Perusahaan.
6. Conduct meetings of Board of Directors and/or Board of Commissioners, including recording the proceedings of the meetings and managing the Minutes of Meetings of Board of Directors and/or Board of Commissioners.
 7. Properly hold General Meeting of Shareholders (GMS) of BII, meetings of the Board of Directors, and or the Board of Commissioners and other events of activities that involve the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.
 8. The implementation of good management of documents in relation to the recording of shareholding in the Register of Shareholders as well as the Special Register as referred to in Article 50 of Limited Liability Company Laws and relevant documents with corporate actions.
 9. Stay updated on developments of the capital market and provide feedback/views to the Board of Directors and/or Board of Commissioners in relation to the provisions of the capital market, particularly the aspect of information disclosure or reporting of Company's actions.

Akses Informasi Perusahaan Company's Information Access

BII senantiasa memberikan kemudahan informasi kepada stakeholders untuk mengakses informasi mengenai keuangan dan perkembangan perusahaan melalui jalur-jalur komunikasi seperti siaran pers. BII secara aktif juga menyebarkan informasi ke media cetak, elektronik dalam cakupan nasional maupun internasional. Informasi mengenai produk dan layanan, kegiatan, aksi korporasi dan lain-lainnya disajikan melalui website BII <http://www.bii.co.id>.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, nasabah dapat menghubungi layanan BII Customer Care melalui ponsel : 69811 atau Fixed Line: 500611. Selain itu nasabah dapat pula menghubungi melalui e-mail ke cs@bii.co.id dari Senin sampai Jum'at (08.30 WIB - 17.30 WIB) atau menghubungi cabang terdekat BII.

Bagi investor dapat langsung menghubungi Investor Relations Perusahaan melalui e-mail InvestorRelations@bankbii.com.

Jalur komunikasi lainnya yang bisa diakses adalah melalui BII Friends <http://www.biiifriends.com/> atau akun jejaring sosial Twitter yakni @Biifriends atau <https://www.twitter.com/BiiFriends> dan Facebook untuk BII Friends Community <https://www.facebook.com/BiiFriends>.

BII juga senantiasa melakukan pelaporan informasi dan fakta material melalui surat kepada Bapepam-LK dan *Electronic Reporting* kepada Bursa Efek Indonesia (www.idxnet.co.id).

Kemudahan keseluruhan akses informasi dan data perusahaan sebagai wujud Komunikasi Eksternal dan bertujuan meningkatkan corporate image kepada *stakeholders* serta mempunyai peranan mengkomunikasikan hal-hal yang telah dilakukan BII serta peningkatan *brand awareness* BII di mata publik.

BII continues to provide easy information access to stakeholders regarding finance and company updates through communication channels such as press releases. BII also actively circulates information to print and electronic media as well as national and international coverage. Information concerning products and services, activities, corporate actions and others is presented through our BII website <http://www.bii.co.id>.

For more information, customers can call BII Customer Care through mobile phone number 69811 or Fixed Line number 500611. In addition, customers can also contact through e-mail to cs@bii.co.id from Monday to Friday (08.30 WIB - 17.30 WIB) or contact the nearest BII branch.

Investors can directly contact the Company's Investor Relations by e-mail InvestorRelations@bankbii.com.

Other lines that can be accessed is through BII Friends <http://www.biiifriends.com/> or Twitter social networking account @Biifriends or <https://www.twitter.com/BiiFriends> and Facebook for BII Friends Community <https://www.facebook.com/BiiFriends>.

BII also continues to report the information and material facts through letters to OJK and Electronic Reporting to Indonesia Stock Exchange (www.idxnet.co.id).

The convenience of access to corporate information and the company's data as a form of External Communication aims to improve corporate image to the stakeholders as well as having a role to communicate the programs that have been performed by BII and to improve BII brand awareness in the public eye.

KOMUNIKASI EKSTERNAL

A. Hubungan Investor

Unit kerja Hubungan Investor BII bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan, dengan fungsi tugas yang melingkupi aspek keuangan dan strategi. Secara spesifik, unit kerja Hubungan Investor bertugas untuk:

1. Memberikan informasi yang akurat, terpercaya dan tepat waktu kepada pihak-pihak intern dan ekstern mencakup pemegang saham, investor, analis, lembaga pemeringkat, dan regulator.
2. Melakukan kegiatan secara berkala, diantaranya: paparan kinerja, pertemuan analis, pertemuan dengan investor, dan pertemuan lain yang bertujuan untuk menyampaikan kinerja BII
3. Menyediakan akses informasi kepada setiap pemangku kepentingan mengenai kinerja keuangan dan aksi korporasi yang dilakukan oleh BII.

Dalam melakukan kegiatan di atas, unit kerja Hubungan Investor menjalin kerjasama dengan Manajemen, unit kerja Komunikasi Perusahaan, unit kerja Finance & Accounting dan Sekretaris Perusahaan. Unit kerja Hubungan Investor juga melakukan komunikasi dengan para pemangku kepentingan melalui berbagai media, termasuk conference call, penerbitan laporan keuangan berkala, dan penerbitan laporan tahunan.

Kegiatan penyediaan informasi dari unit kerja Hubungan Investor selama 2013 adalah:

a. Analyst Briefing

Kami melakukan analyst briefing dan conference call untuk penerbitan laporan keuangan FY2013, sedangkan untuk kuartal-I, kuartal-II, dan kuartal-III, kami menerbitkan presentasi kinerja keuangan. Seluruh materi presentasi dan laporan keuangan serta dokumen terkait lainnya telah tersedia pada website BII www.bii.co.id.

EXTERNAL COMMUNICATION

A. Investor Relations

The working unit of BII Investor Relations is responsible to the Director of Finance, with the function of tasks covering financial and strategic aspects. Specifically, the Investor Relations unit is responsible for:

1. Providing accurate, reliable and timely information to internal and external parties, including shareholders, investors, analysts, rating agencies, and regulators.
2. Conducting regular activities, among others: performance exposure, analyst meetings, investor meetings, and other meetings that aim to convey the performance of BII
3. Providing access to information to each stakeholder regarding financial performance and corporate actions conducted by BII.

In performing the abovementioned activities, the Investor Relations Unit is partnering with the Management, Corporate Communication working unit, Finance & Accounting and Corporate Secretary. The Investor Relations Unit also communicates with stakeholders through various media, including conference calls, issuance of periodic financial statements, and publication of the annual report.

Provision of information from the Investor Relation Unit during 2013 is as follows:

a. Analyst Briefing

We conducted analyst briefings and conference calls for the publication of financial statement of FY2013, while for the first quarter, second quarter, and third quarter, we published the presentation of financial performance. All presentations and financial statement materials and other relevant documents are available on the website of BII www.bii.co.id.

Paparan Kinerja	Tanggal Date
Kuartal-I 2013 Quarter – I 2013	26 April 2013 26 April 2013
Kuartal-II 2013 Quarter – II 2013	29 Juli 2013 29 July 2013
Kuartal-III 2013 Quarter – III 2013	11 November 2013 11 November 2013
Kuartal-IV 2013 Quarter – IV 2013	19 Februari 2014 19 February 2014

b. Credit Rating

Sebagai bagian dari kebijakan penyediaan informasi kepada pemegang saham dan publik, kami melakukan pemeringkatan untuk mengukur kinerja dan kondisi perusahaan dari pihak independen melalui dua lembaga pemeringkat, yaitu : PT Pemeringkat Efek Indoensia (Pefindo) dan Fitch Ratings Indonesia. Data hasil pemeringkatan terdapat pada hal 121 dari laporan tahunan ini.

c. Paparan Publik (Public Expose)

Guna memenuhi kewajiban penyampaian informasi kepada publik berdasarkan ketentuan Bursa Efek Indonesia No Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-E, BII telah melakukan satu (1) kali public expose pada 11 November 2013 yang memaparkan presentasi mengenai profil perusahaan, strategi bisnis, kinerja keuangan, ikhtisar peristiwa penting, penghargaan dan prestasi yang diterima, serta kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan termasuk sesi tanya jawab .

d. Kegiatan lainnya

Dalam rangka memberikan informasi yang seimbang kepada seluruh pemangku kepentingan, unit kerja Hubungan Investor BII juga melakukan kegiatan lainnya, diantaranya: Maybank Investor Day telah diselenggarakan pada tanggal 3 Juni 2013, pertemuan one-on-one dengan para analis/investor lokal dan/atau luar negeri, dan Laporan Tahunan (1 kali).

b. Credit Rating

As part of the policy regarding information provision to shareholders and the public, we rank to measure the performance and the condition of the company by an independent party through two rating agencies, namely: PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) and Fitch Ratings Indonesia. The result of ranking data is available in this annual report on page 121.

c. Public Expose

In order to fulfill the obligation to submit the information to the public under the provisions of Indonesia Stock Exchange No Kep-306/BEJ/07-2004 on Regulation Number I-E, BII has conducted a one (1) time public expose on 11 November 2013 which presented the company's profile, business strategy, financial performance, summary of key events, awards and achievements received, as well as corporate social responsibility activities, including question and answer sessions.

d. Other Activities

In order to provide balanced information to all stakeholders, BII Investor Relations Working Unit also conducted other activities, among others: Maybank Investor Day was held on 3 June 2013, one-on-one meeting with analysts/local investors and/or foreign investors, and Annual Report (1 time).

Akses Informasi Perusahaan Company's Information Access

B. Hubungan Media Massa

No	Kegiatan Activities	Jumlah Total	
		2012	2013
1	Konferensi Pers Press Conference	21	15
3	Siaran Pers /Press Release Press Release	59	59
4	Ulasan Media Media Coverage	1.775	1,850*
5	Pelatihan untuk Media Journalist Training	1	1
6	Pertemuan dengan Media Media Meeting/Gathering	2	1
7	Kunjungan Media Media visit	1	2

*) liputan di media cetak saja | *) coverage in print media only

Siaran pers yang telah dilakukan selama Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Press Release made during the Year 2013 can be seen in the following table:

NO	PERIHAL	TANGGAL DATE	SUBJECT
JANUARI JANUARY			
1	Registrasi BII Maybank Bali Marathon 2013 telah Dibuka	31-Jan-2013	BII Opens Registration for BII Maybank Bali Marathon 2013
FEBRUARI FEBRUARY			
2	Tiga Pemenang Maybank Corporate Challenge di Indonesia Menuju Maybank Malaysian Open 2013	3-Feb-2013	Three Winners of Maybank Corporate Challenge in Indonesia Heading towards Maybank Malaysian Open 2013
3	BII KC Solo Lakukan Pendampingan Komunitas Masyarakat Miskin Urban	7-Feb-2013	BII Solo Branch assisted for Poor Urban Community
4	BII Selenggarakan BII Chinese New Year 2013	14-Feb-2013	BII Celebrates BII Chinese New Year 2013
5	AirAsia dan BII Jalin Kerja Sama Strategis Menambah Jalur Distribusi Penjualan Tiket	15-Feb-2013	AirAsia and BII Set Strategic Alliance to Increase Ticket Sales Distribution Channels
6	Laba Bersih BII 2012 Naik 81% Mencapai Rekor Rp1,2 triliun	19-Feb-2013	BII full year net Profit surges 81% to a record Rp1.2 trillion
7	BII Buka Layanan Wealth Management dan Perbankan Reguler di Kantor Pusat Baru	20-Feb-2013	BII opens Wealth Management Service and Regular Banking in the New Head Office
MARET MARCH			
8	BII Perkaya Program Tabungan Wanita, BII Woman One	13-Mar-2013	BII Enriches Women Savings Program, BII Woman One
9	BII dan Kospin Jasa Tanda Tangan Nota Kesepahaman Kerja Sama dalam Aktivitas Cash Management & Rencana Penerbitan Kartu ATM Co-Branding	16-Mar-2013	BII and Kospin Service Sign Memorandum of Understanding in Cash Management Activity & Planning of ATM Co-Branding Card Issuance
10	BII Buka KCP Bandar Jaya, Lampung Tengah	22-Mar-2013	BII Opens Sub-Branch Bandar Jaya, Lampung Tengah
APRIL APRIL			
11	BII Luncurkan BII Mobile Banking Berbasis Android dan Selenggarakan Program "BII Mobile Banking Berhadiah"	2-Apr-2013	BII Launches Android-Based BII Mobile Banking and "BII Mobile Banking Prize" Program
12	BII dan Hekikai Shinkin Bank Jalin Kerja Sama Bisnis Strategis	4-Apr-2013	BII and Hekikai Shinkin Bank Set Strategic Business Partnership
13	BII Selenggarakan Seminar Pengembangan UKM dan Laksanakan CSR "BII Berbagi" di Makassar	11-Apr-2013	BII Holds SME Development Seminar and CSR Implementation through "BII Berbagi" CSR in Makassar
14	"Pushing The Limit", Film Dokumenter Perjuangan Lima Pelari dengan Latar Belakang Berbeda di Lomba Lari BII Maybank Bali Marathon 2012 (Jakarta)	19-Apr-2013	"Pushing The Limit", A Documentary Film of Five Runners Struggle from Different Backgrounds in BII Maybank Bali Marathon 2012 (Jakarta)
15	"Pushing The Limit", Film Dokumenter Perjuangan Lima Pelari dengan Latar Belakang Berbeda di Lomba Lari BII Maybank Bali Marathon 2012 (Denpasar)	20-Apr-2013	"Pushing The Limit", A Documentary Film of Five Runners Struggle from Different Backgrounds in BII Maybank Bali Marathon 2012 (Denpasar)
16	BII Selenggarakan BII Mini Marathon di Bali Ajang Pemanasan BII Maybank Bali Marathon 2013	21-Apr-2013	BII Conducts BII Mini Marathon in Bali Warming Up Event of BII Maybank Bali Marathon 2013

NO	PERIHAL	TANGGAL DATE	SUBJECT
17	BII Resmikan Lokasi Baru KC Bengkulu	22-Apr-2013	BII Inaugurates the New Location of Bengkulu Branch
18	BII Umumkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham	22-Apr-2013	BII Announces Results of General Meeting of Shareholders
19	Program 'Biingkisan Beruntun' Dukung Pertumbuhan Tabungan BII	24-Apr-2013	'Biingkisan Beruntun' Program Supports the Growth of BII Savings
20	BII Catat Pertumbuhan Laba Bersih 16% pada Kuartal Pertama 2013 Peningkatan Kualitas Aset; Memperkuat Landasan untuk Pertumbuhan Berkelanjutan	25-Apr-2013	BII Records 16% Increase in Net Profit for First Quarter 2013 Improved Asset Quality; Foundation Strengthened for Sustained Growth
MEI MAY			
21	BII Lanjutkan Program Beasiswa untuk Mahasiswa UGM	3-May-2013	BII Continues Scholarship Program for UGM Students
22	Mini Marathon Ajang Pemanasan BII Maybank Bali Marathon	5-May-2013	Mini Marathon as BII Maybank Bali Marathon Warming Up Event
23	BII Perkuat Hubungan dengan Nasabah Setia di Pontianak melalui Customer Gathering	13-May-2013	BII Strengthens Relationship with its Loyal Customers in Pontianak through Customer Gathering
24	BII Sukma Awards Lahirkan Pengusaha Perempuan yang Berani, Independen dan Inspiratif	22-May-2013	BII Sukma Awards Births Brave, Independent, and Inspirational Women Entrepreneurs
25	Pendaftaran BII Maybank Bali Marathon akan Ditutup 30 Mei 2013	28-May-2013	Registration of BII Maybank Bali Marathon to be Closed at 30 May 2013
26	Customer Gathering di Balikpapan	31-May-2013	BII Customer Gathering in Balikpapan
JUNI JUNE			
27	BII Kembali Luncurkan Program 'Biingkisan Beruntun'	4-Jun-2013	BII Again Launches the of 'Biingkisan Beruntun' Program
28	BII Maybank Bali Marathon Sediakan Total Hadiah USD153,940	10-Jun-2013	BII Maybank Bali Marathon Provides Total Prize of USD153,940
29	BII Buka Layanan Wealth Management di KC Palang Merah	12-Jun-2013	BII Opens Wealth Management Service in Palang Merah Branch
30	BII Berbagi ke 486 Siswa Gianyar dalam Rangkaian CSR BII Maybank Bali Marathon 2013	15-Jun-2013	BII Shares to 486 Students in Gianyar during BII Maybank Bali Marathon 2013
31	Juara BII Maybank Bali Marathon 2013	16-Jun-2013	Winner of BII Maybank Bali Marathon 2013
32	Pemegang Saham BII Setujui Rencana Penawaran Umum Terbatas untuk Mendukung Pertumbuhan Jangka Panjang Bank	27-Jun-2013	BII Shareholders Approve Rights Issue Plan to Support the Bank's Long-Term Growth
33	BII Buka Kantor Cabang Pangkalpinang, Bangka Belitung	27-Jun-2013	BII Opens Pangkalpinang Branch, Bangka Belitung
JULI JULY			
34	Bank Internasional Indonesia Mulai Beroperasi di Mumbai, India	10-Jul-2013	Bank Internasional Indonesia Starts to Operate in Mumbai, India
35	BII Dukung Pengembangan UMKM di Bogor	10-Jul-2013	BII Supports the Development of MSME (Micro, Small, Medium Enterprise) in Bogor
36	Penerima Program "BII-Maybank Scholarship" Menuju Nanyang Technological University, Singapura	25-Jul-2013	Beneficiary of "BII-Maybank Scholarship" Program goes to Nanyang Technological University, Singapore
37	BII Catat Kenaikan Laba Bersih 15% untuk Semester Pertama 2013	29-Jul-2013	BII Records 15% Increase in Net Profit for First six Months 2013
AGUSTUS AUGUSTUS			
38	BII Laksanakan Pengundian Program BII Mobile Banking Berhadiah 2013	21-Aug-2013	BII Conducts Drawing of BII Mobile Banking Prize Program 2013
39	BII Luncurkan BII CoOLPay2 dan Kartu BII Sinergi untuk Dukung Pembiayaan Rantai Pasok kepada Komunitas Bisnis	22-Aug-2013	BII Launches BII CoOLPay2 and BII Sinergi Card to Support the Funding of Supply Chain for the Business Community
40	Tiga Penerima Program "BII-Maybank Scholarship" Menuju Malaysia	26-Aug-2013	Three Beneficiaries of "BII-Maybank Scholarship" Program go to Malaysia
SEPTEMBER SEPTEMBER			
41	BII Memastikan Transisi Kepemimpinan Berjalan Lancar	4-Sep-2013	BII Ensures the Leadership Transition Goes Smoothly

Akses Informasi Perusahaan

Company's Information Access

NO	PERIHAL	TANGGAL DATE	SUBJECT
42	BII Laksanakan Program CR Pemberdayaan Ekonomi melalui Micro Financing	6-Sep-2013	BII Implements CR Program of Economic Empowerment through Micro Financing
43	Pelanggan Palyja dan Aetra Bisa Membayar Tagihan Air di Indomaret	6-Sep-2013	Palyja and Aetra Customers Can Pay Water Bill in Indomaret
44	Grup Maybank Laksanakan Global CR Day BII Lakukan Karya Bakti di Taman Makam Pahlawan dan Tempat Bersejarah	28-Sep-2013	Maybank Group Implements Global CR Day BII Focuses on Community Services in Heroes Cemetery and Historic Sites
45	Bank Internasional Indonesia dan Maybank Mengumumkan Menunjukkan Presiden Direktur/CEO Baru BII	30-Sep-2013	Bank Internasional Indonesia and Maybank announce the appointment of BII New President Director /CEO
OKTOBER OCTOBER			
46	Bank Internasional Indonesia (BII) Buka Kantor Cabang Pertama di Mumbai	21-Oct-2013	Bank Internasional Indonesia (BII) Opens First Branch in Mumbai
47	Workshop Fotografi Eksklusif bagi Nasabah Setia BII * Bagian dari Maybank Photography Award 2013	26-Oct-2013	Exclusive Photography Workshop for Loyal Customers of BII * Part of Maybank Photography Award 2013
48	Laba Bersih BII dalam Sembilan Bulan Pertama 2013 Naik 19%, Mencapai lebih dari Rp1 triliun untuk Pertama kalinya	28-Oct-2013	BII Net Profit in the First Nine Months of 2013 Rose by 19%, Reaching More than Rp1 trillion for the First Time
49	BII Apresiasi Nasabah untuk Saksikan Konser Maroon 5 Gratis di Paris	31-Oct-2013	BII Appreciates Customers with "Free Trip and Watch Maroon 5 in Paris" Program
NOVEMBER NOVEMBER			
50	RUPSLB BII Setujui Presiden Direktur Baru & Perubahan Dewan Komisaris	11-Nov-2013	EGM BII Approves New President Director & Changes of Board of Commissioners
51	BII Selenggarakan "Biingkisan Beruntun Festival" di Banjarmasin	27-Nov-2013	BII Conducts "Biingkisan Beruntun Festival" in Banjarmasin
DESEMBER DECEMBER			
52	BII Selenggarakan "Biingkisan Beruntun Festival" di Medan	2-Dec-2013	BII Conducts "Biingkisan Beruntun Festival" in Medan
53	BII Laksanakan CSR Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Micro Financing	9-Dec-2013	BII Implements the CSR of Women Economic Empowerment through Micro Financing
54	BII Selenggarakan "Lelang Poin Reward BII" di Yogyakarta	11-Dec-2013	BII Conducts "BII Point Reward Auction" in Yogyakarta
55	Wartawan Foto Indonesia Juara Kategori Pers Maybank Photography Awards 2013	15-Dec-2013	Indonesian Photojournalist Wins in Press Category in Maybank Photography Awards of 2013
56	BII Peringati Hari Ibu dengan Program "BII Woman One-Tribute to Mom"	17-Dec-2013	BII Commemorates Mother's Day with the Program of "BII Woman One-Tribute to Mom"
57	BII dan Citilink Jalin Kerja Sama Strategis di Bidang Cash Management dan Pembayaran Tiket melalui ATM	18-Dec-2013	BII and Citilink Set Strategic Partnership in Cash Management and Ticket Payment through ATM
58	Pengumuman Grand Prize "Gratis Ke Paris Nonton Maroon 5 Live"	19-Dec-2013	Grand Prize Announcement of "Free Trip and Watch Maroon 5 Live"
59	Dukungan BII atas Peralihan Fungsi Pengawasan dan Pengaturan Bank dari BI ke OJK	30-Dec-2013	BII Supports the Transfer of Supervisory and Regulatory Function from BI to OJK

C. Promosi di Media Massa

Selama 2013, BII melakukan kegiatan periklanan melalui media cetak, radio dan media lainnya, baik untuk komunikasi korporasi maupun produk.

C. Promotion in Mass Media

During 2013, BII conducted advertisement activities through print media, radio and other media, both for corporate communications and products.

Komunikasi Internal Internal Communications

Komunikasi Internal kepada seluruh karyawan dilakukan melalui media internal sebagai berikut:

1. MAJALAH INTERNAL (BII NEWS)

Terbit setiap bulan (12 edisi) sebanyak 40 halaman, dengan rubrikasi diantaranya:

- a. Pesan Manajemen: Rubrik yang berisi pesan kepada seluruh karyawan terkait dengan informasi perkembangan BII, budaya kerja, dan sebagainya yang disampaikan langsung oleh Manajemen
- b. Salam Redaksi: Rubrik yang berisi pengantar Redaksi berupa ringkasan topic-topik yang terangkum dalam Majalah Internal pada setiap edisinya.
- c. Fokus: Rubrik yang berisi berita-berita yang mencerminkan tema/topik utama BII News pada setiap edisi
- d. Peristiwa: Rubrik yang berisi berita tentang aksi korporasi/kegiatan yang dilakukan BII secara bank-wide atau BII bersama dengan institusi/perusahaan lain
- e. Kabar Maybank: Rubrik yang berisi berita-berita tentang aksi korporasi/kegiatan yang dilakukan oleh non divisi atau cabang.
- f. Aktivitas: Rubrik yang berisi tentang kegiatan yang dilakukan oleh grup dan unit kerja.
- g. Apresiasi: Rubrik yang berisi tentang penghargaan yang diberikan BII kepada individu dan unit kerja yang memberikan pencapaian terbaik kepada BII
- h. Transformasi: Rubrik yang berisi informasi terkait aktivitas transformasi yang sedang berlangsung di perusahaan.
- i. Kabar Unit kerja: Rubrik yang berisi tentang kegiatan yang dilakukan oleh cabang dan anak perusahaan.
- j. Pojok BII Berbagi: Rubrik yang berisi berita tentang kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/ CSR) "BII Berbagi"
- k. Inspirasi: Rubrik yang berisikan artikel untuk memberikan inspirasi kepada karyawan dan menanamkan budaya kerja serta core values perusahaan.

Internal communications to all employees through the following media:

1. INTERNAL MAGAZINE (BII NEWS)

Published monthly (12 editions), each totaling 40 pages, with the following columns:

- a. Management Message: Column that contains the message to all employees associated with BII development information, work culture, and others that are delivered directly by the Management. (CEO)
- b. Editorial message: Introductory editorial section containing summary of the topics covered in each edition.
- c. Focus: Column that contains main news which reflects the theme and topic of BII News in each edition.
- d. Events: Column which contains news on corporate actions and activities undertaken by BII (bank wide) or BII with other institutions/ companies.
- e. Maybank News: Column that contains news about corporate actions or activities undertaken by Maybank Group.
- f. Activity: Column that contains the activities undertaken by the group and work units.
- g. Appreciation: Column that contains company's awards given to individuals or work units who provide the best achievement.
- h. Transformation: Column that contains news and information on transformation activities that are implemented in the company.
- i. Working Unit: Column that contains activities carried out by branches and subsidiaries.
- j. Corner of 'BII Berbagi': Column that contains activities carried out by corporate social responsibility "BII Berbagi"
- k. Inspiration: Column that contains articles to inspire employees and inculcate work culture and the company's core values.

- l. Info: Rubrik yang berisi tentang informasi ringkas tentang hal-hal yang terkait dengan operasional BII dan pengembangan budaya kerja.
- m. Info Sehat: Rubrik yang berisi tentang informasi seputar kesehatan dan kebugaran.
- n. Intermezzo: Rubrik yang berisi tentang kuis berhadiah bagi para pembaca.

2. EMAIL BLAST

Penyampaian informasi kepada seluruh karyawan melalui email Presiden Direktur BII dan Corporate Communication diantaranya berupa:

- a. Pesan Manajemen: 23 pesan
- b. Ucapan Selamat Hari Raya: 7 ucapan
- c. Sosialisasi Produk dan Layanan terbaru: 126 info
- d. Sosialisasi aktivitas/kegiatan perusahaan: 129info
- e. Sharing session: 8 info

3. TOWNHALL MEETING

Forum komunikasi yang dihadiri oleh manajemen, senior manajemen, pimpinan regional dan pimpinan cabang untuk menginformasikan kinerja perusahaan periode tertentu serta inisiatif-inisiatif yang sedang dan akan dilaksanakan. Selama 2013, townhall meeting telah diselenggarakan 6 (enam) kali pada 20 Februari 2013, 23 Mei 2013, 5 Juni 2013, 29 Juli 2013, 28 October 2013, dan 21 November 2013.

4. BII CORPORATE UNIVERSITY

Mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan perihal pesan manajemen, kegiatan perusahaan, dll melalui portal BII Corporate University <http://biportal/>

- a. Pesan Manajemen: 21 pesan
- b. Ucapan Selamat Hari Raya: 11 ucapan
- c. Sosialisasi Aktivitas/kegiatan perusahaan: 37 Berita

- l. Info: Column that contains concise information regarding operation and work development in BII.

- m. Health Info: Column that contains information about health.

- n. Intermezzo: Column that contains a Quiz of the Month in addition to prizes to be given to readers.

2. EMAIL BLAST

Conveying information to all employees via email blast from the President Director of BII and Corporate Communication channels:

- a. Message from the Management: 23 messages
- b. Eid Greetings: 7 greetings
- c. Socialization of the latest Products and Services: 126 info
- d. Socialization of activities/ events of the company: 129 info
- e. Sharing session: 8 info

6. TOWNHALL MEETING

A forum of communication attended by management, senior management, regional leaders and branch managers to inform the corporate performance of a certain period as well as initiatives that are being and will be implemented. During 2012, the Townhall meetings were held 6 (six) times on 20 February 2013, 23 May 2013, 5 June 2013, 29 July 2013, 28 October 2013, and 21 November 2013.

7. BII CORPORATE UNIVERSITY

BII Corporate University Portal (<http://biportal/>) that communicates messages from management, corporate activities, etc.

- a. Message from the Management: 21 messages
- b. Eid Greetings: 11 greetings
- c. Socialization of activities/ events of the company: 37 news bits

Sistim Pengendalian Intern Internal Control System

BII telah mengimplementasikan fungsi pengendalian dalam kegiatan operasionalnya termasuk melalui pemisahan tugas, dual control, rekonsiliasi serta standar proses kerja dan pedoman pelaksanaan.

SKAI sebagai audit internal merupakan bagian dari struktur pengendalian intern BII, dalam pelaksanaan tugasnya melakukan pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan struktur pengendalian intern, efektivitas pengendalian intern, dan kualitas pelaksanaannya.

Pemeriksaan dan penilaian atas efektivitas dari struktur pengendalian intern dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bagi auditor intern bahwa pengendalian telah berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

SKAI berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern secara berkesinambungan atas kegiatan operasional BII untuk pencapaian tujuan dan sasaran BII.

SKAI melakukan penilaian Kantor Cabang/Unit Kerja berdasarkan sistem peringkat ROCAM (Risk Management, Operational Controls, Compliance, Asset Quality, dan Management).

Risk Management

Auditor akan menentukan sejauh mana teknik manajemen risiko cukup memadai untuk mengendalikan eksposur risiko yang dihasilkan dari kegiatan Kantor Cabang/Unit Kerja dan untuk memastikan pengawasan yang memadai oleh Kantor Cabang/Unit Kerja dan Manajemen Kantor Pusat, dengan demikian mempromosikan lingkungan perbankan yang aman dan sehat.

Operational Controls

Penilaian terhadap komponen Operational Controls dilakukan untuk menilai efektifitas operasional kontrol Kantor Cabang/Unit Kerja.

Compliance

Penilaian terhadap komponen Compliance dilakukan untuk menilai apakah fungsi kepatuhan yang berupa serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat ex-ante (preventif) untuk

BII has implemented a controlling function in operational activities including through job separation, dual control, and reconciliation as well as standard operating procedure and implementation guidelines.

Internal Audit is part of the Bank's internal control, responsible for auditing and assessing the adequacy of structure, effectiveness and quality of the Bank's internal control.

Audit and assessment of internal control effectiveness is meant to provide assurance to the auditor that the control has been implemented accordingly.

Internal Audit actively plays a role in improving the effectiveness of internal control systems sustainably on operational activities of BII in order to achieve its goal and objectives.

Internal Audit conducts the assessment for Branch Office/Work Unit based on ROCAM ranking system (Risk Management, Operational Controls, Compliance, Asset Quality, and Management).

Risk Management

The Auditor will determine the extent of adequate risk management techniques to control risk exposure resulting from the activities of the Branch Offices/Work Units and to ensure adequate supervision by the Branch Offices/Work Unit and Head Office Management, thereby promoting a safe and sound banking environment.

Operational Controls

The audit on Operational Controls component is conducted to assess the effectiveness of operational controls of the Branch Offices/Work Units.

Compliance

The audit on Compliance component is carried out to assess the compliance functions including preventive measures or actions to ensure that the policies, regulations, systems and procedures,

memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Kantor Cabang/Unit Kerja telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta memastikan kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat oleh Kantor Cabang/Unit Kerja kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Asset Quality

Penilaian terhadap komponen Asset Quality mencerminkan kuantitas risiko kredit yang terjadi dan potensial yang terkait dengan pinjaman dan portofolio kredit korporasi, komersial, SME, konsumen, dan aset lainnya, serta transaksi rekening administratif (off balance sheet). Kemampuan manajemen untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit juga tercermin di sini.

Management

Penilaian terhadap komponen Management antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap penerapan prinsip-prinsip manajemen umum, struktur dan komposisi pengurus Kantor Cabang/Unit Kerja (kualitas manajemen), Planning, Organizing, Directing & Controlling, penanganan conflict of interest, transparansi informasi dan edukasi nasabah, kemampuan mengelola asset-asset fisik (premises) dan sumber daya manusia secara optimal.

Ruang lingkup sistem penilaian hasil Audit TI terhadap Unit Kerja penyelenggara dan pengguna TI adalah berdasarkan kecukupan pengendalian intern dalam sistem informasi Bank, penerapan prinsip kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity) dan ketersediaan (availability) TI, efektivitas perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan TI, serta mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan intern, ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta international best practices (misalnya: COBIT).

as well as business activities conducted by the Branch Offices/Work Units are in accordance with Bank Indonesia regulations and prevailing laws, including the Syariah Principles for Syariah Commercial Banks and Syariah Business Unit, thus to ensure compliance toward the commitment of Branch Offices/Works Units to Bank Indonesia and/or other regulators.

Asset Quality

The audit on the Asset Quality component reflects the credit risk quantity, which arose and has the potential related to lending and loan portfolio of corporate, commercial, SME, consumer, and other assets, as well as the off balance sheet. The ability of management to identify, measure, monitor, and control credit risk is also reflected here.

Management

Assessment of the Management component was conducted through the implementation of general management principles, management structure and composition of Branch Offices/Work Units (management quality), Planning, Organizing, Directing & Controlling, managing the conflict of interest, information transparency and customer education, ability to optimally manage the assets (premises) and human resources.

The scope of IT Audit assessment system results implemented and used by Work Units are based on the adequacy of internal controls in the Bank's information systems, confidentiality principles implementation, integrity and availability of IT, effectiveness of planning and controlling of IT implementation, as well as compliance evaluation on internal regulations, Bank Indonesia regulations and prevailing laws, as well as international best practices (such as: COBIT).

Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk memastikan sistem pengendalian intern telah dilaksanakan secara memadai sebagai salah satu pilar yang fundamental dalam pelaksanaan GCG secara konsisten.

Sistem pengendalian intern merupakan proses yang dijalankan oleh:

1. Direksi dan seluruh unit kerja terkait, yang memberikan arahan, petunjuk dan pengawasan.
2. Komite-Komite.
3. Audit Intern.
4. Seluruh karyawan.

Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pengendalian intern yang baik untuk mencapai tujuan Perusahaan.

Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dalam rangka memastikan terselenggaranya pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut.

Direksi dibantu oleh Komite Internal Audit bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan memastikan tindak lanjut serta komitmen yang diberikan kepada regulator telah ditindaklanjuti dengan baik.

Sistem pengendalian intern hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai dan tidak menjamin secara mutlak terhadap adanya salah saji yang material, atau kerugian, atau terjadinya kondisi yang tidak terduga.

Evaluasi dan Lingkungan Pengendalian Intern

Pengendalian intern dijalankan secara efektif dan efisien, tidak ada pengecualian dalam pelaksanaan prosedur pengawasan serta senantiasa menjaga lingkungan yang menunjang upaya pengendalian intern.

Responsibility of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The Board of Commissioners and Board of Directors are committed to ensuring that internal control has been performed adequately as one of the fundamental parts of consistent implementation of GCG.

Internal Control is a process conducted by:

1. Directors and related working units, which provide governance, guidance, and supervisory functions.
2. Committees.
3. Internal Audit.
4. All employees.

Directors are responsible for implementing a sound internal control system in order to achieve the Company's objectives.

The Board of Commissioners, assisted by Audit Committee, is responsible for monitoring to ensure the implementation of the Bank's internal control in general, including Directors' policy regarding the internal controls.

The Board of Directors, assisted by Internal Audit Committee, is responsible for monitoring and ensuring its follow-up as well as ensuring that the commitment to the regulator is well maintained.

Internal control system is able to provide only reasonable assurance but cannot absolutely guarantee against material misstatement or loss or unexpected circumstances.

Evaluation and Environment of Internal Control

Internal control was implemented effectively and efficiently, without any exception in conducting control procedures; also by maintaining a supportive environment for internal control initiatives.

Secara keseluruhan kualitas sistem pengendalian intern telah berjalan dengan baik. Permasalahan yang timbul karena kelemahan pengendalian intern dilaporkan kepada Direksi dan ditindaklanjuti secara konsisten untuk meminimalkan risiko.

Laporan juga disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite-komite yang telah dibentuk.

Dewan Komisaris, melalui Komite-komite yang telah dibentuk melakukan pengkajian atas lingkungan pengendalian dan melakukan penilaian secara independen yang dikomunikasikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti.

Penilaian Risiko dan Pengelolaan Risiko

Risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran Perusahaan telah diidentifikasi, dinilai, dipantau dan dikendalikan secara terus-menerus. Telah tersedia kebijakan dan prosedur untuk mengantisipasi, mengidentifikasi dan merespon kejadian dan kendala yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan permodalan bank.

Dewan Komisaris dan Direksi, melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Manajemen Risiko, memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilaksanakan dengan baik.

Kegiatan Pengendalian

Kegiatan dan prosedur pengendalian risiko dilaksanakan oleh unit pendukung yang telah dibentuk oleh BII yaitu Komite Manajemen Risiko dan Komite Audit. Aktivitas, tugas dan tanggung jawab unit kerja ini diuraikan pada bagian lain dari laporan GCG ini.

Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab untuk mensosialisasikan ketentuan perbankan yang berlaku, melakukan uji kepatuhan atas kebijakan internal baru dan melakukan review atas usulan produk/aktivitas baru, menerapkan program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) serta memonitor pelaksanaan kepatuhan melalui Compliance Plan Self Assessment.

Overall, the internal control system quality has been well established. Issues related to the inadequacy of internal control were reported to the Directors, and were followed up consistently to minimize risks.

Reports were also submitted to the Board of Commissioners through all formed committees.

The Board of Commissioners, through its various Committees, conducted reviews of internal control environment and conducted an independent assessment to be communicated to the Board of Directors for further action.

Risk Assessment and Risk Management

Risks impacting the Bank's objective and achievement have been identified, assessed, monitored and controlled continuously. Appropriate policy and procedures are available to anticipate, identify and respond to events and barriers that could effect the goal's achievement and bank's capital.

The Board of Commissioners and Board of Directors, through Risk Oversight Committee and Risk Management Committee, ensured that risk management has been implemented properly.

Control Activities

The supporting units formed by BII including Risk Management Committee and Audit Committee implemented policies and procedures of risk control. Activities; duty and responsibility of this committee are described in another part of GCG report.

The Compliance Unit is responsible for socializing current banking regulations, conducting a compliance test upon new internal policy, as well as reviewing new products/activities, implementing Anti Money Laundering (AML), Terrorism Funding Prevention and monitoring compliance implementation through Compliance Plan Self Assessment.

Satuan Kerja Kepatuhan menyampaikan laporan kepatuhan secara berkala kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Bank Indonesia.

Unit Kerja terkait melakukan review data secara berkala atas keberadaan dan efektivitas pengendalian, pembagian tugas yang memadai, dan verifikasi rutin atas akurasi.

Informasi dan Komunikasi

Telah tersedia prosedur pengumpulan data dan teknologi informasi yang dapat menghasilkan laporan kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pemenuhan tugas Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi mengidentifikasi informasi penting yang diperlukan Perusahaan, merangkum, dan mengkomunikasikannya dalam bentuk dan waktu yang tepat sehingga karyawan dapat menjalankan kewajibannya dan pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat mengetahui kondisi Bank.

Pemantauan

Direksi, Unit Kerja terkait dan Audit Intern melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern. Pemantauan terhadap risiko utama telah diprioritaskan dan menjadi bagian kegiatan sehari-hari, termasuk evaluasi secara berkala.

Audit Intern didukung oleh sumber daya yang memiliki kompetensi dan jumlah yang memadai untuk mengevaluasi keseluruhan sistem pengendalian intern atas strategi, kegiatan operasional dan metode pemrosesan informasi keuangan. Audit Intern senantiasa menyampaikan hasil temuan audit kepada Komite Audit dan Direksi agar kelemahan atau kekurangan yang ada dapat segera diperbaiki.

Direksi dan Pejabat Perusahaan memiliki komitmen dan telah melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan yang telah dilakukan maupun rekomendasi Audit Intern.

The Compliance Unit provides a periodic report of Compliance to the Board of Commissioners, Board of Directors and Bank Indonesia.

The relevant units periodically review the data of existence and effectiveness of internal control, establish an appropriate array of duties, and perform routine verifications of data accuracy.

Information and Communications

Procedures of gathering data and information technology are available, and able to produce reports of business activities, financial reports, risk management implementation and regulatory compliance that support the duty of the Board of Directors and Board of Commissioners. The Board of Directors identified crucial information, summarized and communicated it in a right form and time, thereby enabling employees to carry out their responsibilities and external stakeholders to be well informed of the Bank's conditions.

Monitoring

Directors, relevant unit and Internal Audit conduct ongoing monitoring on the effectiveness of internal control implementation. The key risks have been prioritized on a daily basis for monitoring, including evaluation period.

Internal Audit is supported by a competent and sufficient number of human resources to evaluate entire internal control of strategies, operations and financial information processing. Internal Audit reports the audit findings to the Audit Committee and Board of Directors, for immediate improvement.

The Board of Directors and Senior Management are committed and have conducted further actions upon the monitoring results as well as recommendation for Internal Audit.

Audit Intern

Internal Audit

Fungsi Audit Intern merupakan salah satu komponen GCG yang ikut berperan aktif dalam membentuk dan meningkatkan lingkungan pengendalian perusahaan (control environment). Fungsi Audit Intern BII dijalankan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

1. FUNGSI SKAI

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) BII adalah fungsi independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan secara tidak langsung kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Tugas SKAI adalah membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit. Dalam melaksanakan hal ini SKAI melakukan kegiatannya melalui pemeriksaan serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen.

2. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN SKAI

- a. Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur.
- b. Untuk mendukung independensi dan menjamin tidak ada pembatasan audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, Kepala SKAI dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan atau melalui Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Pemberian informasi tersebut harus dilaporkan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.

3. PENGANGKATAN KEPALA SKAI

SKAI dipimpin oleh seorang Kepala SKAI. Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Bank Indonesia serta Bapepam dan LK.

The Audit Internal function is one of the GCG components that actively supports the development and enhancement of the company's control environment. BII's Internal Audit Function is performed by the Internal Audit Unit (IAU).

1. IAU FUNCTION

BII's Internal Audit Unit (IAU) is an independent function that is directly accountable to the President Director and to the Board of Commissioners through the Audit Committee. The IAU (Internal Audit Unit) main responsibility is to provide assurance and to render independent objectives, and professional consultancy in order to generate added value. IAU realizes its goals with the adequacy of internal control and maintains the objectives of risk management on overall activities throughout each management level.

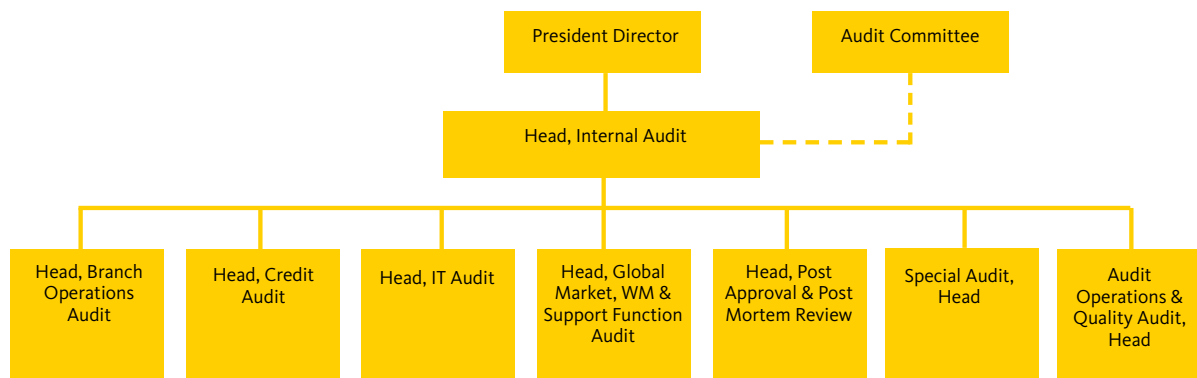
2. STRUCTURE AND POSITION OF IAU

- a. Head of IAU is responsible for answering directly to President Director.
- b. To ensure the independency of Internal Audit Unit, the Head of IAU communicates directly to the Board of Commissioners and through the Audit Committee, in regard to its audit activities to notify any matter to the President Director and the Compliance Director.

3. APPOINTMENT OF HEAD OF IAU

IAU is led by a Head of IAU, who is appointed and dismissed by the President Director with approval from the Board of Commissioners and notified to Bank Indonesia as well as to OJK.

4. STRUKTUR ORGANISASI SKAI



4. IAU ORGANIZATION STRUCTURE

5. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SKAI

Kepala SKAI memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Membuat perencanaan audit tahunan. Rencana audit tahunan harus mendapatkan persetujuan Presiden Direktur dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk mendapatkan pengakuan.
- b. Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui, termasuk melaksanakan penugasan khusus atas permintaan Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- c. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan BII.
- d. Melakukan evaluasi dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.

5. IAU DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Head of IAU and internal auditors have duties and responsibilities to:

- a. Develop the annual audit plan, with risk-based approach, including risks and control being the main focus for the management and regulators. The annual audit plan must also obtain approval from the President Director and the Board of Commissioners for authorization.
- b. Execute the annual audit plan that has been approved; this also includes performing special assignment tasks given by the President Director and Board of Commissioners through the Audit Committee.
- c. Assess and evaluate the implementation of internal audit control and the risk management system in accordance with BII policies.
- d. Evaluate the efficiency & effectiveness activities in finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology and other activities.

- e. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
 - f. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
 - g. Melakukan pemantauan dan analisa atas kecukupan tindak lanjut hasil audit termasuk didalamnya memberikan laporan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dalam hal auditee tidak menindaklanjuti hasil audit.
 - h. Menyiapkan laporan yang akan disampaikan oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris kepada Bank Indonesia tentang:
 - o Pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern (per semester) termasuk informasi hasil audit yang bersifat sangat rahasia. Batas waktu penyampaian laporan kepada Bank Indonesia adalah 2 (dua) bulan setelah akhir semester
 - o Setiap temuan yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank. Batas waktu penyampaian laporan kepada Bank Indonesia adalah 7 (tujuh) hari sejak temuan audit diketahui
 - o Laporan hasil kaji ulang pihak eksternal yang memuat pendapat tentang hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern bank serta perbaikan yang mungkin dilakukan. Batas waktu penyampaian laporan kepada Bank Indonesia adalah 1 (satu) bulan setelah hasil kaji ulang oleh pihak ekstern diterima oleh Bank dan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam 3 (tiga) tahun
 - i. Berperan sebagai konsultan bagi pihak-pihak intern BII antara lain dengan memberikan tanggapan atas usulan kebijakan, sistem, dan prosedur untuk memastikan kecukupan pengendalian intern yang tidak termasuk dalam kegiatan operasional unit kerja.
- e. Provide recommendations for improvement and objective information regarding audited activities at all levels of management
 - f. Develop report of audit result and administer the report to President Director and Board of Commissioners, with copies to Director of Compliance.
 - g. Monitor and analyze the adequacy of follow-up actions taken following audit result, including submitting the report of auditee's follow-up actions to President Director and Board of Commissioners through Audit Committee.
 - h. Prepare report to be submitted by President Director and the Board of Commissioners to Bank Indonesia regarding:
 - o Implementation of internal audit and its key results (by semester) including information on audit result categorized as highly classified. The report needs to be submitted to Bank Indonesia no later than 2 (two) months after the end of a semester
 - o Any findings that are predicted to disrupt the Bank's business continuity. The report needs to be submitted to Bank Indonesia no later than 7 (seven) days upon the finding
 - o Report on external review that sets forth opinion on IAU performance and its compliance with the standard of implementation of bank's internal audit function as well as improvements that may be required. The report needs to be submitted to Bank Indonesia (OJK) no later than 1 (one) month after the result of external review is received by the Bank, at least once every 3 (three) years
 - i. Be the consultant for BII internal parties, by giving feedback about policies, systems and procedures to maintain the high quality of internal control for all working units.

- j. Menjaga profesionalisme auditor intern dengan pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, serta program sertifikasi yang memadai melalui program pendidikan berkelanjutan.
- k. Membuat program pengendalian mutu (quality assurance program) untuk mengevaluasi dan menjamin mutu kegiatan operasional SKAI.
- l. Membuat program pengembangan metodologi audit untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja SKAI secara berkelanjutan.

6. JUMLAH KARYAWAN DAN SERTIFIKASI PROFESI

Per 31 Desember 2013, SKAI memiliki total 101 karyawan. Untuk mempertahankan standar kinerja dan meningkatkan kompetensi auditor secara berkelanjutan, setiap auditor SKAI diwajibkan untuk mengikuti pelatihan internal maupun eksternal serta pelatihan berbasis *e-learning*. Untuk menunjang pelaksanaan audit yang profesional, auditor SKAI juga diwajibkan untuk memiliki minimal 1 jenis sertifikasi profesi. Sertifikasi profesi yang dimiliki auditor SKAI sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

6. NUMBER OF EMPLOYEES AND PROFESSIONAL CERTIFICATION

As of 31 December 2013, IAU has a total of 101 staff. To maintain the performance standard and to continually enhance the auditors' competence, each of IAU's auditors are required to attend internal and external training programs, including e-learning training. To provide professional audit implementation, it is also a prerequisite for IAU's auditors to hold at least 1 professional certification. Professional certifications held by IAU auditors as of 31 December 2013 are:

Sertifikasi/Certification	Jumlah Auditor /Number of Auditor
Certified Information System Auditor (CISA)	6
Certified Information Security Manager (CISM)	1
Certified Fraud Examiner (CFE)	1
Certified in Risk and Information Systems Control (CIRSC)	1
Certified Ethical Hacker (CEH)	2
Sertifikasi Kompetensi Audit Intern Bank - LSPP	14
Certified Bank Internal Auditor (CBIA)	14
Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA)	33
Risk Management Certification (BSMR) – Level I	28
Risk Management Certification (BSMR) – Level II	10
Risk Management Certification (BSMR) – Level III	6

7. PIAGAM AUDIT INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER)

SKAI sebagai bagian dari struktur pengendalian intern Bank melaksanakan fungsi audit intern dengan berpedoman pada aturan dan standar sebagaimana diatur dalam: Peraturan Bank Indonesia nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang “Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum”, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) nomor IX.1.7 tentang “Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal” tanggal 28 Nopember 2008, serta Standar Profesi Audit Intern dari Institute of Internal Auditors (IIA).

Untuk mendukung pelaksanaan fungsinya, audit intern harus diberikan wewenang, kedudukan, dan tanggung jawab yang dinyatakan dalam Piagam Audit Intern. Piagam Audit Intern merupakan pernyataan formal yang menegaskan mengenai misi dan ruang lingkup, kedudukan dan independensi, akuntabilitas, wewenang, tanggung jawab, kualifikasi dan kode etik auditor intern Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) BII. SKAI secara berkala melakukan kaji ulang terhadap Piagam Audit Intern. Pada April 2013, SKAI telah melakukan pengkinian Piagam Audit Intern yang ditetapkan Direksi dan disetujui Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

8. FOKUS DAN PELAKSANAAN AUDIT 2013

Di tahun 2013 SKAI telah melakukan 143 penugasan audit yang mencakup 541 kunjungan kantor dalam bentuk regular, tematik, surprise, khusus serta review pada area perkreditan melalui penugasan *post approval review* dan *post mortem review*. Cakupan audit meliputi audit pada kantor cabang dalam negeri, unit kerja kantor pusat (bisnis dan fungsi support), teknologi dan sistem informasi, audit pada area perkreditan, serta melakukan audit khusus dengan rincian jumlah penugasan sebagai berikut:

7. INTERNAL AUDIT CHARTER

As part of the Bank’s internal control structure, IAU performs its internal audit function by observing the regulations and standards as prescribed in: Bank Indonesia Regulation number 1/6/PBI/1999 dated 20 September 1999 on “The Assignment of Compliance Director and the Application of Internal Audit Function Implementation Standards in Commercial Bank”, Regulation from the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) number IX.1.7 on “The Development and Formulation Guidelines of Internal Audit Charter” dated 28 November 2009 as well as the Standard for Professional Practice of Internal Auditing from the Institute of Internal Auditors (IIA).

To be able to fully implement its function, internal audit needs to have the authority, position, and responsibilities set forth in Internal Audit Charter. Internal Audit Charter is the formal document that certifies the mission, scope, position and independence, accountability, authority, responsibilities, qualifications, and code of conduct of internal auditors under BII Internal Audit Unit (IAU). Periodically, IAU reviews the Internal Audit Charter. In April 2013, IAU updated the Internal Audit Charter established by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners through Audit Committee.

8. 2013 AUDIT FOCUS AND IMPLEMENTATION

In 2013, IAU executed 143 audit assignments, consisting of 541 visits in the form of regular, thematic, surprise, special, and credit reviews through post approval review and post mortem review assignments. The scope of audit covered audit on domestic branch offices, working units at the Head Office (business and supporting units), technology and information systems, audit on credit activities, as well as a special audit. The following table presents details of number of assignments:

No.	Obyek Audit / Audit Object	2013
		Realisasi Audit / Audit Realization
1	Thematic Audit Thematic Audit	12
2	Surprise Audit Surprise Audit	4
3	Cabang Dalam Negeri Domestic Branch Office	49
4	Anak Perusahaan Subsidiary	2
5	Unit Kerja Kantor Pusat Head Office Working Unit	18
6	Perkreditan Credit	16
7	Teknologi dan Sistem Informasi Technology and Information System	15
8	PAR & PMR PAR & PMR	12
9	Audit Khusus Special Audit	15
Jumlah Total		143

9. FOKUS DAN RENCANA AUDIT 2014

Di tahun 2014, SKAI memfokuskan audit pada seluruh kantor cabang induk BII (79 kantor cabang di dalam negeri dan 2 kantor cabang di luar negeri), Internal Rating Based (IRB), Basel II, anak perusahaan, kegiatan *treasury*, anti pencucian uang dan manajemen risiko operasional.

Cakupan audit meliputi audit pada kantor cabang (81 kantor), unit kerja kantor pusat (bisnis dan fungsi support), teknologi dan sistem informasi, serta area perkreditan dengan rincian jumlah penugasan sebagai berikut:

9. AUDIT PLAN & FOCUS IN 2014

In 2014, SKAI is prioritizing its audit focus to the whole BII's main branches (79 local branches and 2 overseas branches), Internal Rating Based (IRB) Basel II, subsidiaries, treasury activities, anti-money laundering and operational risk management.

The audit scope covers local branch offices, business & supporting units in the Head Office, information system technology and also credit activities with the following details:

No.	Obyek Audit Audit Object	2013
		Realisasi Audit Audit Plan
1	Thematic Audit Thematic Audit	5
2	Surprise Audit Surprise Audit	2
3	Kantor Cabang Induk Main Branch Office	81
4	Anak Perusahaan Subsidiary	2
5	Unit Kerja Kantor Pusat Head Office Working Unit	19
6	Perkreditan Credit	16
7	Teknologi dan Sistem Informasi Technology and Information System	13
8	PAR & PMR PAR & PMR	12
9	Audit Khusus Special audit	-(*)
Jumlah Total		150

(*)Jumlah audit khusus tidak ditentukan dalam rencana audit
 (*) The number of special audit is not determined in audit plan

10. KEGIATAN SKAI LAINNYA

SKAI dalam pelaksanaan tugasnya selain melakukan kegiatan audit juga berperan secara aktif sebagai konsultan dalam kegiatan proyek pengembangan sistem aplikasi dengan tujuan untuk meyakinkan bahwa sistem pengendalian intern telah memadai. SKAI juga melakukan validasi atas hasil tindak lanjut yang dilakukan unit kerja terkait dengan temuan dari regulator.

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan audit, SKAI melakukan pengembangan teknik audit terkini dengan melakukan *continuous monitoring* melalui analisa *Management Information System* (MIS) dan penerapan *Computer Assisted Audit Technique* (CAATS) yang berkesinambungan dan terintegrasi. Dengan penerapan CAATS, SKAI mampu menganalisa data secara lebih menyeluruh sekaligus mampu terfokus pada kondisi yang tidak biasa (*unusual conditions*) sehingga bisa melaksanakan kegiatan audit secara lebih komprehensif.

Selain itu, untuk memastikan kualitas pelaksanaan audit intern, SKAI melakukan kaji ulang intern secara regular yang dilakukan oleh unit Quality Assurance dan setiap tiga tahun sekali dilakukan external review oleh auditor eksternal. Kaji ulang oleh pihak eksternal terakhir dilakukan pada bulan Februari tahun 2011 untuk periode audit 2008 hingga 2010 dan dinyatakan bahwa SKAI telah memenuhi ketentuan SPFAIB.

10. OTHER ACTIVITIES OF IAU

Aside from performing audit duties, Internal Audit Unit (IAU) is also active in reviewing the policy framework and operational systems to ensure that the internal control function is performing at a high level. IAU also needs to assess the related working units with findings from the regulators.

To support audit activities, IAU develops latest audit techniques by conducting continuous and integrated monitoring through Management Information System (MIS) analysis and implementation of Computer Assisted Audit Technique (CAATS). With CAATS, IAU is able to perform data analysis in a more comprehensive manner as well focusing on unusual conditions, and as such is capable of providing more extensive audit activities.

To ensure the high level performance of internal audit implementation, IAU regularly reviews the conduct of the Quality Assurance Unit. External review is performed every three years by an external auditor. The previous assessment was conducted in February 2011, with audit period from 2008 to 2010, and IAU has been acknowledged to conform with regulation of SPFAIB.

11. PERNYATAAN PENGENDALIAN INTERN

SKAI sebagai bagian dari struktur pengendalian intern BII, dalam pelaksanaan tugasnya melakukan pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan struktur pengendalian intern, efektivitas pengendalian intern, dan kualitas pelaksanaannya. Pemeriksaan dan penilaian atas efektivitas dari struktur pengendalian intern dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bagi auditor intern bahwa pengendalian telah berjalan sesuai yang telah ditetapkan. SKAI berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern secara berkesinambungan atas kegiatan operasional BII untuk pencapaian tujuan dan sasaran BII.

11. STATEMENT OF INTERNAL AUDIT

IAU is a part of BII's internal control structure and in its duty implementation conducts examination and assessment on the adequacy of internal control structure, effectiveness of internal control, and the quality of its execution. The examination and assessment on internal control structure effectiveness aims to provide assurance for internal auditors that control activities have been performed as required. IAU is actively involved in the continuous activities to improve the effectiveness of internal control of BII's operations in order to support BII in realizing its goals and objectives.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dengan Penyediaan Dana Besar

Provision of Funds to Related Parties with Large Exposures

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dengan Penyediaan Dana Besar

Provision of Funds and Large Exposures

Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan debitur/group inti per tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Provision of funds to related parties and debtors/core group as of 31 December 2013 was as follows:

No.	Penyediaan Dana Provision of Funds	Jumlah Total	
		Debts Debitur	Nominal (Rp.Million) Nominal (Jutaan Rupiah)
1	To Related Parties Kepada Pihak Terkait*)	211	742.229
2	To Core Debts Kepada Debitur Inti		
	- Individu Perorangan	9	7.617.959
	- Group	16	15.091.539

Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan kepada debitur/group inti telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), dan tidak terdapat pelanggaran maupun pelanggaran BMPK sepanjang 2013.

Provision of funds to related parties and debtors/core groups is conducted in compliance with the regulations of Bank Indonesia regarding Legal Lending Limit (LLL). There were no breaches or exceeding LLL during 2013.

Bank memiliki dan menyampaikan Daftar Pihak Terkait secara periodik ke Bank Indonesia. Daftar Pihak Terkait tersebut dipantau oleh Bank Indonesia. Daftar Pihak Terkait tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

The Bank has developed and reported a List of Related Parties periodically to Bank Indonesia, while conducting monitoring of the list. The Bank's Related Parties are as follows:

No	Nama Perusahaan Company name	Total Saldo/Pihak Terkait (Jutaan Rupiah) Total Balance / Related Parties (IDR Million)	Keterangan Description
1	PT Adaro Indonesia.		- Salah satu Direksi adalah Komisaris perusahaan/badan dimana Bank bertindak sebagai pengendali One of directors is the commissioner of company in which the Bank as controlling interest.
2	Adikencana Mahkota Buana		- Terkait karena hubungan keluarga pengurus Bank Related with management
3	PT. Bank Maybank Syariah Indonesia		- Mempunyai induk perusahaan yang sama dgn Bank Owned by the same shareholder
4	Komisaris, Direksi, DPS, Pejabat Eksekutif & hubungan karena keluarga	34,712	Management and Key management personnel which the Bank as controlling interest
5	PT BII Finance Center	139,128	Perusahaan/badan dimana Bank bertindak sebagai pengendali Bank as controlling interest
6	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	105,062	Perusahaan/badan dimana Bank bertindak sebagai pengendali Bank as controlling interest
7	PT Wahanaartha Harsaka		Perusahaan/badan dimana Bank bertindak sebagai pengendali Bank as controlling interest

No	Nama Perusahaan Company name	Total Saldo/Pihak Terkait (Jutaan Rupiah) Total Balance / Related Parties (IDR Million)	Keterangan Description
8	PT Jasa Angkasa Semesta		- Salah satu Dewan Komisaris PT Jasa Angkasa Semesta adalah Presiden Direktur BII BII President Director is one of the BOC's Jasa Angkasa Semesta
9	Kim Eng Securities		- Mempunyai induk perusahaan yang sama dgn Bank Owned by the same shareholder
10	Malayan Banking Berhad	33,978	Pemegang saham akhir. Ultimate Shareholder
11	Mayban Offshore Corporate Services (Labuan) Sd. Bhd.		- Pengendali Bank Bank's controlling interest
12	Malayan Islamic Berhad		- Mempunyai induk perusahaan yang sama dgn Bank Owned by the same shareholder
13	Maybank Philippines		- Mempunyai induk perusahaan yang sama dgn Bank Owned by the same shareholder
14	Maybank GMT Asset Mngt.		- Mempunyai induk perusahaan yang sama dgn Bank Owned by the same shareholder
15	Sorak Financial Holding, Pte, Ltd.		- Pengendali Bank Bank's controlling interest
16	Sari Warna Asli Textile		- Terkait karena hubungan keluarga pengurus Bank Related with management
17	BCA Sekuritas		- Terkait karena hubungan keluarga pengurus Bank Related with management
18	PT. Wahana Artha		- Pemegang saham perusahaan/pengurus adalah Komisaris salah satu perusahaan/badan dimana Bank bertindak sebagai pengendali The company's shareholder is commissioner of company which the Bank as controlling interest
19	PT. Wahana Makmur Sejati		- Merupakan pengendali dari salah satu anak perusahaan Bank As controlling in one of Bank's Subsidiaries
20	Penyertaan Pada Perusahaan Anak - PT Bii Finance Center	32,370	Perusahaan/badan dimana Bank bertindak sebagai pengendali Bank as controlling interest
	- PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	396,979	Perusahaan/badan dimana Bank bertindak sebagai pengendali Bank as controlling interest
TOTAL		742.229	

Bank telah memiliki kebijakan internal mengenai mekanisme pemantauan penyediaan dana dengan memperhatikan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan dan Bank telah menetapkan kebijakan internal mengenai limit penyediaan dana, seperti diantaranya adalah penetapan limit internal penyediaan dana besar untuk debitur dan obligor.

The Bank has in place an internal policy on monitoring the mechanism of fund provisioning by taking into account the diversification of portfolio of fund provisioning by the Bank. The Bank has established an internal policy on limit of funds provisioning, such as internal limit of large exposures for debtors and obligors.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dengan Penyediaan Dana Besar
 Provision of Funds to Related Parties with Large Exposures

Penyediaan dana besar (Large Exposure) yang diberikan kepada 10 (sepuluh) debitur terbesar per 31 Desember 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Provision of Large Exposure to 10 (ten) largest debtor as of 31 December 2013 were as follows:

dalam Jutaan Rupiah | In million Rupiah

No.	Nama Debitur Debtor Name	Kolektibilitas Collectibility	Saldo (dalam Rp.) Outstanding (in IDR)
1	A	1	1,750,000
2	B	1	1,162,736
3	C	1	1,147,933
4	D	1	986,652
5	E	1	961,844
6	F	1	882,696
7	G	1	717,892
8	H	1	701,704
9	I	1	692,014
10	J	1	689,642
	Total		9,675,114

Audit Eksternal External Audit

Fungsi Audit Ekstern 2013 | FUNGSI AUDIT EKSTERN / EXTERNAL AUDIT FUNCTION 2013

NO	URAIAN DESCRIPTION
	<p>Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan Pemeriksaan Umum tahun 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebagai perusahaan publik, BII menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (sebelumnya Bapepam-LK). - Salah satu keputusan RUPS 2013, antara lain memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP sebagai auditor ekstern yang independen untuk memeriksa laporan keuangan BII tahun 2013. Berdasarkan kuasa tersebut, Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit menunjuk KAP Purwanto, Suherman & Surja (PSS), member of Ernst & Young (EY). Tahun 2013 merupakan penugasan tahun keempat bagi KAP Purwanto, Suherman & Surja (PSS), member of Ernst & Young (EY). - Izin usaha dari KAP Purwanto, Suherman & Surja telah mendapatkan persetujuan izin usaha dari Menteri Keuangan RI berdasarkan keputusan No.381/KM.1/2010 tertanggal 24 Mei 2010. <p>Public Accountant Firm (KAP) Conducting General Audit in 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> - As a public listed company, BII appoints Public Accountant from Public Accountant Firm (KAP) registered with Bank Indonesia and the Financial Services Authority (previously Bapepam-LK). - One of the resolutions of 2013 AMS was to grant authority to Board of Commissioners to appoint KAP as independent external auditor to audit BII's financial statements of 2013. With the authority, Board of Commissioners, following recommendations from Audit Committee, appointed KAP Purwanto, Suherman & Surja (PSS), member of Ernst & Young (EY). The year 2013 was the fourth assignment for KAP Purwanto, Suherman & Surja (PSS), member of Ernst & Young (EY). - KAP Purwanto, Suherman & Surja has obtained business license from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, pursuant to decision No.381/KM.1/2010 dated 24 May 2010.
	<p>Akuntan yang menandatangani Laporan Keuangan (LK)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Benyanto Suherman, sebagai salah satu partner dari KAP PSS, yang memperoleh Izin Akuntan Publik No. AP.0685, menanda-tangani Laporan Keuangan (LK) pada tahun 2012 dan 2013. - Drs. Hari Purwanto, sebagai salah satu partner dari KAP PSS, yang memperoleh Izin Akuntan Publik No. 98.1.0065, menanda-tangani Laporan Keuangan (LK) pada tahun 2011, 2010 dan 2009. <p>Accountants Signing the Financial Statements (LK)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Benyanto Suherman, one of the partners of KAP PSS, who obtained the License of Certified Public Accountant No. AP.0685, signed the Financial Statements (LK) of 2012 and 2013. - Drs. Hari Purwanto, one of the partners of KAP PSS, who obtained the License of Certified Public Account No. 98.1.0065, signed the financial statements (LK) of 2011, 2010, and 2009.
	<p>Biaya Pemeriksaan Umum</p> <p>Besarnya biaya pemeriksaan Umum (General Audit Fee) untuk Laporan Keuangan yang berakhir pada akhir tahun 31 Desember 2013 adalah USD285,000.</p> <p>General Audit Fee</p> <p>The general audit fee for Financial Statements for year ended on 31 December 2013 was USD285,000.</p>
	<p>Jasa – jasa lainnya</p> <p>Jasa lainnya yang diberikan KAP Purwanto, Suherman & Surja (PSS), member of Ernst & Young (EY) adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jasa reuiv untuk melakukan reuiv atas reporting package konsolidasian yang tidak diaudit untuk periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2013 dengan biaya sebesar USD85,000. Jasa yang diberikan untuk menerbitkanhubungan dengan Comfort Letter dan membantu Bank dalam rangka persiapan dokumen penawaran (prospektus) untuk Penawaran Umum Terbatas VI dengan biaya sebesar USD80,000. <p>Other Services</p> <p>Other services provided by KAP Purwanto, Suherman & Surja (PSS), member of Ernst & Young (EY) are:</p> <ol style="list-style-type: none"> Review services on unaudited reporting package consolidated for a 6-month period for the year ended on 30 June 2013 with audit fee of USD85,000. Services to issue Comfort Letter and to assist the Bank in preparing prospectus for Rights Issue VI, with service fee of USD80,000.
	<p>Independensi</p> <p>Dalam rangka untuk menjaga independensi selama pemeriksaan umum tahun 2013, maka Akuntan yang bertindak sebagai Partner-in-Charge (PIC) telah menanda-tangani "surat pernyataan independen" dengan surat No. 04092/PSS-AS/2013 tanggal 8 Juli 2013. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa KAP Purwanto, Suherman & Surja (anggota dari Ernst & Young), baik Partner maupun anggota tim yang melakukan audit atas laporan keuangan BII adalah independen sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam – LK No. Kep-86/BL/2011 tertanggal 28 Februari 2011 tentang tentang Independensi Akuntan Publik yang Memberikan Jasa di Pasar Modal.</p> <p>Independency</p> <p>To maintain independency during the process of general audit in 2013, the Accountant who serves as Partner-In-Charge (PIC) has signed "Statement of Impartiality" by letter No. 04092/PSS-AS/2013 dated 8 July 2013. The letter states that KAP Purwanto, Suherman & Surja (member of Ernst & Young), its Partners, and team members conducting the audit on BII's financial statements are independent parties, in accordance with Decision of the Chair of Bapepam-LK No. Kep-86/BL/2011 dated 28 February 2011 regarding the Independency of Public Accountants that Provide Services to the Capital Market.</p>

Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Implementation Risk Management Function

FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain : Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Manajemen Risiko, Komite Asset & Liability, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Remunerasi & Nominasi, Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Struktur organisasi senantiasa dikinikani untuk mengikuti perkembangan kebutuhan organisasi dan bisnis.

Dalam tugas pengelolaan Risiko tersebut sumber daya pada Satuan Kerja Manajemen Risiko bersama-sama dengan Satuan Kerja Kepatuhan sebagai lini kedua yang berfungsi mengawasi Satuan Kerja Bisnis pada lini pertama dan Satuan Kerja Audit Internal sebagai lini ketiga, dalam tugas pengelolaan risiko secara independen.

Untuk menanamkan tingkat kesadaran risiko yang tinggi kepada seluruh karyawan, secara berkesinambungan melakukan pelatihan dan sosialisasi ke cabang-cabang untuk meningkatkan pemahaman seluruh risiko Bank (antara lain: risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar likuiditas, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko stratejik). Sosialisasi juga dilakukan dengan metode e-learning untuk Policy Attestation sebagai salah satu cara untuk senantiasa menyegarkan kembali ingatan tentang Ketentuan dan Kebijakan yang berlaku.

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang mencakup 8 (delapan) jenis risiko Bank dan penetapan limit risiko. Sejalan dengan ketentuan yang berlaku dalam hal pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko melalui Komite Pemantau Risiko yang melakukan rapat secara periodik, serta mengevaluasi atau merekomendasikan atas transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan Peraturan Bank Indonesia.

RISK MANAGEMENT FUNCTION

The Bank has had in place an adequate organizational structure to support the implementation of robust risk management and internal control, among others: Audit Committee, Risk Oversight Committee, Risk Management Committee, Asset & Liability Committee, Information Technology Steering Committee, Remuneration & Nomination Committee, Internal Audit Unit, Compliance Unit, and Risk Management Unit. The organizational structure is updated regularly following business and organizational developments.

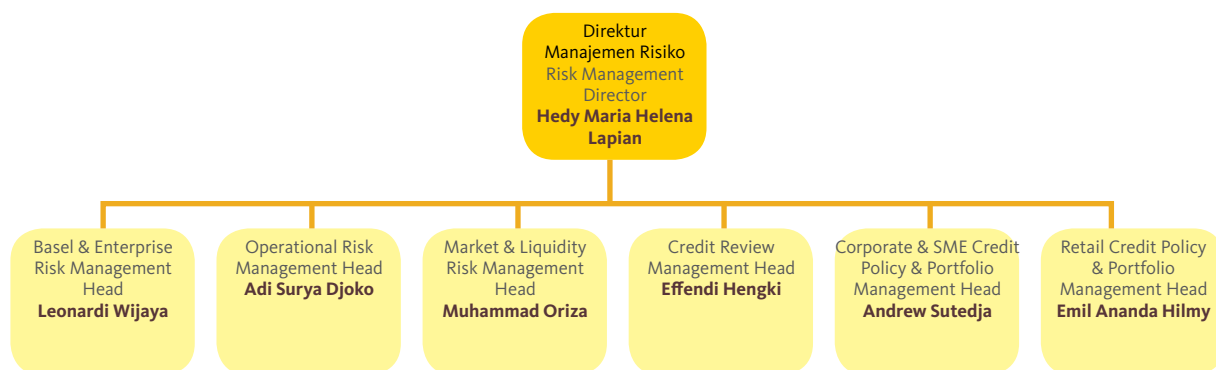
In its duties to manage Risks, the staff under Risk Management Unit and Compliance Unit serve as the second line of defense, whose function is to monitor Business Units as the first line of defense and Internal Audit Unit as the third line of defense, carried out in an independent manner.

To embed a high level of risk awareness for all employees, the Bank continually conducts training and socialization at branch offices, to enhance understanding on the Bank's full spectrum of risks (among others: credit, operational, market and liquidity, compliance, legal, reputational, and strategic risks). Socialization is also conducted through e-learning method for Policy Attestation, as one of the ways to continuously refresh knowledge of prevailing Regulations and Policies.

The Bank has established policies and procedures that cover 8 types of risk of the Bank and has determined risk limit. In accordance with the policies in terms of duty and responsibility implementation, the Board of Commissioners monitors the policies and implementation of risk management through its Risk Oversight Committee, which convenes periodically. The Committee evaluates and recommends transactions that require the approval of the Board of Directors, in accordance with the Bank's Articles of Association and Regulations of Bank Indonesia.

Berikut adalah struktur Satuan Kerja Manajemen Risiko:

The following is structure of Risk Management Unit:



Keterangan:
Struktur organisasi berdasarkan No. SE.2014.001/Presdir tanggal 5 Februari 2014 perihal Struktur Organisasi PT BII Tbk.

Note:
Organization structure based on No. SE.2014.001/Presdir dated 5 February 2014 regarding Organizational Structure of PT BII Tbk.

Pembahasan mengenai Fungsi Manajemen Risiko secara mendalam terdapat pada laporan manajemen risiko dalam bagian laporan pendukung bisnis pada buku Laporan Tahunan 2013 ini.

Detailed discussion on Risk Management Function is available in the Risk Management Report, under the supporting function section of this 2013 Annual Report.

Kode Etik Code of Conduct

KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU

Sebagai wujud komitmen untuk senantiasa melaksanakan prinsip GCG, BII selalu mengedepankan prinsip moral dan etika serta praktek bisnis yang sehat dalam melaksanakan kegiatan perbankan.

Untuk menjunjung tinggi salah satu nilai Perusahaan yaitu Integritas, Perusahaan memiliki dan menerapkan pedoman standar mengenai tata cara perilaku yaitu Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang mengatur standar dan perilaku bisnis serta tingkah laku Pribadi yang etis yang merupakan bagian dari budaya BII dalam pengelolaan tata perusahaan yang baik.

Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku dibuat sebagai pedoman dasar dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kebijakan BII ataupun Perjanjian Kerja Bersama. Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku mencakup masalah kepatutan/kepantasan berdasarkan nilai-nilai dan pertimbangan-pertimbangan moral yang menyangkut integritas, profesionalisme, hati nurani, kesadaran diri dan citra positif yang diharapkan mampu menjaga kelangsungan usaha dan nama baik BII.

Pernyataan Kode Etik Berlaku di Seluruh Level Organisasi

Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku berlaku untuk seluruh karyawan dan pengurus tanpa terkecuali, termasuk para karyawan kontrak serta para pihak yang bekerjasama dengan Bank atau para pihak yang mewakili Bank secara langsung atau tidak langsung.

Bank mengharapkan semua pihak yang mewakili Bank bertindak sesuai dengan standar integritas pribadi dan profesional yang tinggi dalam setiap segi kegiatan mereka dan mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan-kebijakan Perusahaan serta wajib untuk menolak segala bentuk kompromi baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan Perusahaan yang dapat merusak integritas tersebut.

CODE OF ETHICS AND CONDUCT

As its commitment to implementation of GCG principles, BII upholds sound moral principles and ethics as well as healthy banking business practices.

To preserve the Company's values of Integrity, the Company has and applies Code of Ethics and Conduct as the standards and guidance for business behavior and ethical Individual conduct that is part of BII's culture and Good Corporate Governance.

The Code of Ethics and Conduct is formulated as the fundamental guidance and serves as an integral part of BII's policies and Collective Labor Agreement. Code of Ethics and Conduct addresses issues of appropriateness based on moral values and considerations that are related to integrity, professionalism, conscience, self awareness, and positive self image, which will contribute to BII's business and reputation.

Statement of Code of Ethics Enactment at all Levels of the Organization

Code of Ethics and Conduct are applicable to all employees and management without exceptions, including contract employees and other parties that cooperate with the Bank, or parties who represent the Bank directly or indirectly.

The Bank expects that conduct all parties who represent the Bank is in accordance with the highest level of personal and professional integrity standards in their activities and complying with prevailing laws as well as Company policies. They shall decline any kinds of compromise for either their personal interests or the Company's interests that may impair integrity.

Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku menguraikan secara ringkas prinsip-prinsip, kebijakan-kebijakan dan peraturan yang mengatur kegiatan perusahaan yang harus ditaati oleh para karyawan dan pihak lain yang bekerja dengan BII, atau yang mewakili BII secara langsung atau secara tidak langsung atau setiap orang yang berdasarkan kedudukannya memiliki atau dapat memiliki akses terhadap Informasi Perusahaan, baik secara regular maupun tidak atau dapat diasumsikan mengetahui Informasi Perusahaan.

Kode Etik dan Pedoman Tingkah-Laku dibagikan kepada semua karyawan BII dan pihak lain yang melaksanakan pekerjaan untuk perusahaan dan pada dasarnya memberikan pedoman untuk tingkah laku profesional.

Komitmen Pribadi Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku

Penerapan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku diperkuat dengan adanya Pembaharuan Komitmen Pribadi atas Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku secara online melalui Portal BII Corporate University setiap setahun sekali.

Dalam pembaharuan komitmen tersebut diingatkan kembali hal-hal terkait kode etik dan pedoman tingkah laku dalam bentuk kuesioner yang harus dijawab.

Pengecualian pelaksanaan Komitmen Pribadi atas Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku secara online melalui Portal BII Corporate University yaitu untuk:

1. Karyawan Baru, yang wajib menyampaikannya secara tertulis dan ditandatangani.
2. Konsultan dan Pihak Lain yang berhubungan dengan BII (Bekerja untuk/mewakili), dan lain-lain.

Pemantauan atas pemenuhan pembaharuan Komitmen Pribadi atas Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku tersebut dilakukan oleh Human Capital.

Mengharapkan bisnis dan para karyawan mematuhi undang-undang, peraturan pemerintah dan ketetapan yang berlaku serta kebijakan-kebijakan intern BII

The Code of Ethics and Conduct briefly explains the principles, policies, and regulations that oversee Company activities, which must be adhered to by employees and other parties working with BII, or representing BII directly or indirectly, or any other person who, due to his/her position, might have access to Company information regularly or irregularly, or can be assumed to have knowledge of Company information.

The Code of Ethics and Conduct is distributed to all employees of BII and other parties who carry out work for the Company. In essence, the Code of Ethics and Conduct is guidance for professional conduct.

Personal Commitment to Code of Ethics and Conduct

The implementation of the Code of Ethics and Conduct is reinforced by an annual Renewal of Personal Commitment to a Code of Ethics and Conduct done online through the BII Corporate University portal.

During the commitment renewal, knowledge related to code of ethics and conduct is refreshed by answering the questionnaire provided.

The online completion for Personal Commitment and Code of Ethics and Conduct through BII Corporate University is not applicable to:

1. New employees, who need to administer the commitment in writing and signed.
2. Consultants and Other Parties relating to BII (work for/representing), and others.

Monitoring of the renewal of Personal Commitment to Code of Ethics and Conduct is performed by Human Capital.

Implementation of Code of Ethics and Internal Control Improvement

Karyawan wajib melaporkan kegiatan yang mencurigakan kepada Direktur Kepatuhan atau kuasanya Pelaksanaan Kode Etik dan Meningkatkan Pengawasan internal.

Sebagai salah satu wujud komitmen pelaksanaan GCG maka seluruh karyawan menjunjung tinggi pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan transaksi/kegiatan usaha perbankan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaannya maka BII mengeluarkan aturan internal yang berkaitan dengan pelaksanaan kode etik dan meningkatkan pengawasan internal. Peningkatan pengawasan internal dilakukan secara berkala baik melalui pengarahan maupun sosialisasi yang dilakukan oleh pimpinan unit kerja maupun cabang.

Segala keputusan ataupun tindakan harus senantiasa sesuai dengan kode etik. Selain itu seluruh karyawan agar segera melaporkan melalui mekanisme whistleblowing jika mencurigai atau kemungkinan timbulnya suatu pelanggaran terhadap suatu undang-undang, peraturan ataupun standar etika, pedoman tingkah laku atau kebijakan BII tanpa adanya persetujuan yang benar. Keadaan dimana kepentingan pribadi berbenturan dengan kepentingan bank atau nasabah (conflict of interest), harus dihindari. Tetap menjaga dan mempertahankan integritas pribadi dan profesional yang luhur serta etika termasuk kepercayaan, kejujuran, moralitas dan integritas.

Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku dapat mengakibatkan pengenaan sanksi yang berat, termasuk pemutusan hubungan kerja serta hukuman pidana dan hukuman perdata bagi pribadi yang melakukannya.

Sehubungan dengan core value BII untuk tetap menjaga dan mempertahankan integritas dan profesional serta etika, maka setiap kantor cabang perlu melakukan sosialisasi atas pelaksanaan kode etik dan meningkatkan pengawasan internal secara konsisten minimal 6 bulan sekali. Selain itu melakukan pengaturan dan pemantauan pelaksanaan cuti (block leave) dan melakukan rotasi karyawan minimal 3 tahun sekali.

Employee shall report suspicious activity to the Compliance Director or the Code of Ethics Implementation officer and to Improve Internal Control.

As part of the commitment realization to GCG implementation, all employees strongly uphold the implementation of Code of Ethics and Conduct and adhere to prudent principles in performing banking transactions/activities.

To support implementation, BII has issued internal regulations relating to the enactment of a code of ethics and improve internal control. The improvement of internal control is done gradually through guidance or socialization performed by a unit leader or branch.

All decisions and actions shall always comply with the code of ethics. Through a whistleblowing mechanism, all employees should also report immediately any suspicion or possibility of breach of the law, regulations, or standards of ethics, code of conduct, or BII's policies without proper consent. Any event of conflict between personal interests and the Bank's or customers' interests (conflict of interest) need to be avoided. Maintaining and preserving personal integrity and highest level of professionalism as well as ethics, trust, honesty, morality, and integrity are paramount.

Breach of Code of Ethics and Conduct may result in severe sanctions, including employment termination as well as criminal and civil penalties for individuals who commit the breach.

In accordance with BII core values to keep and maintain integrity, professionalism, and ethics, each branch office is required to hold socialization of code of ethics and to improve internal monitoring regularly at least every 6 months. In addition, arrangement and monitoring of leave (block leave) as well as employee rotation is done at a minimum of every 3 years.

Whistleblowing Whistleblowing

Whistleblowing merupakan salah satu sarana komunikasi yang efektif dalam mendeteksi kejadian fraud maupun yang berpotensi fraud dan penyimpangan lainnya. Melalui whistleblowing setiap karyawan didorong dan difasilitasi untuk melaporkan setiap dugaan tindakan fraud, penyimpangan atau pelanggaran yang mereka jumpai dengan itikad baik, tanpa harus khawatir bahwa tindakan melaporkan tersebut mungkin memiliki konsekuensi yang merugikan.

Pengembangan budaya dan kepedulian terhadap anti fraud pada seluruh jenjang organisasi diantaranya dilakukan melalui kebijakan whistleblowing yang merupakan salah satu elemen kunci untuk menjaga integritas serta bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan yang mendukung sistem BII untuk memerangi praktek-praktek yang dapat merusak kegiatan dan reputasi BII. Kewajiban menyampaikan informasi adanya indikasi pelanggaran (whistleblowing) diatur melalui ketentuan internal BII yang telah diperbaharui melalui No.SE.2013.004/Dir Compliance tanggal 24 Juli 2013.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian fraud dan GCG dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan (pelaporan), serta untuk menjalin kerjasama yang saling menghargai, BII mengharapkan dukungan para nasabah dan rekanan untuk dapat melaporkan kejadian-kejadian yang berhubungan dengan tindakan fraud, pelanggaran etika, kriminal, penyalahgunaan wewenang, menerima imbalan, pelanggaran ketentuan perusahaan dan hal-hal lain yang melibatkan karyawan BII dan/atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan BII.

Dengan memberikan laporan pengungkapan pelanggaran tersebut sebagai suatu informasi awal, berarti nasabah dan rekanan telah membantu BII berperan aktif dalam melaksanakan GCG dan perlindungan bagi nasabah serta rekanan.

Untuk mendukung hal tersebut maka informasi perihal Whistleblowing dapat diakses pula melalui website BII : www.bii.co.id

Whistleblowing is one of the effective communication tools to detect fraud, or potential occurrence of fraud, and other kinds of irregularities. Through a whistleblowing mechanism, employees are encouraged and facilitated to report with good faith, any suspected incidents of fraud, irregularities, or breach that they may identify, without concern that the act of reporting may bring adverse consequences.

The anti-fraud culture and awareness are instilled at all levels of the organization, among others through a whistleblowing policy that is one of the key elements to maintain integrity. It is also intended to improve transparency and to support BII's system to eliminate practices that may damage BII's activities or reputation. The obligation to provide information of suspected violations (whistleblowing) is regulated by BII's internal policy, updated through No.SE.2013.004/Dir Compliance dated 24 July 2013.

In order to increase the effectiveness of its fraud control system and GCG with emphasis on disclosure of reporting, and to build partnership based on mutual respect, BII welcomes the customers or partners to report any incidents related to fraud, breach of ethics, crime, misuse of authority, inappropriate rewards, violation of company regulations, and other incidents involving BII's employees and/or parties related to BII.

By providing such a report as preliminary information, customers and partners have therefore supported BII in taking active role in implementing GCG and providing protection for customers and partners.

With this in mind, all information regarding Whistleblowing can be accessed through BII website: www.bii.co.id

Whistleblowing

Whistleblowing

Tata Cara Pelaporan Indikasi Whistleblowing

Kondisi yang membuat karyawan yang menyaksikan atau mengetahui adanya pelanggaran untuk melaporkan dan pemenuhan terhadap kondisi tersebut dapat dilaksanakan antara lain melalui :

- Peningkatan pemahaman etika perusahaan dan membina iklim keterbukaan.
- Meningkatnya kesadaran dan pemahaman yang luas mengenai manfaat dan pentingnya program Pelaporan Pelanggaran/ Whistleblowing.
- Tersedianya saluran untuk menyampaikan pelaporan pelanggaran tidak melalui jalur manajemen yang biasa.
- Kemudahan menyampaikan laporan pelanggaran.
- Adanya jaminan kerahasiaan pelapor.

Laporan dapat disampaikan melalui 2 (dua) cara yaitu:

No	Sarana Pelaporan Reporting Channel	Media Whistle Blowing Whistle Blowing Media
1.	E-mail E-mail	whistleblowing@bankbii.com whistleblowing@bankbii.com
2.	Surat tertutup Sealed Letter	Ditujukan kepada Manajemen BII Addressed to BII management

Persyaratan Dan Rincian Laporan Indikasi Pelanggaran

Untuk membantu dalam menanggapi atau melakukan investigasi dari laporan, laporan whistleblowing harus merupakan laporan yang faktual, bukan spekulatif atau rumor dan harus memuat sebanyak mungkin informasi spesifik untuk memungkinkan penilaian yang tepat. Jika mungkin, laporan harus diserahkan menggunakan bukti-bukti pendukung yang dapat diverifikasi. Tanpa mengabaikan ketentuan di atas, laporan minimal berisi informasi berikut:

- Indikasi/fakta pelanggaran/kesalahan yang terjadi;
- Nama Karyawan/pihak lain yang diindikasikan terlibat;
- Modus/cara yang dilakukan;
- Kapan dan dimana terjadinya;
- Informasi/bukti lain yang dianggap perlu;

Whistleblowing Reporting Procedure

To ensure and encourage employees who witness or are informed of any breach, to report such violation certain conditions need to be met:

- Improved understanding of company's ethics whilst the spirit of transparency is promoted.
- Improved awareness and knowledge of the benefit and importance of Whistleblowing program.
- Availability of reporting channels outside regular management channels.
- Easy reporting steps.
- Assurance of confidentiality of the Whistleblower.

Reports can be submitted in 2 (two) ways:

Requirements and Details of Report of Suspected Breaches

To help in responding or follow up a report with an investigation, a whistleblowing report must be fact-based, and not based on speculation or rumor. It also needs to contain as much specific information as possible to enable appropriate judgement. If possible, the report also needs to attach supporting evidence to be verified. Aside from the above, the report should at least contain:

- Indication/fact of breach/violation;
- Name of employees/other parties suspected to be involved;
- Modus Operandi;
- Time and place of incident;
- Information/other evidence deemed necessary;

Untuk menjaga integritas laporan dan memastikan tindak lanjut serta penanganan yang sesuai, maka perlu dipertimbangkan bahwa laporan yang dibuat adalah laporan yang dapat dipertanggungjawabkan.

To maintain the integrity of the report and to ensure appropriate follow up and handling process, it should also be considered that the report needs to be accountable.

Prosedur Penanganan Laporan Whistleblowing

Setiap laporan whistleblowing yang diterima akan diadministrasikan, dikelola dan dievaluasi oleh Tim Whistleblowing untuk mendapatkan informasi awal dan menentukan tindak lanjut yang diperlukan. Dalam menentukan tindak lanjut, Tim Whistleblowing akan berkoordinasi dengan SKAI, dan apabila diperlukan, Tim Whistleblowing juga bisa berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

Dalam hal tidak terdapat cukup informasi dari laporan yang diterima, maka Tim Whistleblowing akan melakukan hal-hal sbb:

- a. Dalam hal pelapor bersedia dihubungi dan/atau memberikan informasi berupa nomor kontak atau email address yang dapat dihubungi, maka Tim Whistleblowing akan menghubungi untuk meminta tambahan informasi lebih detail/lengkap.
- b. Dalam hal pelapor tidak memberikan respon atau tidak bersedia untuk dihubungi dan/atau memberikan tambahan informasi dari pelaporannya, maka Tim Whistleblowing akan melakukan koordinasi awal dengan unit kerja SKAI untuk mendapatkan masukan apakah pelaporan yang diterima dapat ditindaklanjuti. Dalam hal pelaporan tidak dapat ditindaklanjuti, maka Tim Whistleblowing akan mendokumentasikan alasan dan pertimbangan suatu laporan tidak dapat ditindaklanjuti.

Tugas dan wewenang dari Tim Whistleblowing:

- a. Melakukan registrasi setiap laporan whistleblowing yang diterima dalam daftar *whistleblowing tracking*.
- b. Melakukan review, mengkompilasi, serta membuat ringkasan dari setiap

Whistleblowing Report Follow-Up Procedure

All whistleblowing reports will be archived, managed, and evaluated by a Whistleblowing Team in order to discern the initial information and deliberate the next-step. In deliberating follow-up action, Whistleblowing Team coordinates with IAU and, if necessary, also with the related working unit.

If a report contains insufficient information, a Whistleblowing Team shall do the following:

- a. Provided that the whistleblower is willing to be contacted and/or provide contact information or email address, Whistleblowing Team will initiate communication with the complainant to request additional details or information.
- b. If the complainant is unresponsive or is not willing to be contacted and/or to provide additional information, Whistleblowing Team shall commence initial coordination with IAU to gain feedback as to whether the report is valid, for a follow-up. In the event that the report is deemed insufficient for a follow-up, Whistleblowing Team will record the reasons and considerations of such decision.

Duties and authorities of Whistleblowing Team:

- a. Register all whistleblowing reports received into whistleblowing tracking list.
- b. Review, compile, formulate summary of each whistleblowing report, including assessing

Whistleblowing

Whistleblowing

laporan whistleblowing yang diterima termasuk melihat kelengkapan bukti-bukti pendukung yang diperlukan sebagai dasar rekomendasi untuk dilakukannya proses investigasi lebih lanjut oleh unit kerja SKAI, dan apabila diperlukan maka unit kerja lain yang relevan dapat diikutsertakan sebagai undangan/*invitee*.

- c. Menindaklanjuti hasil investigasi (LHA SKAI) kepada *Personnel Committee*. *Personnel Committee* merupakan komite yang dibentuk guna melakukan review dan memberikan rekomendasi yang harus dijalankan oleh unit kerja Human Capital terkait dengan pemberian sanksi yang berhubungan dengan pelanggaran/kesalahan sebagaimana diatur dalam ketentuan internal perihal Pemberian Sanksi dan/atau *Fraud* kepada karyawan pada semua tingkatan dan/atau jabatan.
- d. Menyampaikan laporan penanganan laporan *whistleblowing* secara periodik kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.
- e. Melakukan pengelolaan dan evaluasi laporan *whistleblowing* secara berkala.

the completeness of supporting evidence required as a basis to recommend follow-up investigation to IAU. If an investigation is deemed necessary, other relevant working units may be involved as invitees.

- c. Follow up IAU investigation results, conveying them to Personnel Committee. Personnel Committee is established to review and provide recommendations to Human Capital unit on sanctions relating to breach/mistakes as regulated in the internal policy regarding Imposition of Sanctions and/or Fraud to employees of all levels and/or positions.
- d. Periodically administer a whistleblowing handling report to President Director and Board of Commissioners.
- e. Periodically manage and evaluate whistleblowing report.

Perlindungan Kepada Pelapor

BII berkomitmen untuk melindungi pelapor pelanggaran yang beritikad baik dan perusahaan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait dalam penyelenggaraan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing). Maksud dari adanya perlindungan pelapor adalah untuk mendorong terjadinya pelaporan pelanggaran dan menjamin keamanan si pelapor maupun keluarganya.

Semua laporan pelanggaran akan dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh BII. Bila pelapor menyertakan identitasnya secara jelas, maka pelapor juga dijamin haknya untuk memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas laporannya. Hal ini juga merupakan komitmen BII dalam melindungi pelapor.

Whistleblower Protection

BII is committed to protect whistleblowers who make the report in good faith and the company shall comply with prevailing laws and regulations related to Whistleblowing. The protection of whistleblowers is intended to encourage others to report incidences of breach and be assured of his/her personal and family safety.

The confidentiality and security of all reports are guaranteed by BII. If the whistleblower states his/her identity clearly, the whistleblower would also have his/her rights guaranteed relating to information regarding the follow up of the report. This is also part of BII's commitment to protect whistleblowers.

Sistem pelaporan pelanggaran memberikan fasilitas dan perlindungan (Whistleblower protection) sebagai berikut:

- a. Fasilitas saluran pelaporan (e-mail dan surat tertutup).
- b. Perlindungan kerahasiaan identitas pelapor. Perlindungan ini diberikan bila pelapor memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor. Walaupun diperbolehkan, namun penyampaian laporan secara anonim, yaitu tanpa identitas tidak direkomendasikan. Pelaporan secara anonim menyulitkan dilakukannya komunikasi untuk tindak lanjut atas pelaporan
- c. Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau organisasi. Perlindungan dari tekanan, dari penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, gugatan hukum, harta benda, hingga tindakan fisik. Perlindungan ini tidak hanya untuk pelapor tetapi juga diperluas hingga ke anggota keluarga pelapor.
- d. Informasi pelaksanaan tindak lanjut, berupa kapan dan bagaimana serta kepada unit kerja/institusi mana tindak lanjut diserahkan. Informasi ini disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang lengkap identitasnya

Perlindungan diatas tidak diberikan kepada pelapor yang terbukti melakukan pelaporan palsu dan/fitnah. Pelapor yang melakukan laporan palsu dan/atau fitnah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, misalnya KUHP pasal 310 dan 311 atau peraturan internal organisasi (Perjanjian Kerja Bersama) dan Kode Etik BII.

The reporting system provides the following forms of whistleblower protection:

- a. Facilities of reporting channel (email and sealed letter)
- b. Confidentiality assurance on the identity of whistleblower. The protection is rendered if the whistleblower provides his/her identity and other information that may be used to communicate with the whistleblower. Anonymous whistleblower, although allowed, is not recommended, as anonymous reporting would hamper efforts to communicate for the purpose of reporting follow-up.
- c. Protection from detrimental treatment of the reported person or from the organization. The protection covers protection from pressure, hindered promotion, termination of employment, legal actions, property damage, to physical actions. Protection is not only provided to the whistleblower, but also to the whistleblower's family members.
- d. Information regarding follow-up steps regarding when, how, and which unit/institution that undertakes the follow-up action. The information is provided in confidential manner to whistleblower who discloses his/her full identity.

Such protection is not applicable to whistleblowers who are later found to be providing false report and/or defamation. Whistleblowers who submit false report and/or defamation can be prosecuted with sanctions according to the prevailing laws, such as Article 310 and 311 of the Criminal Code, or organization's internal regulations (Collective Labour Agreement), and BII's Code of Ethics.

Sanksi Bagi Pihak Yang Terlibat

Berdasarkan hasil investigasi, para pihak/pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran dan SOP Pemberian Sanksi serta PKB yang teknis dan mekanismenya mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi yang diberikan antara lain dapat berupa salah satu atau gabungan dari sanksi dibawah ini:

- a. Teguran/Peringatan lisan.
- b. Pemindahan jabatan.
- c. Penundaan Kenaikan jabatan.
- d. Penundaan Kenaikan upah/gaji.
- e. Pencabutan fasilitas-fasilitas yang melekat pada Jabatan yang bersangkutan.
- f. Penurunan atau Pelepasan Jabatan.
- g. Surat Peringatan sampai dengan Pemutusan Hubungan Kerja.
- h. Ganti Rugi.
- i. Sanksi pidana, bila terbukti pelanggaran dilakukan ada unsur pidananya.
- j. Sanksi lainnya sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran dan SOP Pemberian Sanksi serta PKB dengan teknis dan mekanismenya yang mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku/Pihak yang terlibat disini adalah Karyawan yang melakukan tindakan pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung termasuk didalamnya adalah karyawan yang membantu terjadinya pelanggaran dan/atau mengetahui adanya kejadian tersebut tetapi membiarkan kejadian tersebut tetap berlangsung dan tidak melaporkannya.

Pelaksanaan dan penanganan pemberian sanksi yang berhubungan dengan pelanggaran/kesalahan sebagaimana diatur dalam SOP Pemberian Sanksi akan dilakukan melalui *Personnel Committee*.

Sanction Imposed on Involved Parties

Based on investigation findings, parties/persons who have been proven to commit fraud will be imposed with sanctions as regulated in the Circular Letter and SOP of Imposition of Sanction as well as the CLA, which mechanism refers to prevailing laws and regulations. The sanctions that may be imposed can be one or multiple forms of the following:

- a. Verbal warning.
- b. Position transfer.
- c. Delayed promotion.
- d. Delayed salary/wage raise.
- e. Termination of facilities associated with the person's Position.
- f. Demotion or Release of Position.
- g. Warning Letter until Termination of Employment.
- h. Compensation.
- i. Criminal penalty, if the breach is proven to contain elements of crime.
- j. Other sanctions as regulated in Circular Letter and SOP of Imposition of Sanction as well as the CLA, which mechanism refers to prevailing laws and regulations.

Offenders/Involved Parties refer to Employees who commit a breach, directly or indirectly, including employees who are involved as accomplices in cases of fraudulence and/or have the knowledge of the occurrence of fraud yet choose to remain silent and permit such occurrences, without any attempt at reporting.

The execution and imposition of sanctions relating to fraud/violations as regulated in the SOP on Imposition of Sanctions is done through *Personnel Committee*.

Kerahasiaan dan Anonim

Kebijakan ini mendorong Karyawan untuk mencantumkan namanya dalam setiap laporan *whistleblowing* yang diserahkan. Apabila Karyawan pelapor menghendaki dan/atau tidak memungkinkan, laporan *whistleblowing* dapat dilaporkan secara anonim (tanpa nama).

Laporan yang disampaikan secara anonim hanya akan diproses apabila didukung oleh:

- Keseriusan insiden yang dilaporkan;
- Bukti-bukti yang mendukung.

Semua insiden yang dilaporkan akan diperlakukan dengan rahasia dan setiap usaha akan dilakukan, tunduk pada batasan-batasan hukum, untuk tidak mengungkapkan identitas Karyawan.

Dalam hal suatu kasus tidak dapat dilanjutkan atau tidak dapat dilakukan tindakan investigasi Tim *Whistleblowing* wajib memberitahukan Karyawan pelapor tersebut sebelum mengungkapkan jika Karyawan pelapor memberikan identitas dirinya.

Langkah-Langkah Pembelaan Diri

Pihak terlapor akan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dengan memperhatikan tingkat pelanggaran yang dilaporkan sesuai dengan pemeriksaan investigasi yang telah dilakukan.

Laporan Whistleblowing 2013

Perihal / Type of Report	Media Penyampaian Reporting Channels		Keterangan/Status Explanation/status	
	Surat Tertutup Sealed Letter	Email	Media Lainnya Other reporting channels	Keterangan/Status Explanation/status
Jenis Pengaduan (Whistleblowing) :				
Gratifikasi / Gratification	-	-	-	
Pelanggaran Hukum & Regulasi Breach of Law and Regulations	2	1	-	closed
Fraud	-	-	-	-
Lainnya Others	-	1	-	Masih dalam proses pengumpulan data & informasi
Jumlah Pengaduan (Whistleblowing)	2	2	-	

Confidentiality and Anonymity

This policy encourages Employees to disclose his/her name in each of the *whistleblowing* reports that is submitted. If Employees wish and/or if situation warrants, the *whistleblowing* report may be made anonymously.

Anonymous reports will only be processed under the following criteria:

- The reported incident is material;
- Availability of supporting evidence.

All reported incidents will be treated in a strictly confidential manner and all attempts will be carried out, within the legal corridor, to protect the identity of the Employee.

In cases where investigations cannot be carried forward or cannot be carried out entirely, the *Whistleblowing* Team must first inform the situation to the Employee who lodges the report, provided that the Employee discloses his/her identity.

Contestation

The reported party shall be given the opportunity to contest the report in accordance with the degree of reported violation and in line with the results of investigation.

Whistleblowing Report 2013

Perkara Hukum Litigation

Berkaitan dengan bisnis, BII terlibat dalam sejumlah sengketa atau gugatan hukum perdata atau pidana. Semua tindakan hukum yang melibatkan BII pada tahun 2013 telah dibawa ke pengadilan.

BII melakukan analisis risiko hukum berdasarkan sejumlah parameter. Hasil evaluasi risiko hukum disusun secara bulanan sebagai bagian dari upaya manajemen risiko hukum dan manajemen risiko secara keseluruhan.

Relating to its business, BII is involved in a number of disputes or civil or criminal legal suits. All legal actions involving BII in 2013 were brought to court.

BII carries out analysis of its legal risk based on a number of parameters. Result of the legal risk evaluation is compiled on a monthly basis as part of the legal risk management efforts and overall risk management.

A. BII SEBAGAI TERGUGAT/TERLAPOR

Permasalahan Hukum / Lawsuit	Jumlah / Total Cases	
	Perdata / Civil	Pidana / Criminal
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) / Resolved (have binding legal resolution)	27	0
Dalam proses penyelesaian / In the process of settlement	60	1
Total	87	1

Description | Keterangan:

- * for Civil Cases | untuk Perkara Perdata:
 - 9 new cases until December 2013 | 9 perkara baru sampai Desember 2013.
 - 78 cases have not been settled in 2012 | 78 perkara belum selesai di tahun 2012.
- * for Criminal | untuk Perkara Pidana:
 - no new case until December 2013 | tidak ada perkara baru sampai Desember 2013.
 - 1 cases have not been settled in 2012 | 1 perkara belum selesai di tahun 2012.

A. BII AS DEFENDANT

B. BII SEBAGAI PENGGUGAT/PEMOHON/ PELAPOR

No	Permasalahan Hukum / Lawsuit	Jumlah / Total Cases	
		Perdata / Civil	Pidana / Criminal
1.	Perkara berkaitan dengan pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Cases related to mortgage loans		
	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) Resolved (have binding legal resolution)	14	-
	Dalam proses penyelesaian / In the process of settlement	6	-
	Total	20	-
2.	Perkara berkaitan dengan pemberian kredit lainnya / Cases related to other loans		
	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) / Resolved (have binding legal resolution)	22	1
	Dalam proses penyelesaian / In the process of settlement	65	1
	Total	87	2
3.	Perkara Kepailitan / Insolvency		
	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) / Resolved (have binding legal resolution)	6	-
	Dalam proses penyelesaian / In the process of settlement	1	-
	Total	7	-
4.	Perkara lainnya / Other Cases		
	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) / Resolved (have binding legal resolution)	-	1
	Dalam proses penyelesaian / In the process of settlement	-	8
	Total	-	9

B. BII AS PLAINTIFF

Perkara-perkara Penting Yang Dihadapi BII Perkara Penting yang Melibatkan BII

Selama tahun 2013, perkara-perkara penting yang melibatkan BII mencakup perkara oposisi terhadap eksekusi yang dilakukan oleh BII sebagai kreditur. Dalam setiap perkara di mana BII dinyatakan sebagai pihak yang kalah oleh Mahkamah, keputusan tersebut tidak memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja keuangan dan kelangsungan usaha BII.

Database yang berisi semua perkara yang melibatkan Perusahaan dimonitor dan dievaluasi oleh Unit Kerja Litigasi. Satuan Kerja Litigasi adalah direktorat di bawah struktur organisasi Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.

Perkara-perkara Penting yang sedang dihadapi oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang Menjabat

Pada 2013, tidak ada anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang terlibat dalam kasus-kasus perdata dan/atau pidana.

Perkara-perkara Penting Yang Dihadapi Anak Perusahaan BII

Pada tahun 2013, tidak terdapat perkara-perkara penting/material yang dapat memberikan dampak terhadap kinerja BII yang melibatkan PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) atau PT BII Finance Center.

Significant Cases Involving BII

During 2013, the legal cases involving BII were mostly cases of opposition against execution performed by BII as a preferred creditor. In any cases where BII was declared as the losing party by the Court, such decisions had no negative and material impact on BII's finances or business continuity.

The database that contains all the cases involving the Company is monitored and evaluated by Litigation Working Unit. Litigation Working Unit is a directorate under the Director's organizational structure that oversees compliance function.

Significant Cases Involving Members of the Board of Commissioners and Directors Currently in Office

In 2013, no members of the Board of Commissioners and Directors were involved in civil and/or criminal cases.

Significant Cases Involving the Subsidiaries of BII

In 2013, there were no significant/material cases and/or cases that could impact BII's performance that involved PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) or PT BII Finance Center.

Kebijakan Tata Kelola Corporate Governance Policy

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

Kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan dilakukan sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan menurut ketentuan yang berlaku dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank telah menerapkan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Bank kepada stakeholders, termasuk mempublikasikan laporan keuangan Bank dalam surat kabar berbahasa Indonesia serta melaporkan kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan stakeholders sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan non keuangan telah dilakukan sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan menurut ketentuan yang berlaku dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank juga mengirimkan laporan keuangan setiap bulan untuk dipublikasikan dalam website Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan publikasi triwulanan dan Laporan Keuangan Konsolidasian telah disampaikan juga kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Di informasikan secara transparan produk-produk Bank telah ditransparasikan sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Bank mentransparasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.

TRANSPARENCY OF BANK'S FINANCIAL AND NON-FINANCIAL CONDITIONS

Policies and procedures regarding the process for implementing the transparency of financial and non-financial conditions are conducted in accordance with the procedures, types and scope as stated in the prevailing provisions of Bank Indonesia, Financial Services Authority and other prevailing legislation.

The bank has implemented transparency of the Bank's financial and non-financial conditions to stakeholders, including publicizing the Bank's financial statement in Indonesian-language newspapers as well as reporting to Bank Indonesia, Financial Services Authority and stakeholders, in accordance with the provisions in force.

The arrangement and presentation of financial and non-financial statements have been implemented in accordance with the procedure, type and scope as stated in prevailing provisions of Bank Indonesia, Financial Services Authority and prevailing legislation.

The bank also sends a monthly report to be publicized on the Bank Indonesia and Financial Services Authority website. Publications of quarterly financial statements and Consolidated Financial Statements have also been submitted to Bank Indonesia, Financial Services Authority, Indonesia Stock Exchange, and Indonesian Capital Market and OJK.

In terms of product information, it has been made transparent according to the provisions of Bank Indonesia on Transparency of Bank Product Information and Use of Customer Personal Data.

The bank has made the procedures of the customer's complaints and dispute settlement in a transparent manner, in accordance with the provisions of Bank Indonesia on Customer Complaints and Bank Mediation.

Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan Tahunan Bank disampaikan ke pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia, antara lain kepada Bank Indonesia (OJK), YLKI, Lembaga Pemeringkat di Indonesia, Asosiasi Bank-Bank di Indonesia, LPPI, 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan serta 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan.

PENGADUAN NASABAH

Dalam rangka meningkatkan tata kelola perusahaan, Bank melakukan Monitoring Complaint nasabah melalui media massa dan media online ataupun media lainnya, sehingga dapat ditindaklanjuti setiap keluhan nasabah yang disampaikan melalui media apapun. Transparansi tata cara pengaduan nasabah disampaikan dalam setiap penanganan dari keluhan nasabah yang diterima terutama terkait keluhan financial.

Bank telah mentransparasikan tata cara pengaduan nasabah kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah. Transparansi tata cara pengaduan nasabah disampaikan dalam setiap penanganan dari keluhan nasabah yang diterima. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia, penyelesaian pengaduan nasabah merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan nasabah dalam rangka menjamin hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan Bank. Jika pengaduan nasabah tidak segera ditindaklanjuti, akan berpotensi meningkatkan risiko reputasi bagi Bank dan dalam jangka panjang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Bank juga telah menyampaikan Laporan Penanganan dan penyelesaian pengaduan sesuai dengan format yang ditetapkan Bank Indonesia, yang disampaikan secara triwulan kepada Bank Indonesia.

The bank has prepared a GCG Implementation Report with content and coverage at least meeting prevailing provisions.

The Bank's Annual Report is submitted to the parties as set in the provisions of Bank Indonesia, which include to Bank Indonesia (OJK), YLKI, Ratings Agency of Indonesia, the Association of Banks in Indonesia, LPPI, 2 (two) Research Institutes of Economics and Finance and 2 (two) Economics and Finance Magazines.

CUSTOMERS COMPLAINT

In order to improve corporate governance, the Bank conducts customer monitoring complaints through the mass media, online media, or other media, so the Bank may follow up every complaint made through any medium. Transparency of procedures for customer complaints has been submitted in all handling of customer complaints received, particularly related to financial complaints.

The bank has carried out the procedures of a customer complaint to the customer in a transparent manner, according to the provisions of Bank Indonesia on Customer Complaints. Transparency of procedures for customer complaints is submitted in each handling of customer complaints received. As regulated by the provisions of Bank Indonesia, the settlement of customer complaints is one of the forms of customer protection in order to guarantee the rights of clients in their dealings with the Bank. If the customer complaints are not immediately addressed, it will potentially increase the Bank's reputational risk and in the long run may reduce public confidence in the banking institution.

The bank has also submitted a Handling Report and complaint settlement, in accordance with the format set by Bank Indonesia, submitted quarterly to Bank Indonesia.

Kebijakan Tata Kelola

Corporate Governance Policy

Selama 2013, Laporan Pengaduan Nasabah yang dikirimkan ke Bank Indonesia melalui LKPBU sebagai berikut :

Periode Pelaporan 2013	Dilaporkan	Jumlah Pengaduan Nasabah
Q1 Jan – Mar	April 2013	2731
Q2 Apr – Jun	Juli 2013	2365
Q3 Jul - Sep	Oktober 2013	2201
Q4 Okt – Des	Januari 2013	1943

MEDIASI PERBANKAN

Mediasi perbankan dilakukan dalam hal apabila terjadi ketidaksepakatan dalam proses penyelesaian pengaduan nasabah. Transparansi atas proses mediasi Perbankan disampaikan secara langsung kepada nasabah apabila terjadi ketidaksepakatan dalam proses penyelesaian pengaduan nasabah dengan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia mengenai Mediasi dan diatur juga secara internal melalui SOP Penanganan Keluhan Nasabah dan SOP Mediasi Perbankan.

Bank telah melakukan sosialisasi mengenai prosedur Mediasi Perbankan melalui flyers yang didistribusikan ke seluruh cabang BII untuk dibagikan kepada Nasabah.

Selama 2013 BII tidak ada melakukan Mediasi Perbankan dalam penanganan keluhan nasabah.

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Bank telah memiliki kebijakan internal mengenai penanganan benturan kepentingan, baik yang diatur dalam anggaran dasar, ketentuan kode etik dan pedoman tingkah laku yang telah diedarkan dan wajib dipatuhi oleh setiap pengurus dan pegawai bank dimana setiap pengurus dan seluruh karyawan tanpa terkecuali telah memberikan komitmen pribadi atas kode etik dan pedoman tingkah laku BII yang diperbaharui setahun sekali.

Anggaran Dasar mengatur mengenai kewenangan mewakili perusahaan dilaksanakan oleh minimal 2 direktur. Anggaran Dasar juga mengatur

During 2013, the Customer Complaint Report submitted to Bank Indonesia through LKPBU was as follows:

BANKING MEDIATION

Banking mediation is conducted in the event of any disagreement in the process of customer complaint settlement. Transparency of the process of Banking Mediation is made immediately to the customer, should disagreement occur in the process of customer complaint settlement, by referring to the provisions of Bank Indonesia on Mediation, and governed internally through the SOP of Customer Complaint Settlement and SOP of Banking Mediation.

Bank has socialized the Mediation Banking procedures through flyers distributed to all BII branches to be provided to Customers.

During 2013 BII did not conduct any Banking Mediation in Handling of Customer Complaints.

CONFLICT OF INTEREST

The Bank has an internal policy concerning the management of conflicts of interest, regulated in the Articles of Association, the provisions of the code of ethics and code of conduct that has been circulated, and must be obeyed by each officer and employee of the bank. All employees of the bank, without exception, have confirmed their personal commitment to BII code of ethics and code of conduct, and these are annually updated.

The Articles of Association govern the authority to represent the company with the minimum of 2 directors. The Articles of Association also

bahwa dalam hal terdapat anggota Direksi/Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tertentu yang sedang diusulkan maka anggota Direksi/Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak berhak memimpin atau ikut dalam pengambilan suara/keputusan dalam rapat-rapat yang diadakan untuk itu, seperti RUPS, Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris.

Selain itu dalam mengatasi penanganan benturan kepentingan terkait pengeluaran biaya maka Bank telah mengaturnya dalam ketentuan internal perihal kebijakan persetujuan pengeluaran biaya.

Dalam hal penanganan benturan kepentingan terkait limit transaksi maka Bank telah memiliki ketentuan internal yang mengatur mengenai limit transaksi

Dalam pelaksanaan operasional dan pemberian persetujuan kredit Bank menerapkan adanya prinsip adanya dual control.

Selama 2013, tidak terdapat pengungkapan transaksi benturan kepentingan.

Bank juga telah melakukan revisi ketentuan maupun penerbitan ketentuan baru terkait pengelolaan potensi benturan kepentingan (conflict of interest) antara lain:

- Penanganan transaksi dengan pihak terafiliasi sejalan dengan ketentuan Bapepam dan Bank Indonesia.
- Penunjukan pihak ketiga (vendor, kantor hukum, notaris).
- Persetujuan pengeluaran biaya.
- Ketentuan pemberian hadiah & hiburan (Gift & entertainment policy)
- Whistleblowing

Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan wajib memenuhi kebijakan internal dalam rangka prinsip kehati-hatian.

TRANSAKSI AFILIASI

Transaksi Afiliasi adalah transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari Perusahaan atau Afiliasi dari

governs that in the event of a conflict of interest that involves the Board of Directors/Board of Commissioners in a particular transaction that is being proposed, the members of the relevant Board of Directors/Board of Commissioners are not entitled to lead or participate in the voting/decision in the meeting held to deal with it, such as GMS, Board of Directors Meeting, or a Board of Commissioners meeting.

In addition, the Bank has included the matter pertaining to management of conflicts of interest relating to the expenditures in the internal provision concerning the approval of expenditures.

In terms of conflict of interest management relating to the handling of transaction limits, the Bank has internal regulations governing the transaction limit.

In the operational implementation and granting of credit approval, the Bank applies the principle of dual control.

During 2013, there was no disclosure of conflict of interest transactions.

The Bank has also revised the provisions or issuance of new provisions relating to the management of conflict of interest, among others:

- Transaction handling with affiliated parties in line with the provisions of Bank Indonesia and.
- Third party designation (vendor, legal office, notary).
- Expenditure approval.
- Gift & entertainment policy
- Whistle-blowing

Board of Commissioners, Board of Directors and employees are obliged to fulfill the internal policy concerning the prudence principle.

AFFILIATED TRANSACTIONS

Affiliated Transaction refers to transactions performed by the Company or the Company Controlled by the Affiliates of the Company or

Kebijakan Tata Kelola

Corporate Governance Policy

anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan, hal tersebut sesuai dengan Peraturan OJK (d/h Bapepam-LK) No. IX.E.1., lampiran Keputusan Ketua (d/h) Bapepam-LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Dalam rangka memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan tersebut serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Bank telah menerbitkan prosedur internal yang mengatur atas transaksi dengan pihak terafiliasi.

Rincian mengenai transaksi dengan pihak terafiliasi selama 2013, dapat dilihat dalam Laporan Tahunan ini sesuai dengan Laporan Keuangan Perusahaan.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Kegiatan Sosial

Pemberian dana untuk kegiatan sosial merupakan salah satu bentuk penerapan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Perusahaan menjalankan CSR melalui program yang dinamakan "BII Berbagi". Sejalan dengan misi Perusahaan, yakni humanizing financial services, khususnya untuk selalu berada di tengah masyarakat, Perusahaan hadir di tengah masyarakat, baik melalui produk dan layanan perbankan maupun melalui program CSR yang dilaksanakan Perusahaan, dimana program CSR Perusahaan fokus pada empat pilar, yaitu pendidikan, kegiatan mendukung hidup sehat, pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Perusahaan percaya bahwa kegiatan sosial memberi dampak positif kepada khalayak yang lebih luas untuk jangka panjang.

Informasi kegiatan sosial akan dilaporkan dalam bagian khusus Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Kegiatan Politik

Bank memegang teguh kode etik dan pedoman tingkah laku dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kebijakan intern Perusahaan melarang keterlibatan karyawan maupun Perusahaan dalam kegiatan politik, termasuk memberikan dana untuk kepentingan politik.

Affiliates of the Board of Directors members, the Board of Commissioners, or the Company's main shareholder, in line with the Regulation of OJK (d/h Bapepam-LK) No. IX.E.1. Appendix Chairman Decision (d/h) Bapepam-LK No.Kep-412/BL/2009 on 25 November 2009 on Affiliated Transactions and Conflict of Interest on Particular Transactions.

In order to ensure the compliance of the Bank with the provisions as well as with prevailing laws and regulations, the Bank has issued internal procedures regulating transactions with affiliated parties.

Details about transactions with affiliated parties during 2013 can be seen in this Annual Report, in accordance with the Company's Financial Statements.

FUNDING FOR SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITIES

Social Activity

Funding for social activities is part of the Bank's Corporate Social Responsibility (CSR) implementation. The Bank conducts its CSR through an umbrella program known as "BII Berbagi." In line with Company's mission of humanizing financial services, especially its dedication to always be in the heart of the communities, the Company extends its presence through products and services as well as CSR programs, which focus on four pillars of education, health, community empowerment, and environmental preservation. The Company believes that social activities will provide a positive impact on the wider communities over the long term.

Information of social activities is reported in a dedicated section for Corporate Social Responsibility in this Annual Report.

Political Activities

The Bank strongly adheres to its code of ethics and conduct in performing its business activities. The Company's internal policies prohibit employees and the Company from taking part in political activities, including providing funding for political interests.

Selama 2013 Bank tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik.

During 2013, the Bank did not provide any funds for political activities.

INTERNAL FRAUD

Yang dimaksud dengan Internal fraud adalah tindakan penyimpangan/kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap (honorer dan outsourcing) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank. Untuk keperluan presentasi laporan tahunan, informasi yang disampaikan hanya internal fraud yang berdampak finansial sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) atau lebih.

Dengan mengacu pada core values Bank yaitu "Integrity" Dewan Komisaris dan Direksi menerapkan prinsip *zero tolerance to fraud*. Berbagai penyempurnaan dilakukan dalam mendukung penegakan prinsip tersebut antara lain tersedianya internal prosedur yang memadai, memastikan terdapat dual control di setiap kegiatan perbankan, media whistleblowing, review kejadian internal fraud serta terdapatnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

INTERNAL FRAUD

Internal fraud refers to any breach/fraud committed by members of the Board of Commissioners, Board of Directors, permanent and temporary staff (honorary and outsourced), relating to the Bank's operational activities and work processes. For the purpose of annual report presentation, internal fraud presented in the report are only limited to fraud with financial impact amounting to Rp100,000,000 (one hundred million Rupiah), or above.

Founded upon the Bank's core value of "Integrity", the Board of Commissioners and Board of Directors apply zero tolerance to fraud. Enhancement efforts are carried out continuously to support the enactment of the principle, among others by providing adequate internal procedures, ensuring the presence of dual control in all banking activities, whistleblowing media, review of internal fraud incidents, and legally binding court decisions.

Penyimpangan Internal Internal Fraud	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh / Total Cases by								
	Pengurus Management			Pegawai Tetap Permanent Staff			Pegawai Tidak Tetap Non Permanent Staff		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Jumlah Penyimpangan Internal Fraud Total Internal Fraud Incidents	-	-	-	2	1	-	1	-	-
• Telah diselesaikan / Resolved	-	-	-	0	1	-	1	-	-
• Dalam proses penyelesaian di internal bank / In the process of the Bank's internal settlement	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Belum diupayakan penyelesaiannya Pending process	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum / Followed up through legal action	-	-	-	2	-	-	-	-	-

Kebijakan Tata Kelola

Corporate Governance Policy

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

HIGHEST AND LOWEST SALARY RATIO

Salary is the employee's right, received and stated in the form of money as the reward from the company or employer to the employee which has been stipulated and paid according to working agreements, deals, or regulations, including benefits for the employee and its family for work and/or service provided by them.

The highest and lowest salary ratio, in the following comparison scale:

No	Jenis Rasio Types of Ratios	Besarnya Rasio / Total Ratio		
		2013	2012	2011
a.	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah The ratio of the highest salary to lowest	70,17 x	110,6 x	112 x
b.	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah The ratio of the highest Director salary to lowest	3,02 x	1,7 x	2,1 x
c.	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah The ratio of the highest Commissioner salary to lowest	1,28 x	1,3 x	1,3 x
d.	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi The ratio of the highest Director salary to the highest top officials	3,24 x	1,7 x	1,7 x

PERINCIAN REMUNERASI KOMITE-KOMITE

Dalam hal ini tidak termasuk anggota Komite yang merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris.

COMMITTEE REMUNERATION-DETAILS

Does not include Committee members holding a concurrent position as a member of the Board of Commissioners.

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Types of Remuneration and Other Facilities	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun **) / Total Received in 1 Year **)					
		2013		2012		2011	
		Jumlah Orang Total Person	Jutaan Rp Million Rp	Jumlah Orang Total Person	Jutaan Rp Million Rp	Jumlah Orang Total Person	Jutaan Rp Million Rp
1.	Honorarium		1,182		1,011		1,223
2.	Tantiem	3	196	3	218	4	364
3.	Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Benefits and Other Facilities		110		-		-
4.	Total	3	1,488	3	1,229	4	1,587

BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI BANK

Buy back shares atau buy back obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selama 2013, BII tidak melakukan transaksi Buy back shares atau buy back obligasi.

SHARES OPTION

Shares option adalah opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dan telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

Selama 2013 BII tidak memberikan opsi saham baik kepada Dewan Komisaris, Direksi maupun kepada Pejabat Eksekutif.

BANK'S SHARE BUYBACK AND BOND BUYBACK

Share buybacks or bond buybacks represent an effort to reduce the number of shares or bonds issued by the Bank through a repurchase of shares or bonds, in which the payment procedures are implemented in accordance with prevailing laws.

During 2013, BII did not conduct any share or bond buyback transactions.

SHARES OPTION

Share options represent options to purchase shares by members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Executive Officers conducted through a rights issue or stock options offering in reference to the provision of compensation provided to members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Executive Officers, as stipulated in the General Meeting of Shareholders and/or the Bank's Articles of Association.

During 2013, BII did not provide any stock options either to the Board of Commissioners, Board of Directors or Executive Officers.

Rencana Peningkatan Kualitas Penerapan Tata kelola Quality Improvement Plan on Good Corporate Governance

RENCANA STRATEGIS BANK

Rencana strategis Bank disusun dengan mengacu pada visi, misi dan arah kebijakan jangka panjang bisnis Bank. Bank mengformulasikan inisiatif-inisiatif strategis sebagaimana disampaikan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dan disesuaikan melalui Revisi RBB dengan memperhatikan perkembangan kondisi internal dan eksternal terkini, antara lain dengan mempelajari hasil riset ekonomi dari berbagai pihak independen. Implementasi dan pencapaian dari inisiatif-inisiatif strategis tersebut dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan oleh manajemen Bank agar tetap selaras dengan visi dan misi Bank.

Pada tahun 2012, Manajemen Bank telah melakukan penyegaran terhadap Strategi Bank untuk jangka pendek, menengah dan panjang dengan mengacu kepada visi dan misi Bank. visi, Misi dan Strategi tersebut telah dituangkan dalam RBB 2013 dan Revisi RBB 2013 sebagai rencana kerja dan inisiatif-inisiatif yang akan dilakukan selama 3 tahun ke depan. Implementasi dan pencapaian dari rencana kerja dan inisiatif-inisiatif tahun 2013 tersebut secara rutin telah dievaluasi secara berkala.

Untuk tahun 2014, Bank tetap melanjutkan visi dan strategi Bank yang telah dicanangkan manajemen sejak tahun 2012 tersebut karena dinilai masih relevan dengan melakukan penyesuaian perkembangan pasar terakhir.

Rencana Bisnis Bank merupakan penjabaran dari visi, Misi dan Strategi Bank dalam mencapai tujuan untuk menjadi "Relationship bank terkemuka di Indonesia yang hadir di tengah-tengah komunitas, menyediakan beragam produk dan solusi bisnis yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, serta memberikan layanan yang berkualitas tinggi". Bank bertujuan untuk bertumbuh bersama-sama dengan komunitas dan mengupayakan empowerment terhadap pemberdayaan komunitas disekelilingnya.

Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank. Grup Maybank sebagai pemegang saham utama berkomitmen untuk mendukung dan

THE BANK STRATEGIC PLAN

The Bank's strategic plan is prepared according to the vision, mission and long-term policy direction for the Bank's business. The Bank formulates strategic initiatives as presented in the Bank Business Plan Bank (RBB) and adjusted via RBB revision by taking into account the development of current internal and external conditions, such as studying the result of economic research of various independent parties. Implementation and achievement of strategic initiatives are periodically and sustainably evaluated by Bank management, in order to remain aligned with the Bank's vision and mission.

In the year 2012, Bank Management conducted a refreshment of Bank Strategy for short, medium, and long-terms, by referring to the vision and mission of the Bank. The Vision, Mission and Strategy have been outlined in the 2013 RBB and 2013 RBB revision as the work plans and initiatives to be implemented over the next 3 years. Implementation and achievement of the 2013 work plans and initiatives have been routinely evaluated regularly.

For the year 2014, The Bank will continue the vision and strategy of the Bank that has been set by management since the year 2012, as this is still deemed relevant to the adjustment of recent market developments.

The Bank Business Plan is a description of Bank's Vision, Mission, and Strategy in achieving its goal to be the leading Relationship Bank in Indonesia, present in the heart of the community, providing various business products and solutions in line with customer needs, and giving superior service. The Bank aims to grow together with the community and seeks to empower its surrounding communities.

The Bank's strategic plan is fully supported by the owner, among others reflected in the commitment and endeavor of the owner to strengthen the Bank's capital. Maybank Group as a major shareholder is committed to support and strengthen the Bank's

memperkuat permodalan Bank. Sebagai salah satu upaya untuk memperkuat permodalan dan mendukung pertumbuhan aset secara berkelanjutan, pada akhir bulan Juli 2013 Bank telah berhasil merealisasikan Penawaran Umum Terbatas (Rights Issue).

Maybank selaku pemegang saham mayoritas telah berhasil melakukan penjualan saham BII yang dimiliki oleh Maybank ke publik sebanyak ekuivalen 9% kepemilikan pada tanggal 19 Juni 2013 dan sebanyak ekuivalen 9,3% kepemilikan pada tanggal 22 November 2013. Sehingga besar kepemilikan Maybank atas saham BII per tanggal 29 November 2013 adalah sebesar 78,98%. Dengan pelepasan saham Bank yang dimiliki oleh Maybank tersebut, ketentuan jumlah perputaran saham Bank (float) di publik telah tercapai (free float mencapai 20%) dan telah sesuai dengan ketentuan dari regulator (OJK/Otoritas Jasa Keuangan).

BII bersama Grup Maybank secara berkala melaksanakan pembaruan (update) dan diskusi atas kebutuhan strategis Bank.

Bank juga senantiasa melakukan review kinerja keuangan secara rutin. Pengukuran kinerja setiap unit bisnis direview setiap bulan sehingga Bank dapat segera melakukan action plan untuk mencapai target tahunan yang telah ditetapkan.

Bank telah menyampaikan laporan realisasi kinerja keuangan Bank tahun 2013 dengan tepat waktu ke regulator, dimana Bank menunjukkan perbaikan kinerja yang bersinambungan dan berhasil mencapai sebagian besar target anggaran yang telah ditetapkan.

Rencana RBB tahun 2013-2015 dan Revisi RBB tahun 2013-2015 telah dipresentasikan oleh Direksi Bank kepada Dewan Komisaris dan disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 27 November 2012 untuk RBB dan tanggal 28 Juni 2013 untuk Revisi RBB.

Sedangkan RBB tahun 2014-2016 telah dipresentasikan oleh Direksi Bank kepada Dewan Komisaris dan telah mendapat persetujuan

capital. To support this goal, at the end of July 2013 Bank succeeded in realizing a Rights Issue.

Maybank as the majority shareholder has succeeded in selling BII shares owned by Maybank to the public equivalent to 9% ownership on 19 June 2013 and equivalent to 9.3% ownership on 22 November 2013. Therefore, the amount of Maybank ownership of BII shares per 29 November 2013 is 78.98%. With the release of the Bank's shares owned by Maybank, the requirement of total amount of Bank's issued shares (float) is met (free float reaches 20%), in line with the regulation of the Financial Services Authority.

BII and Maybank Group periodically implement updates and discussion of the Bank's strategic needs.

The Bank also continues to conduct a review of financial performance on a regular basis. The measure of performance for each business unit is reviewed every month so that the Bank can implement an action plan immediately to achieve annual targets that have been set.

The Bank has submitted the report of financial statement realization of year 2013 in a timely manner to the regulator, which the Bank has shown a continual improvement of performance and has succeeded to achieve most of the set budget target.

RBB Plans for 2013-2015 and RBB Revision for 2013-2015 have been presented by Bank's Board of Directors to the Board of Commissioners and have been approved by the Board of Commissioners through a meeting of Board of Commissioners on 27 November 2012 for RBB and on 28 June 2013 for Revised RBB.

Meanwhile RBB for the year of 2014-2016 has been presented by Bank's Board of Directors to the Board of Commissioners, has obtained approval

melalui Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 27 November 2013 serta telah disampaikan ke regulator pada tanggal 2 Desember 2013.

Direksi Bank telah mengkomunikasikan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank serta perkembangan kinerja Bank kepada Pemegang Saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank, melalui:

- Corporate Plan hingga 3 tahun ke depan telah dipresentasikan kepada pemegang saham termasuk melalui Analyst Meeting dan Investor Day dan juga kepada karyawan Bank melalui meeting khusus.
- Mengadakan BII Townhall Meeting dan Maybank Townhall Meeting pada setiap kuartal sebagai sarana komunikasi internal untuk menyampaikan kebijakan dan strategi manajemen serta hasil-hasil yang telah dicapai. Townhall meeting merupakan forum komunikasi yang dihadiri oleh top manajemen, senior manajemen, pimpinan regional dan pimpinan cabang untuk menginformasikan kinerja perusahaan serta inisiatif-inisiatif yang sedang dan akan dilaksanakan.
- Melakukan up date perkembangan kinerja dan rencana Bank tahun 2013 pada Maybank Board Meeting.
- Melakukan up date perkembangan kinerja dan rencana Bank tahun 2013 melalui Analyst Briefing dan Maybank Board Meeting.
- Menyenggarakan Public Expose.
- Melakukan up date perkembangan kinerja dan rencana Bank tahun 2013 pada Website Perusahaan pada setiap kuartal.

Direksi Bank telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank secara efektif melalui hal-hal sebagai berikut:

- Menetapkan sasaran yang tercantum dalam Rencana Bisnis Bank menjadi KPI (Key Performance Indicator) masing-masing unit kerja. Pencapaian realisasi RBB tahun 2013-2015 dievaluasi dari waktu ke waktu untuk memastikan agar target tahunan dapat tercapai melalui:
 - Laporan keuangan bulanan dan kinerja bisnis

through the Board of Commissioners meeting on 27 November 2013 and has been submitted to the regulator on 2 December 2013.

The Board of Directors of the Bank has communicated the Corporate Plans and Bank Business Plans and the development of the Bank's performance to the shareholders of the Bank and all levels of organizations in the Bank, through:

- Corporate Plan over the next 3 years, presented to the shareholders through Analyst Meeting and Investor Day and also to the Bank's employees through special meetings.
- Conduct of BII Townhall Meeting and Maybank Townhall Meeting every quarter, as a means of internal communication, to deliver the policy and strategy of management, as well as results achieved. Townhall meeting is a communication form attended by top management, senior management, regional head and branch heads to inform on Company performance as well as the initiatives that are being implemented.
- Update the development of performance and the plan of the Bank for 2013 at the Maybank Board Meeting.
- Update the development of performance and the plan of the Bank for 2013 on Analyst Briefing e.g. Maybank Board Meeting.
- Conduct a Public Expose.
- Update the development of performance and the plan of the Bank for 2013 in the Company Website in each quarter.

The Bank's Board of Directors has implemented its Bank Business Plan effectively by:

- Translating the targets contained in the Bank Business Plan into a KPI (Key Performance Indicator) for each working unit. The RBB realization of 2013-2015 is being evaluated on an ongoing basis to ensure that the annual targets can be achieved through:
 - Monthly financial and business performance update meeting

- Peninjauan kinerja per kuartal
 - Peninjauan kinerja per enam bulan
 - Membuat forecast berdasarkan pencapaian terakhir dan melakukan monitoring secara intensif.
 - Membentuk Task force untuk memonitor pengimplementasian rencana bisnis sehingga pencapaian kinerja dapat tercapai.
- Quarterly review meeting
 - Mid Year review meeting
 - Creating forecast based on the last achievement and conduct intensive monitoring.
 - Establishing a Task force to monitor the implementation of the business plan so that the performance can be achieved.

Sampai dengan akhir Desember 2013, realisasi kinerja Bank menunjukkan pencapaian yang positif dan sebagian besar target anggaran berhasil dicapai, antara lain tercermin pada pertumbuhan total Aset yang didukung oleh pertumbuhan kuat pada jumlah Simpanan Nasabah dan pertumbuhan Kredit, membaiknya kualitas aset serta LDR yang dikelola dengan baik. Dari sisi profitabilitas, Bank berhasil meningkatkan Laba bersih per 31 Desember 2013 dibandingkan dengan Laba bersih yang dibukukan pada periode yang sama tahun lalu.

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (corporate plan), dengan melakukan evaluasi kinerja Bank secara rutin setiap bulannya.

Dewan Komisaris memberikan arahan dan masukan atas kinerja yang berhasil dicapai Bank untuk memastikan kesinambungan peningkatan usaha Bank di masa mendatang.

As of the end of December 2013, the realization of the Bank's performance showed positive achievement. The majority of the budget target was achieved, as reflected in the growth of Total Asset supported by strong growth in the number of Customers Deposit and Loan Growth, improvement of asset quality as well as well-managed LDR. In terms of the profitability, Bank succeeded in increasing the Net Income per 31 December 2013 compared to the Net Income recorded in the same period last year.

The Board of Commissioners has supervised the implementation of the Bank Business Plan (corporate plan), by conducting a routine, monthly performance evaluation of the Bank.

The Board of Commissioners provides directions and feedbacks upon the performance that has been successfully achieved by the Bank to ensure the sustainability of Bank's business development in the future.

Laporan GCG Unit Usaha Syariah

GCG Report of Shariah Business Unit

Perbankan Syariah

Shariah Banking

“Keseriusan BII UUS dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik diwujudkan antara lain dengan mengeluarkan kerangka kerja dengan nama ‘Shariah Governance Framework (SGF)’ yang merupakan Kerangka Kerja Tata Kelola Syariah sebagai *framework* dalam mengelola kepatuhan Syariah pada tingkat Bank sehingga fungsi pengawasan dan kontrol kepatuhan Syariah berjalan efektif dan baik”

“BII UUS’ determination in applying good corporate governance has been implemented by releasing a framework named ‘Shariah Governance Framework (SGF)’. It is a part of the Shariah Good Governance Framework, a framework in managing the Shariah compliance at banking level to ensure good and effective monitoring function and control of Shariah compliance.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan industri perbankan Syariah yang ditandai dengan semakin beragamnya produk perbankan Syariah dan bertambahnya jaringan layanan perbankan Syariah, mensyaratkan semakin pentingnya pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan Syariah. Selain pelaksanaan GCG, industri perbankan Syariah juga harus memenuhi prinsip Syariah (*Shariah compliance*). Hal ini penting karena ketidaksesuaian tata kelola bank dengan prinsip Syariah akan berpotensi menimbulkan berbagai risiko terutama risiko reputasi bagi industri perbankan Syariah.

Overview

The growth of Shariah banking industry, which can be seen from the multitude of Shariah banking products available today and the vast expansion of Shariah banking network, also suggests the increasing importance of Good Corporate Governance (GCG) in Shariah banking industry. In addition to GCG principles, Shariah banking must also meet the standard of Shariah compliance, which is particularly important, as failure to do so would invoke various risks for Shariah banking industry especially reputational risk.



Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pelaksanaan GCG perbankan Syariah ini berlandaskan pada lima prinsip dasar yaitu prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*), dan ditujukan untuk melindungi kepentingan

In accordance with Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 11/33/PBI/2009 dated 7 December 2009 and Bank Indonesia Circular Letter (SEBI) No. 12/13/DPbS dated 30 April 2010 on the Implementation of Good Corporate Governance for Shariah Commercial Bank and Shariah Business Units, GCG in the banking industry is founded on five principles, which are transparency, accountability, responsibility, professionalism, and fairness. These principles aim to safeguard the interests of stakeholders and at the same time improve

stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan Syariah.

Pertumbuhan industri perbankan Syariah di Indonesia yang cukup pesat dan potensi pasar perbankan Syariah yang besar, membuat PT Bank Internasional Indonesia Tbk. (“BII”) bertekad mengembangkan bisnis Syariah secara maksimal dengan memanfaatkan semua infrastruktur dan saluran distribusi yang dimiliki Bank. Pada 2013, BII telah menetapkan BII Unit Usaha Syariah (“BII UUS”) sebagai salah satu prioritas pengembangan bisnis BII. Oleh karenanya, BII UUS senantiasa meningkatkan kinerjanya dengan tetap mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku.

Strategi bisnis BII UUS diimplementasikan melalui perubahan model bisnis dimana dilakukan penyesuaian fungsi-fungsi pada BII UUS dengan fungsi-fungsi pada BII serta memanfaatkan sarana dan prasarana BII untuk mempercepat pertumbuhan BII UUS. Dengan target pertumbuhan bisnis Syariah yang tinggi maka dibutuhkan pengawasan risiko Syariah secara komprehensif pada keseluruhan proses kegiatan usaha Syariah. Untuk itu, pada 2013 BII UUS meluncurkan suatu tata kelola Syariah (Shariah Governance Framework) sebagai kerangka kerja dalam mengelola kepatuhan Syariah pada tingkat Bank yang dikembangkan dengan mengacu pada peraturan perbankan Syariah di Indonesia.

Direktur UUS

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai GCG, Direktur UUS adalah direktur Bank Umum Konvensional atau pimpinan kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan UUS. Berdasarkan ketentuan internal BII melalui Surat Edaran No.2012.007/PRES DIR tanggal 14 Desember 2012 perihal Struktur Organisasi PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk. beserta perubahannya, BII UUS di bawah pengawasan langsung Presiden Direktur BII. Oleh karena itu, sesuai ketentuan internal tersebut maka Direktur UUS dijabat oleh Presiden Direktur BII.

the level of compliance with prevailing laws, regulations, and ethics that apply in general to Shariah banking industry.

The rapid growth of Shariah banking in Indonesia and its substantial market potential has compelled the commitment of PT Bank Internasional Indonesia Tbk. (“BII”) to develop and optimize Shariah business, utilizing the Bank’s infrastructure and distribution channels. In 2013, BII established BII Shariah Business Unit (“BII UUS”) as one of BII’s business development priorities. BII UUS therefore intensifies its efforts to improve the unit’s performance within the corridor of the prevailing laws and regulations.

The implementation of BII UUS’ business strategy is demonstrated by a change of business model. The functions of BII UUS are aligned with the functions under BII, and BII’s facilities and support system are being leveraged to accelerate the progress of BII UUS. With its significant growth target, a comprehensive oversight on Shariah risks is required on the overall activities of Shariah business. To address this, BII UUS in 2013 launched Shariah Governance Framework, developed in reference to Indonesia’s shariah banking regulation, and formulated as the framework in managing Shariah compliance at the Bank.

Director in Charge of UUS

Pursuant to Bank Indonesia regulation on GCG, the Director in charge of UUS is a Director of Conventional Commercial Bank, or leader of a branch office of a bank located overseas, who has the authority and full responsibility to manage UUS. Based on BII internal decision through Circular Letter No.2012.007/PRES DIR, dated 14 December 2012 regarding the Organisational Structure of PT Bank Internasional Indonesia Tbk. and its amendment. BII UUS is under the direct oversight of BII President Director. With respect to the decision, the Director in charge of UUS is BII President Director.

Pada 2013, Direktur UUS dijabat oleh Dato' Khairussaleh Ramli sesuai dengan persetujuan dari Bank Indonesia melalui surat No.14/2737/DPbS tanggal 18 Desember 2012 perihal Keputusan atas Penunjukan Calon Direktur Unit Usaha Syariah Bank Saudara.

Terhitung sejak 1 September 2013, Dato' Khairussaleh Ramli mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Direktur. Perihal ini telah diinformasikan oleh BII kepada Bank Indonesia melalui surat No.S.2013.499/DIR COMPLIANCE tanggal 4 September 2013 perihal Pemberitahuan Pengunduran Diri Presiden Direktur PT Bank Internasional Indonesia Tbk. ("Perseroan"). Melalui surat tersebut juga diinformasikan bahwa kewajiban Presiden Direktur untuk sementara dijabat oleh Thilagavathy Nadason sampai dengan penunjukan pejabat pengganti dilakukan dan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("RUPS") pada tanggal 11 November 2013 telah ditunjuk Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur BII dan telah mendapat persetujuan dari OJK melalui surat OJK No.SR-26/D.03/2014 tanggal 11 Maret 2014 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Profer Test*) atas Peralihan Jabatan Komisaris Independen menjadi Presiden Direktur PT Bank Internasional Indonesia Tbk.

Profil Direktur UUS

Dapat dilihat pada Bab Informasi Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

In 2013, the position of Director in charge of UUS is occupied by Dato' Khairussaleh Ramli, as approved by Bank Indonesia through Letter No. 14/2737/DPbs dated 18 December 2012 regarding Decision on the Appointment of Candidate for the Director in charge of UUS of Bank Saudara.

Effective as of 1 September 2013, Dato' Khairussaleh Ramil resigned from his position as President Director, and his resignation has been notified by BII to Bank Indonesia through Letter No.S.2013.499/DIR COMPLIANCE dated 4 September 2013 regarding Notification on the Resignation of President Director of PT Bank Internasional Indonesia Tbk. ("Company"). The letter also notified that the duties of the President Director shall be executed by interim Director Thilagavathy Nadason until the appointment of a new Director and until such appointment obtains approval from Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Based on General Meeting of Shareholders of the Company ("GMS") held on 11 November 2013, Taswin Zakaria has been appointed as President Director of BII and has received approval from OJK through letter No.SR-26/D.03/2014 dated 11 March 2014 regarding the result of Fit and Profer Test upon the transition from the position of Independent Commissioner and to become the President Director of PT Bank Internasional Indonesia Tbk.

Profile of Director in Charge of UUS

Available on Corporate Information section at this Annual Report.

Tugas & Tanggung Jawab Direktur UUS

Direktur UUS bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BII UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah, meliputi:

Duties and Responsibilities of Director in charge of UUS

The Director in charge of UUS is fully responsible for the management of BII UUS by observing the following principles of prudence and Shariah:

Akuntabilitas Utama Key Accountabilities	Aktivitas Utama Key Activities	Hasil Output
Bertanggung jawab terhadap strategi pengembangan UUS Responsible for UUS strategic development	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun strategi bisnis UUS 3 sampai dengan 5 tahun ke depan. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) UUS. <ol style="list-style-type: none"> Develop UUS business strategy for the next 3-5 years Formulate UUS Annual Business and Budget Plan (RKAT) 	Rencana Kerja Anggaran Tahunan Annual Business Plan & Budget
Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah Fully responsible for the implementation of UUS management based on Shariah and prudent principles	<ol style="list-style-type: none"> Bersama Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengawasi kegiatan perbankan UUS, baik produk maupun jasa Syariah agar sesuai dengan prinsip Syariah serta melakukan analisa terhadap temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern dan/ atau auditor ekstern. Menerima dan menindaklanjuti Laporan Hasil Pengawasan DPS setiap semesteran yang berisi laporan pelaksanaan atas kesesuaian produk dan jasa Bank dengan fatwa DSN dan opini Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh UUS. Menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern dan/atau auditor ekstern. <ol style="list-style-type: none"> Together with Shariah Supervisory Board (SSB) oversee UUS banking activities, both products and services, to ensure their compliance with Shariah principles, and analyze audit findings and/or recommendations from Bank Indonesia, internal auditor and/or external auditor based on the results of their supervisions. Accept and follow up Reports of SSB Monitoring Results issued by semester, which consist of report on implementation of the Bank's products and services adherence to DSN fatwa and Shariah opinion on operating guidelines and products issued by UUS. Follow up audit findings and/or recommendations from Bank Indonesia, internal auditor and/or external auditor based on the results of their supervisions. 	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut pengawasan DPS dan Audit. Laporan GCG UUS. Laporan Profil Risiko UUS. <ol style="list-style-type: none"> Follow up on SSB supervision and Audit. UUS GCG Report. UUS Risk Profile report.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur UUS juga menyediakan data dan informasi terkait dengan pemenuhan prinsip Syariah yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada DPS, serta melakukan evaluasi dan menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan DPS setiap semester, atau *case by case*.

In implementing its duties, the Director in charge of UUS provides data and information to SSB to meet accurate, relevant, and timely principles of Shariah, and conducts evaluation and follow-up actions on the results of SSB' supervision every semester, or case by case.

Direktur UUS senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara *prudent* dengan berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tugas & tanggung jawab Direktur UUS juga sudah dituangkan dalam SGF.

Pengembangan Bisnis dan Layanan BII UUS

Saat ini BII UUS menjadi salah satu prioritas pengembangan bisnis BII dan diproyeksikan untuk menjadi salah satu pemain penting industri perbankan Syariah.

Untuk mencapai aspirasi tersebut, manajemen BII telah mencanangkan dan melakukan penataan kembali BII UUS sebagai penyedia produk & jasa Syariah dan manajemen pemasaran dengan melakukan perubahan model bisnis pada BII UUS dimana beberapa fungsi yang ada pada Syariah dialihkan atau diselaraskan dengan fungsi-fungsi yang ada di unit kerja dan cabang BII serta memanfaatkan sarana dan prasarana BII untuk mempercepat pertumbuhan BII UUS.

Selain itu juga dilakukan penataan ulang struktur pengelolaan cabang-cabang Syariah dimana pengelolaan bisnis dan operasional sehari-hari di bawah supervisi *Sales & Distribution* BII. Dalam hal ini BII UUS secara fungsional tetap mengemban tanggung jawab penuh untuk memastikan bisnis dan operasional sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Penataan ulang ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan cabang-cabang Syariah dan meningkatkan kapasitas cabang-cabang tersebut (baik sumberdaya dan kapasitas/portofolio cabang Syariah).

BII UUS juga melanjutkan kerjasama dengan *Line of Business* (LOB) dalam kegiatan promosi bersama (*joint promotion*) dalam bentuk kampanye produk, *channeling*, *Linkage Program*, *sponsorship*, iklan, pameran dan lain-lain.

The Director in charge of UUS consistently perform its duties and responsibilities prudently, and conforming to the principles of good governance. The duties and responsibilities of Director in charge of UUS are stated in SGF.

BII UUS Business and Services Development

BII UUS today has become one of BII's business development priorities and is projected to become one of the leading players in Shariah banking industry.

To realize the aspiration, the management of BII established and reorganized BII UUS as provider of Shariah products & services and marketing management by adjusting BII UUS business model, where several functions under BII UUS are transferred or aligned with the functions under BII working units and branch offices, and BII's facilities and support systems are leveraged to accelerate BII UUS development.

In addition, Shariah structure and branch offices management are also being reset. On a day-to-day basis, the business and operations management are under the supervision of BII Sales & Distribution. Functionally, BII UUS remains fully responsible to ensure that its business and operations comply with Shariah principles. The reorganization is expected to accelerate the growth and capacity improvement of Shariah branch offices (in terms of resources and capacity/portfolio of Shariah branches).

BII UUS also continues cooperation with Line of Business (LOB) to conduct joint promotion of product campaign, channeling, linkage program, sponsorship, advertisements, exhibitions, and so forth.

Program, inisiatif dan proyek yang dilaksanakan oleh BII UUS pada 2013

Produk & Layanan BII UUS

Selama 2013, BII UUS telah meluncurkan lima produk baru, yaitu Sertifikat Investasi Komoditi Antarbank (SIKA), *joint financing* BII Syariah dengan BII Finance Syariah, Pembiayaan BII Rumah Syariah iB dengan akad Musyarakah Mutanaqishah (MMq), Pembiayaan BII Tunai Emas iB, dan BII Corporate Leasing iB. Sedangkan untuk mempercepat pertumbuhan bisnis Syariah di segmen mikro, BII UUS mengembangkan produk-produk Mikro yang memiliki fitur-fitur yang paling tidak setara dengan produk-produk konvensional, diantaranya produk Pembiayaan Mikro Syariah/Mitra Amanah iB.

E-Learning of Shariah Banking

Dalam rangka memberikan pengetahuan dan sosialisasi perbankan Syariah kepada seluruh karyawan BII serta untuk mendukung aspirasi Bank dalam mencapai target pertumbuhan bisnis Syariah, pada 2013 BII UUS bersama dengan Human Capital – Talent Management & Organization Learning mengembangkan pelatihan yang komprehensif mengenai perbankan Syariah, yaitu melalui:

a. E-learning Training

E-learning of Shariah Banking yang terdiri dari lima modul, yaitu:

1. Foundation of Shariah Banking
2. Comprehension of Shariah Banking
3. Mastering Shariah Banking Funding Products
4. Mastering Shariah Banking Financing Products
5. Mastering Shariah Banking Wealth Management Products

b. In class Training

- Tips & Tricks Selling Shariah Banking Products

In class training diberikan kepada karyawan BII khususnya bagi *marketing & sales*.

Programmes, Initiatives, and Projects of BII UUS in 2013

BII UUS Products & Services

In 2013, BII UUS launched five new products, i.e. Interbank Commodity Investment Certificate (SIKA), a *joint financing* between BII Syariah and BII Finance Syariah; BII Rumah Syariah iB, financing with Musyarakah Mutanaqishah (MMq) agreement; BII Tunai Emas iB Financing; and BII Corporate Leasing iB. Meanwhile, to support the growth of Shariah business in micro segment, BII UUS developed products with features that match the conventional products, including Micro Shariah Financing/Mitra Amanah iB.

E-Learning of Shariah Banking

To equip all BII employees with the knowledge and information regarding Shariah banking, and to support the Bank's aspiration in realizing its goal of Shariah business growth, in 2013 BII UUS and Human Capital – Talent Management & Organization Learning developed comprehensive training on Shariah banking, comprising the following programs:

a. E-learning Training

E-learning of Shariah Banking consists of five modules:

1. Foundation of Shariah Banking
2. Comprehension of Shariah Banking
3. Mastering Shariah Banking Funding Products
4. Mastering Shariah Banking Financing Products
5. Mastering Shariah Banking Wealth Management Products

b. In class Training

- Tips & Tricks Selling Shariah Banking Products

In class training is held for BII employees, especially those from marketing & sales department.

Shariah Governance Framework (SGF)

BII UUS terus berupaya meningkatkan penerapan GCG dalam kegiatan bisnis Syariahnya dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah. Untuk mendukung pengelolaan dan memastikan fungsi pengawasan dan kontrol kepatuhan Syariah berjalan dengan baik, pada akhir 2013 BII UUS meluncurkan kebijakan tata kelola yang dituangkan dalam suatu Kerangka Kerja Tata Kelola Syariah (Shariah Governance Framework/SGF) sebagai *framework* dalam mengelola kepatuhan Syariah pada tingkat Bank.

SGF menjabarkan kerangka kerja yang meliputi struktur dan mekanisme kerja yang berhubungan dengan pemenuhan kepatuhan Syariah dalam menjalankan kegiatan usaha Syariah Bank. Hal-hal umum dalam kegiatan usaha Syariah Bank yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kepatuhan Syariah dikelola dan dimonitor sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank yang berlaku.

Efektivitas implementasi SGF dicerminkan melalui tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, Direktur UUS, Kepala UUS dan Manajemen serta independensi DPS yang kompeten dan bertanggung jawab, didukung oleh fungsi Syariah Management, Syariah Compliance dan Syariah Risk Management yang kuat serta dikontrol oleh Syariah Audit dan Syariah Review.

Mekanisme kontrol kepatuhan Syariah secara menyeluruh (*end-to-end*) dilaksanakan melalui 3 lini kontrol (*line of defense*) yang mencakup proses sebelum (*pre*) dan sesudah (*post*) pelaksanaan aktivitas operasional dan bisnis. Lini 1 meliputi Manajemen, Unit Bisnis dan Unit Pendukung Bisnis, Lini 2 meliputi Syariah Management, Syariah Risk Management dan Syariah Compliance, sedangkan Lini 3 adalah Syariah Audit dan Syariah Review.

Shariah Governance Framework (SGF)

BII UUS performs continuous endeavours to improve its GCG implementation in Shariah business by obeying prudence and Shariah principles. To support the management, and to ensure sound performance of Shariah oversight and compliance control, at the end of 2013 BII UUS launched governance policy formulated as Shariah Governance Framework (SGF). It is a framework to manage Shariah compliance at Bank level.

The framework prescribed in SGF includes structure and work mechanism to meet Shariah compliance standards when executing the Bank's Shariah business activities. Meanwhile, general matters in Shariah business that are not related to Shariah compliance are managed and monitored according to the existing procedures and policies of the Bank.

The effectiveness of SGF implementation is reflected in the responsibilities of Board of Commissioners, Board of Directors, Director in charge of UUS, Head of UUS, the Management, and the independence of a competent and accountable SSB. These elements are supported by Syariah Management, Syariah Compliance, and Syariah Risk Management functions as well as under the robust oversight from Syariah Audit and Syariah Review.

End-to-end Shariah compliance control mechanism is carried out through 3 lines of defence that covers the pre and post phases of business and operations activities. The scope of the First Line is the Management, Business Units, and Supporting Units; Second Line consists of Syariah Management, Syariah Risk Management, and Syariah Compliance; while the Third Line consists of Syariah Audit and Syariah Review.

Sosialisasi, edukasi dan *awareness* perbankan Syariah

BII UUS secara aktif ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi produk dan layanan perbankan Syariah yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersama dengan BUS dan UUS lainnya.

Selama 2013, kegiatan sosialisasi, edukasi dan *awareness* perbankan Syariah yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- Indonesia Banking Expo (IBEX) 2013 yang diselenggarakan bersama-sama dengan BII Konvensional di Jakarta Convention Center pada 23-25 Mei 2013;
- iB Vaganza Semarang yang dilaksanakan di Mal Paragon Semarang pada 21-24 November 2013;
- iB Vaganza Surabaya yang dilaksanakan di Royal Plaza Surabaya pada 12-15 Desember 2013; dan
- iB Vaganza Jakarta yang diselenggarakan di Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jakarta pada 16-18 Desember 2013.

Pengembangan Organisasi

A. Struktur Organisasi

Pengembangan organisasi BII UUS dilakukan sejalan dengan komitmen BII untuk mendukung penerapan model bisnis yang baru bagi BII UUS sebagai penyedia produk & layanan Syariah dan manajemen pemasaran dalam rangka mempercepat pertumbuhan BII UUS dengan tetap menjaga kesesuaian bisnis dan operasional dengan prinsip-prinsip Syariah.

BII UUS memiliki enam unit kerja dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing unit kerja tersebut sebagai berikut:

- a) **Shariah Global Banking**, yang mengatur dan mengkoordinasikan penjualan & jalur distribusi semua produk Syariah untuk segmen Korporasi.

Socialization, education, and awareness on Shariah banking

BII UUS actively participates in socialization activities on products and services of Shariah banking organized by Bank Indonesia with other BUS and UUS.

In 2013, socialization, education, and awareness raising activities on Shariah banking participated by BII UUS are as follows:

- Indonesia Banking Expo (IBEX) 2013 held jointly with BII Conventional at Jakarta Convention Center on 23-25 Mei 2013;
- iB Vaganza Semarang at Mal Paragon Semarang on 21-24 November 2013;
- iB Vaganza Surabaya at Royal Plaza Surabaya on 12-15 Desember 2013; and
- iB Vaganza Jakarta at Bank Indonesia Office Complex Jakarta on 16-18 December 2013.

Organizational Development

A. Organization Structure

BII UUS organizational development is in line with BII's commitment to support the implementation of BII UUS' new business model as provider of Shariah products & services and marketing management, in order to expedite the growth of BII UUS, while maintaining the compliance of business and operations activities with Shariah principles.

BII UUS has six working units with their respective duties and responsibilities:

- a) **Shariah Global Banking**, which manage and coordinate the sales and distribution channels of all Shariah products for corporate segments.

- b) **Shariah Business Banking**, yang mengatur dan mengkoordinasikan penjualan & jalur distribusi semua produk Syariah untuk segmen Usaha Mikro, Kecil & Menengah dan Komersial.
- c) **Shariah Retail Banking**, yang mengatur dan mengkoordinasikan penjualan & jalur distribusi semua produk Syariah untuk segmen Ritel dan melakukan supervisi terhadap seluruh Kantor Cabang Syariah (KCS) dan Layanan Syariah (LS).
- d) **Shariah Strategy & Business Implementation**, yang menyiapkan dan mengkoordinasikan pembuatan strategi bisnis Syariah sesuai dengan arahan BII dan Group serta bertanggung jawab untuk menjaga tercapainya implementasi strategi sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.
- e) **Shariah Advisory & Assurance**, yang bertugas membantu DPS dan manajemen dalam memastikan keseluruhan bisnis dan operasional UUS sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.
- f) **Shariah Communication & Product Program**, yang bertugas dalam pembuatan program-program pemasaran produk-produk Syariah, mengkaji semua materi pemasaran produk dan jasa BII UUS serta acara-acara *below the line* dan termasuk perencanaan komunikasi/publisitas tahunan untuk BII UUS.
- b) **Shariah Business Banking**, which manage and coordinate sales and distribution channels of all Shariah products for Micro, Small & Medium and Commercial segments.
- c) **Shariah Retail Banking**, which set and coordinate sales and distribution channels of Shariah products for Retail segment and also supervises all Shariah Branch Offices and Office Channeling.
- d) **Shariah Strategy & Business Implementation**, which prepare and coordinate the development of Shariah business strategy in line with directives from BII and Group, and is responsible to ensure the realization of strategy implementation according to target.
- e) **Shariah Advisory & Assurance**, which assist SSB and the management in ensuring the compliance of UUS' overall business and operations with Shariah principles.
- f) **Shariah Communication & Product Program**, which develop marketing programs for Shariah products, review all marketing materials for BII UUS products and services as well as the below the line activities, including BII UUS annual.

B. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan modal yang sangat penting dalam pengembangan usaha, untuk menunjang serta meningkatkan kemampuan/kompetensi SDM, maka BII UUS terus berupaya meningkatkan berbagai pelatihan antara lain sebagai berikut:

- Pelatihan perbankan Syariah kepada karyawan yang menangani atau berhubungan dengan bisnis Syariah di

B. Human Resources Education and Training

Human Resources is key to business development. To support and enhance the capacity/competence of its human resources, BII UUS continuously improves its training programs as follows:

- Shariah banking training for employees, both in Branch Offices and in the Head Office, who handle or correspond with

Kantor Cabang dan Kantor Pusat dalam bentuk modul *e-learning* dan atau *in class training* sesuai dengan tingkatan/level pelatihan yang diperlukan oleh masing-masing karyawan.

- Pelatihan perbankan Syariah kepada karyawan/pihak yang terlibat dan bertanggung jawab atas implementasi SGF yaitu Risk Management, Compliance, General Legal Counsel, Anti Money Laundering & Assurance, Strategic Planning dan Internal Audit melalui 'Shariah Basic Training & Shariah Governance Framework Awareness'.
- Pelatihan/seminar/workshop bagi Anggota DPS sesuai dengan kebutuhan pengembangan diri anggota DPS untuk mendukung dan meningkatkan kegiatan pengawasan Syariah di BII UUS.
- Training untuk meningkatkan ketrampilan fungsional baik eksternal/internal dalam bidang Manajemen Risiko, Super Service Excellence, Legal Syariah, Financial Analyst dll.

Penghargaan

Selama 2013, BII UUS menerima penghargaan sebagai berikut:

- 1st Rank – The Most Profitable Sharia Unit, Asset \geq IDR500 miliar dari KARIM Business Consulting dalam acara The 9th Islamic Finance Award pada 22 Februari 2013.
- Indonesia Service to Care Champion 2013 – Category: Saving Account of Islamic Banking dari Marketeers dan MarkPlus Insight dalam acara Service to Care Award 2013 pada 18 Maret 2013.
- Best Syariah 2013 – Kategori Unit Usaha Syariah Aset Lebih dari Rp1 Triliun – 5 Triliun dari Majalah Investor pada 31 Juli 2013.

Pengembangan Jaringan Distribusi

Pengembangan jaringan distribusi Bank dilakukan dengan fokus kepada strategi penjualan, proses operasional yang cepat, efisien dan akurat.

Shariah business. The training is available through e-learning module or in class training, according to the level of training needed by the participants.

- Shariah banking training for employees/parties involved and responsible for SGF implementation, i.e. Risk Management, Compliance, General Legal Counsel, Anti Money Laundering & Assurance, Strategic Planning, and Internal Audit.
- Opportunity for SSB Members to attend trainings/seminars/workshops for self-developmet purpose as they require to support and enhance their Shariah oversight on BII UUS.
- Training to improve external/internal functional skills in the fields: Risk Management, Super Service Excellence, Legal Syariah, Financial Analyst, and so forth.

Awards

Throughout 2013, BII UUS received the following awards:

- 1st Rank – The Most Profitable Shariah Unit, Asset \geq IDR500 billion from KARIM Business Consulting in The 9th Islamic Finance Award event, 22 February 2013.
- Indonesia Service to Care Champion 2013 – Category: Saving Account of Islamic Banking from Marketeers dan MarkPlus Insight in Service to Care Award 2013 event, 18 March 2013.
- Best Syariah 2013 – Shariah Business Unit with over Rp1 Trillion – 5 Trillion Asset Category for Investor Magazine, 31 July 2013

Distribution Network Development

The Bank's distribution network development will focus on sales strategy and quick, efficient as well as accurate operational process.

Per 31 Desember 2013, jumlah jaringan cabang BII UUS adalah lima KCS, dua Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) dan 269 Layanan Syariah (LS.)

Di masa yang akan datang, BII UUS terus mengembangkan jaringan kantor cabangnya untuk bisa menjangkau nasabah yang lebih luas sesuai dengan kebutuhan.

Kinerja Keuangan

Selama 2013, BII UUS telah membukukan laba bersih sebesar Rp112 miliar, naik 115% dari Rp52 miliar tahun 2012. Dana Pihak Ketiga tumbuh signifikan 402% menjadi Rp3,0 triliun dibandingkan dengan Rp606 miliar tahun sebelumnya.

Pembiayaan BII UUS juga naik signifikan sebesar 82% dari Rp1,9 triliun pada 2012 menjadi Rp3,4 triliun tahun ini seiring dengan semakin bertambahnya jenis dan fasilitas pembiayaan di BII UUS.

Dengan pertumbuhan bisnis BII UUS di 2013 ini membuat total aset BII UUS naik sebesar 91% menjadi Rp4,0 triliun dibandingkan dengan Rp2,1 triliun tahun sebelumnya.

Pesatnya pertumbuhan bisnis BII UUS ini didukung oleh sinergi dengan *sales team* BII yang memiliki wawasan dan pengetahuan Syariah.

Dewan Pengawas Syariah Jumlah dan Komposisi DPS

Per 31 Desember 2013, anggota DPS berjumlah tiga orang dan salah satunya ditunjuk sebagai Ketua dengan komposisi sebagai berikut:

No	Nama Name	Jabatan Position	Persetujuan RUPS AGMS Approval	Masa Jabatan Term of Office
1	Dr. M. Anwar Ibrahim, MA.	Ketua Chairman		
2	Prof. Drs. H. Muh. Nahar Nahrawi, SH, MM.	Anggota Member	Berita Acara RUPST PT BII Tbk. Nomor 32 tanggal 19 April 2012 Minutes of AGMS PT BII Tbk. Number 32 dated 19 April 2012	19 April 2012 sd RUPST tahun 2015 19 April 2012 until the AGMS of 2015
3	Dr. Abdul Jabar Majid, MA.	Anggota Member		

As of 31 December 2013, BII UUS distribution network in total comprises five Shariah Branches (KCS), two Shariah Sub Branches (KCPS), and 269 Office Channeling (OC).

Going forward, BII UUS will continue expanding its branch office network, reaching to more customers as needed.

Financial Performance

In 2013, BII UUS recorded net profit of Rp112 billion, up 115% from Rp52 billion in 2012. Third Party Funds shows particularly strong performance with 402% growth to Rp3.0 trillion compared to Rp606 billion in the earlier year.

BII UUS financing also increased significantly by 82% from Rp1.9 trillion in 2012 to Rp3.4 trillion in this reporting year, on the back of higher varieties of BII UUS financing type and facility.

BII UUS' business growth in 2013 contributed to 91% increase of BII UUS total assets to Rp4.0 trillion from Rp2.1 trillion in the previous year.

The strong growth of BII UUS is also supported by solid synergy with BII sales team, who are equipped with Shariah knowledge and information.

Sharia Supervisory Board (SSB) Member and Composition of SSB

As of 31 December 2013, SSB consists of three persons including one who is appointed as Chairman, with the following composition:

Rangkap Jabatan sebagai DPS

Anggota DPS BII UUS telah memenuhi ketentuan PBI No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah khususnya mengenai ketentuan rangkap jabatan DPS, yaitu merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada empat Lembaga Keuangan Syariah lainnya.

Rangkap jabatan anggota DPS BII UUS pada 2013 adalah sebagai berikut:

Nama Name	Posisi Position	Perusahaan Company
Dr. M. Anwar Ibrahim, MA.	Ketua DPS SSB Chairman	1. OCBC NISP
		2. Prudential
Prof. Drs. H. Muh. Nahar Nahrawi, SH, MM.	Anggota DPS SSB Member	1. Tokyo Marine Insurance Indonesia
		2. NSC Pembiayaan Motor Berjenjang
		3. PT Pegadaian Unit Syariah
		4. IBF Leasing Alat Berat Syariah
Dr. Abdul Jabar Majid, MA.	Ketua DPS SSB Chairman	1. WOM Finance

Concurrent Positions in other SSB

The members of BII UUS SSB have fulfilled the requirements of PBI No. 11/10/PBI/2009 on Shariah Business Unit, in particular the stipulation on SSB concurrent positions. The regulation allows no more than four concurrent memberships in SSB of other Shariah Financial Institutions.

Concurrent positions of BII UUS SSB members in 2013 are as follows:

Tugas dan Tanggung Jawab DPS

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, DPS bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direktur yang membawahi UUS serta mengawasi kegiatan BII UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Pertemuan antara DPS dan Direktur dijadwalkan secara rutin dimana salah satu agenda pertemuan merupakan update dari kegiatan/hasil rapat DPS.

Tugas dan tanggung jawab DPS meliputi antara lain:

- Melakukan penilaian dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan BII UUS.
- Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru BII UUS agar sesuai dengan fatwa DSN - MUI.
- Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BII UUS yang belum ada fatwanya.
- Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BII UUS.

Duties and Responsibilities of SSB

In accordance with Bank Indonesia regulation, SSB has the duties and responsibilities to provide consultation and recommendations to Director in charge of UUS, and to oversee the activities of BII UUS to ensure the compliance with Shariah Principles. SSB and the Director meet regularly where discussion on update of activities/outcome of SSB meetings is one of the regular agenda items.

Duties and responsibilities of SSB include:

- Assess and ensure compliance of operational guidelines and products issued by BII UUS.
- Supervise product development process in BII UUS to ensure the conformity with fatwa from DSN-MUI.
- Request fatwas to the National Shariah Board – Indonesia Ulema Council for new products of BII UUS that are yet to have fatwas.
- Conduct periodic review on the compliance of funding mechanism, funds disbursement, and services of BII UUS with Shariah Principles.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek Syariah dari satuan kerja BII UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya. f. Menyampaikan hasil pengawasan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran. g. Senantiasa melakukan analisa terhadap produk dan layanan jasa baru dalam bentuk Opini DPS yang di dalamnya disampaikan kesesuaian produk dan layanan yang akan diluncurkan dengan Fatwa DSN-MUI. | <ul style="list-style-type: none"> e. Request data and information related to Shariah aspect to BII UUS working units in its task implementation. f. Submit result of oversight as Report of SSB Oversight Report by semester. g. Continuously analyse new products and services complied in SSB Opinion. The document shall describe the conformity of products and services to be issued with Fatwa from DSN-MUI. |
|--|--|

Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tersebut di atas, DPS diberi kewenangan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Memeriksa dan meminta penjelasan dari pejabat BII dan BII UUS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, kebijakan SOP dan akad-akad yang digunakan pada produk-produk dan aktivitas keuangan yang ada pada BII UUS. b. Melakukan review dan memberikan rekomendasi atas kebijakan, sistem, SOP, produk yang terkait dengan prinsip Syariah dan akad yang dikeluarkan oleh BII UUS. c. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai BII dan/atau BII UUS dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan. d. Meminta seluruh data dan informasi yang diperlukan kepada Direktur yang membawahi UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya. | <p>To effectively carry out its duties and responsibilities, SSB has the authority to perform the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Review and request explanation from BII and BII UUS officials regarding the purpose, characteristic, SOP, and contracts applied on BII UUS products as well as financial activities. b. Review and provide recommendations on policies, systems, SOPs, products related to Shariah principles, and contracts issued by BII UUS. c. Inspect, observe, and request for explanation and/or confirmation to BII and/or BII UUS employees and/or customers to substantiate result of examination. d. Request the availability of all required data and information to Director in charge of UUS in its task implementation. |
|---|---|

Tugas dan tanggung jawab DPS dituangkan dalam SGF sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS dibantu oleh unit kerja Shariah Advisory & Assurance yang bertugas mengelola pelaksanaan rapat/pertemuan DPS, mengadministrasikan permohonan dan hasil opini DPS serta kewajiban pelaporan hasil pengawasan DPS kepada OJK.

The duties and responsibilities of SSB are set forth in SGF as duties and responsibilities implementation guidelines. In carrying out its duties, SSB is assisted by Shariah Advisory and Assurance working unit, whose tasks are to organize SSB meetings, register documents of requests and SSB opinions as well as reporting document of SSB to OJK as obliged by regulation.

Selama 2013, DPS telah melakukan pengawasan dan memberikan nasehat, saran, opini terhadap produk dan kegiatan BII UUS agar senantiasa sesuai dengan Prinsip Syariah yang tercermin dari beberapa rangkaian Rapat DPS di bawah ini.

Rapat & Agenda Rapat DPS

Selama 2013, DPS telah menyelenggarakan rapat rutin sebanyak 36 kali dengan tingkat kehadiran anggota DPS sebagai berikut:

Nama Name	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran Attendance
Dr. M. Anwar Ibrahim, MA.	30	83%
Prof. Drs. H. Muh. Nahar Nahrawi, SH, MM.	33	92%
Dr. Abdul Jabar Majid, MA.	32	89%

Rapat DPS diselenggarakan untuk membahas permohonan opini DPS dari unit bisnis BII UUS maupun dengan Manajemen BII. Risalah rapat dan hasil opini DPS didokumentasikan dan diadministrasikan dengan baik.

Adapun Agenda Rapat DPS selama 2013 adalah sebagai berikut:

No	Tanggal Date	Tempat Location	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
1	3 Jan 2013	Ruang Rapat DPS, Gd. BII Jatinegara SSB Meeting Room, BII Jatinegara Building	1. Presentasi produk Rahn Emas. 2. Penjelasan tentang fitur produk pembiayaan beragun emas (Rahn). 1. Presentation of Gold Pawn (Rahn) product 2. Explanation on financing features with gold as collateral (Rahn)	1. MAI 2. MNN 3. AJM
2	10 Jan 2013	Ruang Rapat DPS, Gd. BII Jatinegara SSB Meeting Room, BII Jatinegara Building	1. Evaluasi pembiayaan kendaraan bermotor dan langkah-langkah perbaikan/mitigasi terkait penurunan kolektibilitas pembiayaan. 2. Keuntungan bisnis pembiayaan Rahn Emas. 1. Evaluation on vehicle financing and corrective actions/ mitigation regarding the decline of financing collectibility 2. Advantage of Gold Rahn financing business	1. MAI 2. MNN 3. AJM
3	23 Jan 2013	Ruang Rapat DPS, Gd. BII Jatinegara SSB Meeting Room, BII Jatinegara Building	Pembahasan Opini DPS tentang Rahn Emas dan <i>benchmark</i> transaksi Rahn emas dengan bank-bank lain. Discussion on SSB Opinion regarding Gold Rahn and benchmark of gold Rahn transactions to other banks	1. MAI 2. MNN 3. AJM

Throughout 2013, SSB has executed its oversight function, provided advices, recommendations, and opinions on BII UUS products and activities, to ensure the overall compliance with Shariah Principles. The duty implementation is evidenced by the following agenda of Meetings of SSB.

SSB Meetings & Meetings Agenda

In 2013, SSB held 36 regular meetings, with the following attendance record:

SSB meetings are held to discuss requests for SSB opinions submitted by BII UUS business unit or to hold discussion with BII Management. The minutes of meetings and outcome of SSB opinions are meticulously documented and registered.

SSB Meeting Agenda during 2013 is as follows:

No	Tanggal Date	Tempat Location	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
4	31 Jan 2013	Ruang Rapat DPS, Gd. BII Jatinegara SSB Meeting Room, BII Jatinegara Building	Pembahasan hasil pemeriksaan DPS yang akan disampaikan dalam Laporan Pengawasan DPS Semester II tahun 2012. Discussion on SSB examination result to be administered in the Semester II 2012 SSB Oversight Report.	1. MAI 2. MNN 3. AJM
5	7 Feb 2013	Ruang Rapat DPS, Gd. BII Jatinegara SSB Meeting Room, BII Jatinegara Building	Pembahasan lanjutan hasil pemeriksaan DPS yang akan disampaikan dalam Laporan Pengawasan DPS Semester II tahun 2012. Continued discussion on SSB examination result to be administered in the Semester II 2012 SSB Oversight Report.	1. MAI 2. MNN 3. AJM
6	14 Feb 2013	Ruang Rapat DPS, Gd. BII Jatinegara SSB Meeting Room, BII Jatinegara Building	Penyusunan Laporan Pengawasan DPS Semester II tahun 2012. Development of Semester II 2012 SSB Oversight Report.	1. MAI 2. AJM 3. HB 4. ARH
7	26 Feb 2013	Ruang Rapat DPS, Gd. BII Jatinegara SSB Meeting Room, BII Jatinegara Building	Musarakah Mutanaqisah (MMq) 1. Prinsip-prinsip dasar, struktur dan dokumentasi pembiayaan MMq. 2. Mekanisme penyelesaian pembiayaan untuk Nasabah wanprestasi. Musarakah Mutanaqisah (MMq) 1. Basic principles of MMq, financing structure, documentation of MMq financing. 2. Mechanism of financing resolution for defaulting Customers	1. MAI 2. AJM 3. HB 4. ARH
8	14 Mar 2013	Ruang Rapat DPS, Gd. BII Jatinegara SSB Meeting Room, BII Jatinegara Building	1. Pembahasan lanjutan mengenai MMq. 2. Penerapan Ijarah Mawsufah fi al-zimmah dalam pembiayaan MMq. 3. Pembahasan Produk SIMA BII UUS. 1. Continued discussion on MMq. 2. Examine the possibility to apply Ijarah Mawsufah fi al-zimmah in MMq financing. 3. Discussion on BII UUS SIMA product.	1. MAI 2. AJM 3. HB 4. ARH
9	21 Mar 2013	Ruang Rapat DPS, Gd. BII Jatinegara SSB Meeting Room, BII Jatinegara Building	Analisa Ijarah Mawsufah fi al-zimmah dan MMq (Lanjutan) Analysis on Ijarah Mawsufah fi al-zimmah and MMq (Continued)	1. MAI 2. MNN 3. AJM
10	4 Apr 2013	Ruang Rapat DPS, Gd. BII Jatinegara SSB Meeting Room, BII Jatinegara Building	1. Strategi & Struktur Organisasi BII UUS. 2. Rencana pengembangan produk BII UUS Pembiayaan Murabahah Warehouse. 3. Rencana pengembangan produk BII UUS berbasis Ijarah/Sewa yang terdiri atas produk Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT), Pembiayaan Ijarah – Sale and Lease Back dan Pembiayaan Ijarah Refinancing (Take Over) 1. BII UUS Strategy and Organization Structure 2. Development plan of BII UUS Murabahah Warehouse financing product. 3. Development plan of BII UUS Ijarah/Lease-based products that consist of Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT), Ijarah – Sale and Lease Back, Ijarah Refinancing (Take Over).	1. MAI 2. MNN 3. AJM 4. HB

No	Tanggal Date	Tempat Location	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
11	11 Apr 2013	Ruang Rapat DPS, Gedung SS3 SSB Meeting Room, SS3 Building	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan & masukan DPS atas rencana produk pembiayaan IMBT dan pembiayaan <i>Warehouse Murabahah</i> diantaranya membahas mengenai skema transaksi dan struktur dokumentasi produk. Rencana pengembangan produk <i>Shariah Sale & Lease Back</i>. <ol style="list-style-type: none"> Discuss and provide SSB recommendations on the plan to develop IMBT financing product and Warehouse Murabahah financing; discussion included transaction scheme and structure of product documentation. Development plan of Shariah Sale & Lease Back product 	AJM
12	16 Apr 2013	Ruang Rapat DPS, Gedung SS3 SSB Meeting Room, SS3 Building	<p>Masukan DPS mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumentasi produk Pembiayaan <i>Warehouse Murabahah</i>. Ketentuan-ketentuan pada produk Pembiayaan IMBT Korporasi. Ketentuan-ketentuan pada produk pembiayaan <i>Ijarah Sale & Lease Back</i>. <p>SSB recommendations on:</p> <ol style="list-style-type: none"> Details of documentation of Warehouse Murabahah financing product. Provisions under Corporate IMBT Financing. Provisions under Ijarah Sale & Lease Back product. 	<ol style="list-style-type: none"> MNN AJM
13	25 Apr 2013	Ruang Rapat DPS, Gedung SS3 SSB Meeting Room, SS3 Building	<p>Pembahasan produk pembiayaan BII Rumah Syariah iB dengan Skema MMq, berkaitan dengan Surat BI dan pertemuan dengan BI tanggal 22 April 2013.</p> <p>Discussion on BII Rumah Syariah iB product with MMq scheme with respect to BI Letter and Meeting with BI on 22 April 2013.</p>	<ol style="list-style-type: none"> MNN AJM
14	2 Mei 2013 2 May 2013	Ruang Rapat DPS, Gedung SS3 SSB Meeting Room, SS3 Building	<p>Pembahasan produk pembiayaan BII Rumah Syariah iB dengan Skema MMq, berkaitan dengan Surat BI dan pertemuan dengan BI tanggal 22 April 2013. (Lanjutan)</p> <p>Discussion on BII Rumah Syariah iB product with MMq scheme with respect to BI Letter and Meeting with BI on 22 April 2013 (continued).</p>	<ol style="list-style-type: none"> MAI MNN AJM
15	30 Mei 2013 30 May 2013	Ruang Rapat DPS, Gedung SS3 SSB Meeting Room, SS3 Building	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan mengenai BII Rumah Syariah iB dengan Akad Murabahah. BII Rumah Syariah iB dengan akad MMq dimana terdapat unsur kerjasama (Syirkah) dan unsur sewa (Ijarah). BII Corporate Leasing iB menggunakan set akad IMBT. <ol style="list-style-type: none"> Discussion on BII Rumah Syariah iB with Murabahah, contract. BII Rumah Syariah iB with MMq contract, where elements of cooperation (Syirkah) and lease (Ijarah) are present. BII Corporate Leasing iB using IMBT contract set. 	<ol style="list-style-type: none"> MNN AJM

No	Tanggal Date	Tempat Location	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
16	13 Juni 2013 13 June 2013	Ruang Rapat DPS, Gedung SS3 SSB Meeting Room, SS3 Building	Pembahasan mengenai perluasan penggunaan mesin Electronic Data Capture (EDC): 1. Penggunaan mesin EDC sebagai <i>payment point</i> untuk memperluas jaringan transaksi Syariah BII UUS. 2. EDC dapat digunakan sebagai bagian dari preposisi produk mikro Syariah. Discussion on broadening the use of Electronic Data Capture (EDC) machine: 1. EDC machine as payment point to support the expansion of Shariah transaction network. 2. EDC can be leveraged as part of Shariah micro product preposition.	1. MAI 2. MNN 3. AJM
17	4 Juli 2013 4 July 2013	Ruang Rapat DPS, Gedung SS3 SSB Meeting Room, SS3 Building	Pembahasan mengenai produk BII Rumah Syariah iB akad MMq, khususnya mengenai struktur transaksi dan ketentuan <i>take over</i> pembiayaan. Discussion on MMq contract for BII Rumah Syariah iB contract, especially on structure of transaction and financing take over provisions.	1. MAI 2. MNN 3. AJM
18	9 Juli 2013 9 July 2013	Ruang Rapat DPS, Gedung SS3 SSB Meeting Room, SS3 Building	1. Rencana pengembangan dan struktur modul E-Learning Syariah. 2. EDC dan permohonan opini DPS (Lanjutan). 3. Presentasi prinsip dan struktur Cross Currency Hedging (CCH). 1. Development and structuring plan for E-Learning Shariah Module. 2. EDC and request for SSB opinion (continued). 3. Presentation on Cross Currency Hedging (CCH) principle and structure.	1. MAI 2. MNN
19	11 Juli 2013 11 July 2013	Ruang Rapat DPS, Gedung SS3 SSB Meeting Room, SS3 Building	Diskonto dan Formulir Diskonto Pembiayaan LC/SKBDN. Discount rate and Discount Form for LC/SKBDN financing	1. MAI 2. MNN
20	18 Juli 2013 18 July 2013	Ruang Rapat DPS, Gedung SS3 SSB Meeting Room, SS3 Building	1. Pembahasan E-Learning Modul Foundation of Shariah Banking untuk karyawan BII. 2. Pembahasan mengenai CCH (lanjutan). 3. Pembahasan struktur dokumentasi Perjanjian Induk IMBT untuk fasilitas pembiayaan ijarah <i>Direct Leasing</i> maupun <i>Sale & Lease Back</i> . 4. Rencana program Produk Giro Wadiah BII UUS. 1. Discussion on E-Learning Module Foundation of Shariah Banking for BII employees 2. Discussion on CCH (continued). 3. Discussion on structure of agreement document of IMBT Principal Agreement for ijarah financing facility, both Direct Leasing and Sale & Lease Back. 4. Discussions on product plan Giro Wadiah BII UUS.	1. MAI 2. MNN 3. AJM
21	25 Juli 2013 25 July 2013	Ruang Rapat DPS, Gedung SS3 SSB Meeting Room, SS3 Building	Presentasi prinsip dan struktur CCH serta penyampaian hasil pertemuan dengan DPS (18 Juli 2013) mengenai CCH. Presentation on the principle and structure of CCH as well as results of SSB meeting (18 July 2013) on CCH.	AJM

No	Tanggal Date	Tempat Location	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
22	22 Agustus 2013 22 August 2013	Ruang Rapat DPS, Gedung SS3 SSB Meeting Room, SS3 Building	Finalisasi Laporan Dewan Pengawas Syariah Semester I 2013. Finalisation of Shariah Supervisory Board Report Semester I 2013.	1. MNN 2. AJM
23	29 Agustus 2013 29 August 2013	Ruang Rapat DPS, Gedung SS3 SSB Meeting Room, SS3 Building	<p>Presentasi Draft Shariah Governance Framework (SGF)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan dan cakupan SGF secara umum untuk memastikan fungsi pengawasan dan kontrol kepatuhan Syariah berjalan baik. 2. Peran dan tanggung jawab Direktur UUS, Direksi dan Manajemen dalam memberikan pengawasan secara umum dan menyediakan kondisi/<i>environment</i> untuk berjalannya mekanisme kontrol kepatuhan Syariah secara baik. 3. Peran dan tanggung jawab fungsi-fungsi tata kelola Syariah yaitu fungsi Shariah Management, Shariah Compliance, Shariah Risk Management, Shariah Audit dan Shariah Review. <p>Presentation of Shariah Governance Framework (SGF) draft, which includes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Purpose and scope of SGF in general, which is to ensure robust implementation of oversight and control functions on Shariah compliance. 2. Duties and responsibilities of Director in charge of UUS, Board of Director and the Management in performing general oversight and providing conducive environment for the implementation of control mechanism on Shariah compliance. 3. Duties and responsibilities of Shariah governance functions that consist of Shariah Management, Shariah Compliance, Shariah Risk Management, Shariah Audit, and Shariah Review. 	1. MAI 2. MNN 3. AJM
24	24 September 2013	Ruang Rapat DPS, Gedung SS3 SSB Meeting Room, SS3 Building	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan opini DPS mengenai batasan jenis usaha nasabah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana bank agar tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. 2. Permohonan opini DPS mengenai spesial bonus sebagai bentuk insentif mudharabah untuk nasabah Deposito. 3. Pembahasan pengembangan Produk Giro Mudharabah. <ol style="list-style-type: none"> 1. Request for SSB opinion on limitation of customers' type of business in funds collection and funds disbursement activities, to avoid breach of Shariah principles. 2. Request for SSB opinion on special bonus as mudharabah incentive for Time Deposit customers. 3. Discussion on the plan to develop Mudharabah Current Account product. 	AJM
25	3 Oktober 2013 3 October 2013	Ruang Rapat DPS, Gedung SS3 SSB Meeting Room, SS3 Building	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan klausa mengenai pengalihan kewajiban pengasuransian dan pemeliharaan obyek sewa kepada nasabah. 2. Pembahasan mengenai penyelarasan program produk tabungan anak Syariah dengan program serupa di konvensional yang menggunakan karakter Barbie dari Mattel inc. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on the provision prescribing transfer of obligation of leased object insurance and maintenance to customers. 2. Discussion on the alignment of Shariah savings program for children with similar program under conventional banking using Barbie character from Mattel Inc. 	AJM

No	Tanggal Date	Tempat Location	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
26	10 Oktober 2013 10 October 2013	Ruang Rapat DPS, Gedung SS3 SSB Meeting Room, SS3 Building	Pembahasan SGF khususnya mengenai fungsi dan peranan DPS dalam pengawasan kepatuhan Syariah terhadap kegiatan usaha Syariah Bank. Discussion on SGF especially the function and role of SSB in overseeing Shariah compliance within the Bank's Shariah activities.	1. MAI 2. MNN 3. AJM
27	17 Oktober 2013 17 October 2013	Ruang Rapat DPS, Gedung SS3 SSB Meeting Room, SS3 Building	Pembahasan lanjutan mengenai SGF, khususnya menyangkut fungsi dan peran DPS yang berkaitan dengan: 1. Shariah Management 2. Shariah Risk Management 3. Shariah Compliance 4. Shariah Audit 5. Shariah Review Continued discussion on SGF, especially the function and role of SSB related to: 1. Shariah Management 2. Shariah Risk Management 3. Shariah Compliance 4. Shariah Audit 5. Shariah Review	1. MAI 2. MNN 3. AJM
28	24 Oktober 2013 24 October 2013	Ruang Rapat DPS, Gedung SS3 SSB Meeting Room, SS3 Building	1. Pembahasan materi e-Learning Modul Comprehension of Shariah Banking. 2. Persetujuan template standar akad-akad IMBT untuk penerbitan SE mengenai produk IMBT. 1. Discussion on material of Comprehension of Shariah Banking e-Learning Module. 2. Approval for standard templates of IMBT contracts for the issuance of SE regarding IMBT products.	1. MAI 2. MNN 3. AJM
29	31 Oktober 2013 31 October 2013	Ruang Rapat DPS, Gedung SS3 SSB Meeting Room, SS3 Building	Pembahasan mengenai kinerja keuangan BII UUS periode September 2013. Discussion on BII UUS financial performance as of September 2013.	1. MAI 2. MNN 3. AJM
30	11 November 2013 11 November 2013	Ruang Rapat DPS, Gedung SS3 SSB Meeting Room, SS3 Building	Pembahasan mengenai pembagian reward/'iwadh/ju'l penempatan pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang di-accrue dan diakui untuk dibagikan setiap bulan kepada nasabah. Discussion on reward/'iwadh/ju'l payment from placement on Bank Indonesia Certificate Shariah (SBIS) that has been accrued and acknowledged to be distributed to customers on monthly basis.	1. MAI 2. MNN 3. AJM
31	14 November 2013	Ruang Rapat DPS, Gedung SS3 SSB Meeting Room, SS3 Building	1. Penyelarasan dan penataan ulang format Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening Simpanan yang mengatur produk Konvensional dan produk Syariah. 2. Pembahasan dan persetujuan format akad murabahah untuk produk mikro Syariah. 3. Pembahasan mengenai format Surat Penegasan Pembiayaan untuk nasabah dengan fasilitas pembiayaan Syariah dan konvensional. 1. Alignment and adjustment of the format of General Terms and Conditions for New Savings Accounts applied to Conventional and Shariah products. 2. Discussion and approval on murabahah contract format for Shariah micro product. 3. Discussion on the format of Financing Confirmation Letter for customers of Shariah and conventional financing products.	1. MAI 2. MNN 3. AJM

No	Tanggal Date	Tempat Location	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
32	25 November 2013	Ruang Rapat DPS, Gedung SS3 SSB Meeting Room, SS3 Building	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentasi dokumen SGF sesuai dengan persetujuan RMC dan ROC. 2. Diskusi mengenai metode <i>Transfer Pricing</i> sebagai mekanisme internal untuk penentuan <i>pricing</i> yang dikenakan Bank. <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentation of SGF in accordance with approval from RMC and ROC. 2. Discussion on Transfer Pricing method as internal mechanism to determine pricing imposed by the Bank. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. MAI 2. MNN 3. AJM
33	28 November 2013	Ruang Rapat DPS, Gedung SS3 SSB Meeting Room, SS3 Building	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan mengenai pengenaan margin murabahah efektif sebagai acuan internal menggunakan <i>benchmark/</i> acuan <i>rate</i> yang berlaku di <i>market</i> seperti <i>BI rate</i> atau <i>SBIS rate</i>. 2. Presentasi fitur Giro Bisnis BII. 3. Presentasi material e-Learning Shariah Module Comprehension of Shariah Banking (Lanjutan). 4. Pembahasan mengenai penyesuaian dan penyesuaian format SOP Mikro untuk digunakan bagi produk mikro Syariah dan produk mikro konvensional. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on administering murabahah effective margin as internal reference of benchmark rate similar to the benchmark rate in the market, such as BI rate or SBIS rate. 2. Presentation on BII Giro Bisnis. 3. Presentation on Shariah e-Learning Module Comprehension of Shariah Banking (Continued) 4. Discussion on alignment and adjustment of the format of Micro SOP to be applied to micro products of both conventional and Shariah banking. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. MNN 2. AJM
34	2 Desember 2013 2 December 2013	Ruang Rapat DPS, Gedung SS3 SSB Meeting Room, SS3 Building	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi kerangka tata kelola Syariah berdasarkan SGF yang telah disetujui oleh ROC. 2. Diskusi dengan Komisaris BII mengenai implementasi SGF dan peningkatan peran/keterlibatan semua pemangku kepentingan internal untuk bersama-sama menjaga kesesuaian prinsip Syariah dalam menjalankan kegiatan usaha Syariah Bank. 3. Presentasi dan diskusi mengenai rencana dan target pencapaian BII UUS pada 2014 - 2016. <ol style="list-style-type: none"> 1. Socialization of Shariah Governance Framework as approved by ROC. 2. SSB discussion with BII Commissioner regarding implementation of SGF and the increased role/ involvement of all internal stakeholders, promoting joint efforts to ensure conformity to Shariah principles in executing the Bank's Shariah business activities. 3. Presentation and discussion on BII UUS plan and realization target for the period 2014 - 2016. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. AI 2. MAI 3. MNN 4. AJM 5. HB
35	9 Desember 2013 9 December 2013	Ruang Rapat DPS, Gedung SS3 SSB Meeting Room, SS3 Building	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentasi dan diskusi draft Shariah Compliance Policy (SCP) sebagai turunan SGF. 2. Pembahasan mengenai potongan angsuran murabahah. <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentation and discussion on Shariah Compliance Policy (SCP) draft as the subset of SGF. 2. Discussion on discount of murabahah installment. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. MAI 2. MNN 3. AJM

No	Tanggal Date	Tempat Location	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
36	21 Desember 2013 21 December 2013	Ruang Rapat DPS, Gedung SS3 SSB Meeting Room, SS3 Building	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi kerangka tata kelola Syariah berdasarkan SGF yang telah disetujui oleh ROC. Diskusi dengan Presiden Direktur BII/Direktur UUS mengenai implementasi SGF dan peningkatan peran/ keterlibatan semua pemangku kepentingan internal untuk bersama-sama menjaga kesesuaian prinsip Syariah dalam menjalankan kegiatan usaha Syariah Bank. Rencana agenda pertemuan antara manajemen BII UUS, DPS dan Presiden Direktur BII/Direktur UUS. Diskusi mengenai peningkatan peran DPS dalam proses bisnis/pembiayaan Syariah dan frekuensi kunjungan/ pemeriksaan cabang dan transaksi berskala besar pada kantor pusat. Presentasi mengenai inisiatif-inisiatif kegiatan BII UUS pada 2014. 	<ol style="list-style-type: none"> MAI MNN AJM TZ HB

Nama / Name	Inisial / Initial	Jabatan / Position
M. Anwar Ibrahim	MAI	Ketua DPS / SSB Chairman
Muh. Nahar Nahrawi	MNN	Anggota DPS / SSB Member
Abdul Jabar Majid	AJM	Anggota DPS / SSB Member
Achjar Iljas	AI	Komisaris BII / BII Commissioner
Taswin Zakaria	TZ	Presiden Direktur BII / President Director / Director in charge of UUS
Herwin Bustaman	HB	Head, Syariah Banking

Di samping melalui pertemuan, komunikasi dan konsultasi dengan DPS juga dilakukan melalui media komunikasi lainnya untuk mendukung proses review akad, formulir, kebijakan dan SOP produk.

Opini DPS

DPS melakukan review dan memberikan opini terhadap pedoman operasional dan produk & jasa BII UUS yang diluncurkan.

In addition to meetings, communications and consultation with SSB are also conducted through other communications medium to support the process of contract review, forms, policies, and products' SOP.

SSB Opinion

SSB reviews and provides opinions on BII UUS' products and services' operating guidelines.

Selama 2013, DPS mengeluarkan 14 opini Syariah baik yang berkaitan dengan rencana produk, layanan baru BII UUS dan aspek operasional bank lainnya. Opini yang dikeluarkan DPS selalu mengacu dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Opini DPS yang telah dikeluarkan selama 2013 adalah sebagai berikut:

In 2013, SSB issued 14 Shariah opinions related to product plan, new BII UUS services, and other aspects of the Bank's operations. The opinions issued by SSB always refer to the fatwas from DSN-MUI.

Opinions of SSB issued throughout 2013 are:

No	Tanggal Date	No. Opini No. Opinion	Perihal Opini Summary of Opinion
1	23 Januari 2013 23 January 2013	M.2013.001/BOC-Syariah Supervisory M.2013.001/BOC-Syariah Supervisory	Produk Rahn Rahn Product
2	28 Maret 2013 28 March 2013	M.2013.002/BOC-Syariah Supervisory M.2013.002/BOC-Syariah Supervisory	Akad Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik (IMBT) untuk Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor, Alat Berat dan <i>Trucking</i> Akad Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik (IMBT) untuk Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor, Alat Berat dan <i>Trucking</i>
3	25 April 2013 25 April 2013	M.2013.003/BOC-Syariah Supervisory M.2013.003/BOC-Syariah Supervisory	Produk Murabahah <i>Warehouse Financing</i> Murabahah Warehouse Financing Product
4	25 April 2013	M.2013.004/BOC-Syariah Supervisory M.2013.004/BOC-Syariah Supervisory	Pembiayaan IMBT Korporasi IMBT Corporate Financing
5	25 April 2013	M.2013.005/BOC-Syariah Supervisory M.2013.005/BOC-Syariah Supervisory	Produk Pembiayaan Ijarah <i>Sale & Lease Back</i> Ijarah Sale & Lease Back Financing Product
6	2 Mei 2013 2 May 2013	M.2013.006/BOC-Syariah Supervisory M.2013.006/BOC-Syariah Supervisory	Produk Pembiayaan Ijarah <i>Refinancing</i> Ijarah Refinancing Product
7	2 Mei 2013 2 May 2013	M.2013.007/BOC-Syariah Supervisory M.2013.007/BOC-Syariah Supervisory	Produk Pembiayaan BII Rumah Syariah iB dengan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMq) Financing Product - BII Rumah Syariah iB Musyarakah Mutanaqisah (MMq) Contract
8	13 Juni 2013 13 June 2013	M.2013.008/BOC-Syariah Supervisory M.2013.008/BOC-Syariah Supervisory	Perluasan Aplikasi Layanan <i>Electronic Data Capture</i> (EDC) Syariah Expansion of Shariah Electronic Data Capture (EDC) Service
9	29 Agustus 2013 29 August 2013	M.2013.009/BOC-Syariah Supervisory M.2013.009/BOC-Syariah Supervisory	<i>Take Over Top Up</i> Nasabah BII UUS dengan Skema Murabahah atau Skema MMq Take Over Top Up Customer BII UUS using Murabahah or MMq Schemes
10	24 September 2013	M.2013.010/BOC-Syariah Supervisory M.2013.010/BOC-Syariah Supervisory	Jenis Usaha dan <i>Banking Relationship</i> (<i>Funding</i> dan <i>Financing</i> Syariah) Type of Business and Banking Relationship Shariah (<i>Funding</i> dan <i>Financing</i> Syariah)
11	24 September 2013	M.2013.011/BOC-Syariah Supervisory M.2013.011/BOC-Syariah Supervisory	Insentif Mudharabah bagi Nasabah Deposito Mudharabah Incentive to Time Deposit
12	24 September 2013	M.2013.012/BOC-Syariah Supervisory M.2013.012/BOC-Syariah Supervisory	Produk Giro Mudharabah Mudharabah Current Account Product
13	11 November 2013	M.2013.013/BOC-Syariah Supervisory M.2013.013/BOC-Syariah Supervisory	Transaksi Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Dengan Bagi Hasil Akrual dan Didistribusikan Setiap Bulan Transaction of Shariah Certificate of Bank Indonesia Shariah (SBIS) With Accrued Profit-Sharing and Distributed on Monthly Basis
14	28 November 2013	M.2013.014/BOC-Syariah Supervisory M.2013.014/BOC-Syariah Supervisory	Kartu Debit untuk Rekening Syariah Debit Card for Shariah Accounts

Laporan Hasil Pengawasan DPS

DPS melakukan pengawasan terhadap kegiatan BII UUS dengan melakukan kunjungan dan pemeriksaan kegiatan usaha Syariah di KCS, LS dan Kantor Pusat untuk memastikan implementasi produk & jasa Syariah dengan prinsip Syariah. Di samping kunjungan dan pemeriksaan juga dilakukan diskusi dengan manajemen BII UUS untuk memperoleh keterangan-keterangan terkait kegiatan BII UUS sebagai bagian pengawasan DPS.

Review DPS terhadap kegiatan BII UUS dilakukan setiap semester dan dituangkan dalam Laporan Pengawasan DPS yang dilaporkan kepada Bank Indonesia/OJK. Pada pemeriksaan DPS untuk periode 2013, DPS menetapkan pemeriksaan KCS dan LS yang berada di kota Bandung untuk pengambilan sampel transaksi Syariah.

BII UUS telah menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS Semester I dan Semester II 2013 kepada Bank Indonesia/OJK masing-masing melalui surat No.S.2013.080/PRES DIR tanggal 27 Agustus 2013 dan No.S.2014.012/PRES DIR tanggal 27 Februari 2014.

Selama 2013, DPS melakukan pengawasan terhadap produk dan layanan baru BII UUS yang akan diluncurkan, yaitu sebagai berikut:

SSB Supervisory Report

SSB supervises the activities of BII UUS by conducting visits and inspection on Shariah business activities to Shariah Branch Offices (KCS), Office Channeling (OC), and Head Office to ensure that Shariah products and services are implemented in accordance with Shariah principles. Aside from visits and inspections, SSB also discusses with BII UUS management to obtain information regarding BII UUS activities as part of SSB oversight function.

SSB review on BII UUS activities is conducted every semester and the result is administered in SSB Supervisory Report, submitted to Bank Indonesia OJK. In SSB review for 2013 period, SSB established KCS and OC located in kota Bandung as samples for Shariah transaction.

BII UUS has submitted its Semester I and Semester II 2013 SSB Supervisory Report to Bank Indonesia/OJK, by letter No.S.2013.080/PRES DIR dated 27 August 2013 and No.S.2014.012/PRES DIR dated 27 February 2014, respectively.

During 2013, SSB had supervised on the new products & services that will be launched by BII UUS, as follows:

Pengawasan terhadap Produk Baru BII UUS I Supervisory on BII UUS New Products

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester I 2013

Report of SSB Supervisory for the First Semester of 2013

No	Nama Produk Baru Name of New Product	Ringkasan Hasil Pengawasan DPS Summary of SSB Oversight
1	Pembiayaan BII Tunai Emas iB BII Tunai Emas iB Financing Product	<p>Produk ini untuk membiayai keperluan dana jangka pendek golongan nasabah usaha mikro & kecil dan keperluan lain.</p> <p>DPS telah memberikan opininya yaitu No.M.2013.001/BOC – Syariah Supervisory tanggal 23 Januari 2013 tentang Produk Rahn.</p> <p>This product finances short-term fund needs of micro & small enterprises segment and other needs not included in the investment purpose.</p> <p>SSB has rendered its opinion No.M.2013.001/BOC – Syariah Supervisory dated 23 January 2013 on Rahn Product.</p>

Pengawasan terhadap Produk Baru BII UUS | Supervisory on BII UUS New Products

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester I 2013 Report of SSB Supervisory for the First Semester of 2013		
No	Nama Produk Baru Name of New Product	Ringkasan Hasil Pengawasan DPS Summary of SSB Oversight
2	Pembiayaan <i>Joint Financing</i> BII Syariah – BII Finance Joint Financing BII Syariah – BII Finance	<p>Produk ini merupakan pembiayaan murabahah <i>joint financing</i> antara BII UUS dan BII Finance kepada konsumen.</p> <p>DPS telah memberikan opininya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No.M.2012.12/BOC – Syariah Supervisory tanggal 17 September 2012 perihal Pembiayaan Joint Financing ke BII Finance. 2. No.M.2013.002/BOC – Syariah Supervisory tanggal 28 Maret 2013 perihal Ijarah Muntahiya Bi tamlik (IMBT) untuk Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor, Alat Berat dan Trucking. <p>A murabahah joint financing product from BII UUS and BII Finance for consumers (Customers).</p> <p>SSB has rendered its opinion as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No.M.2012.12/BOC – Syariah Supervisory dated 17 September 2012 on Joint Financing to BII Finance. 2. No.M.2013.002/BOC – Syariah Supervisory dated 28 March 2013 on Ijarah Muntahiya Bi tamlik (IMBT) for Vehicles, Heavy Equipment, and Trucking Financing.
3	BII Syariah Inventory Financing iB (Murabahah Warehouse Financing) BII Syariah Inventory Financing iB (Murabahah Warehouse Financing)	<p>Produk pembiayaan ini hanya untuk pembelian persediaan barang dari <i>supplier</i> untuk keperluan produksi yang diidentifikasi oleh Nasabah dan disetujui oleh Bank.</p> <p>DPS telah memberikan opininya yaitu No.M.2013.003/BOC – Syariah Supervisory tanggal 25 April 2013 tentang Produk Murabahah Warehouse Financing.</p> <p>This product finances procurement good from suppliers for production purposes specified by the Customer and approved by the Bank.</p> <p>SSB has rendered its opinion No.M.2013.003/BOC – Syariah Supervisory dated 25 April 2013 on Murabahah Warehouse Financing Product.</p>
4	BII Corporate Leasing iB (Ijarah Muntahiya Bi Tamlik – IMBT) BII Corporate Leasing iB (Ijarah Muntahiya Bi Tamlik – IMBT)	<p>Produk ini merupakan pembiayaan jangka menengah dan panjang untuk nasabah perusahaan yang digunakan untuk perolehan aset tetap melalui skema <i>direct leasing</i> dan untuk memperoleh dana dari aset tetap yang telah dimiliki perusahaan melalui skema <i>sale and lease back</i>.</p> <p>DPS telah memberikan opininya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No.M.2013.004/BOC – Syariah Supervisory tanggal 25 April 2013 tentang Produk Ijarah Muntahiya bi Tamlik (IMBT). 2. No.M.2013.005/BOC – Syariah Supervisory tanggal 25 April 2013 tentang Produk Ijarah Sale and Lease Back. 3. No.M.2013.006/BOC – Syariah Supervisory tanggal 2 Mei 2013 tentang Produk Pembiayaan Ijarah Re-Financing. <p>A medium and long term financing for corporate customers to acquire fixed assets through direct leasing scheme and to gain funds from the fixed assets owned by the company through sale and lease back scheme.</p> <p>SSB has rendered its opinions as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No.M.2013.004/BOC – Syariah Supervisory dated 25 April 2013 on Ijarah Muntahiya bi Tamlik (IMBT) Product. 2. No.M.2013.005/BOC – Syariah Supervisory dated 25 April 2013 on Ijarah Sale and Lease Back Product. 3. No.M.2013.006/BOC – Syariah Supervisory dated 2 May 2013 on Ijarah Re-Financing Product.
5	BII Rumah Syariah iB (Musyarakah Mutanaqisah – MMq) BII Rumah Syariah iB (Musyarakah Mutanaqisah – MMq)	<p>Pembiayaan bersama antara bank dan nasabah untuk kepemilikan rumah secara bersama (<i>partnership</i>).</p> <p>DPS telah memberikan opininya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No.M.2013.017/BOC – Syariah Supervisory tanggal 20 Desember 2013 tentang Rumah Syariah dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMq). 2. No.M.2013.007/BOC – Syariah Supervisory tanggal 2 Mei 2013 tentang BII Rumah Syariah MMq. <p>Joint financing (partnership) between the Bank and customer for house ownership.</p> <p>SSB has rendered its opinions as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No.M.2013.017/BOC – Syariah Supervisory dated 20 December 2013 on Rumah Syariah with Musyarakah Mutanaqisah (MMq) Contract. 2. No.M.2013.007/BOC – Syariah Supervisory dated 2 May 2013 on BII Rumah Syariah MMq.

Pengawasan terhadap Produk Baru BII UUS I Supervisory on BII UUS New Products

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester I 2013 Report of SSB Supervisory for the First Semester of 2013		
No	Nama Produk Baru Name of New Product	Ringkasan Hasil Pengawasan DPS Summary of SSB Oversight
6	Perluasan Aplikasi Layanan EDC Syariah Shariah EDC Application Service Expansion	<p>Perluasan Aplikasi Layanan EDC Syariah bertujuan untuk meningkatkan fungsi dari mesin EDC BII UUS yang telah ada dengan menambahkan fitur-fitur yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan menggunakan kartu ATM/Debit dengan verifikasi PIN melalui mesin EDC BII UUS.</p> <p>DPS memberikan opininya yaitu No.M.2013.008/BOC – Syariah Supervisory tanggal 13 Juni 2013 tentang Perluasan Aplikasi Layanan EDC Syariah.</p> <p>Shariah EDC Application Service expansion aims to enhance the function of existing BII UUS EDC units by adding features that enable customers to perform banking transactions using ATM/Debit card with PIN verification through BII UUS EDC units.</p> <p>SSB has rendered its opinion No.M.2013.008/BOC – Syariah Supervisory dated 13 June 2013 on Shariah EDC Application Service Expansion.</p>

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester II 2013
Report of SSB Supervisory for the Second Semester of 2013

No	Nama Produk Baru Name of New Product	Ringkasan Hasil Pengawasan DPS Summary Result of SSB Oversight
1	Giro Mudharabah Mudharabah Current Account	<p>Produk Giro dengan akad Mudharabah dikembangkan sebagai produk pendanaan murah yang kompetitif dan sesuai dengan Syariah, serta untuk melengkapi fitur produk giro yang sudah ada.</p> <p>DPS telah memberikan opininya yaitu No.M.2013.12/BOC-Syariah Supervisory tanggal 24 September 2013 tentang Produk Giro Mudharabah.</p> <p>Current Account product under Mudharabah contract was developed as competitive low-cost-funding product based on Shariah principle as well as to complement the existing current account product's features.</p> <p>SSB has rendered its opinion No.M.2013.12/BOC-Syariah Supervisory dated 24 September 2013 on Mudharabah Current Account Product.</p>

Pengawasan terhadap Kegiatan Bank - BII UUS

Selama 2013, DPS melakukan pengawasan terhadap kegiatan BII UUS yang meliputi pengumpulan dana dan pembiayaan yaitu sebagai berikut:

Supervisory on the Bank-BII UUS Activities

During 2013, SSB had supervised on BII UUS activities including fund collection and fund disbursement, as follows:

Penghimpunan Dana Funding		Pembiayaan Financing		
Mudharabah	Wadiah	Murabahah	Mudharabah & Musyarakah	Qardh
<p>Pengawasan kegiatan penghimpunan dana dengan akad Mudharabah, meliputi pengawasan terhadap produk BII Tabungan Musafir iB, BII Tabungan Investasi iB dan BII Deposito iB.</p> <p>Supervisory on funds collection based on Mudharabah contract that consists of oversight on BII Tabungan Musafir iB, BII Tabungan Investasi iB, and BII Deposito iB products.</p>	<p>Pengawasan kegiatan penghimpunan dana dengan akad Wadiah, meliputi pengawasan terhadap produk BII Giro iB dan BII TabunganKu iB.</p> <p>Supervisory on funds collection based on Mudharabah contract that consists of oversight on BII Giro iB and BII TabunganKu iB products.</p>	<p>Pengawasan kegiatan penyaluran dana dengan akad Murabahah, meliputi pengawasan terhadap produk Konsumer (KPR iB), Mikro Syariah dan SME Syariah, Komersial dan Korporasi.</p> <p>Supervisory on funds disbursement based on Murabahah contract that consists of oversight on consumer product (KPR iB), Mikro Syariah, and SME Syariah, Commercial and Corporate.</p>	<p>Pengawasan kegiatan penyaluran dana dengan akad Mudharabah & Musyarakah, meliputi pengawasan terhadap produk MMq, Mudharabah, Komersial dan Korporasi.</p> <p>Supervisory on funds disbursement based on Mudharabah & Musyarakah contracts, consists of MMq, Mudharabah products, Commercial and Corporate.</p>	<p>Pengawasan terhadap transaksi pembiayaan dengan akad Qard dilakukan terhadap produk BII Tunai Emas iB.</p> <p>Supervisory on financing transaction based on Qard contract on BII Tunai Emas iB product.</p>
Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester I 2013 Report of SSB Supervisory for First Semester 2013				
Penghimpunan Dana Funding		Pembiayaan Financing		
Mudharabah	Wadiah	Murabahah	Mudharabah & Musyarakah	Qardh
<p>Selama Semester I 2013 terdapat pembukaan produk penghimpunan dana dengan akad Mudharabah sebanyak 1.489 rekening.</p> <p>DPS menetapkan uji sampel secara acak terhadap 9 sampel Nasabah untuk menguji kesesuaian dan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip Syariah pada produk tersebut.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan terhadap sampel dokumen transaksi meliputi aplikasi pembukaan rekening dan akad penghimpunan dana, transaksi sudah memenuhi ketentuan/prinsip Syariah.</p> <p>In Semester I 2013, there were 1,489 account opening with Mudharabah contract, with the following details.</p> <p>SSB determined random sample testing on 9 Customer samples to ensure the product's conformity and quality of compliance with Sharia principles.</p>	<p>Selama Semester I 2013 terdapat pembukaan produk penghimpunan dana dengan akad Wadiah sebanyak 1.045 rekening.</p> <p>DPS menetapkan uji sampel secara acak terhadap 6 sampel Nasabah untuk menguji kesesuaian dan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip Syariah pada produk tersebut.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan terhadap sampel dokumen transaksi meliputi aplikasi pembukaan rekening dan akad penghimpunan dana, transaksi sudah memenuhi ketentuan/prinsip Syariah.</p> <p>In Semester I 2013, there were 1,045 account opening with Wadiah contract, with the following details.</p> <p>SSB determined random sample testing on 6 Customer samples to ensure the product's conformity and quality of compliance with Sharia principles.</p>	<p>Selama Semester I 2013 terdapat transaksi pembiayaan dengan akad Murabahah sebanyak 472 nasabah.</p> <p>DPS menetapkan uji sampel produk penyaluran dana dengan akad Murabahah pada 20 sampel Nasabah untuk menguji kesesuaian dan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip Syariah pada produk tersebut.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan terhadap sampel dokumen transaksi meliputi dokumen Aplikasi Permohonan Nasabah, Surat Kuasa Nasabah, Formulir Back End Control Fasilitas Baru dan Perpanjangan, Surat Penegasan Pembiayaan dan Akad Pembiayaan secara umum sudah memenuhi prinsip Syariah.</p> <p>DPS mengeluarkan 1 opini yaitu No.M.2013.003/BOC – Syariah Supervisory tanggal 25 April 2013 perihal Produk Murabahah Warehouse Financing untuk produk Murabahah segmen Korporasi.</p>	<p>Selama Semester I 2013 tidak terdapat pencairan baru untuk pembiayaan dengan akad Mudharabah dan Musyarakah, dan hanya terdapat perpanjangan fasilitas eksisting.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan penjelasan yang disampaikan, pelaksanaan pembiayaan Musyarakah sudah sesuai dengan ketentuan/prinsip Syariah.</p> <p>DPS mengeluarkan 1 opini yaitu No.M.2013.007/BOC – Syariah Supervisory tanggal 2 Mei 2013 perihal BII Rumah Syariah iB Musyarakah Mutanaqisah (MMq). Opini DPS ini ditujukan untuk produk pembiayaan BII Rumah Syariah iB dengan akad MMq sebagai alternatif pembiayaan rumah Syariah yang sudah ditawarkan sebelumnya yaitu BII Rumah iB dengan akad Murabahah.</p>	

Based on examination on samples of transaction documents that consist of account opening application and contract of funds collection, the transactions have complied with Syariah provisions/principles.

Based on examination on samples of transaction documents that consist of account opening application and contract of funds collection, the transactions have complied with Sharia provisions/principles.

in Semester I 2013, there were a total of 472 financing facilities with Murabahah contract, comprising:

SSB determined sample testing for funds disbursement with Murabahah contract on 20 Customer samples to ensure the product's conformity and quality of compliance with Sharia principles.

Based on examination on samples of transaction documents that consist of Customer Application, Customer Letter of Attorney, Back End Form of New and Extension Facility Control, Letter of Financing Confirmation, and Financing Contract, this product in general has complied with Sharia principles.

SSB issued 1 opinion No.M.2013.003/BOC Syariah Supervisory dated 25 April 2013 on Murabahah Warehouse Financing Product for Murabahah' s corporation segment.

In Semester I 2013, there were none of customers transacting with Mudharabah and Musyarakah contracts, but only extended existing facility.

Based on examination on samples of transaction documents mentioned earlier, this product of Musyarakah Financing in general has complied with Sharia principles.

SSB issued 1 opinion, opinion No.M.2013.007/BOC Syariah Supervisory dated 2 May 2013 on BII Rumah Syariah iB Musyarakah Mutanaqisah (MMq). This opinion addressed to BII Rumah Syariah iB Financing product with MMq contract as an alternative for Sharia mortgage mentioned earlier which is BII Rumah iB with Murabahah contract.

Penghimpunan Dana I Funding		Pembiayaan I Financing		
Mudharabah	Wadiah	Murabahah	Mudharabah & Musyarakah	Qardh
<p>Selama Semester II 2013 terdapat pembukaan produk penghimpunan dana dengan akad Mudharabah sebanyak 4.561 rekening.</p> <p>DPS menetapkan uji sampel secara acak terhadap 15 sampel Nasabah untuk menguji kesesuaian dan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip Syariah pada produk tersebut.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan terhadap sampel dokumen transaksi meliputi aplikasi pembukaan rekening dan akad penghimpunan dana, transaksi sudah memenuhi ketentuan/prinsip Syariah.</p> <p>DPS mengeluarkan 2 opini DPS yang berhubungan dengan produk ini.</p> <p>1. No.M.2013.011/BOC Syariah Supervisory tanggal 24 September 2013 perihal : Special Bonus Produk Deposito Mudharabah.</p> <p>2. No.M.2013.014/BOC Syariah Supervisory tanggal 28 September 2013 perihal : Kartu Debet untuk rekening Syariah.</p> <p>In Semester II 2013, there were 4,561 account opening with Mudharabah contract, with the following details.</p> <p>SSB determined random sample testing on 15 Customer samples to ensure the product's conformity and quality of compliance with Sharia principles.</p> <p>Based on examination on samples of transaction documents that consist of account opening application and contract of funds collection, the transactions have complied with Sharia provisions/principles.</p>	<p>Selama Semester II 2013 terdapat pembukaan produk penghimpunan dana dengan akad Wadiah sebanyak 1.164 rekening.</p> <p>DPS menetapkan uji sampel secara acak terhadap 15 sampel Nasabah untuk menguji kesesuaian dan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip Syariah pada produk tersebut.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan terhadap sampel dokumen transaksi meliputi aplikasi pembukaan rekening dan akad penghimpunan dana, transaksi sudah memenuhi ketentuan/prinsip Syariah.</p> <p>DPS mengeluarkan 1 opini DPS yang berhubungan dengan produk ini, yaitu No.M.2013.014/BOC Syariah Supervisory tanggal 28 September 2013 perihal Kartu Debet untuk Rekening Syariah.</p> <p>In Semester II 2013, there were 1,164 account opening with Wadiah contract, with the following details:</p> <p>SSB determined random sample testing on 15 Customer samples to ensure the product's conformity and quality of compliance with Sharia principles.</p> <p>Based on examination on samples of transaction documents that consist of account opening application and contract of funds collection, the transactions have complied with Sharia provisions/principles.</p> <p>SSB issued 1 opinion related to the product No.M.2013.014/BOC Syariah Supervisory dated 28 September 2013 on Debit Card for Shariah account.</p>	<p>Selama Semester II 2013 terdapat transaksi pembiayaan dengan akad Murabahah sebanyak 600 fasilitas.</p> <p>DPS menetapkan uji sampel produk penyaluran dana dengan akad Murabahah pada 11 sampel Nasabah untuk menguji kesesuaian dan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip Syariah pada produk tersebut.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan terhadap sampel dokumen transaksi meliputi dokumen Aplikasi Permohonan Nasabah, Surat Kuasa Nasabah, Formulir Back End Control Fasilitas Baru dan Perpanjangan, Surat Penegasan Pembiayaan dan Akad Pembiayaan secara umum sudah memenuhi prinsip Syariah.</p> <p>DPS mengeluarkan 1 opini yaitu No.M.2013.010/BOC Syariah Supervisory tanggal 29 Agustus 2013 tentang Take Over dengan Top Up melalui Skema Murabahah atau Skema MMq.</p> <p>In Semester II 2013, there were a total of 600 financing with Murabahah contract.</p> <p>SSB determined sample testing for funds disbursement with Murabahah contract on 11 Customer samples to ensure the product's conformity and quality of compliance with Sharia principles.</p> <p>Based on examination on samples of transaction documents that consist of Customer Application, Customer Letter of Attorney, Back End Form of New and Extension Facility Control, Letter of Financing Confirmation, and Financing Contract, this product in general has complied with Sharia principles.</p>	<p>Selama Semester II 2013 terdapat transaksi pembiayaan dengan akad Mudharabah & Musyarakah sebanyak 189 nasabah.</p> <p>DPS menetapkan uji sampel produk penyaluran dana dengan akad Mudharabah & Musyarakah pada 11 sampel Nasabah untuk menguji kesesuaian dan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip Syariah pada produk tersebut.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan terhadap sampel dokumen transaksi meliputi dokumen Aplikasi Permohonan Nasabah, Surat Kuasa Nasabah, Formulir Back End Control Fasilitas Baru dan Perpanjangan, Surat Penegasan Pembiayaan dan Akad Pembiayaan secara umum sudah memenuhi prinsip Syariah.</p> <p>DPS mengeluarkan 1 opini yaitu No.M.2013.010/BOC Syariah Supervisory tanggal 29 Agustus 2013 tentang Take Over dengan Top Up melalui Skema Murabahah atau Skema MMq.</p> <p>In Semester I 2013, there were a total of 189 customers transacting with Mudharabah and Musyarakah contracts, with the following details:</p> <p>SSB determined sample testing for funds disbursement with Mudharabah and Musyarakah contracts on 11 Customer samples to ensure the product's conformity and quality of compliance with Sharia principles.</p> <p>Based on examination on samples of transaction documents that consist of Customer Application, Customer Letter of Attorney, Back End Form of New and Extension Facility Control, Letter of Financing Confirmation, and Financing Contract, this product in general has complied with Sharia principles.</p>	<p>Selama Semester II 2013 terdapat transaksi pembiayaan dengan Akad Qard Tunai Emas sebanyak 41 nasabah.</p> <p>DPS menetapkan uji sampel produk penyaluran dana dengan akad Qard untuk transaksi pembiayaan pada 15 sampel Nasabah untuk menguji kesesuaian dan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip Syariah pada produk ini.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan terhadap sampel dokumen, transaksi pembiayaan BII Tunai Emas iB secara umum sudah memenuhi prinsip Syariah.</p> <p>Selama periode Semester II 2013, DPS tidak mengeluarkan Opini yang berhubungan dengan produk ini.</p> <p>In Semester II 2013, there were 41 transactions of Tunai Emas product with Qard contract.</p> <p>SSB determined sample testing for funds disbursement with Qard contract for financing transaction on 15 Customer samples to ensure the product's conformity and quality of compliance with Sharia principles.</p> <p>Based on examination on samples of transaction documents, in general transaction of BII Tunai Emas iB has comply with Shariah principles.</p> <p>In the period of Semester II 2013, SSB did not issue any Opinion regarding this product.</p>

SSB issued 2 opinions related to below products:

1. No.M.2013.011/BOC Syariah Supervisory dated 24 September 2013 on Special Bonus of Mudharabah Time Deposit product.
2. No.M.2013.014/BOC Syariah Supervisory dated 28 September 2013 on Debit Card for Shariah account.

SSB issued 1 Opinion, opinion No.M.2013.010/BOC Syariah Supervisory dated 29 August 2013 on Take Over with Top Up using Murabahah or MMq schemes.

SSB issued 1 opinion, opinion No.M.2013.010/BOC Syariah Supervisory dated 29 August 2013 on Take Over with Top Up using Murabahah or MMq schemes.

Remunerasi DPS

Total remunerasi yang dibayarkan kepada DPS selama 2013 yang meliputi gaji adalah sebesar Rp491 juta.

SSB Remuneration

In 2013, total remuneration paid to SSB including salary is Rp491 million.

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya Type of Remuneration of Other Facility	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun Amount Received in 1 Year	
		Orang Person	Jutaan Rupiah in Million Rupiah
1.	Remunerasi Remuneration	3	491
2.	Fasilitas Lainnya Other facility	-	-
	a. Yang dapat dimiliki That can be owned		
	b. Yang tidak dapat dimiliki That cannot be owned		
Total		-	491

Jumlah Remunerasi *) per orang dalam 1 tahun Amount of Remuneration *) per person per year	Jumlah DPS Total SSB
Di atas Rp2 miliar / Over Rp2 billion	-
Di atas Rp1 miliar sd Rp2 miliar / Over Rp1 billion to Rp2 billion	-
Di atas Rp500 juta sd Rp1 miliar / Over Rp500 million to Rp1 billion	-
Rp500 juta ke bawah / Rp500 million and below	3

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

*) received in cash (non in kind)

Daftar Konsultan dan Penasehat

Pada 2013, BII UUS menggunakan konsultan untuk proyek yang bersifat khusus dan didasari dengan proses pemilihan dan kontrak yang jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konsultan tersebut independen, profesional dan memiliki kualifikasi yang memadai. Konsultan yang digunakan oleh BII UUS selama 2013 adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan Konsultan Name of Consulting Company	Bidang Area	Keterangan Description
Brandt Exigo Pte Ltd (Brandt International) Brandt Exigo Pte Ltd (Brandt International)	Jasa Konsultan Training Training Consultancy Service	Konsultasi proyek pengembangan dan <i>roll-out</i> 'Shariah Business School' yang merupakan <i>BII UUS learning program</i> baik modul Online (OL) maupun Class Room Training (CRT). Proyek ini bekerjasama dengan unit kerja internal lainnya yaitu BII – Talent Management & Organization Learning Consultation on 'Shariah Business School' development and rollout projects, a BII UUS' learning program by online (OL) module and Class Room Training (CRT). The project collaborates with other working units of BII – HC Talent Management & Organization Learning
LAPI ITB LAPI ITB	Jasa Produksi E-Learning Production Service	Proyek pengembangan materi 'Shariah Business School' yang merupakan <i>learning program BII UUS</i> untuk modul Online (OL). Proyek ini bekerjasama dengan unit kerja internal lainnya yaitu BII - Talent Management & Organization Learning 'Shariah Business School' material development project, BII UUS learning program for online (OL) module. The project collaborates with other working units of BII – HC Talent Management & Organization Learning
PT Bloomhead Indonesia (Voloxa) PT Bloomhead Indonesia (Voloxa)	Jasa Produksi E-Learning Production Service	Proyek pengembangan materi 'Shariah Business School' yang merupakan <i>learning program BII UUS</i> untuk modul Online (OL). Proyek ini bekerjasama dengan unit kerja internal lainnya yaitu BII - Talent Management & Organization Learning 'Shariah Business School' material development project, BII UUS learning program for online (OL) module. The project collaborates with other working units of BII – HC Talent Management & Organization Learning
Assegaf Hamzah & Partners Assegaf Hamzah & Partners	Konsultan Hukum Legal Consultant	Pemberian opini hukum terkait pilihan forum untuk penyelesaian sengketa pada pembiayaan Syariah – program bersama dengan Maybank Islamic Banking. Administering legal opinion regarding the choice of dispute settlement forum for Shariah financing on joint program with Maybank Islamic Banking.

Penyimpangan Internal

Selama 2013, tidak terdapat penyimpangan internal (*internal fraud*) di BII UUS.

List of Consultants and Advisors

In 2013, BII UUS engaged consultants and advisors for special projects. The selection processes and contracts were in accordance with prevailing regulations. The consultants and advisors were independent, professional consultants with adequate qualifications. The list of of consultants and advisors engaged by BII UUS in 2013 are:

Internal Fraud

In 2013, there was no internal fraud incident in BII UUS.

Internal Fraud (dalam 1 tahun) (in 1 year)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh / Number of Cases Committed by					
	Dewan Komisaris/ Direksi Board of Commissioners/ Directors		Pegawai Tetap Permanent Employees		Pegawai tidak Tetap Temporary Employees	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Total Fraud Resolved	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan In process of BII UUS Internal settlement		-		-		-
Dalam proses penyelesaian di internal UUS	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya Resolution process pending	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum Followed up with legal action		-		-		-

Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BII UUS

Permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi BII UUS selama periode 2013 adalah sebagai berikut:

Litigations and Resolution Efforts by BII UUS

Civil and criminal cases faced by BII UUS during 2013 are:

Permasalahan Hukum / Legal Case	Jumlah / Total	
	Perdata / Civil	Pidana / Criminal
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) Resolved (has legally binding resolution)	-	1
Dalam proses penyelesaian In process of resolution	1	-
Total	1	1

Penghimpunan Dana oleh Deposan Inti

Per 31 Desember 2013, deposito inti BII UUS adalah sebagai berikut:

Funds Collection by Depositors

As of 31 December 2013, BII UUS depositors are as follows:

(Miliar Rupiah) / In Billion Rupiah)

No	Nama Deposan Name of Depositors	Giro Current Account	Tabungan Savings	Deposito Time Deposit	Total
1	A	-	-	455	455
2	B	-	-	205	205
3	C	-	-	170	170
4	D	0,01	-	115	115
5	E	-	-	113	113
6	F	-	-	107	107
7	G	-	0,02	78	78
8	H	-	-	74	74
9	I	0,16	-	72	73
10	J	-	-	70	70

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, BII UUS tidak memberikan fasilitas terkait penghimpunan dana untuk Deposan.

Pembiayaan kepada Nasabah Pembiayaan Inti

Secara umum BII UUS telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana kepada Nasabah dimana proses-proses penyaluran dana termasuk review calon Nasabah dan pengikatan agunan sudah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pula produk yang ditawarkan sudah memperoleh persetujuan regulator dan dilengkapi dengan opini DPS dan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Untuk meningkatkan kehati-hatian, BII UUS sedang mengurangi konsentrasi eksposur pada beberapa Nasabah inti.

BII UUS telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyaluran dana kepada Nasabah dan pedoman tersebut sudah dilaksanakan dengan baik. Untuk meningkatkan pedoman pada level operasional sehubungan dengan peningkatan aktivitas pada LS, maka dilakukan penyesuaian format dokumentasi kebijakan dan prosedur di BII UUS dan BII. SOP/kebijakan selalu dikaji ulang, terutama apabila ada perubahan/*update* baik dari internal maupun berkaitan dengan perubahan ketentuan regulator.

Per 31 Desember 2013, nasabah pembiayaan inti BII UUS adalah sebagai berikut:

In accordance with the regulation, BII UUS does not provide facility in regard with funds collection for Depositors.

Financing for Core Financing Customers

Overall, BII UUS has applied prudence principle in executing funds disbursement to Customers. Required processes including reviewing potential Customers and signing of collateral agreement have been implemented according to prevailing regulations. Products offered to the customers have also obtained approval from regulators, complemented by SSB opinion that is issued in accordance with Fatwa from DSN-MUI. To increase prudence, BII UUS is lessening concentration of exposures on several core Customers.

BII UUS has written policy guidelines and procedures regarding funds disbursement to Customers and the guidelines are adhered robustly. To enhance the guidelines at operational level in line with increasing activities in Shariah Services, the format of policies and procedures documentation in BII UUS and BII are aligned. Frequently review on SOP/Policies is in place, especially in the event of amendment/update of regulations by internal management and regulators.

As of 31 December 2013, BII UUS core financing customers are as follows:

(Miliar Rupiah) / (in Million Rupiah)

No	Nama Debitur Debtor's Name	Pembiayaan Berdasarkan Akad / Financing Based on Contract							Nominal
		Murabahah	Musarakah	Istishna	Mudharabah	Musarakah Mutanaqisah	IMBT	Salam	
1	A	464	7	-	-	-	-	-	470
2	B	206	-	-	-	-	-	-	206
3	C	183	-	-	-	-	-	-	183
4	D	-	57	-	-	-	-	-	57
5	E	-	57	-	-	-	-	-	57
6	F	53	-	-	-	-	-	-	53
7	G	-	38	-	-	-	-	-	38
8	H	-	16	-	-	-	-	-	16
9	I	-	14	-	-	-	-	-	14
10	J	14	-	-	-	-	-	-	14

Nasabah Pembiayaan dan Nasabah Deposita BII UUS selalu diadministrasikan dengan baik dan dilaporkan kepada Bank Indonesia/OJK melalui LBBU (periode mingguan) dan LBUS (periode bulanan).

Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial

Bentuk tanggung jawab sosial BII UUS diimplementasikan dengan menyalurkan dana sosial yang berhasil dikumpulkan BII UUS baik dari dana Zakat & Infaq/Shadaqah (ZIS) maupun dana kebajikan (Qardhul Hasan) yang berasal dari denda, pendapatan non-halal (bukan hak BII UUS) dan dana sosial lainnya.

Selama 2013, BII UUS mencatat pengumpulan dana ZIS, yaitu dana Infaq/Shadaqah sebesar Rp 40,3 juta, dana Zakat sebesar Rp 28,6 juta dan dana Qard/Sosial sebesar Rp 602,6 juta.

Pelaporan BII UUS

Dalam hal pelaporan, BII UUS telah didukung oleh sistem informasi manajemen yang handal dan sumber daya manusia yang kompeten, serta memiliki IT *security system* yang memadai sehingga informasi UUS tersedia secara akurat dan tepat waktu.

BII UUS telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu di surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas, yaitu:

1. Triwulan I 2013 telah dipublikasikan di harian Media Indonesia tanggal 26 April 2013.
2. Triwulan II 2013 telah dipublikasikan di harian Media Indonesia dan Bisnis Indonesia pada tanggal 30 Juli 2013.
3. Triwulan III 2013 telah dipublikasikan di harian Media Indonesia dan Bisnis Indonesia pada tanggal 29 Oktober 2013.
4. Triwulan IV 2013 telah dipublikasikan di harian Bisnis Indonesia dan Media Indonesia pada tanggal 20 Februari 2014.

BII UUS ensures meticulous documentation of its Financing Customers and Depositors and report the registration to Bank Indonesia/OJK through LBBU (weekly report) and LBUS (monthly report).

Donations for Social Activities

As implementation of social responsibility, BII UUS disburses social funds collected from Zakat & Infaq/Shadaqah (ZIS) funds as well as benevolence funds (Qardhul Hasan) derived from penalties, non-halal income (income that is not the right of BII UUS to retain), and other social funds.

During 2013, SSB BII recorded fund collection of ZIS, an infaq/Shadaqah fund raising as much as Rp40.3 million, Zakat as Rp28.6 million and Qard/Social as Rp602.6million

BII UUS Reporting

In terms of reporting, BII UUS is supported by reliable management information systems and competent resources as well as sufficient IT security system, ensuring accurate and timely availability of information from UUS.

BII UUS has issued Quartely Financial Report and in accordance with regulations has published the report in Indonesian newspaper with extensive circulation:

1. Quarter I 2013 report published in Media Indonesia Newspaper on 26 April 2013.
2. Quarter II 2013 report published in Media Indonesia and Bisnis Indonesia Newspapers on 30 July 2013.
3. Quarter III 2013 report published in Media Indonesia and Bisnis Indonesia Newspapers on 29 October 2013.
4. Quarter IV 2013 report published in Media Indonesia and Bisnis Indonesia Newspapers on 20 February 2014.

Selama 2013, laporan-laporan BII UUS adalah BII UUS reports issued in 2013 are as follows: sebagai berikut:

Laporan Report	Frekuensi Frequency	Keterangan Description
Good Corporate Governance Good Corporate Governance	tahunan annual	Laporan Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Report
Rencana Bisnis Bank Bank Business Plan	tahunan annual	Laporan Rencana Kerja Bank Bank Business Plan Report
Perubahan Rencana Bisnis Bank Bank's Revised Business Plan	tahunan annual	Revisi Laporan Rencana Kerja Bank Revision on Bank Business Plan Report
Annual Operating Plan Annual Operating Plan	tahunan annual	Laporan Rencana Kerja Bank secara detail Line of Business Detailed Report of Bank Business Plan by Line of Business
Self Assessment GCG Self Assessment GCG	semester	Laporan self assessment BII UUS BII UUS Self Assessment Report
Compliance Plan Self Assessment (CPSA) Compliance Plan Self Assessment (CPSA)	semester	Laporan mengenai pemenuhan kepatuhan BII UUS Report on BII UUS Compliance
Laporan Publikasi Syariah (LPS) Shariah Publication Report	triwulan quarterly	Laporan mengenai Neraca, Laba/Rugi dan Aset BII UUS serta informasi distribusi bagi hasil Report on Balance Sheet, Profit/Loss, and Assets of BII UUS as well as profit-sharing distribution information
Realisasi Rencana Bisnis Bank Bank Business Plan Realization	triwulan quarterly	Realisasi Laporan Rencana Kerja Bank Realization of Bank Business Plan
Risk Compliance Self Assessment (RCSA) Risk Compliance Self Assessment (RCSA)	triwulan quarterly	Laporan mengenai temuan pemeriksaan terkait dengan manajemen risiko BII UUS Report on audit findings on BII UUS risk management
Risk Profile Risk Profile	triwulan quarterly	Laporan Profil Risiko Risk Profile Report
Shariah Portfolio Shariah Portfolio	bulanan monthly	Laporan kinerja bisnis BII UUS BII UUS business performance report
Monthly Business Report Monthly Business Report	bulanan monthly	Laporan kegiatan bulanan mengenai financing & projects BII UUS Monthly activities report on BII UUS financing & projects
Enterprise Risk Dashboard Enterprise Risk Dashboard	bulanan monthly	Laporan kinerja risk management BII UUS Report on BII UUS risk management performance
Shariah Performance by LoB Shariah Performance by LoB	bulanan monthly	Laporan kinerja BII UUS per Line of Business BII UUS performance report by Line of Business
Result Management Report (RMR) Result Management Report (RMR)	bulanan monthly	Laporan mengenai data keuangan BII UUS Report on BII UUS financial data
Laporan Bank Umum (LBU) Basel versi Excel Laporan Bank Umum (LBU) Basel versi Excel	bulanan monthly	Laporan mengenai data keuangan BII UUS Report on BII UUS financial data
Laporan un-used pembiayaan komitmen & kontinjensi Report on un-used financing commitment & contingency	bulanan monthly	Laporan mengenai un-used pembiayaan komitmen & kontinjensi Report on un-used financing commitment & contingency
Customer with collectibility (SM & NPF) Customer with collectibility (SM & NPF)	bulanan monthly	Laporan mengenai debitur dengan klasifikasi Special Mention dan Non Performing Financing BII UUS Report on debtors classified as Special Mention and BII UUS Non Performing Financing
Laporan Profit Distribusi Bagi Hasil dan Bonus Report on Distribution of Profit Sharing and Bonus	bulanan monthly	Laporan mengenai hasil investasi yang ditanamkan oleh nasabah Report on results of investments placed by customers
Laporan GWM Syariah Report on Shariah Statutory Reserve	bulanan monthly	Laporan mengenai Giro Wajib Minimum BII UUS Report on BII UUS Statutory Reserve
Laporan Keuangan Backdate Report on Backdated Finance	bulanan monthly	Laporan mengenai Neraca, Laba/Rugi dan Rekapitulasi Backdate BII UUS Report on BII UUS Balance Sheet, Profit/Loss and Backdated Recapitulation

Laporan Report	Frekuensi Frequency	Keterangan Description
Laporan NPL dan Credit Restructure NPL and Credit Restructure Report	bulanan monthly	Laporan mengenai kredit bermasalah dan restrukturisasi kredit UUS Report on BII UUS' non performing loans and credit restructuring
Laporan Sektor Ekonomi Syariah Shariah Economy Sector Report	bulanan monthly	Laporan mengenai pengelompokan pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi Report on financing classification based on economy sector
Laporan Keuangan Bank (LKB) Bank Financial Statements (LKB)	bulanan monthly	Laporan mengenai Neraca, Laba/Rugi, Aset dan Distribusi Bagi Hasil BII UUS Report on BII UUS Balance Sheet, Profit/Loss, Assets, and Profit Sharing Distributions
Laporan Monitoring Dana Usaha Syariah Shariah Funds Monitoring Report	bulanan monthly	Laporan mengenai dana modal kerja BII UUS, yaitu penyisihan dana bersih Bank Induk pada UUS Report on working capital of BII UUS, which is the net proceeds from the Bank to UUS
LKPBU LKPBU	bulanan monthly	Laporan penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu ATM (APMK) Report on Usage of ATM Cards as Payment System (APMK)
KPMM/ATMR KPMM/ATMR	bulanan monthly	Laporan Aktiva Tertimbang yang dimiliki terhadap modal dan risiko Report on Weighted Assets to capital and risk
LBUS LBUS	bulanan monthly	Laporan Neraca, R/L, Pembiayaan serta Rekening Administratif per cabang dan konsolidasi melalui website BI Report on Balance Sheet, P/L, Financing, Administrative Account of each branch and consolidation through BI website
LSMK Syariah (Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan) LSMK Syariah (Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan) / (Monetary and Financial System Stability)	bulanan monthly	Laporan Neraca, R/L, Pembiayaan serta Rekening Administratif dalam satuan angka penuh baik per cabang dan konsolidasi melalui website BI Report on Balance Sheet, P/L, Financing, Administrative Account on full nominal by branch and consolidation through BI website
Maturity Profile Maturity Profile	bulanan monthly	Laporan jatuh tempo arus kas Report on cash flow maturity
LBUS versi Excell LBUS versi Excell	bulanan monthly	Laporan Neraca, R/L, Pembiayaan serta Rekening Administratif per cabang dan konsolidasi perform dalam format Excell Report on Balance Sheet, P/L, Financing, Administrative Account of each branch and consolidation in Excell format
Laporan Nominatif Pembiayaan Financing Nominative Report	bulanan monthly	Laporan O/S Pembiayaan Report on Financing O/S P
Laporan Berkala Bank Umum Syariah (LBBUS) Periodic Report of Shariah Commercial Banks	mingguan monthly	Laporan mengenai Neraca, Laba/Rugi dan Aset BII UUS Report on BII UUS Balance Sheet, Profit/Loss, and Assets
Outstanding Surat Berharga Outstanding Securities	mingguan monthly	Pelaporan kolektibilitas surat berharga yang dimiliki ke FAD Report on securities collectibility to FAD
Past-due Report Past-due Report	harian daily	Laporan mengenai debitur yang belum memenuhi kewajibannya Report on debtors who are in arrears
Subledger Subledger	harian daily	Laporan Neraca Harian dan R/L per cabang dan konsolidasi untuk kepentingan pembukuan cabang Report on daily Balance Sheet and P/L per branch and consolidation for branch bookkeeping
Laporan KYC KYC Report	harian daily	Laporan mengenai nasabah yang <i>out of profile</i> Report on out of profile customers

HASIL SELF ASSESSMENT GCG
 RESULT OF GCG SELF ASSESSMENT

No	Faktor Factor	Bobot / Weight (a)	2013 Peringkat / Rating (b)	Nilai / Score (a) x (b)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS Implementation of duties and responsibilities of Director in charge of UUS	35%	1,00	0,35
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Syariah / Implementation of duties and responsibilities of Shariah Supervisory Board	20%	1,13	0,23
3	Pelaksanaan prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Implementation of Shariah principles in funds collection, funds disbursement, and services activities	10%	1,20	0,12
4	Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti Funds disbursement fo core financing customers and funds placement by depositors	10%	1,17	0,11
5	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan dan pelaporan internal Transparency of financial and non-financial condition, report of corporate governance implementation, and internal reporting	25%	1,25	0,31
Nilai Komposit Composite Score		100%		1,12
Predikat Komposit Composite Rating			Sangat Baik Very Good	

Nilai Komposit Composite Score	Predikat Komposit Composite Rating
Nilai Komposit < 1,5 Composite Score < 1,5	Sangat Baik Very Good
1,5 ≤ Nilai Komposit < 2,5 1,5 ≤ Composite Score < 2,5	Baik Good
2,5 ≤ Nilai Komposit < 3,5 2,5 ≤ Composite Score < 3,5	Cukup Baik Fair
3,5 ≤ Nilai Komposit < 4,5 3,5 ≤ Composite Score < 4,5	Kurang Baik Poor
4,5 ≤ Nilai Komposit ≤ 5 4,5 ≤ Composite Score ≤ 5	Tidak Baik Very Poor

LEMBAR PERSETUJUAN
APPROVAL SHEET
PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA TBK.

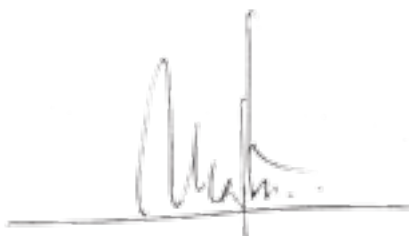


Taswin Zakaria
Presiden Direktur I President Director
Direktur UUS I Director in Charge of UUS

Dewan Pengawas Syariah I Shariah Supervisory Board



Dr. M. Anwar Ibrahim, MA
Ketua I Chairman



Prof. Dr. H. Muh. Nahar Nahrawi, SH. MM
Anggota I Member



Dr. Abdul Jabar Majid, MA
Anggota I Member